PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG





RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025 - 2045

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai RPJPD.

(2) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

d. BAB IV : VISI DAN MISI

e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

f. BAB VI : PENUTUP

(3) RPJPD ...

(3) RPJPD sebagimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai berikut :

a. RPJMD Tahap Pertama (Tahun 2025-2029);
b. RPJMD Tahap Kedua (Tahun 2030-2034);
c. RPJMD Tahap Ketiga (Tahun 2035-2039); dan
d. RPJMD Tahap Keempat (Tahun 2040-2045).

Pasal 4

RPJPD mengacu pada RPJP Nasional yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2) Perubahan atas indikator kinerja akibat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pada dokumen RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 12 November 2024
BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 12 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

KARTIYUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (8 / 2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RPJPD Kabupaten Sintang berisikan visi, misi, sasaran, arah kebijakan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sintang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Sintang mengikuti tahun 2025-2045.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, disusun RPJPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjangka yaitu jangka panjang (untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah disingkat RPJM, dan RPJM terbagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu tahapan pertama (Tahun 2025- 2029), tahapan kedua (Tahun 2030-2034), tahapan ketiga (Tahun 2035- 2039), dan tahapan keempat (Tahun 2040-2045).

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah, yaitu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan...

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025–2045 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJPD Kabupaten Sintang merupakan salah satu produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk mempedomani materi yang termuat di dalamnya, mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. Adapun secara berkala akan dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang tertuang di dalamnya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dimaksud.

Dengan demikian Raperda ini memuat gambaran konkrit kondisi Kabupaten Sintang saat ini, serta acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan visi dan misi dan arah pembangunan Daerah di masa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 8



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

RPJPD
KABUPATEN SINTANG
2025 - 2045

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SINTANG

KATA SAMBUTAN



Assalamualaikum. Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala hikmat serta petunjuknya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2025-2045 telah tersusun dengan baik. RPJP yang membawa harapan bagi pembangunan kabupaten sintang untuk 20 tahun yang akan datang.

RPJP ini telah melewati proses yang sangat panjang serta menampung semua keinginan serta harapan seluruh elemen masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan akan dapat tercapai sesuai rencana yang telah kita sepakati Bersama. Dengan tujuan menjadikan Kabupaten Sintang yang **Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan** pada tahun 2045 kita harapkan 20 tahun yang akan datang Kabupaten Sintang dapat sejajar bahkan lebih besar dari daerah lainnya baik ditaraf regional maupun nasional, tentunya hal ini tidak lepas dari dukungan dan kerjsama oleh semua pihak untuk mewujudkan cita-cita Bersama.

Demikian sambutan ini kami sampaikan. Semoga mimpi dan harapan kita Bersama mendapat restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

BUPATI SINTANG

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun RPJPD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada periode awal jangka panjang daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD ini juga disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka Panjang. Dokumen RPJPD ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan bersifat makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi ke depan, visi dan misi, serta arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045 dengan melakukan sinkronisasi terhadap RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu: langkah pertama adalah penyiapan Rancangan Awal RPJP Daerah yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi Pemerintahan Daerah memberikan masukan dan komentar terhadap rancangan RPJP Daerah yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rancangan RPJP Daerah yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah untuk ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Melalui RPJPD ini, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) di Kabupaten Sintang akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok dalam kurun waktu tahun 2025-2045. Untuk itu, proses penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga dengan

dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, dan RPJMN tahun 2025-2045. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi

Akhir kata, kami dari Tim Penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, saran, serta rekomendasi terhadap penyelesaian Dokumen RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 ini.

Sintang, 12 November 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**
Daftar Isi ..... **iii**
Daftar Tabel ..... **vi**
Daftar Gambar ..... **xii**
Daftar Grafik ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I – 1**
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I – 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya ..... I – 7
1.3.1. RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang ..... I – 8
1.3.2. RPJPD dan RTRW Kabupaten Sintang ..... I – 8
1.3.3. RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ..... I – 8
1.3.4. RPJPD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ..... I – 9
1.3.5. RPJPD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... I – 10
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I – 10
1.4.1. Maksud ..... I – 10
1.4.2. Tujuan ..... I – 10
1.5. Sistematika Penulisan ..... I – 11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... **II – 1**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II – 1
2.1.1. Geografi ..... II – 1
2.1.2. Demografi ..... II – 23
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II – 27
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi ..... II – 27
2.2.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama ..... II – 28
2.3. Aspek Daya Saing ..... II – 32
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah ..... II – 32
2.3.1.1. Perkembangan PDRB ..... II – 32
2.3.1.1.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan 2010 (ADHK-2010) ..... II – 33
2.3.1.1.2. PDRB Sisi Pengeluaran ..... II – 35
2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi ..... II – 36
2.3.1.3. PDRB per Kapita ..... II – 39
2.3.1.4. Indeks Gini ..... II – 40
2.3.1.5. Inflasi Kabupaten ..... II – 42
2.3.2. Daya Saing Sumber daya Manusia ..... II – 43
2.3.2.1. Aspek Pendidikan ..... II – 43
2.3.2.2. Aspek Kesehatan ..... II – 47
2.3.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... II – 48
2.3.2.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ..... II – 50
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah ..... II – 56
2.3.3.1. Kawasan Perbatasan ..... II – 56
2.3.3.2. Jalan ..... II – 63
2.3.3.3. Jembatan ..... II – 66
2.3.3.4. Perhubungan ..... II – 67

2.3.3.5. Irigasi ..... II – 70
2.3.3.6. Perumahan dan Permukiman..... II – 74
2.3.3.7. Ketersediaan Air Bersih..... II – 75
2.3.3.8. Fasilitas Listrik..... II – 78
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi..... II – 79
2.4. Aspek Pelayanan Umum..... II – 81
2.4.1. Politik, Pemerintahan dan Hukum..... II – 81
2.4.1.1 Bidang Politik..... II – 81
2.4.1.2 Bidang Pemerintahan..... II – 84
2.4.1.3 Hukum dan HAM..... II – 93
2.4.2. Fasilitas Umum..... II – 94
2.4.2.1. Fasilitas Kesehatan..... II – 94
2.4.2.2. Fasilitas Pendidikan..... II – 99
2.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank..... II – 102
2.4.2.4. Fasilitas Sarana Perdagangan..... II – 103
2.4.2.5. Koperasi..... II – 104
2.4.2.6. Prasarana Olahraga..... II – 105
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025..... II – 105
2.5.1. Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah..... II – 105
2.5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi..... II – 105
2.5.1.2 Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini..... II – 107
2.5.1.3 PDRB Per Kapita..... II – 109
2.5.1.4 Indeks Pembangunan Manusia..... II – 110
2.5.1.5 Angka Kemiskinan..... II – 111
2.5.1.6 Angka Pengangguran..... II – 112
2.5.2. Rekomendasi..... II – 115
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik..... II – 116
2.6.1. Proyeksi Demografi..... II – 116
2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana..... II – 121
2.6.2.1 Kebutuhan Dasar..... II – 122
2.6.2.2 Sarana Kesehatan..... II – 123
2.6.2.3 Sarana Pendidikan..... II – 124
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah..... II – 125
2.7.1. Kinerja RTRW..... II – 125
2.7.2. Rencana Struktur Ruang..... II – 126
2.7.3. Rencana Pola Ruang..... II – 136
2.7.4. Kawasan Lindung..... II – 136
2.7.5. Kawasan Budidaya..... II – 141
2.7.6. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten..... II – 153
2.8. Indikasi Program..... II – 156
2.8.1. Penggunaan Lahan..... II – 171
2.8.2. Potensi Pengembangan Wilayah..... II – 172
2.8.3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah..... II – 175

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH..... III – 1
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah..... III – 1
3.2. Isu Strategis..... III – 10
3.2.1. Isu Strategis Internasional..... III – 10
3.2.1.1. Demografi Global..... III – 11
3.2.1.2. Geo Politik dan Geo Ekonomi..... III – 11
3.2.1.3. Perkembangan Teknologi..... III – 12
3.2.1.4. Urbanisasi Dunia..... III – 12

3.2.1.5. Konstelasi Perdagangan Global..... III – 13
3.2.1.6. Tata Kelola Keuangan Global..... III – 14
3.2.1.7. Pertumbuhan Kelas menengah..... III – 14
3.2.1.8. Persaingan Memperebutkan Sumber Daya Alam..... III – 15
3.2.1.9. Perubahan Iklim..... III – 15
3.2.1.10. Pemanfaatan Luar Angkasa..... III – 15
3.2.2. Isu Strategis Nasional..... III – 15
3.2.2.1. Rendahnya Produktifitas ditengah Persaingan Global yang semakin Meningkat..... III – 16
3.2.2.2. Lemahnya Kualitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) III – 17
3.2.2.3. Kuantitas dan Kualitas SDM Peneliti Belum Memadai..... III – 18
3.2.2.4. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang masih rendah..... III – 18
3.2.2.5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut... III – 20
3.2.2.6. Rencahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi..... III – 21
3.2.2.7. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia dalam Kurun Waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal..... III – 21
3.2.3. Isu Strategis Kabupaten Sintang..... III – 22

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045..... IV – 1
4.1. Visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 ..... IV – 1
4.2. Misi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 ..... IV – 5

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK..... V – 1
5.1. Arah Kebijakan..... V – 1
5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2025 – 2029: Penguatan Modal Dasar Pembangunan..... V – 2
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2030 – 2034: Akselerasi Pembangunan Daerah..... V – 2
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2035 – 2039: Perluasan Aktivitas Pembangunan Daerah..... V – 3
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2040 – 2045: Pemantapan Capaian Pembangunan..... V – 3
5.2. Sasaran Pokok..... V – 9

BAB VI PENUTUP..... VI – 1
6.1 Kaidah Pelaksanaan..... VI – 1
6.2 Konsistensi Perencanaan Pendanaan..... VI – 1
6.2.1. Keterikatan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota VI – 1
6.3 Manajemen Resiko Pembangunan Daerah VI - 3
6.4 Kesimpulan VI - 7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sistematika Penulisan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045.....	I – 11
Tabel 2.1.	Luas dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2024.....	II – 1
Tabel 2.2.	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2010 – 2023.....	II – 4
Tabel 2.3.	Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditi Perkebunan di Kabupaten Sintang Tahun 2010 – 2023.....	II – 5
Tabel 2.4.	Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Sintang	II – 8
Tabel 2.5.	Kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Sintang Tahun 2018-2023	II – 11
Tabel 2.6.	Konsumsi Beras dan Total Konsumsi Beras di Kabupaten Sintang Tahun 2018-2023	II – 11
Tabel 2.7.	Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2023.....	II – 11
Tabel 2.8.	Konsumsi Ikan di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2023.....	II - 12
Tabel 2.9.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (KK) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2023.....	II – 12
Tabel 2.10.	Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2023.....	II – 13
Tabel 2.11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2023.....	II – 15
Tabel 2.12.	Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2022.....	II – 15
Tabel 2.13.	Rekapitulasi Kejadian Bencana tahun 2017 - 2023.....	II – 16
Tabel 2.14.	Tingkat Luas Risiko Bencana Kabupaten Sintang.....	II – 17
Tabel 2.15.	Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Sintang Berdasarkan Jenis Risiko.....	II – 18
Tabel 2.16.	Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Sintang	II – 18
Tabel 2.17.	Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya di Kabupaten Sintang	II – 19
Tabel 2.18.	Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Sintang Tahun 2018-2023.....	II – 20
Tabel 2.19.	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sintang Tahun 2019-2023.....	II – 21
Tabel 2.20.	Hasil Kajian Ketahanan Kabupaten Sintang.....	II – 22
Tabel 2.21.	Jumlah Penduduk, Distribusi, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	II – 24
Tabel 2.22.	Jumlah Penduduk Kab. Sintang Menurut Struktur Umur Tahun 2023.....	II – 25

Tabel 2.23. Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Sintang Tahun 2010 dan 2020..... II – 27

Tabel 2.24. Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani di Kabupaten Sintang, Tahun 2023..... II – 30

Tabel 2.25. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2023..... II – 31

Tabel 2.26. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sintang..... II – 31

Tabel 2.27. Indikator Kebudayaan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022..... II – 32

Tabel 2.28. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sintang Tahun 2011-2023 (Milyar)..... II – 34

Tabel 2.29. Perkembangan PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang Tahun 2011-2023 (Miliyar)..... II – 34

Tabel 2.30. Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Sintang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023..... II – 35

Tabel 2.31. PDRB ADHB Kabupaten Sintang Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2019-2023 II – 36

Tabel 2.32. PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2019-2023..... II – 36

Tabel 2.33. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sintang Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2019-2023..... II – 39

Tabel 2.34. Rekapitulasi Jumlah Utilitas SMP di Kabupaten Sintang..... II – 46

Tabel 2.35. Rekapitulasi Jumlah Utilitas SD di Kabupaten Sintang..... II – 47

Tabel 2.36. Perkembangan IPM, IPG, IDG, IKG Kabupaten Sintang dan Indikatornya Tahun 2010 – 2023..... II – 50

Tabel 2.37. Total Menara Telekomunikasi Swasta Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2023..... II – 52

Tabel 2.38. Indikator Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang Tahun 2017-2023..... II – 53

Tabel 2.39. Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2023..... II – 54

Tabel 2.40. Jangkauan Telekomunikasi Kabupaten Sintang..... II – 55

Tabel 2.41. Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet Tahun 2019-2022..... II – 56

Tabel 2.42. Desa Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara Malaysia..... II – 59

Tabel 2.43. Fasilitas Listrik, Air bersih, Balai Pertemuan dan Tempat Ibadah di Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah..... II – 61

Tabel 2.44. Status Desa Kawasan Perbatasan Tahun 2023..... II – 63

Tabel 2.45.	Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2023	II – 65
Tabel 2.46.	Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2023	II – 65
Tabel 2.47.	Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2018 – 2023	II – 65
Tabel 2.48.	Ruas Jalan Poros Kabupaten Sintang	II – 66
Tabel 2.49.	Kondisi Jembatan di Jaringan Jalan Kabupaten Sintang Tahun 2023	II – 68
Tabel 2.50.	Indikator Bidang Perhubungan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023	II – 69
Tabel 2.51.	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2022	II – 70
Tabel 2.52.	Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Sintang	II – 71
Tabel 2.53.	Indeks Kondisi Prasarana Fisik dan Sarana serta dan Kondisi Jaringan Irigasi	II – 74
Tabel 2.54.	Areal Tedampak Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2019	II – 74
Tabel 2.55.	Kondisi Perumahan Permukiman di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023	II – 75
Tabel 2.56.	Jumlah Pelanggan Air Bersih Berdasarkan Jenis Pelanggan Tahun 2016-2023	II – 77
Tabel 2.57.	Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan Menurut Lokasi di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2023	II – 77
Tabel 2.58.	Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2023	II – 77
Tabel 2.59.	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020	II – 78
Tabel 2.60.	Rasio Elektrifikasi	II – 80
Tabel 2.61.	Rasio Desa Berlistrik	II – 80
Tabel 2.62.	Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sintang, Tahun 2012-2023	II – 81
Tabel 2.63.	Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 di Kalimantan Barat	II – 83
Tabel 2.64.	Persentase Partisipasi Pemilih di Kabupaten Sintang Pada Pemilu 2004-2019	II – 84
Tabel 2.65.	Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Sintang (2015-2020)	II – 85
Tabel 2.66.	Capaian Opini BPK Pemerintah Kabupaten Sintang (2010-2023)	II – 86
Tabel 2.67.	Capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sintang (2010-2022)	II – 87
Tabel 2.68.	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Sintang (2010-2023)	II – 87

Tabel 2.69. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sintang (2010-2022)..... II – 88

Tabel 2.70. Indeks SPBE Kabupaten Sintang (2010-2022)..... II – 89

Tabel 2.71. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sintang..... II – 90

Tabel 2.72. Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sintang..... II – 91

Tabel 2.73. Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sintang Tahun 2010-2023..... II – 92

Tabel 2.74. Klasifikasi Desa di Kabupaten Sintang..... II – 93

Tabel 2.75. Jumlah Tindak Pidana Terbesar Menurut Jenis Tindak Pidana di Kabupaten Sintang Tahun 2022..... II – 94

Tabel 2.76. Jumlah Rumah Sakit (unit) Menurut Kecamatan Tahun 2016 – 2023..... II – 96

Tabel 2.77. Jumlah Rumah Sakit Bersalin (Unit) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2023..... II – 96

Tabel 2.78. Jumlah Poliklinik (Unit) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2022..... II – 97

Tabel 2.79. Jumlah Puskesmas (Unit) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2023..... II – 97

Tabel 2.80. Jumlah Puskesmas Pembantu (Unit) menurut Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2023..... II – 97

Tabel 2.81. Jumlah Apotek (Unit) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2023..... II – 98

Tabel 2.82. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sintang Tahun 2022 – 2023..... II – 100

Tabel 2.83. Jumlah Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023..... II – 101

Tabel 2.84. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023..... II – 101

Tabel 2.85. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023..... II – 101

Tabel 2.86. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023..... II – 102

Tabel 2.87. Jumlah Gedung Perguruan Tinggi Di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2021..... II – 102

Tabel 2.88. Jumlah Gedung Perguruan Tinggi di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2023..... II – 103

Tabel 2.89. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023..... II – 104

Tabel 2.90.	Jumlah Koperasi Aktif per Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2022.....	II – 105
Tabel 2.91.	Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023.....	II – 106
Tabel 2.92.	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.....	II – 114
Tabel 2.93.	Parameter Kependudukan Kabupaten Sintang Tahun 2020-2045.....	II – 118
Tabel 2.94.	Distribusi Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Generasi Tahun 2020 dan 2045 (dalam 000).....	II – 120
Tabel 2.95.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2045.....	II – 121
Tabel 2.96.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Rumah Tempat Tinggal di Kabupaten Sintang.....	II – 123
Tabel 2.97.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Di Kabupaten Sintang.....	II – 123
Tabel 2.98.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Di Kabupaten Sintang.....	II – 123
Tabel 2.99.	Proyeksi Kebutuhan beras Di Kabupaten Sintang.....	II – 124
Tabel 2.100.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sintang.....	II – 124
Tabel 2.101.	Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sintang.....	II – 124
Tabel 2.102.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan TK Di Kabupaten Sintang.....	II – 125
Tabel 2.103.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SD Di Kabupaten Sintang.....	II – 125
Tabel 2.104.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMP Di Kabupaten Sintang.....	II – 125
Tabel 2.105.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMA Di Kabupaten Sintang.....	II – 125
Tabel 2.106.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMK Di Kabupaten Sintang.....	II – 126
Tabel 2.107.	Luas Rencana Pola Ruang.....	II – 136
Tabel 2.108.	Hasil Telaahan Struktur Ruang.....	II – 157
Tabel 2.109.	Data Penggunaan Lahan Kabupaten Sintang Tahun 2019.....	II – 173
Tabel 2.110.	Luas Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Sintang.....	II – 174
Tabel 2.111.	Luas Rencana Kawasan Budaya Kabupaten Sintang.....	II – 174
Tabel 2.112.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2017-2020.....	II – 175
Tabel 3.1	Luas Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Sintang.....	III – 1
Tabel 5.1.	Target Capaian Indikator Makro.....	V – 1
Tabel 5.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.....	V – 5

Tabel 5.3. Sasaran Pokok..... V - 10

Tabel 6.1. Identifikasi Resiko..... VI - 4

Tabel 6.2. Penilaian Resiko..... VI - 5

Tabel 6.3. Tindak Lanjut Resiko..... VI - 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya..... I – 9

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sintang..... II – 2

Gambar 2.2. Proporsi Luas Tingkat Jasa Penyediaan Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sintang..... II – 9

Gambar 2.3. Proporsi Luas Tingkat Jasa Penyediaan Pangan di Kabupaten Sintang..... II – 10

Gambar 2.4. Dokumentasi Banjir Kabupaten Sintang Bulan November Tahun 2021..... II – 19

Gambar 2.5. Infografis Kejadian Banjir Kabupaten Sintang Bulan November Tahun 2021..... II – 19

Gambar 2.6. Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang..... II – 58

Gambar 2.7. Rencana Kawasan Pembangunan PLBN Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu..... II – 60

Gambar 2.8. Jalan Poros di Wilayah Kabupaten Sintang..... II – 67

Gambar 2.9. Indeks Ekosistem Jasa Penyediaan Air berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sintang.... II – 72

Gambar 2.10. Proporsi Luas Tingkat jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Sintang..... II – 73

Gambar 2.11. Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Sintang Tahun 2022..... II – 76

Gambar 2.12. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/DLL di Kabupaten Sintang Tahun 2022..... II – 79

Gambar 2.13. Persentase Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sintang (%) Tahun 2022..... II – 105

Gambar 2.14. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Periode 2005-2025 (Dalam Persen)..... II – 107

Gambar 2.15. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Hingga Tahun 2022..... II – 108

Gambar 2.16. Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sintang Periode 2005-2025..... II – 109

Gambar 2.17. PDRB per Kapita Kabupaten Sintang Periode 2005-2025..... II – 110

Gambar 2.18. Perkembangan IPM Kabupaten Sintang Periode 2005-2025..... II – 111

Gambar 2.19. Persentase Kemiskinan di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat Periode 2005-2025..... II – 113

Gambar 2.20. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat Periode 2005-2025..... II – 114

Gambar 2.21. Kawasan industri Sungai Ringin Kecamatan Sintang..... II – 134

Gambar 2.22. Pembagian Wilayah Sub BWP Kawasan Industri Sungai Ringin II – 136

Gambar 2.23. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sintang..... II – 156

Gambar 3.1. Rata-Rata Total Factor Productivity Index..... III – 1

DAFTAR GRAFIK

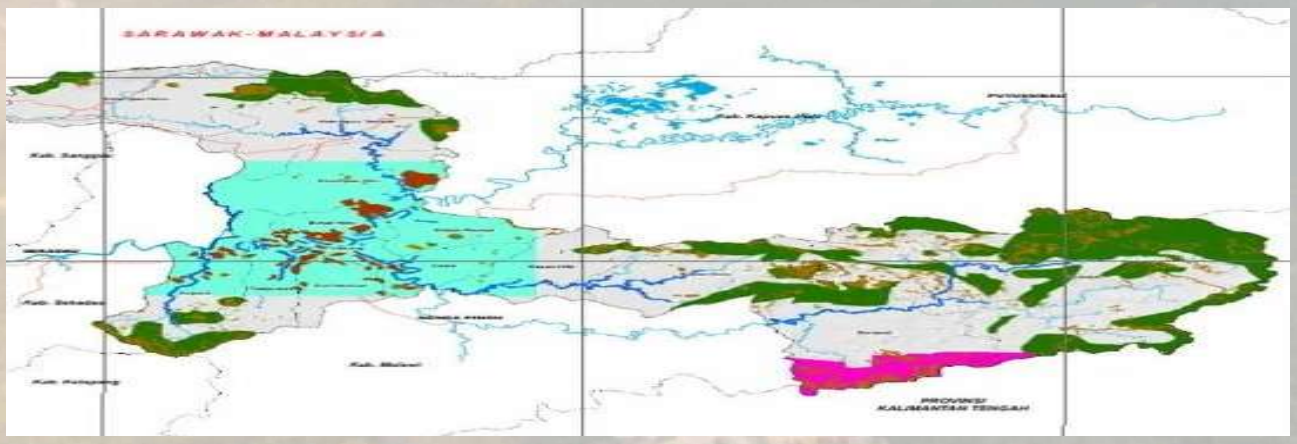
Grafik 2.1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sintang Tahun 2018-2022…..…….……	II – 6
Grafik 2.2.	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2023……..	II – 7
Grafik 2.3.	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sintang (Ha)Tahun 2010-2023……	II – 14
Grafik 2.4.	Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Sintang Tahun 2010 - 2023……..	II – 28
Grafik 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2023……	II – 38
Grafik 2.6.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2016-2022……	II – 38
Grafik 2.7.	Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2022……..	II – 40
Grafik 2.8.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2022……	II – 42
Grafik 2.9.	Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2022 (Persen)……	II – 43
Grafik 2.10.	Angka Partisipasi Sekolah SD, SMP, SMA di Kabuten Sintang Periode 2010-2022…….	II – 46
Grafik 2.11.	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Sintang, Tahun 2018 – 2022……	II – 80
Grafik 3.1.	Total Factor Productivity Index 2010-2019	III – 14
Grafik 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia(1985-2024)	III – 15
Grafik 3.3.	Kontribusi Manufactur Terhadap PDB	III – 17
Grafik 3.4.	Produktifitas Pertanian	III – 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Wilayah Kabupaten Sintang saat ini masih sangat luas, yaitu sekitar 21.638 Km^2 dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain wilayahnya yang luas, Kabupaten Sintang juga memiliki posisi geografis sangat strategis karena berbatasan dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia dan letaknya yang berada persis di tengah-tengah kabupaten lain yang ada di kawasan timur Kalimantan Barat. Artinya, dengan posisi geografis yang demikian, daerah ini sangat potensial digunakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah di kawasan timur Kalimantan Barat, sekaligus sebagai gerbang ekonomi keluar melalui perbatasan darat dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia.



Upaya pemanfaatan posisi geografis yang sangat strategis tersebut sekaligus implementasi pendekatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang

membutuhkan proses perencanaan yang lebih terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar kecamatan, dan antar level pemerintahan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah beserta evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial serta memperhatikan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Daerah wajib Menyusun rencana pembangunan daerah yang salah satunya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang periodesasinya yaitu 20 tahun.

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan bersifat makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi ke depan, visi dan misi, serta arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah. Merujuk kepada peraturan di atas, maka penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sintang, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045 dengan melakukan sinkronisasi terhadap RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu: langkah pertama adalah penyiapan Rancangan Awal RPJP Daerah yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi Pemerintahan Daerah memberikan masukan dan komentar terhadap rancangan RPJP Daerah yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rancangan RPJP Daerah yang dihasilkan melalui musyawarah

perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah untuk ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Dalam perspektif di atas dan untuk memenuhi semua ketentuan normatif perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sintang beserta seluruh komponen masyarakat sepakat untuk menyusun RPJP Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPJP Daerah Kabupaten Sintang disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk setiap jangka waktu lima tahunan. Selanjutnya, visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap periode akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). Dengan demikian RPJP Daerah ini juga merupakan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM Daerah.
2. Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sintang dilakukan melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Melalui RPJPD ini, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) di Kabupaten Sintang akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok dalam kurun waktu tahun 2025-2045. Untuk itu, proses penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, dan RPJMN tahun 2025-2045 serta Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Sintang 2025-

2045. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, yang ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah terintegrasi dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 ini juga didasarkan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.
23. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036; dan

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dokumen RPJPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut:

1.3.1. RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang

RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dalam 4 (empat) periode atau setiap 5 (lima) tahun dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu, dokumen RPJPD Kabupaten Sintang menjadi pedoman bagi dokumen RPJMD setiap 5 (lima) tahun dalam menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti periode tahun 2025-2029, periode tahun 2030-2034, periode tahun 2035-2039 dan periode tahun 2040-2045.

1.3.2. RPJPD dan RTRW Kabupaten Sintang

Dokumen RPJPD Kabupaten Sintang yang disusun ini juga memperhatikan dan mempertimbangkan kinerja RTRW daerah dari berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan jangka panjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

1.3.3. RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

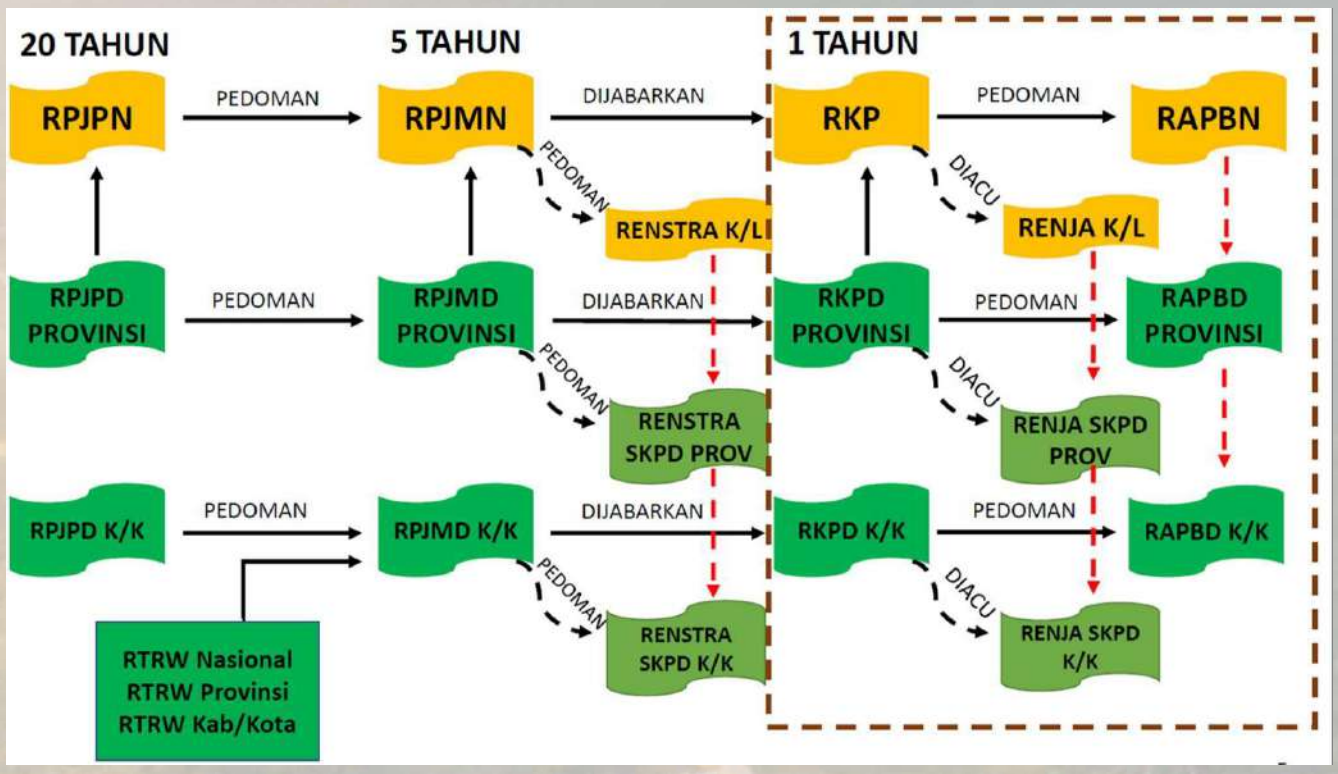
Dokumen RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 yang bersifat umum dan makro menjadi acuan dan pedoman bagi dokumen RPJMD setiap 5 (lima) tahun dan RPJMD ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap 1 (satu) tahun sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang

memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

1.3.4. RPJPD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan RPJMD selama 4 (empat) periode, yang tentunya tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berlaku 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang.

Gambaran tentang skema hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada skema gambar di bawah ini.



Gambar 1.1.
Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP merupakan induk dari dokumen perencanaan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mana RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan dijabarkan didalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu dalam penyusunan Renja OPD.

1.3.5. RPJPD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan dokumen RPJPD wajib disertai dengan penyusunan KLHS, adapun hal-hal yang disingkronisasi antara dokumen RPJP dengan KLHS antara lain; isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan indikator-indikator TPB dan daya dukung daya tampung.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan strategis pembangunan daerah serta menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam 4 (empat) periode, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun pelaksanaan. Selain itu RPJPD ini merupakan dokumen yang telah tersingkroniasasi dengan arah pembangunan nasional dan provinisi sebagai satu kesatuan pembangunan yang terintegrasi

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan perintah peraturan perundangan-undangan;
b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat;
c. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategi daerah Kabupaten Sintang saat ini dan analisa prediksi dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan;

d. Menjabarkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 yang selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Nasional serta Provinsi Kalimantan Barat;

e. Mewujudkan perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang selaras dengan RTRW Kabupaten Sintang;

f. Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sintang selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat; dan

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Sistematika RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2045

BAB I	**PENDAHULUAN** Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Sistematika Penulisan Dokumen; dan Maksud serta Tujuan
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, analisis hasil evaluasi capaian kinerja RPJP 2005-2025, serta berbagai capaian penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS** Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Sintang
BAB IV	**VISI DAN MISI DAERAH** Bab ini berisikan tentang uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD yang ingin diwujudkan pada 20 tahun yang akan datang

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih serta program pembangunan daerah untuk mencapai arah kebijakan tersebut

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJPD menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJPD dapat terwujud. Juga dinyatakan bahwa untuk menjabarkan RPJPD Tahun 2025-2045, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang setiap 5 (lima) tahun.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Wilayah Kabupaten Sintang memiliki luas sebesar 21.638 km^2 dan menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Jika dihitung jarak dari Kota Pontianak, ibukota provinsi, ke Kabupaten Sintang adalah sekitar 395 km^2. Kabupaten Sintang dibagi menjadi setidaknya 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 391 desa. Nama kecamatan dan luas masing-masing akan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.
Luas dan Persentase terhadap Luas Kabupaten
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2024

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Serawai	Nanga Serawai	2.261,37	10,45 %
Ambalau	Nanga Kemangai	5.991,97	27,69 %
Kayan Hulu	Nanga Tebidah	1.790,01	8,27 %
Sepauk	Nanga Sepauk	1.502,71	6,94 %
Tempunak	Nanga Tempunak	873,89	4,04 %
Sungai Tebelian	Sungai Ukoi	597,64	2,75 %
Sintang	Sintang	355,65	1,64 %
Dedai	Nanga Dedai	599,53	2,77 %
Kayan Hilir	Nanga Mau	1.050,46	4,85 %
Kelam Permai	Kebong	642,11	2,97 %
Binjai Hulu	Binjai	377,48	1,74 %
Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1.630,88	7,54 %
Ketungau Tengah	Nanga Merakai	1.970,41	9,11 %
Ketungau Hulu	Senaning	1.993,89	9,21 %
Kabupaten Sintang		**21.638,00**	**100 %**

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka 2024

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 5.991,97 km^2 atau sebesar 27,69% dari luas Kabupaten Sintang. Sementara kecamatan kedua terluas di Kabupaten Sintang adalah Kecamatan Serawai dengan luas 2.261.37 km^2 atau sebesar 10,45% dari luas Kabupaten Sintang. Dua belas kecamatan lainnya tidak mencapai 10% dari total luas kabupaten. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sintang dengan luas 355,65 km^2 atau hanya 1,64% dari total luas kabupaten.

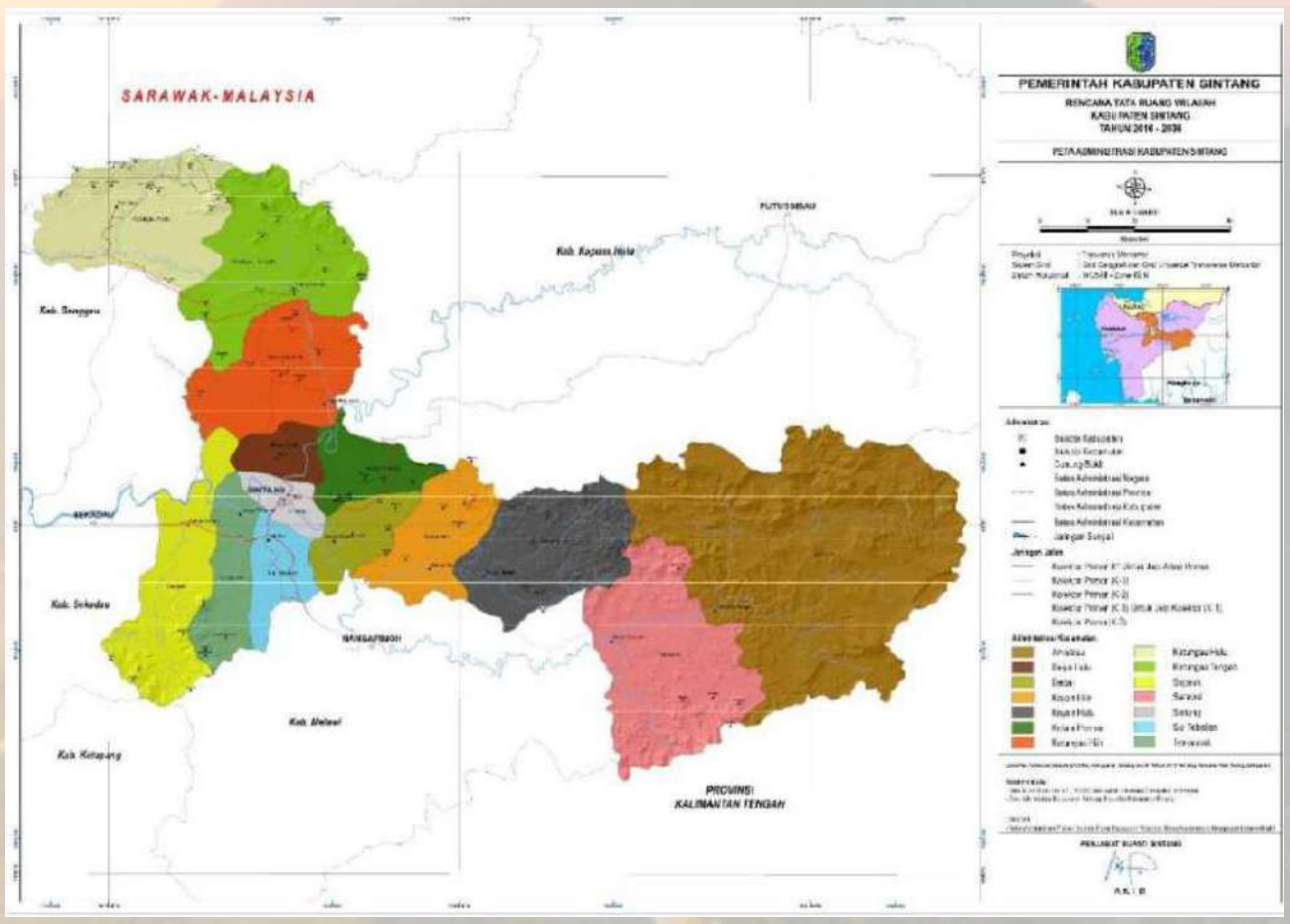
Secara administratif, Kabupaten Sintang berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu

Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Tengah

Timur : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu

Barat : Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sanggau



Sumber : BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sintang

Posisi letak geografis Kabupaten Sintang berada diantara 1°05' Lintang Utara hingga 0°46' Lintang Selatan dan 110°51' sampai 113°20' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Sintang

terdiri dari daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km^2 atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km^2). Kabupaten Sintang juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi berkisar pada 249,08 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Kabupaten Sintang berada di daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi.

Informasi lain terkait kondisi geografis dapat dilihat dari alur sungai besar yang melalui Kabupaten Sintang, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau. Kabupaten Sintang memiliki beberapa potensi alam seperti air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di kecamatan-kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sui Tebelian, dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99% dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 % yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 %.

Sektor pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan Tabel 2.2, produktivitas padi di kabupaten Sintang pada tahun 2010 sampai 2023 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2010 produktivitas padi sebesar 27,45 kw/ha, setelah 5 tahun terjadi penurunan menjadi 24,91. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan

menjadi 26,68 kw/ha dan pada tahun 2023 menjadi 27,02 kw/ha. Selanjutnya produksi padi pada tahun 2010 sebesar 90.821,00 ton, setelah 13 tahun terjadi penurunan drastis menjadi 24.149,95 ton.

Tabel 2.2.
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Tahun 2010-2023

No.	Uraian	Tahun								
		2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023
1	Luas tanam padi (ha)*	NA	NA	31.937	36.952	41.612	45.804	37.020	NA	NA
2	Luas panen padi (ha)**	33.089,00	29.862,00	35.335	35.865	6.761,00	12.506,05	8.507,05	11.240,76	8.936,80
3	Produksi padi (ton)**	90.821,00	74.399,00	38.665	135.983	16.002,00	35.774,06	22.694,82	31.303.80	24.149,95
4	Produktivitas padi (kw/ha)**	27,45	24,91	31,15	37,92	23,67	28,61	26,68	27,85	27,02

*Sumber: * RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026*
*** BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2024*

Kabupaten Sintang juga merupakan salah satu Kabupaten penghasil perkebunan terutama kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi dan kakao. Untuk produksi kelapa sawit pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 yaitu dari 511.189,29 ton menjadi 323.703,89 ton namun naik pada tahun 2023 menjadi 396.051 ton. Sementara produksi kelapa dalam tahun 2010 yaitu 147,28 ton naik pada tahun 2023 menjadi 266 ton. Produksi karet tahun 2010 dibandingkan tahun 2023 juga mengalami peningkatan produksi yaitu dari 34.719,64 ton menjadi 39.849 ton. Produksi kakao tahun 2010 dibandingkan tahun 2022 produksi kakao mengalami penurunan produksi yaitu dari 4,75 ton menjadi 4 ton. Selanjutnya produksi kopi tahun 2010 dibandingkan tahun 2023 produksi kopi mengalami penurunan dari 97,63 ton menjadi 76 ton. Penurunan produksi kelapa sawit tahun 2015 sampai 2020 di duga disebabkan karena tanaman menghasilkan (TM) kelapa sawit sudah kurang produktif, walaupun luas tanaman belum menghasilkan (TBM) meningkat. Berbeda dengan penyebab penuruan produksi kelapa sawit, penurunan produksi tanaman kelapa dalam, karet, dan kopi diduga lebih disebabkan karena lahan perkebunannya dialih fungsikan menjadi lahan sawit. Hal tersebut dapat dilihat terjadinya peningkatan luas tanam kelapa sawit.

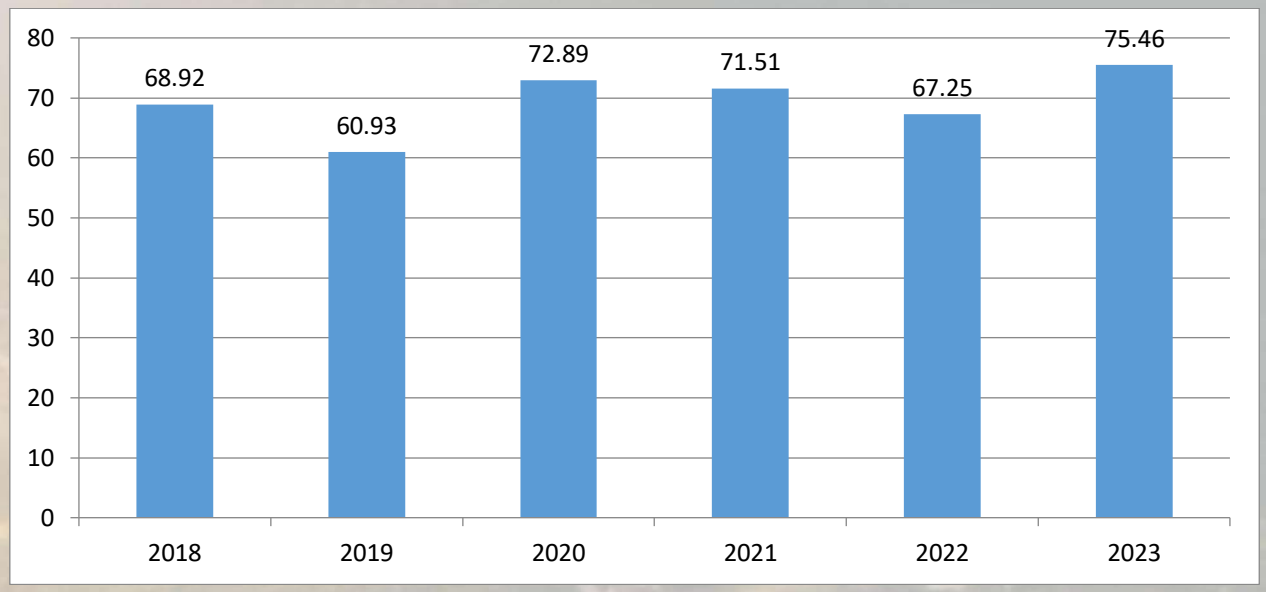
Tabel 2.3.
Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditi Perkebunan
di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2023

No.	Komoditi	Keterangan	2010	2015	2020	2022	2023
1	Kelapa Sawit	Produksi (ton)	511.189,29	213.491,24	323.703,89	433.835	396.051
		Luas Areal tanam (ha)	74.673,00	151.587,00	194.305,97	212.714	213.665
2	Kelapa Dalam	Produksi (ton)	147,28	144,00	309,40	343	266
		Luas Areal tanam (ha)	708,00	708,00	1.326,95	1.308	1.102
3	Karet	Produksi (ton)	34.719,64	38.865,00	39.267,00	40.874	39.849
		Luas Areal tanam (ha)	81.635,00	93.113,00	98.537,00	103.171	96.795
4	Kopi	Produksi (ton)	97,63	98,00	83,07	88	76
		Luas Areal tanam (ha)	354,00	350,00	346,50	341	293
5	Kakao	Produksi (ton)	4,75	9,00	NA	8	4
		Luas Areal tanam (ha)	125,00	125,00	82,40	84	36

Sumber: BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka, Tahun 2024

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub-sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Dalam penyusunan IKP terdapat tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Besar IKP di Kabupaten Sintang dari tahun 2018 hingga 2022 bersifat fluktuatif. Tahun 2018 IKP sebesar 68,92 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 60,93. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2020

menjadi 72,89. Dua tahun kemudian mengalami penurunan IKP menjadi 67,25 kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 75,46. Ada 9 indikator dalam menentukan Indeks Ketahanan Pangan yaitu 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih. 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk 8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). 9. Angka harapan hidup pada saat lahir Kondisi fluktiatif data IKP diduga berkaitan dengan ketersediaan pangan, ketersediaan pangan ini juga berkaitan dengan produksi pangan (padi) di Kabupaten Sintang. Akibat dari fluktuatifnya produksi padi di Kabupaten Sintang di duga menyebabkan terkadinya kondisi IKP yang juga fluktuatif. Data IKP di Kabupaten Sintang selengkapnya disajikan dalam grafik berikut ini.

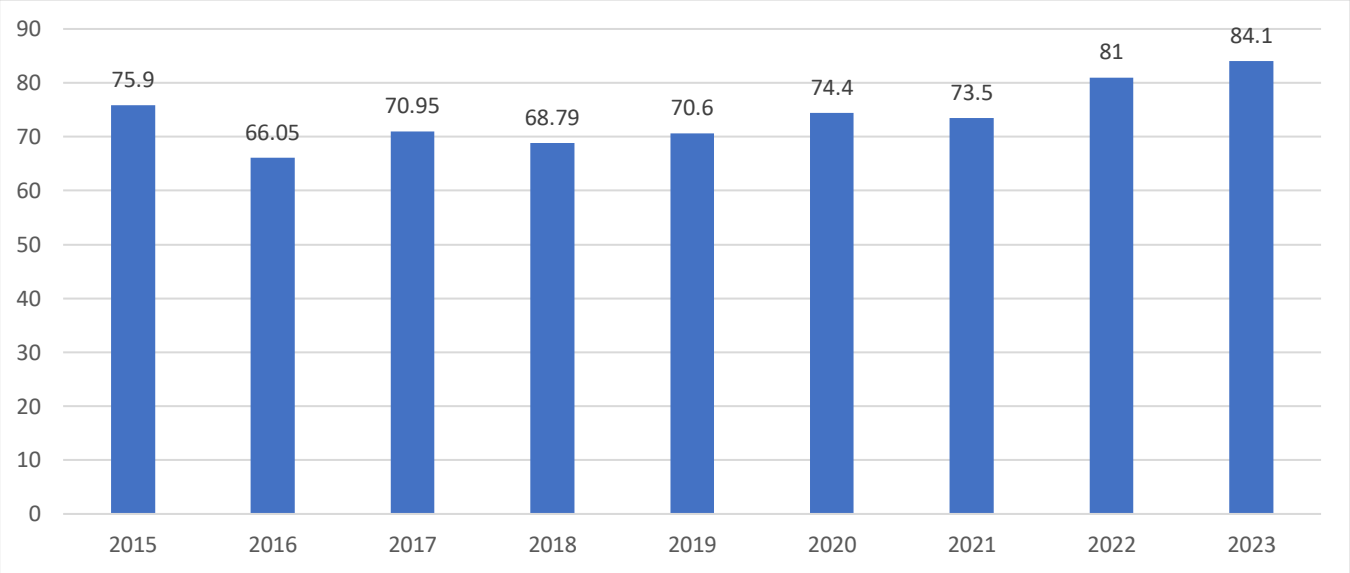


Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2018-2023

Grafik 2.1.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sintang Tahun 2018-2023

Pola Pangan Harapan atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun

perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi. pangan masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Data Skor PPH tahun 2015-2023 di Kabupaten Sintang disajikan dalam grafik berikut ini.



Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, dan Perkebunan Kab. Sintang Tahun 2015-2023

Grafik 2.2
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sintang Tahun 2015 - 2023

Skor pola pangan harapan yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2015 sampai 2023 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 skor pola pangan harapan sebesar 75,90 sementara 5 tahun kemudian mengalami penurunan menjadi 74,40 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 yaitu menjadi 84,10. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan upaya yang lebih baik dalam mencapai Pola Pangan Harapan yang sesuai dengan pedoman gizi dan kesehatan, serta sejalan dengan tujuan Misi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kedua, yaitu *Zero Hunger*. Penyebab peningkatan ini dapat melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat, perbaikan akses terhadap makanan berkualitas, serta program-program pemerintah yang mendukung pola pangan yang baik, sejalan dengan agenda SDGs yang berkomitmen untuk mengakhiri kelaparan dan malnutrisi di seluruh dunia.

Tabel 2.4.
Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Sintang

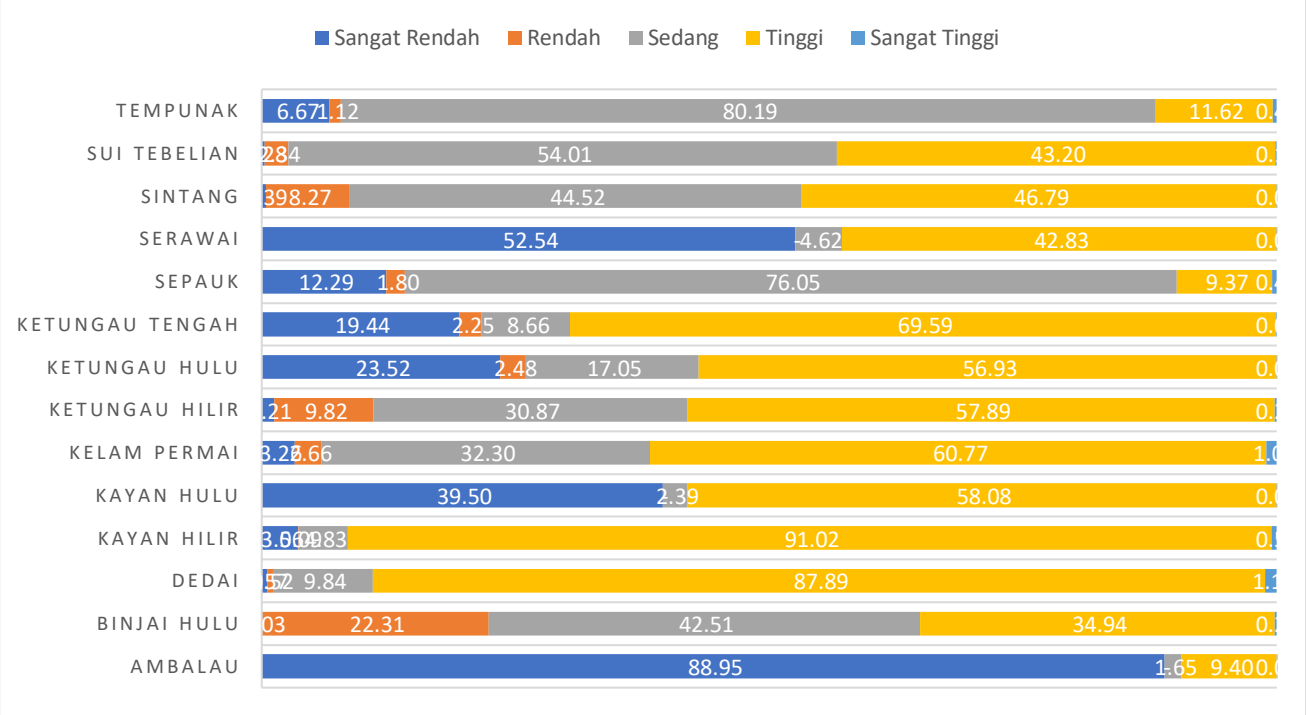
Kecamatan	Jasa Ekosistem Pangan (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	88,95	-	1,65	9,40	0,00	100
Binjai Hulu	0,03	22,31	42,51	34,94	0,22	100
Dedai	0,57	0,52	9,84	87,89	1,18	100
Kayan Hilir	3,56	0,09	4,83	91,02	0,50	100
Kayan Hulu	39,50	-	2,39	58,08	0,04	100
Kelam Permai	3,26	2,66	32,30	60,77	1,00	100
Ketungau Hilir	1,21	9,82	30,87	57,89	0,21	100
Ketungau Hulu	23,52	2,48	17,05	56,93	0,01	100
Ketungau Tengah	19,44	2,25	8,66	69,59	0,07	100
Sepauk	12,29	1,80	76,05	9,37	0,49	100
Serawai	52,54	-	4,62	42,83	0,01	100
Sintang	0,39	8,27	44,52	46,79	0,03	100
Sui Tebelian	0,28	2,34	54,01	43,20	0,17	100
Tempunak	6,67	1,12	80,19	11,62	0,40	100
Kab. Sintang	**39,16**	**1,94**	**19,87**	**38,84**	**0,18**	**100**

Sumber: Hasil Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Sintang, 2023

Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ekoregion dan penutupan lahan. Masing-masing ekoregion dan penutupan lahan memiliki nilai indeks yang berbeda sesuai dengan indeks daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan berdasarkan kondisi ekoregionnya. Jasa ekosistem penyedia pangan tinggi sebagai indikator bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan komoditi pangan yang tinggi.

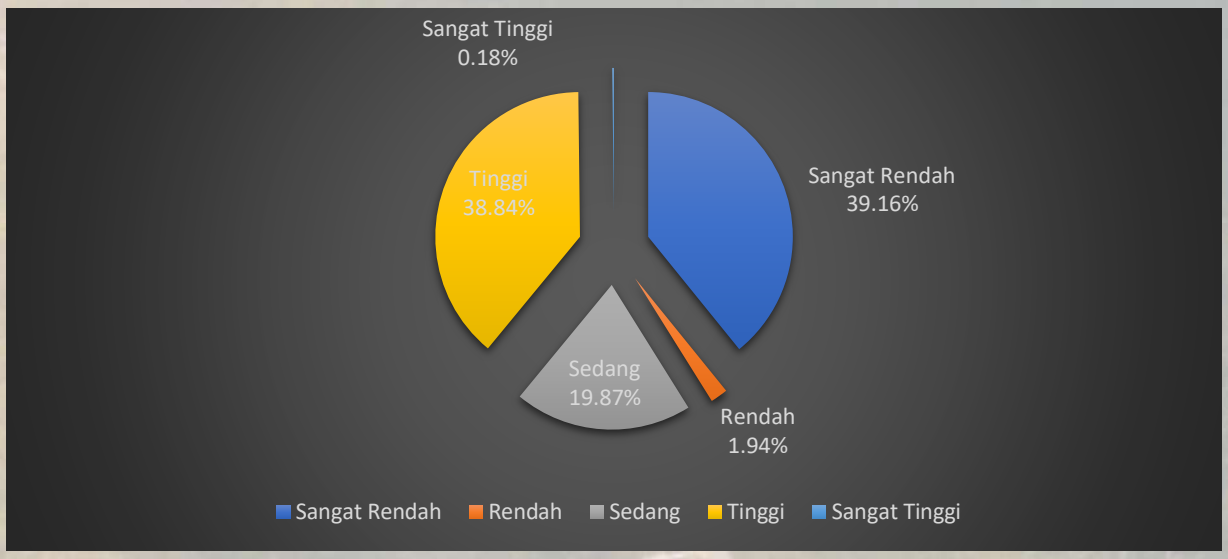
Kabupaten Sintang berdasarkan data pada Tabel 2.4 diatas menunjukan bahwa penyediaan jasa pangan di Kabupaten Sintang yang termasuk dalam kategori sangat rendah 39,16 %, dan tinggi 38,84 % dari total luas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi sebaran daya dukung pangan di Kabupaten Sintang belum tersebar merata. Wilayah kecamatan penyedia jasa pangan kategori sangat rendah adalah Kecamatan: Ambalau (88,95 %), dan Serawai (52,54%). Selanjutnya, ada tujuh kecamatan yang memiliki nilai daya dukung

pangan yang tinggi adalah Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, dan Ketungau Tengah.



Gambar 2.2. Proporsi Luas Tingkat Jasa Penyediaan Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sintang

Berdasarkan Gambar 2.2 diatas menunjukan bahwa setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang memiliki distribusi kategori yang tidak merata, karena pada wilayah 3 kecamatan yang memiliki 4 kategori, yaitu: Kayan Hulu, Ambalau dan Serawai.



GAMBAR 2.3 PROPORSI LUAS TINGKAT JASA PENYEDIAAN PANGAN DI KABUPATEN SINTANG

Gambar 2.3 tentang proporsi luas tingkat jasa penyediaan pangan menunjukan bahwa secara umum Kabupaten Sintang hanya mampu menyediakan jasa ekosistem berupa jasa penyediaan pangan kategori tinggi sekaligus sangat rendah yang mencapai 39% dari total luas wilayahnya. Kategori tinggi terdapat pada beberapa kecamatan, yaitu Kayan Hilir dan Dedai. Sementara yang sangat rendah terdapat pada kecamatan Ambalau.

Potensi utama sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sintang adalah padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Komoditas padi yang dihasilkan adalah padi sawah dan padi ladang, dimana luas panen dan produksi komoditi padi sawah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika peningkatan dan pengembangan tanaman pangan terus dilakukan oleh masyarakat dan melalui kebijakan pembangunan pertanian oleh pemerintah, maka akan dapat meningkatkan jasa ekosistem berupa jasa penyediaan pangan. Tanaman sayur dan buah yang menjadi andalan komoditi di Kabupaten Sintang adalah : Semangka, Ketimun, Cabe rawit, dan Kacang Panjang.

Sementara untuk kecukupan energi dan protein di Kabupaten Sintang pada tahun 2018 sampai 2023 cenderung semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 1.750,09 kal/kap/hari sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 1.900,00 kal/kap/hari. Untuk Konsumsi protein yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2023 juga cenderung semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 48,13 gram/kap/hari sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 56,80 gram/kap/hari. Selengkapnya mengenai data kecukupan energi dan protein di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Sintang Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecukupan Energi (Kkal/kap/hari)	1.750,09	1.740,90	1.770,40	1.836,40	1.931,90	1.900,00
Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	48,46	49,59	50,50	52,30	56,40	56,80

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kab. Sintang Tahun 2018-2023

Tabel 2.6.
Konsumsi Beras dan Total Konsumsi Beras di Kabupaten Sintang Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)	91,10	90,60	89,80	93,60	101,00	94,90
Total Konsumsi Beras Penduduk (kg/tahun)	37.657.916	37.941.921	37.833.279	39.655.886	43.068.016	41.568.288

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kab. Sintang Tahun 2018-2023

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Sintang berasal dari perikanan tangkap dan budidaya. Total produksi perikanan pada tahun 2010 yaitu 1.888,800 ton, setelah 10 tahun yaitu pada 2020 mengalami peningkatan menjadi 2.718,150 ton. Namun pada tahun 2023 total produksi perikanan mengalami penurunan menjadi 1.786,42 ton. Adapun indikasi penurunan terhadap produksi perikanan tangkap di duga disebabkan karena terganggunya ekosistem sungai. Penurunan kualitas air akibat pencemaran dapat mengurangi populasi ikan. Sedangkan indikasi penurunan produksi perikanan budidaya diduga disebabkan berkurangnya petambak karena meningkatnya harga pakan ikan, sehingga usaha budidaya ikan kurang menjanjikan lagi. Selengkapnya mengenai data produksi perikanan di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7.
Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2023

Uraian	TAHUN					
	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	772,000	787,600	833,000	583,613	289,905	920,42
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.116,800	1.775,900	1.885,150	289,051	953,254	866
TOTAL	**1.888,800**	**2.563,500**	**2.718,150**	**872,664**	**1.243,159**	**1.786,42**

Sumber: BPS, Sintang Dalam Angka, Tahun 2024

Capaian indikator konsumsi ikan di Kabupaten Sintang pada tahun 2017 sampai 2023 semakin meningkat. Pada tahun 2017 sebesar 26,97 kg/kpt/tahun dan tahun 2020 sebesar 42,96 kg/kpt/tahun. Selanjutnya pada tahun 2023 sebesar 52,45 kg/kpt/tahun.

Tabel 2.8.
Konsumsi Ikan di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2023

Tahun	Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn)
2017	26,97
2018	30,82
2019	40,49
2020	42,96
2021	42,96
2022	48,23
2023	52,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Tahun 2024

Cakupan Bina Kelompok Nelayan yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2022 semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 912 KK sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 969 KK. Pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi sebanyak 866 KK.

Tabel 2.9.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (KK)
Kabupaten Sintang Tahun 2016-2023

Tahun	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (KK)
2016	912
2017	955
2018	961
2019	969
2020	969
2021	969
2022	969
2023	866

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Tahun 2024

Sub sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung kehidupan di Kabupaten Sintang. Populasi hewan ternak tertinggi di Kabupaten Sintang pada tahun 2010 adalah ayam ras pedaging sebanyak 1.091.431 ekor dan bertahan menjadi populasi hewan ternak tertinggi meskipun mengalami penurunan menjadi 298.153 ekor pada tahun 2015. Sementara untuk populasi hewan ternak kambing merupakan

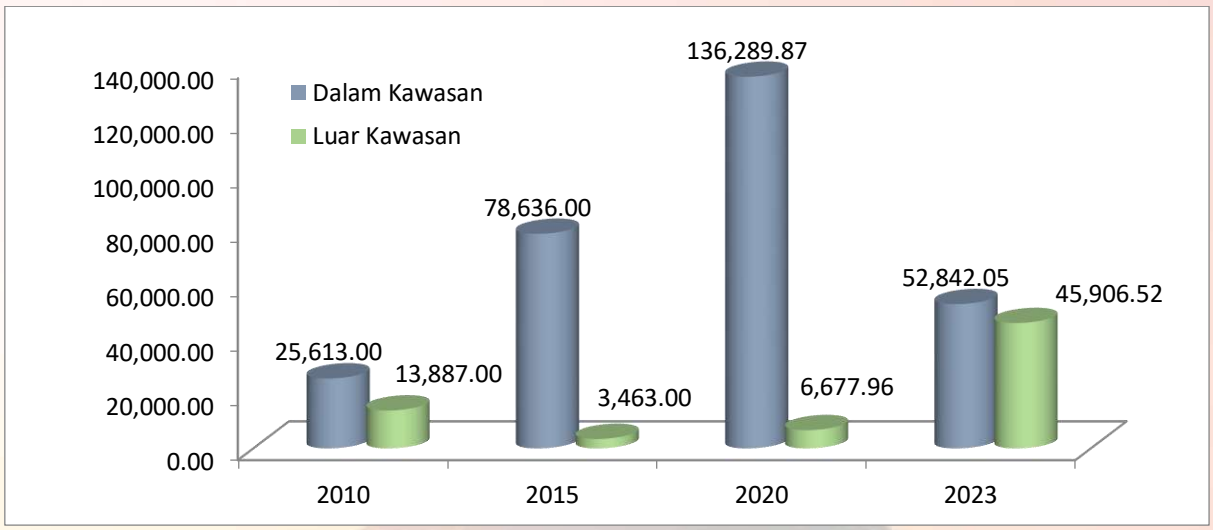
populasi paling sedikit dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. pada tahun 2010 populasi berjumlah 12.278 ekor dan setelah tiga belas tahun kemudian menjadi 5.267 ekor. Adapun penurunan produksi populasi ternak hewan seperti tabel 2.10 dibawah ini diduga adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kalimantan Barat yang menyerang hewan berkuku genap/belah seperti sapi, kambing dan babi.

Tabel 2.10.
Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2023

No.	Populasi Hewan (ekor)	Tahun			
		2010	2015	2020	2023
1	Sapi Potong	20.475	7.741	6.756	5.022
2	Kambing	12.278	2.765	3.363	5.267
3	Babi	73.710	88.376	67.505	3.393
4	Ayam Buras	444.435	482.727	475.565	462.156
5	Ayam Ras Petelur	446.435	482.727	462.315	-
6	Ayam Ras Pedaging	1.091.431	298.153	2.640.368	3.118.679
7	Itik	22.785	16.532	933	8.419

Sumber: BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2024

Potensi kehutanan di Kabupaten Sintang masih sangat besar mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang masih tertutupi oleh kawasan hutan. Lahan kritis di Kabupaten Sintang pada tahun 2010 keseluruhan yaitu 39.500 ha dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 142.967,83 ha lahan kritis pada tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 140.053,68 ha. Adapun penyebab meningkatnya lahan kritis tersebut di duga disebabkan karena kebakaran hutan dan alih fungsi lahan. Data luas lahan kritis di Kabupaten Sintang dibuat dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka, 2024

Grafik 2.3.
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sintang (Ha)Tahun 2010-2023

Gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu disajikan dalam Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2020, IKA di Kabupaten Sintang yaitu 45,93 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 54,62. Untuk IKU pada tahun 2020 yaitu 91,7 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 95,43. Sementara IKTL tahun 2020 yaitu 63,79 dan pada tahun 2023 menurun menjadi 62,23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dengan komponen IKA, IKU, dan IKTL. Dari data IKA, IKU, dan IKTL dapat diketahui bahwa IKLH di Kabupaten Sintang fluktuatif dimana tahun 2020 IKLH sebesar 68,38 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 76,10 yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 72,81.

Tabel 2.11.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2023

Indikator Kualitas Lingkungan Hidup	2020	2021	2022	2023
IKA	45,93	63,33	60,00	54,62
IKU	91,70	95,30	94,49	95,43
IKTL	63,79	62,50	62,80	62,23
IKLH	68,38	76,10	74,58	72,81

Sumber: Laporan IKLH Provinsi Kalimantan Barat, 2023

Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup adalah tentang persampahan. Indikator persentase penanganan sampah digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Capaian indikator Penanganan sampah di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.12.
Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sampah yang ada (m3) per hari*	1.009,07	1.014,37	1.022,01	1.026,84	1.038,84	1,060.81	1,073.39	1,091
Sampah yang dapat diangkut per tahun (m3)*	3.523	3.668	39.168	42.587	53.365	44.630	51.830	
Rata-rata sampah yang terangkut per hari (m3)*	97,60	100,50	107,31	116,68	146,21	370,53	430,30	598,80
Persentase penanganan sampah (%)**	35,60	57,38	36,43	37,51	36,09	34,93	40,09	54,89
Persentase tempat pembuangan sampah per 10000 penduduk*	0,243	0,240	0,330	0,394	0,391	0,200	0,200	0,018

*Sumber: *RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026*
***RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2024*

Berdasarkan tabel diketahui bahwa persentase penanganan sampah di Kabupaten Sintang sejak tahun 2016 sampai 2023 bersifat fluktuatif . Pada tahun 2016 persentase penanganan sampah sebesar 35,60% dan mengalami peningkatan hingga pada 2023 mencapai 54,89%.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Sejarah kebencanaan yang terdokumentasi dari tahun 2017 hingga tahun 2023 dapat di gambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13
Rekapitulasi Kejadian Bencana tahun 2017 - 2023

NO	KEJADIAN BENCANA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1	Banjir	5			7	6	5	1	**24**
2	Tanah Longsor	1	5		20		5	1	**32**
3	Pergeseran Tanah				2				**2**
4	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)				6		3	2	**11**
5	Gempa Bumi				2				**2**
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	6	1		73			18	**98**

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan banjir menjadi kejadian bencana yang sangat tinggi dan sering terjadi di Kabupaten Sintang. Untuk kejadian kebakaran hutan dalam kurun waktu tahun 2017-2023 terjadi sebanyak 98 kali, tanah longsor terjadi sebanyak 32 kali dan banjir sebanyak 24 kali. Dari anilisa lapangan ditemukan seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh sebagian besar disebabkan oleh faktor kesengajaan dan faktor ketiksengajaan. Faktor kesengajaan disebabkan budaya masyarakat lokal yang masih menerapkan ladang berpindah-pindah sehingga untuk membuka lahan baru, masyarakat melakukan pembakaran lahan dengan tujuan untuk pembersihan lahan dan menyuburkan tanah yang akan digarap. Dan faktor ketidaksengajaan yaitu meluasnya kebakaran lahan tersebut yang tidak bisa dikendalikan lagi oleh masyarakat sehingga meyebabkan dampak kerugian yang sangat besar.

Indeks Risiko Bencana adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko banjir suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah. Tingkat risiko bencana Kabupaten Sintang dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional.

Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kabupaten Sintang. Risiko-risiko bencana dapat digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian risiko bencana tersebut juga diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi kondisi kebencanaan di Kabupaten Sintang melalui penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2. 14
TINGKAT LUAS RISIKO BENCANA KABUPATEN SINTANG

NO	JENIS BENCANA	LUAS (HA)				KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	BANJIR	28.274	526.023	-	554.297	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	-	-	40.201	40.201	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	-	1.042.908	-	1.042.908	SEDANG
4	GEMPA BUMI	2.062.231	-	-	2.062.231	RENDAH
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	565.950	969.716	-	1.535.666	SEDANG
6	KEKERINGAN	-	854.056	1.208.175	2.062.231	TINGGI
7	TANAH LONGSOR	515	640.507	-	641.022	SEDANG

TABEL 2. 15
TINGKAT RISIKO BENCANA KABUPATEN SINTANG BERDASARKAN JENIS RISIKO

Jenis Bahaya		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	**Tinggi**
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	**Tinggi**
3	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	Rendah	**Tinggi**
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Tinggi	Rendah	**Tinggi**

Jenis Bahaya		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
5	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	**Tinggi**
6	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Rendah	**Tinggi**
7	Gempa Bumi	Rendah	Tinggi	Rendah	**Sedang**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua jenis bahaya bencana di Kabupaten Sintang masuk ke dalam kelas risiko tinggi, kecuali gempa bumi. Sedangkan kelas kapasitas bahaya bencana termasuk dalam kategori rendah dan masuk dalam kategori tinggi terhadap kerentanan jika terjadi bahaya bencana. Kelas bahaya bencana yang masuk dalam kategori tinggi di Kabupaten Sintang adalah bahaya bencana banjir bandang dan kekeringan. Sedangkan Kelas bahaya bencana yang masuk dalam kategori sedang di Kabupaten Sintang adalah bahay banjir, cuaca eksterim, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor.

TABEL 2. 16
TINGKAT RISIKO BENCANA KABUPATEN SINTANG

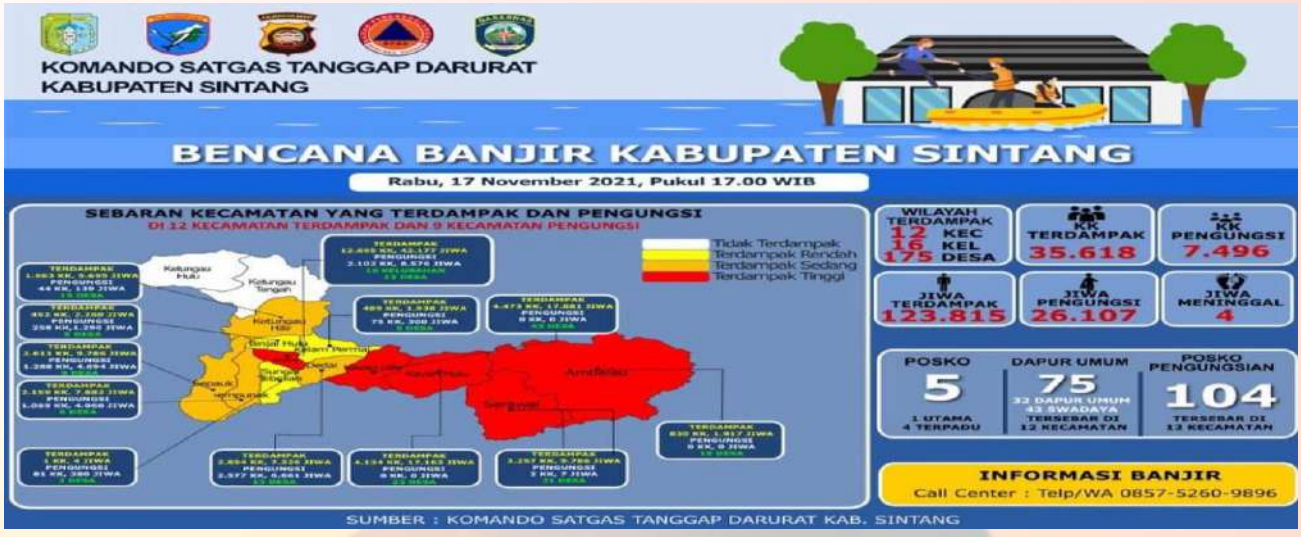
NO	JENIS BENCANA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	INDEKS RESIKO BENCANA (IRB)	123,26	123,26	123,26	133,20	133,20
2	INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

- IRB sumber Buku IRBI 2023
- IKD sumber kajian resiko bencana kabupaten Sintang (2017-2021)
- IKD belum pernah dilakukan asistensi dengan BNPB hanya berdasarkan analisis pada saat penyusunan KRB 2017-2021

Kejadian Banjir besar yang melanda Kabupaten Sintang pada bulan November tahun 2021 melanda sebagian besar wilayah di 12 kecamatan, 16 kelurahan, dan 175 desa di Kabupaten Sintang. Hal ini sangat berdampak merugikan bagi masyarakat secara materill, banyak rumah-rumah masyarakat, fasilitas umum dan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak tercatat sebanyak 123.815 jiwa terdampak dan sebanyak 26.107 jiwa harus mengungsi.



Gambar 2.4 Dokumetasi Banjir Kabupaten Sintang Bulan November Tahun 2021



Gambar 2.5 Infografis Kejadian Banjir Kabupaten Sintang Bulan November Tahun 2021

TABEL 2. 17
KELAS KERENTANAN BENCANA MULTIBAHAYA DI KABUPATEN SINTANG

Jenis Bencana		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
4	Gempa Bumi	Tinggi	-	-	Tinggi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sintang, Tahun 2017 - 2021

Tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Sintang berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko yang mayoritas tinggi di hampir seluruh jenis bahaya bencana. Sedangkan kriteria kelas risiko bencana di Kabupaten Sintang berdasarkan data yang dirilis oleh BNPB sampai dengan tahun 2023 berada pada kelas risiko sedang dengan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 123,26 di tahun 2018 kemudian meningkat sebesar 133,20. di tahun 2023. Berikut ini disajikan capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2023.

TABEL 2. 18
INDEKS RISIKO BENCANA (IRB) KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 - 2023

Kabupaten Sintang	Capaian (Tahun)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana (IRB)	123,26	123,26	123,26	123,26	133,20	133,20
Kriteria Kelas Risiko	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Buku INARISK, BNPB Tahun 2023

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dari perolehan nilai IKD ini, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Oleh karena itu, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian ditumpangsusunkan (overlay) dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012.

Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah dalam suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dianggap bahwa seluruh wilayah dalam 1 (satu) daerah memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai indeks tersebut

memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan kerentanan.

Hasil penilaian dan pemetaan indeks ketahanan daerah Kabupaten Sintang datanya hanya tersedia di tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu dengan nilai IKD masing masing sebesar 0,20 serta 0,25 dengan kriteria penilaian rendah. Hasil capaian nilai IKD ini menandakan bahwa kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sintang dalam implementasi penerapan penanggulangan bencana pada fase perencanaan, sebelum terjadi bencana, pelaksanaan, saat terjadi bencana, pasca terjadi bencana serta rehabilitasi serta rekonstrtuksi pemulihan bencana masih dikategorikan kemampuan daerah untuk menghadapi bahaya bencana masih rendah.

Berdasarkan sumber dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana diperoleh informasi bahwa terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sintang yang belum melakukan pelaporan serta pemenuhan 71 indikator Indeks Ketahanan Daerah yang targetkan oleh BNPB pada tahun 2023.

TABEL 2. 19
HASIL PENILAIAN INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 - 2023

Kabupaten Sintang	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	**N/A**	**N/A**	**0,20**	**0,41**	**0,41***
Kriteria Penilaian	-	-	Rendah	Rendah	Rendah

* *data sementara*

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Deputi Bidang Sistem dan Strategi,2024

Sedangkan, berdasarkan skor prioritas terhadap indeks ketahanan daerah di Kabupaten Sintang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 20
Hasil Kajian Ketahanan Kabupaten SIntang

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,49	0,41	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,23		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,45		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,34		
6	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,50		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,30		

Sumber: Dokumen KRB Kab. Sintang Tahun 2017 - 2021

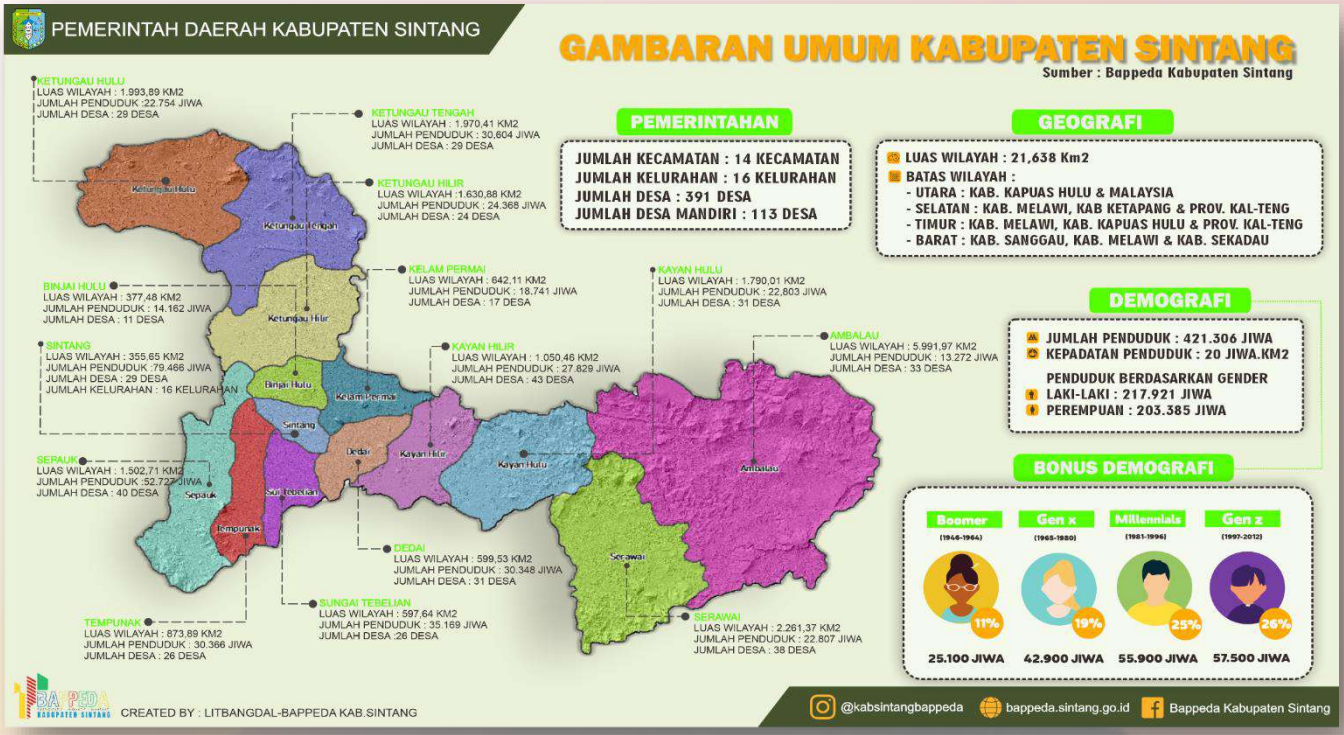
Berdasarkan hasil kajian ketahanan Kabupaten Sintang, diketahui kelas ketahanan Kabupaten Sintang dikategorikan sedang dengan indeks 0,41. Secara umum hal tersebut diartikan bahwa Kabupaten Sintang telah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Hasil ketahanan daerah tersebut menentukan arah kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, untuk itu RPJPD Kab. Sintang agar memasukkan pembahasan terkait pengembangan sumber-sumber ekonomi baru seperti ekonomi hijau (green economy) yang berfokus pada pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penggunaan energi angin, tenaga surya, dan praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu mengenai bio ekonomi (bio economy) yang berfokus pada penggunaan bahan biologis dan proses biologis untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan cara penerapan bioteknologi, pertanian berkelanjutan, dan industri berbasis biomassa, termasuk juga produksi biofuel, bioplastik, dan bahan kimia berbasis

biologis. Kabupaten Sintang adalah salah satu kabupaten yang sudah dapat menerapkan pengembangan ekonomi hijau dan bio ekonomi seperti pengembangan produk Albumin, hilirisasi produk Cacao oleh masyarakat skala rumah tangga yang sangat inklusif dan berkelanjutan, serta pengembangan produk-produk alami basis tengkawang. Hal ini yang harus dipertahankan dan dimungkinkan untuk dikembangkan secara massif agar di tahun-tahun menuju 2045 saat Visi Indonesia Emas tercapai, Kabupaten Sintang mempunyai sudah memiliki passion dan keunikannya sendiri. Oleh karena itu, maka pengembangan sumber-sumber ekonomi baru dimaksud setidaknya perencanaannya dan kebijakannya sudah mulai masuk pada tahapan perencanaan pembangunan sejak tahapan kedua RPJPD Kabupaten Sintang. Karena basis ekonomi kedepan Kabupaten Sintang adalah ekonomi hijau dan bio ekonomi, maka peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan semakin penting sebagai bagian ekonomi hijau tersebut. Oleh karena itu, kedua sektor tersebut (pariwisata dan ekonomi kreatif) selayaknya sudah mulai dimasukkan pada tahapan lima tahun pertama RPJPD dan seterusnya. Arah kebijakan pembangunan yaitu pengembangan parawisata dengan target wisatawan mancanegara (wisman) masuk dalam indikator sasaran.

2.1.2. Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 421.306 jiwa. Dua tahun kemudian, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, penduduk Kabupaten Sintang pada Semester 2 tahun 2023 berjumlah 440.612 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Sintang tergolong rendah, yakni 1,40 persen. LPP tertinggi terjadi di Kecamatan Sintang (2,68%). LPP terendah terjadi di Kecamatan Ambalau (0,18%).



Kabupaten Sintang termasuk daerah berpenduduk jarang, dengan kepadatan penduduk rendah, yakni rata-rata 20 jiwa per kilometer persegi di tahun 2023. Persebaran penduduk di Kabupaten Sintang belum merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sintang (223,78 jiwa/km^2), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Ambalau (3,11 jiwa/km^2), lihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Jumlah Penduduk, Distribusi, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	% Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km^2	LPP per tahun (%) 2020-2023
1.	Serawai	23.335	5,35	10,14	0,26
2.	Ambalau	13.713	3,11	2,22	0,18
3.	Kayan Hulu	22.655	5,14	12,82	0,29
4.	Sepauk	55.802	12,66	36,74	1,32
5.	Tempunak	31.145	7,07	35,56	1,09
6.	Sungai Tebelian	37.486	8,51	60,80	1,71
7.	Sintang	83.058	18,85	233,78	2,68
8.	Dedai	30.812	6,99	51,36	0,80
9.	Kayan Hilir	28.157	6,39	27,07	1,14
10.	Kelam Permai	19.032	4,32	30,20	1,86
11.	Binjai Hulu	14.787	3,36	38,96	2,04
12.	Ketungau Hilir	25.184	5,72	15,41	1,55

13.	Ketungau Tengah	31.022	7,04	15,84	0,96
14.	Ketungau Hulu	24.424	5,54	11,72	1,30
Kabupaten Sintang*		**440.612**	**100,00**	**20,20**	**1,40**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2023
Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2024

Penduduk Kabupaten Sintang tersebar di 14 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sintang (83.058 jiwa atau 18,85%). Sedangkan jumlah penduduk yang sedikit berada di Kecamatan Ambalau (13.713 jiwa atau 3,11%). Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (206.226 jiwa) lebih banyak dari penduduk perempuan (206.190 jiwa). Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan Sex Ratio (SR) melebihi angka 100, tepatnya 107. Tabel 2.22 menunjukkan jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Sintang. berada pada kelompok umur 0-4 tahun (37.576 jiwa atau 8,81%) dan terendah pada kelompok umur 75 tahun lebih sebanyak 5.527 jiwa atau 1,30%. Jumlah penduduk laki-laki melebihi penduduk perempuan, terjadi pada setiap kelompok umur.

Tabel 2.22.
Jumlah Penduduk Kab. Sintang Menurut Struktur Umur Tahun 2023

Umur (tahun)	Penduduk (jiwa)	Persentase
0–4	33.474	7,60
5–9	41.586	9,44
10–14	43.441	9,86
15–19	29.070	6,60
20–24	40.873	9,28
25–29	35.155	7,98
30–34	36.486	8,28
35–39	36.614	8,31
40–44	36.203	8,22
45–49	29.411	6,68
50–54	24.160	5,48
55–59	17.707	4,02
60–64	13.897	3,15
65–69	9.861	2,24
70–74	6.411	1,46
75+	6.263	1,42
Total	**440.612**	**100,00**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, Tahun 2023

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020, proporsi penduduk usia non produktif (0-14) tahun berkurang 5,65% dan usia 65 tahun keatas bertambah 1,66%.

Proporsi penduduk usia 15-64 tahun bertambah 4,02%. Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut *Dependency Ratio (DR) atau* Rasio Beban Ketergantungan (RBK) menurun dari 55,55 tahun 2010 menjadi 46,39 tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan dan kesadaran masyarakat menjalankan program KB. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik bagi daya saing daerah. Angka DR kurang dari 50, menandakan Kabupaten Sintang telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (*gold opportunity*) bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (kelahiran 2013). Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir 71,2% dari 420.170 jiwa penduduk Kabupaten Sintang) harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Selama periode 2010-2020, telah terjadi pergeseran struktur umur penduduk di Kabupaten Sintang dari penduduk usia muda menuju usia tua. Pergeseran ini tampak dari menurunnya proporsi usia muda non produktif (0-14 tahun) dari 34,28% tahun 2010 menjadi 27,09% tahun 2020 dan meningkatnya proporsi usia tua non produktif (65 tahun lebih) dari 3,04% menjadi 4,66%. Pada periode yang sama, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 62,68% menjadi 68,25%, lihat pada Tabel 2.23. Perubahan struktur penduduk ini dikarenakan peningkatan pembangunan parameter demografi dan sosial ekonomi yang pada gilirannya mengundang migrasi masuk ke Kabupaten Sintang. Pertambahan penduduk lansia erat kaitannya dengan perbaikan status sosial ekonomi rumah tangga teknologi kesehatan.

Tabel 2.23.
Struktur Penduduk dan *Dependency Ratio* Kabupaten Sintang
Tahun 2010 dan 2020

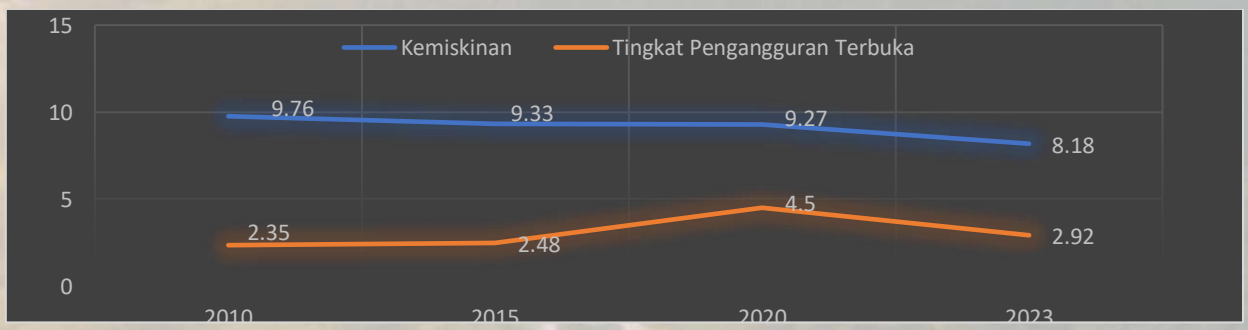
Umur (tahun)	2010		2020		Perubahan		Dependency Ratio (DR)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	2010	2020
0 – 14	119.270	32,70	113.825	27,02	-5.445	-5,68		
15 – 64	234.496	64,29	287.801	68,31	53.305	4,02	55,55	46,39
65+	10.993	3,01	19.680	4,67	8.687	1,66		
Total	**364.759**	**100,00**	**421.306**	**100,00**	**56.547**			

Sumber : Sensus Penduduk, Tahun 2010 dan 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Tujuan pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan PDRB per kapita, penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sejak tahun 2005 hingga 2023, proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sintang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 9,76% pada tahun 2005 menjadi 8,18% tahun 2023. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka, bertambah dari 2,35% menjadi 2,92% pada periode yang sama. TPT di Kabupaten Sintang tergolong rendah, jauh lebih rendah dari tingkat kemiskinan. Keadaan ini menggambarkan upah atau pendapatan yang diterima oleh angkatan kerja yang bekerja tergolong rendah (di bawah garis kemiskinan dan/atau di bawah upah minimum) lihat Grafik 2.4. Lapangan kerja yang digeluti penduduk miskin di Kabupaten Sintang kebanyakan di sektor pertanian (sebagai buruh tani) dan pekerja sektor informal.



Sumber: BPS Kabupaten Sintang

Grafik 2.4.
Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Sintang Tahun 2010 - 2023.

Kualitas Angkatan Kerja (AK) yang bekerja tergolong rendah. Hingga tahun 2022, sebagian besar (53,31%) AK berlatar belakang pendidikan SD ke bawah dan SMP (14,00%), selebihnya bependidikan SMA dan SMK (22,71%) dan Perguruan Tinggi (9,98%).

Produktivitas Kerja merupakan nilai produksi per Angkatan Kerja yang bekerja pada 17 lapangan usaha yang diukur dengan rupiah harga konstan 2010. Perkembangan produktivitas pekerja selama periode 2015-2022 meningkat secara signifikan, dari Rp.21,80 juta per tahun atau Rp. 1,82 juta per bulan (2015) menjadi Rp.45,27 juta per tahun atau Rp.3,77 juta per bulan (2022). Angka ini jauh melebihi upah minimum Kabupaten Sintang Tahun 2023 (Rp. 2,6 juta per bulan). Peningkatan produktivitas ini merupakan indikasi peningkatan kualitas tenaga kerja.

2.2.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pelayanan dasar dalam urusan sosial merupakan tanggung jawab wajib Pemerintah Daerah, yang mencakup upaya membantu, memenuhi, dan memberikan perlakuan serta pelayanan maksimal kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosial dasar mereka. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh kemiskinan, ketunaan, keterlantaran baik pada anak-anak maupun orang tua, cacat, bencana alam, bencana sosial, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) memperkuat pelaksanaan kewajiban tersebut. Peraturan ini menetapkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan dasar minimal dalam urusan wajib yang menjadi kewenangannya.

Guna mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Kementerian Sosial RI telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Petunjuk teknis ini diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, Dinas Sosial Kabupaten Sintang memiliki dasar hukum untuk melaksanakan pelayanan di bidang sosial. Sebagai pelaksana SPM Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sintang memikul tanggung jawab untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi SPM sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Sintang pada tahun 2023 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sintang. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang memandang pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi standar yang ditentukan. Oleh karena itu, penerapan SPM Bidang Sosial menjadi kebijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial pada tahun 2023. Keberhasilan penerapan SPM Bidang Sosial akan membantu meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sintang.

Tabel 2.24.
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani di Kabupaten Sintang, Tahun 2023

NO	JENIS PMKS	BENTUK PENANGANAN	SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (ANGKA)				TOTAL	REALISASI (%)				CAPAIAN (%)
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Anak yang berhadapan dengan hukum	Asesmen & pendampingan	Orang	100	7	9	19	9	44	100	100	100	100	100
2	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Asesmen & pendampingan	Orang	100	5	6	2	0	13	100	100	100	0	100
3	Lanjut usia telantar	Sosialisasi & Pendataan	Orang	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penyandang disabilitas	Sosialisasi & Pendataan, Pemberian Bantuan (alat bantu)	Orang	1,5	18	3	13	3	37	0,78	0,13	0,56	0,13	1,47
5	Tuna Susila	Sosialisasi & Pendataan (Belum)	Orang	100	0	0	59	0	59	0	0	100	0	100
6	Gelandangan	Reunifikasi Keluarga/ Pemulangan ke daerah asal	Orang	0	4	2	0	0	6	100	100	0	0	100
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Pendataan (Warga Binaan yang sudah keluar)	Orang	100	9	3	0	0	12	100	100	0	0	100
8	Korban bencana alam	Penanganan korban Bencana	Orang	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Korban bencana social	Penanganan korban Bencana	Orang	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	JENIS PMKS	BENTUK PENANGANAN	SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (ANGKA)				TOTAL	REALISASI (%)				CAPAIAN (%)
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Fakir Miskin	Update data kemiskinan dalam DTKS	KK	14	28.457	28.013	27.239	27.239	27.737	37,03	36,58	36,09	36,43	36,54
11	Komunitas Adat Terpencil	Fasilitasi dan pendampingan	KK	100	0	35	64	0	99	0	35,35	64,65	0	100
TOTAL			**%**	**71,75**	**28.500**	**28.071**	**27.396**	**27.251**	**28.007**	**39,80**	**42,92**	**36,48**	**12,41**	**58,00**
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani			**71,75**										**58,00**

Indikator aspek pelayanan umum di bidang sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah rumah ibadah, serta jumlah rumah tangga yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial. Jika dijumlahkan, total rumah ibadah di Kabupaten Sintang berjumlah 1.683 unit. Sebaran rumah ibadah berdasarkan agama yang dianut tersebar di beberapa kecamatan. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25.
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2023

Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
Serawai	16	10	28	29	-	1
Ambalau	2	-	20	34	-	-
Kayan Hulu	13	5	60	24	-	1
Sepauk	40	44	45	92	-	1
Tempunak	22	29	33	42	1	1
Sungai Tebelian	40	77	31	35	-	2
Sintang	63	104	54	14	-	3
Dedai	36	39	16	41	-	1
Kayan Hilir	10	4	49	59	-	1
Kelam Permai	17	14	23	59	-	1
Binjai Hulu	19	32	14	8	-	1
Ketungau Hilir	11	8	43	43	-	1
Ketungau Tengah	6	1	40	44	-	1
Ketungau Hulu	7	5	49	33	-	1
Kabupaten Sintang	**302**	**372**	**505**	**557**	**1**	**16**

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2024

Sebaran tempat ibadah di Kabupaten Sintang banyak terdapat di Kecamatan Sintang, Sungai Tebelian, Sepauk dan Kayan Hilir. Sedangkan secara keseluruhan jumlah

Masjid yang ada di Kabupaten Sintang berjumlah 302 unit, Musholla berjumlah 372 unit, Gereja Protestan berjumlah 505 unit, Gereja Katholik berjumlah 557 unit, Pura berjumlah 1 dan Vihara berjumlah 16 unit.

Kondisi aspek pelayanan umum bidang sosial yang meliputi fakir miskin. wanita tuna susila, penyandang cacat dan jompo terlantar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sintang

No	Kategori PMKS	2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7	
1.	Fakir Miskin (KK)	47.826	48.510	72.478	80.844	35.490
2.	Wanita Tuna Susila	57	-	59	59	
3.	Penyandang Cacat Tubuh	365	347	379	1.500	610
4.	Penyandang Cacat Mental	206	918	918	918	96
5.	Penyandang Cacat Ganda	360	51	51	51	
6.	Jompo Terlantar	245	23	1	739	

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2024

Jika dilihat dari perkembangan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, jumlah fakir miskin yang ada di Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Pada tahun 2019 Fakir Miskin (KK) berjumlah 47.826 dan pada tahun 2023 turun menjadi 35.490. Adapun penyebab indikasi penurunan fakir miskin yaitu membaiknya ekonomi masyarakat pasca covid-19 serta efektifnya program-program stimulus ekonomi dari pemerintah maupun sektor lainnya. Begitu juga dengan Penyandang Cacat Tubuh, Penyandang Cacat Mental, dan Jompo Terlantar sejak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan seiring dengan program kesehatan masyarakat yang begitu masif.

Dari aspek budaya, berdasarkan data Dinas Pendidikan pada tahun 2023, perkembangan jumlah group Kesenian dan budaya dan di Kabupaten Sintang belum terlalu berkembang secara signifikan dan cendrung menurun. Sampai saat ini saja misalnya, dari jumlah group kesenian berjumlah 40 grup tahun 2020 yang aktif 40 grup sedangkan pada tahun 2023 dari 73 sanggar yang terdaftar hanya 25 sanggar yang aktif hal ini disebabkan oleh belum tersedianya gedung kesenian yang memadai.

Tabel 2.27.
Indikator Kebudayaan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Jumlah Situs/ tempat bersejarah yang terawat dengan baik	15	15	15	15
2	Jumlah penetapan situs BCB	25	25	25	4
3	Jumlah Peta Budaya	6	6	6	0
4	Jumlah Sanggar Seni	40	42	46	73
5	Jumlah Sanggar seni yang aktif	40	42	46	25
6	Jumlah Festival yang dilaksanakan	3	0	0	2
7	Jumlah dialog budaya	5	0	0	7
8	Jumlah gelar budaya	10	0	0	1
9	Jumlah adat budaya yang dilestarikan	3	3	3	2
10	Jumlah pentas seni dan budaya daerah	3	0	0	2
11	Jumlah budaya. adat istiadat dan kearifan lokal yang di revitalisasi	3	3	3	5
12	Jumlah budaya tari tradisional yang di revitalisasi	4	4	4	2
13	Jumlah film tentang budaya dan kearifan local	3	3	3	2

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang, Tahun 2023

Sampai dengan tahun 2023, kebijakan dan program yang terkait dengan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sudah dilakukan secara berkelanjutan. Begitu juga terkait dengan pelestarian kesenian tradisional atau tradisi budaya lokal telah dilakukan oleh Dinas terkait, walaupun memang pelestarian sejarah dan pengembangan budaya belum sepenuhnya optimalnya. Sedangkan terkait dengan penetapan Cagar Budaya sampai dengan tahun 2023 berjumlah 25 unit.

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Gambaran kondisi makro ekonomi daerah secara umum dapat dilihat di antaranya dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Realisasi Investasi, Indeks Gini, dan Inflasi. Berikut diuraikan beberapa aspek yang menggambarkan kondisi umum perekonomian daerah Kabupaten Sintang.

2.3.1.1. Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan, yakni atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar

harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Adapun unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.

2.3.1.1.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan 2010 (ADHK-2010)

PDRB ADHB Kabupaten Sintang menunjukkan peningkatan secara signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2011, nilai PDRB ADHB mencapai Rp 6.716,48 milyar, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 11.202,05 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 13,36% per tahun. Selanjutnya, pada tahun 2017, PDRB ADHB sebesar Rp 12.282,70 milyar, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 18.586,86 milyar, atau meningkat sebesar 7,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rinci perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sintang selama tahun 2011-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28.
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sintang Tahun 2011-2023 (Milyar)

Tahun	PDRB Harga Berlaku	Peningkatan (%)
2011	6.716,48	--
2012	7.456,84	11,02
2013	8.398,19	12,62
2014	9.294,69	10,67
2015	10.216,11	9,91
2016	11.202,05	9,65
2017	12.282,70	9,65
2018	13.390,62	9,02
2019	14.681,42	9,64
2020	14.711,07	0,20
2021	15.749,08	7,06
2022	17.330,13	10,04
2023	18.586,86	7,25

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2011-2024

Selanjutnya, peningkatan dari waktu ke waktu juga hampir sama terjadi pada PDRB ADHK-2010. PDRB ADHK 2010 merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Artinya semakin tinggi PDRB ADHK 2010, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik/positif

Pada tahun 2011, nilai PDRB ADHK-2010 mencapai Rp 6.320,45 milyar, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 8.243,74 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 6,09% per tahun. Pada tahun 2017, PDRB ADHK-2010 sebesar Rp 8.683,37 milyar, dan pada tahun

2023 meningkat menjadi Rp 10.693,38 milyar, atau meningkat rata-rata sebesar 4,68% per tahun. Secara rinci perkembangan PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang selama tahun 2011-2023 adalah sebagai berikut

Tabel 2.29.
Perkembangan PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang Tahun 2011-2023 (Milyar)

Tahun	PDRB Harga Konstan 2010	Peningkatan (%)
2011	6.320,45	--
2012	6.674,58	5,60
2013	7.106,22	6,47
2014	7.487,75	5,37
2015	7.830,07	4,57
2016	8.243,74	5,28
2017	8.683,37	5,33
2018	9.158,73	5,47
2019	9.586,05	4,69
2020	9.375,71	-2,19
2021	9.731,98	3,77
2022	10.215,01	4,96
2023	10.693.38	4,68

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2011-2024

Struktur ekonomi Kabupaten Sintang selama tahun 2019-2023 masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni rata-rata sebesar 22,87% per tahun. Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2019-2023. Kontribusi terbesar kedua dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yakni rata-rata sebesar 15,98% per tahun. Lapangan usaha konstruksi memberikan kontribusi terbesar ketiga, yakni rata-rata sebesar 15,79% pertahun. Selanjutnya, kontribusi terbesar keempat disumbang oleh lapangan usaha industri pengolahan, yakni rata-rata sebesar 9,14% selama kurun waktu 2019-2023. Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHB menurut lapangan usaha disajikan berikut ini.

Tabel 2.30.
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Sintang Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,72	22,72	22,96	23,35	23,59
B	Pertambangan & Penggalian	8,66	9,24	9,19	9,13	8,28
C	Industri Pengolahan	8,96	9,07	9,11	9,55	9,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	15,79	15,68	16,21	15,67	15,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,41	15,69	15,23	15,49	16,08
H	Transportasi & Pergudangan	2,13	2,15	1,88	2,05	2,17
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,50	2,10	2,14	2,24	2,30
J	Informasi dan Komunikasi	5,30	5,71	5,67	5,63	5,70
K	Jasa Keuangan & Asuransi	2,47	2,42	2,43	2,38	2,36
L	Real Estat	2,78	2,79	2,62	2,46	2,38
M, N	Jasa Perusahaan	0,42	0,39	0,37	0,36	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,31	4,48	4,27	3,86	3,95
P	Jasa Pendidikan	4,46	4,05	3,98	3,83	3,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,29	2,89	3,36	3,42	3,78
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,73	0,54	0,50	0,51	0,56
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2020-2024

2.3.1.1.2. PDRB Sisi Pengeluaran

Perhitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (expenditure) tidak terlepas dari perhitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha. PDRB dari sisi pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor, dan (7) impor.

Adapun distribusi PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31.

PDRB ADHB Kabupaten Sintang
Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Konsumsi Rumah Tangga	7.875.785	7.888.183	8.098.313	8.688.093	9.432,75
2.	Konsumsi LNPRT	179.859	181.074	188.023	198.743	229,40
3.	Konsumsi Pemerintah	1.933.267	1.986.229	2.097.445	2.110.264	2.370,96
4.	PMTB	5.235.800	5.020.540	5.272.684	5.596.981	6.465,89
5.	Perubahan Inventori	386.522	594.269	728.462	1.247.908	971,06
6.	Net Ekspor	-889.812	-959.221	-635.848	-511.860	-883,20
Total PDRB		**14.681.420**	**14.711.074**	**15.749.079**	**17.330.130**	**18.586,86**

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2020-2024

Dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Sintang selama lima tahun terakhir (2019-2023) didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 9.432,75 milyar. Sementara konsumsi pemerintah sebesar 2,370,96 milyar. Sedangkan kontribusi investasi swasta (PMTB) sebesar 6.465,89 milyar, kontribusi investasi swasta ini harus jadi perhatian dalam merancang pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang ke depan.

Tabel 2.32.
PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang
Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2019-2023

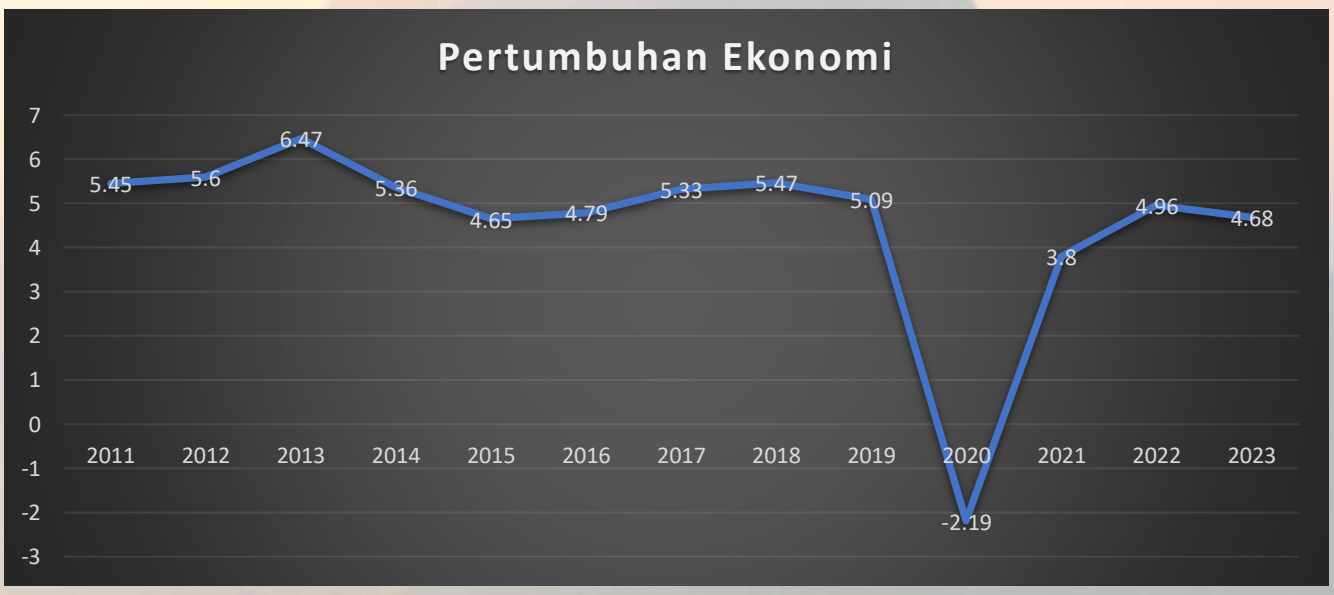
No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5.189.115	5.188.481	5.261.328	5.502.732	5.795,31
2.	Konsumsi LNPRT	119.903	117.943	119.538	119.538	137,29
3.	Konsumsi Pemerintah	1.204.222	1.203.015	1.209.261	1.209.261	1.243,63
4.	PMTB	3.312.430	3.202.870	3.279.596	3.299.596	3.648,34
5.	Perubahan Inventori	124.504	136.202	138.226	138.226	405,60
6.	Net Ekspor	-364.122	-439.802	-275.973	-107.824	-536,80
Total PDRB		**9.586.052**	**9.375.708**	**9.731.976**	**10.215.011**	**10.693,38**

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2020-2024

2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Khusus dalam melakukan analisis perekonomian daerah, seringkali perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB ADHK karena telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dianggap lebih valid. Apabila angka PDRB dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat, demikian pula sebaliknya.

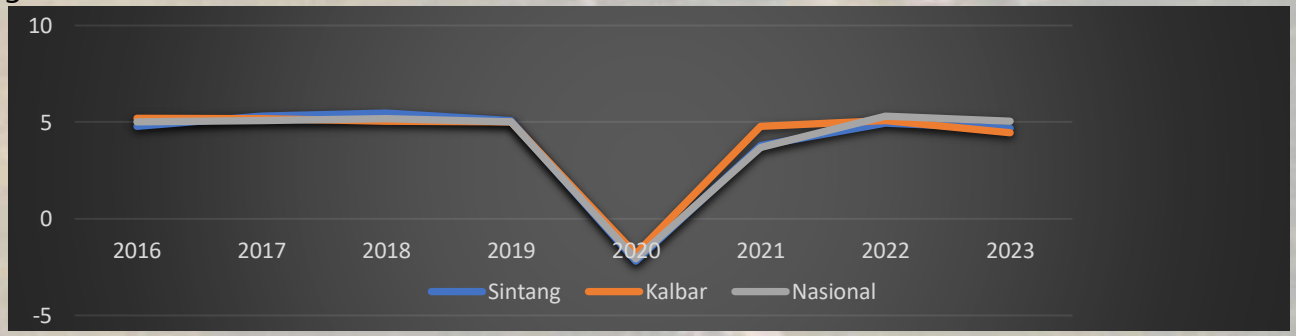
Selama periode 2011-2023, secara umum capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang menunjukkan trend positif. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2011, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45%, kemudian sedikit melambat menjadi 4,65% tahun 2015, dan naik kembali menjadi 5,09% tahun 2019. Namun akibat pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Sintang tahun 2020 tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -2,19%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Kemudian pada tahun 2023, kembali Kabupaten Sintang mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi, yakni sebesar 4,68%.



Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2011-2024

Grafik 2.5.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2023

Secara komparatif, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2016-2023 dibandingkan dengan capaian Kalimantan Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut ini.



Grafik 2.6.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2023

PEMERINTAH	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sintang	5,28	5,33	5,47	5,09	-2,19	3,80	4,96	4,68
Kalbar	5,20	5,17	5,06	5,00	-1,82	4,78	5,07	4,46
Nasional	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka) Tahun 2016-2024) dan BPS Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat Dalam Angka) Tahun 2016-2024 (data diolah)

Meskipun pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang 2016-2023 relatif mirip dengan Kalimantan Barat dan Nasional, namun harus diakui bahwa dalam lima tahun terakhir (2019-2023) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang mengalami fluktuasi cukup tinggi. Khusus pada tahun 2020, terdapat tiga sektor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terkontraksi 2,19%, yaitu sektor Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Jasa lainnya, dan Perdagangan besar dan eceran, yang pada tahun 2020 tumbuh negatif masing-masing sebesar -18,79%; -17,68%; dan -10,60%. Sebaliknya pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (15,72%); Pengadaan listrik dan Gas (13,49%); serta sektor Informasi dan komunikasi (7,37%). Untunglah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi andalan Kabupaten Sintang dengan kontribusi rata-rata mencapai 22,51% masih tumbuh positif, yaitu sebesar 2,76%. Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2018-2023 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sintang
Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,92	2,70	3,12	4,33	2,48
B	Pertambangan & Penggalian	3,06	3,88	2,75	1,86	-3,59
C	Industri Pengolahan	5,23	-1,94	4,68	10,76	2,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,89	13,29	1,35	4,24	7,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,99	3,83	5,00	4,20	6,19
F	Konstruksi	5,27	-8,56	5,44	1,38	5,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,00	-10,60	2,21	7,03	6,30
H	Transportasi & Pergudangan	7,75	-8,61	-7,15	10,65	5,44
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,64	-18,79	7,85	8,59	9,31
J	Informasi dan Komunikasi	6,65	7,37	5,33	7,52	8,52
K	Jasa Keuangan & Asuransi	-2,63	-1,25	4,31	-0,11	5,73
L	Real Estat	2,40	0,66	1,79	2,29	5,12
M, N	Jasa Perusahaan	3,34	-4,32	0,31	4,64	8,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,97	1,06	-1,94	-2,54	5,59

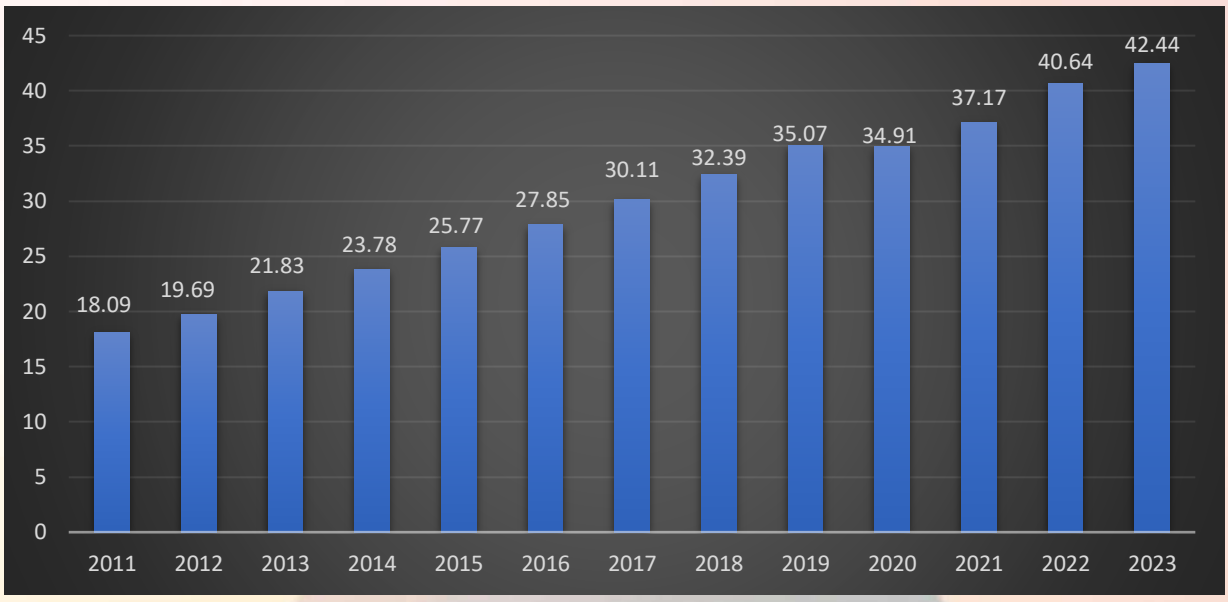
Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
P	Jasa Pendidikan	2,84	-6,61	2,05	2,38	6,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,89	26,01	23,86	9,37	15,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,68	-17,68	0,88	7,57	13,33
Pertumbuhan PDRB		**4,99**	**-2,19**	**3,80**	**4,96**	**4,68**

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020-2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Sintang pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di sektor sektor Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Jasa lainnya, dan Perdagangan besar dan eceran, Konstruksi, Jasa lainnya, Jasa pendidikan, Transportasi dan pergudangan, Jasa perusahaan, serta Jasa keuangan dan asuransi. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang ke depan (2025-2029). Sebaliknya pandemi Covid-19 sepertinya turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor Pengadaan Air dan pengolahan sampah, dan sektor Administrasi pemerintahan, yang masing-masing tumbuh 3,83% dan 1,06%. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif, tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

2.3.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per Kapita. Tinggi rendahnya PDRB per Kapita sangat tergantung pada keberhasilan daerah untuk mendorong perkembangan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) dan mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP). Sepanjang LPE lebih besar dari LPP, maka PDRB per Kapita cenderung akan meningkat.



Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2011-2024 (data diolah)

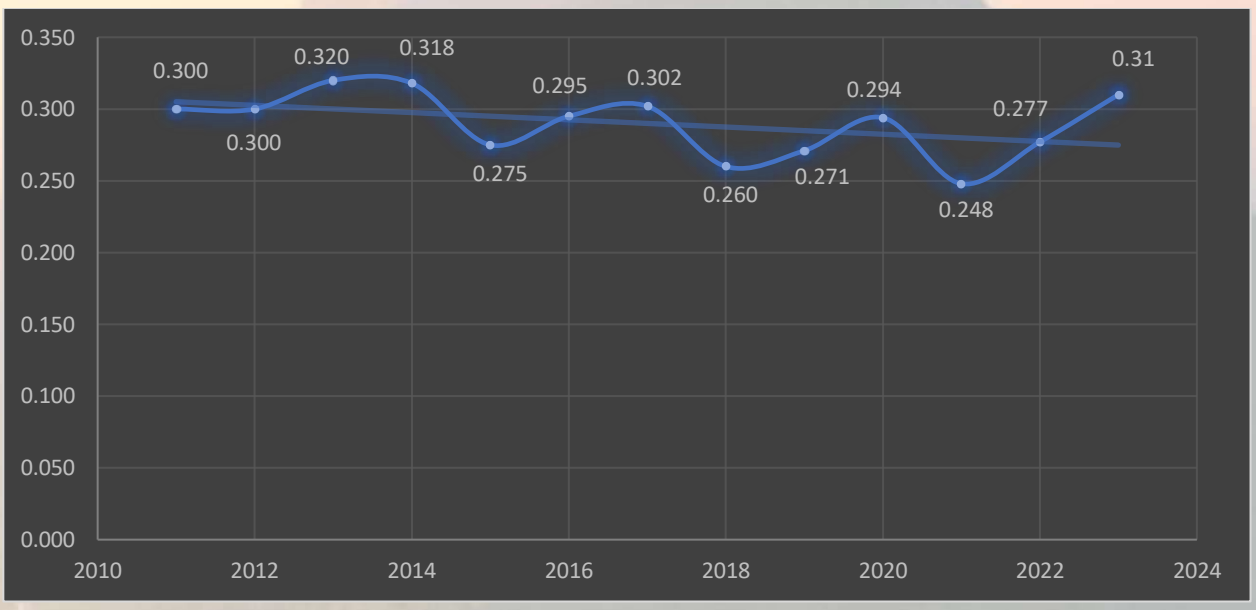
Grafik 2.7.
Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2023

Selama periode 2011-2023, PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sintang menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Sintang pada tahun 2011 sebesar Rp 18,09 juta dan terus meningkat menjadi Rp 25,77 juta pada tahun 2016 atau meningkat rata-rata sebesar 10,79%. Kemudian pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 35,07 juta. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp 34,91 juta. Penurunan PDRB per Kapita pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terkontraksi sebesar -2,19%. Nilai PDRB per Kapita tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 42,44 juta.

2.3.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Koefisien Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35.

Secara umum, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sintang yang ditunjukkan dengan Indeks Gini selama periode 2011-2023, menunjukkan trend penurunan. Namun perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan Indeks Gini bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2011, Indeks Gini sebesar 0,300 ; kemudian empat tahun berikutnya yakni tahun 2015 turun menjadi 0,275. Pada tahun 2016-2017, kembali Indeks Gini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015, yakni 0,295 dan 0,302. Turun kembali pada tahun 2018-2019. Saat pandemi Covid terjadi (2020) Indeks Gini mengalami kenaikan, dan setahun berikutnya (2021) menurun pada tingkat yang paling rendah selama 10 tahun terakhir. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, Tahun 2023 (data diolah)

Grafik 2.8.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2023

Kondisi terakhir yakni tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Sintang mencapai 0,310 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Jika diasumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang bercirikan perdesaan, dan mengacu pada Indeks Gini di daerah perkotaan di Kalimantan Barat pada Tahun 2023 yang sebesar 0,321 maka Indeks Gini Kabupaten Sintang tahun 2023 berada di bawah angka Indeks Gini Provinsi. Mengingat angkanya terletak antara 0,2 sampai 0,35, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Sintang relatif merata. Meski ketimpangan pendapatan relatif rendah, namun upaya pembangunan yang diprioritaskan pada daerah pedesaan yang relatif

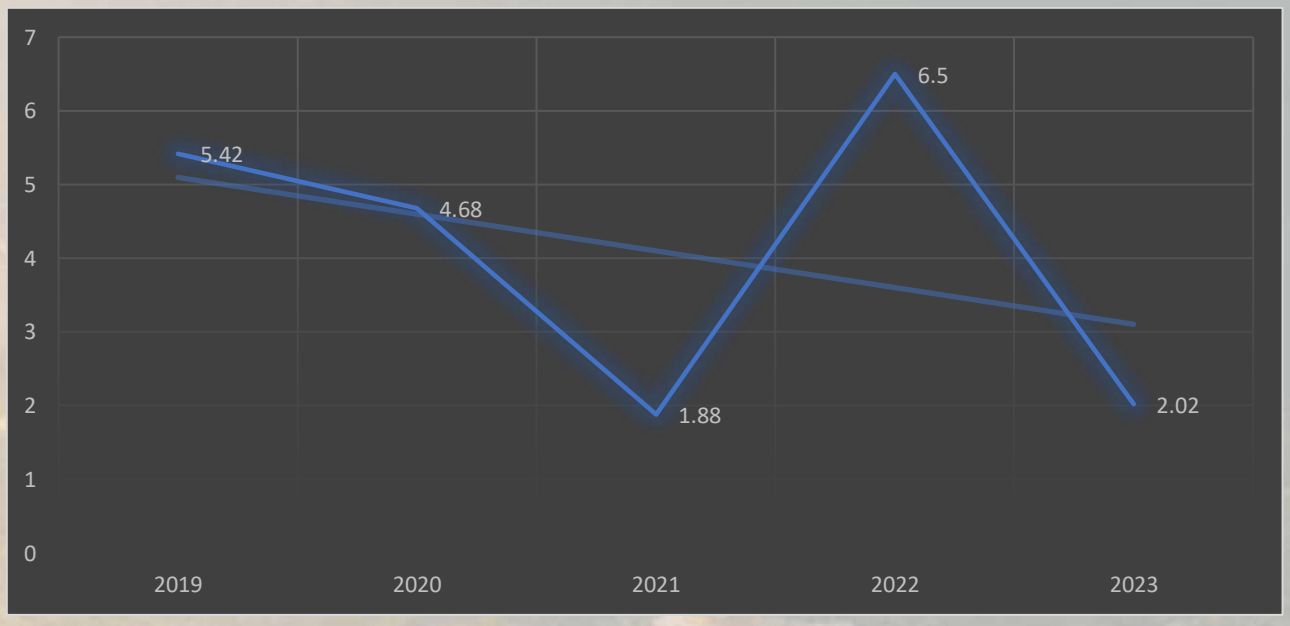
tertinggal tetap terus dilakukan terutama dalam hal penyediaan pelayanan publik agar ketimpangan pendapatan tidak semakin meningkat di Kabupaen Sintang.

2.3.1.5. Inflasi Kabupaten

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi, karena kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) menjadikan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah mencerminkan perekonomian daerah semakin stabil dikarenakan harga barang dan jasa semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat.

Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.

Secara umum, inflasi di Kabupaten Sintang selama tahun 2015-2023 menunjukkan trend penurunan. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 (6,50%) dan terendah pada tahun 2021 (1,88%).



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, 2024 (data diolah)

Grafik 2.9.
Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang,
Tahun 2019-2023 *(Persen)*

Bila dicermati dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni periode 2019-2023 menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Sintang relatif terkendali setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022. Bila dikaji secara mendalam, tingkat inflasi tahun 2019 - 2023 sudah sejalan dengan asumsi makro yang mentargetkan inflasi maksimum 3 persen +/- 1 persen. Dengan kata lain, kondisi perekonomian terutama daya beli masyarakat Sintang relatif stabil.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1. Aspek Pendidikan

Hingga saat ini, kualitas sumberdaya propinsi Kalimantan Barat tergolong rendah. Hasil Long Form SP 2020 menunjukkan bahwa penduduk Kalimantan Barat berumur 15 tahun ke atas sebagian besar (67,73%) berpendidikan SMP sederajad, bahkan masih ada penduduk yang Tidak Pernah Sekolah sebanyak 5,69%. Penduduk yang berpendidikan tinggi (D1/D2/D3; Sarjana/Magister/Doktor), jumlahnya sangat sedikit (7,1%). Sementara yang berpendidikan SMA/Sederajad baru mencapai 25,25%. Lebih memprihatinkan, hingga tahun 2020, masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah (5,69%), tidak tamat SD (10,99%).

Seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun ke tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan selama periode 2010-2023. RLS penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat signifikan. Pada periode 2010 – 2023, RLS bertambah 2,72% per tahun dan pertambahan ini tergolong besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Kalbar. RLS meningkat dari 5,45 tahun (2010) menjadi 7,64 tahun (2023). Peningkatan RLS sebesar 2,19 poin selama 13 tahun atau 0,16 poin per tahun. Peningkatan ini lebih tinggi dari RLS Kalimantan Barat yang bertambah 0,08 poin per tahun. Meskipun meningkat, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sintang baru setara tamat SD (kelas 7).

Harapan lama sekolah mengandung makna lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 (tujuh) tahun ke atas di masa mendatang. Angka HLS tertinggi yang direkomendasi UNDP adalah 18 tahun (setara dengan sarjana). Realisasi capaian RLS di Kabupaten Sintang hingga tahun 2023 baru mencapai 12,3 tahun, masih jauh dari angka maksimum. Ini berarti penduduk usia sekolah di Kabupaten Sintang

iharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA (12 tahun). Meskipun lambat, Angka HLS menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama periode 2010-2023.



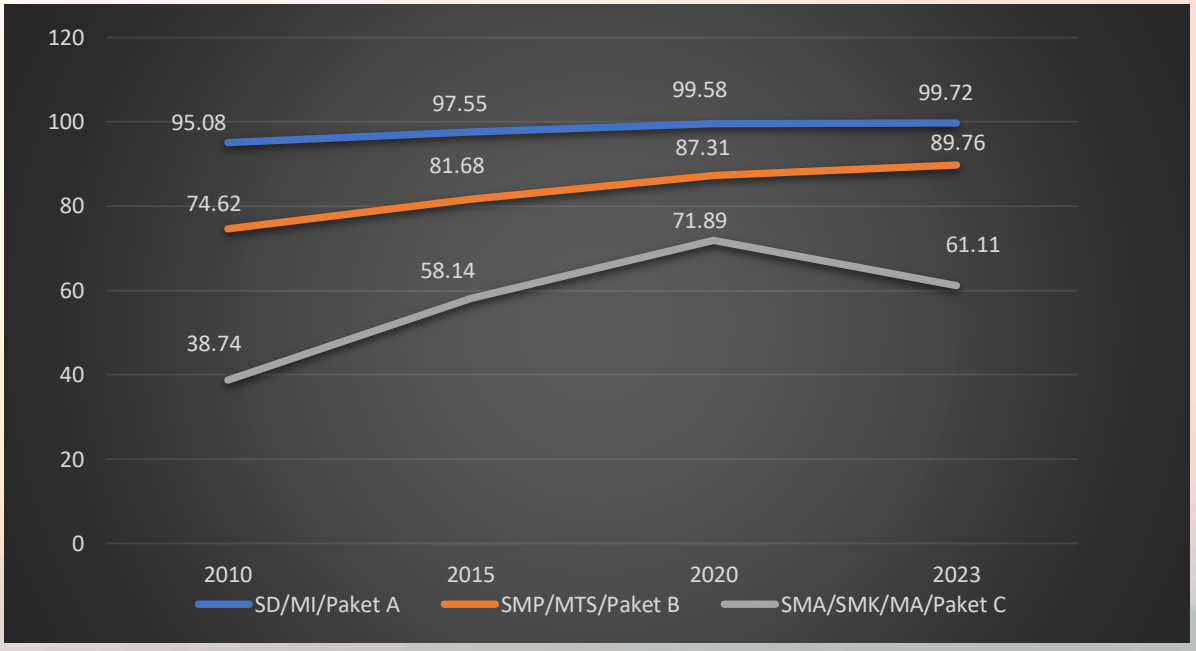


Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sintang cenderung menurun pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/Paket A meningkat dari 95,39% (2010) menjadi 98,42% (2020) dan 98,52% tahun 2023. APM SMP/MTs/Paket B cenderung menurun dari 61,02% menjadi 67,85% pada periode yang sama. Demikian juga APM SMA/SMK/MA/Paket C meningkat dari 32,49% (2010) menjadi 56,53% (2023). APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 56,53 mengandung arti bahwa tiap 100 penduduk usia 16-18 tahun, hanya 56-57 orang yang mengenyam Pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2023, selebihnya (43 orang) diduga tidak melanjut, atau bekerja atau menganggur. Capaian APM SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C yang masih di bawah 56% penting menjadi perhatian pemerintah daerah karena capaian tersebut mengindikasikan program WAJAR 12 tahun belum berjalan efektif dan sekaligus berpengaruh pada perlambatan kenaikan RLS.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A menurun dari 117,24% tahun 2010 menjadi 110,28% tahun 2023. Meskipun menurun, namun capaian APK sudah melebihi 100%. APK SMP/MTs/Paket B meningkat lambat dari 58,25% (2010) menjadi 72,01% (2023). APK SMA/SMK/MA/Paket C meningkat pesat dari 26,62% tahun 2010 menjadi 92,45% tahun 2023.



Secara keseluruhan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sintang pada semua jenjang pendidikan tergolong baik. APS SD/MI/Paket A hingga tahun 2023 tergolong tinggi pada kisaran 95-99 persen. APS SMP/MTs/Paket B pada kisaran 74-90 persen dan APS SMA/SMK/MI/Paket C meningkat tajam dari 38,74% (2010) menjadi 60,80% (2023).



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat,2024

Grafik 2.10.
Angka Partisipasi Sekolah SD, SMP, SMA di Kabuten Sintang Periode 2010-2023

Tantangan pembangunan pendidikan yang belum terselesaikan hingga saat ini dan masih harus dituntaskan untuk masa mendatang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan dan mutu pendidikan. Tantangan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, antara lain adalah (1) ruang kelas dalam kondisi rusak berat dan rusak total pada semua jenjang pendidikan (2) Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan masih banyak; (3) Kekurangan guru pada semua jenjang pendidikan; (4) Belum semua sekolah terakreditasi.

Pada aspek pendidikan, data perpustakaan dan utilitas merupakan pendukung keberhasilan di bidang pendidikan, sehingga data utilitas SD dan SMP tahun 2023 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.34

Rekapitulasi jumlah utilitas SMP di Kabupaten Sintang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Ruang Perpustakaan	Jumlah WC Siswa Laki	Jumlah WC Siswa Perempuan
Ambalau	4	6	4
Binjai Hulu	2	3	3
Dedai	8	11	11
Kayan Hilir	9	9	8
Kayan Hulu	7	8	6
Kelam Permai	6	9	7
Ketungau Hilir	8	9	8
Ketungau Hulu	7	6	7
Ketungau Tengah	12	10	10
Sepauk	13	21	19
Serawai	5	7	8
Sintang	19	22	20
Sungai Tebelian	10	12	11
Tempunak	9	11	11
Grand Total	**119**	**144**	**133**

Tabel 2.35

Rekapitulasi jumlah utilitas SD di Kabupaten Sintang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Ruang Perpustakaan	Jumlah WC Siswa Laki	Jumlah WC Siswa Perempuan
Ambalau	20	19	19
Binjai Hulu	11	16	13
Dedai	19	26	22
Kayan Hilir	16	29	24
Kayan Hulu	19	30	27
Kelam Permai	16	15	13
Ketungau Hilir	21	27	26
Ketungau Hulu	21	27	28
Ketungau Tengah	19	30	17
Sepauk	31	50	44
Serawai	20	33	22
Sintang	36	54	52
Sungai Tebelian	30	32	24
Tempunak	26	34	33
Grand Total	**305**	**422**	**364**

2.3.2.2. Aspek Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Semakin tinggi UHH di suatu negara/daerah pertanda semakin baik pembangunan kesehatan masyarakatnya. Dalam masa pembangunan jangka panjang, UHH di Kabupaten Sintang meningkat setiap tahunnya dan lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat, bahkan tertinggi di antara 8 Kabupaten/Kota. UHH Kabupaten Sintang meningkat dari 70,91 (2010) menjadi 71,71 tahun 2020, dan meningkat lagi menjadi 74,07 tahun 2023. lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat (73,71 tahun). Capaian ini mengungkapkan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Sintang pada tahun 2023, diperkirakan akan bertahan hidup hingga usia antara 74-75 tahun. Peningkatan UHH dari tahun ke tahun pertanda pembangunan kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk merawat kesehatan (termasuk merawat kehamilan) semakin meningkat. RT dengan sumber bersih, akses air minum layak, yang memiliki fasilitas Buang Air Besar dan derajad kesehatan meningkat.

Sejalan dengan peningkatan Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) berkurang dari 30 per 1000 kelahiran hidup tahun 2010 menjadi 11,18 per 1000 kelahiran hidup tahun 2023. Keberhasilan dalam penurunan AKB terkait erat dengan perbaikan akses menuju sarana dan prasarana kesehatan, meningkatnya persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap dan rata-rata lama pemberian ASI untuk membuat bayi bertahan hidup. Selain penurunan AKB, Kematian Anak tahun 2023 mencapai 19 anak dan kematian Balita mencapai 13 balita

Perkembangan Balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Sintang cukup menggembirakan, karena jumlahnya semakin berkurang. Proporsi gizi buruk dan kurang semakin berkurang. Balita Pendek dan sangat pendek (stunting) menurun dari 32,30% (2020) menjadi 28,80% (2021). Kemudian pada tahun 2023, angka stunting Kabupaten Sintang menurun secara signifkan hingga mencapai 24,8%. Penurunan proporsi gizi buruk dan kurang menandakan adanya kemajuan dalam perilaku hidup sehat dan bersih dan sadar sehat dikalangan masyarakat.

Unsur penting dalam menentukan keberhasilan bidang kesehatan yaitu jumlah tenaga kesehatan, cakupan serta sebaran. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2023 yaitu

: 1893, dengan rasio per penduduk yaitu 1 dokter/222 orang penduduk. Jika dilihat dari ketersedian jenis profesi kesehatan maka yang tersedia hanya 9 dari 13 jenis tenaga kesehatan. Berikut data tenaga kesehatan pad atahun 2023

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang, 2023

Nomor	Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Serawai	3	1	36	17	1	1	1	1	1
2	Ambalau	1	-	22	21	1	2	1	1	2
3	Kayan Hulu	1	-	35	27	1	1	1	2	1
4	Sepauk	1	1	51	57	3	1	1	2	1
5	Tempunak	2	-	56	44	3	5	2	4	2
6	Sungai Tebelian	2	-	41	29	1	2	2	1	1
7	Sintang	52	7	405	172	38	15	12	19	52
8	Dedai	3	-	62	43	2	3	2	3	4
9	Kayan Hilir	2	-	44	30	3	1	2	2	1
10	Kelam Permai	3	1	44	30	3	2	1	1	3
11	Binjai Hulu	1	-	27	14	1	1	1	3	2
12	Ketungau Hilir	3	-	53	27	1	2	2	2	2
13	Ketungau Tengah	1	1	57	35	2	1	1	2	1
14	Ketungau Hulu	1	1	47	32	-	1	1	1	2
15	**Kabupaten Sintang**	**76**	**12**	**980**	**578**	**60**	**38**	**30**	**44**	**75**

2.3.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan sumber daya manusia terus membaik, namun perlu upaya transformatif untuk mewujudkan manusia unggul. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu Negara/daerah. Di Kabupaten Sintang, Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2010-2023 bergerak naik namun sangat lambat dari angka 59,91 tahun 2010 menjadi 66,88 tahun 2020 dan 69,39 tahun 2023. IPM Sintang sebesar 69,39 masih lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi (70,47), rangking 7 dari 14 Kabupaten/Kota. Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 0,11% per tahun.

Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sintang adalah dimensi pendidikan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan dan ekonomi, capaiannya masih lebih rendah dari capaian rata-rata propinsi. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,64 tahun masih belum menggembirakan, masih jauh lebih rendah dari RLS propinsi (7,71 tahun). Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,30 tahun masih lebih rendah dari HLS Propinsi (12,67 tahun),. Pengeluaran per kapita per bulan tahun 2023 Rp. 9,128 juta, lebih rendah dari pengeluaran per kapita propinsi sebesar Rp. 9,810 juta. Rendahnya pengeluaran per kapita Kabupaten

Sintang terkait erat dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang relatif banyak. Terbanyak ketiga setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Landak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan mengalami kesulitan meningkatkan partisipasi sekolah anak ke jenjang yang lebih tinggi. Akibat kemiskinan, terjadi putus sekolah. Jumlah anak yang putus sekolah terjadi pada semua jenjang pendidikan, terbanyak pada jenjang SD (98 orang). Dampak ikutannya adalah tidak maksimalnya capaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/Paket C masih sekitar 60%. Keadaan ini pada gilirannya akan berpengaruh pada percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah atau kenaikan IPM melambat.

Dimensi kesehatan, perkembangannya cukup menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2023 sebesar 74,07 tahun, lebih tinggi dari UHH propinsi (73,71 tahun) dan berada pada rangking 5 di antara 14 kabupaten/kota. Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM tahun 2023 disebabkan indikator kinerja pendidikan dan perekonomian sebagai akibat pandemic covid-19.

Selain IPM, indeks pembangunan gender (IPG) dan kesenjangan gender (IKG) menunjukkan capaian positif. IPG meningkat dari 79,31 (2010) menjadi 87,74 (2023), kemudian IKG menurun dari 0,592 (2020) menjadi 0,585 (2023). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan hasil positif. Capaiannya meningkat dari 54,43 (2010) menjadi 63,74 (2023). Meningkatnya IPG dan IDG, dan menurunnya IKG merupakan pertanda roda pembangunan di Sintang yang berlangsung selama ini atas partisipasi seluruh masyarakat, termasuk kaum perempuan. Peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat dan beragam, termasuk dalam bidang politik.

Tabel 2.36.
Perkembangan IPM, IPG, IDG, IKG Kabupaten Sintang dan Indikatornya Tahun 2010 – 2023

Indikator IPM	Tahun			
	2010	2015	2020	2023
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,91	71,05	71,71	74,07
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	5,45	6,70	7,07	7,64
Harapan Lama Sekolah (tahun)	9,78	10,84	12,03	12,30
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	7.302	8.224	8.728	9.128
IPM Kabupaten Sintang	59,91	64,18	66,88	69,39
IPM Propinsi Kalimantan Barat	61,97	65,59	67,66	70,47
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sintang	54,43	55,71	63,67	63,74*

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sintang	79,31	85,44	86,73	87,38*
Indeks Ketimpangan Gender	N/A	N/A	0,592	0,585*

= data tahun 2024

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Tahun 2024.

Perkembangan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sintang yang tersirat dari perkembangan IPM menunjukkan bagaimana investasi di bidang pendidikan dan kesehatan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Harapannya hal ini dapat meningkatkan daya saing daerah. Namun, daya saing daerah akan menjadi bias jika mengesampingkan upaya peningkatan modal manusia yang menjadi *driver* daya saing daerah, khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan. Pengukuran perkembangan modal manusia sebagai salah satu ukuran peningkatan daya saing daerah menggunakan indikator Indeks Modal Manusia (IMM). Indeks Modal Manusia (IMM) didesain untuk menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan dan pendidikan dapat mendukung produktivitas generasi yang akan datang. Indeks ini mengombinasikan komponen-komponen probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (survival), kualitas dan kuantitas pendidikan, dan kesehatan termasuk isu stunting. Komponen tersebut merupakan bagian utama dari pengukuran produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini. Penggunaan IMM sebagai salah satu indikator pembangunan manusia, khususnya pembangunan modal manusia di Kabupaten Sintang, akan disesuaikan dengan perkembangan IPM. Untuk itu, indikator ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Sintang.

2.3.2.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian dan perolehan informasi yang diperlukan. Aktivitas masyarakat, pemerintah, swasta, dan kelembagaan lainnya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akses informasi yang cepat dan akurat, karena dalam banyak hal sarana informasi sangat berpengaruh pada fungsi efisiensi pada suatu organisasi. Kondisi wilayah yang sangat luas dan tersebar tentunya berimplikasi pada potensi kinerja yang kurang efisien, dengan sarana komunikasi dan informasi yang baik hal tersebut tidak lagi menjadi permasalahan. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Sintang dapat melakukan komunikasi melalui jaringan seluler

bahkan jaringan internet. Tabel berikut menyajikan total menara telekomunikasi swasta di Kabupaten Sintang tahun 2020 sampai 2023 menurut kecamatan.

Tabel 2.37.
Total Menara Telekomunikasi Swasta
Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2023

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Ambalau	1	1	1	1
Kecamatan Binjai Hulu	3	3	3	3
Kecamatan Dedai	5	6	6	6
Kecamatan Kayan Hilir	4	4	4	4
Kecamatan Kayan Hulu	1	2	2	2
Kecamatan Kelam Permai	4	5	6	6
Kecamatan Ketungau Hilir	4	4	4	4
Kecamatan Ketungau Tengah	5	5	5	5
Kecamatan Ketungau Hulu	2	2	2	2
Kecamatan Sepauk	18	18	18	18
Kecamatan Serawai	4	4	4	4
Kecamatan Sintang	42	40	41	41
Kecamatan Sungai Tebelian	19	22	22	22
Kecamatan Tempunak	10	11	12	12
Kabupaten Sintang	**119**	**128**	**130**	**130**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2024

Dari tabel diatas, diketahui menara telekomunikasi di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan, dari tahun 2020 berjumlah 119 meningkat menjadi 130 setelah tiga tahun kemudian. Meningkatnya jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Sintang menandakan perkembangan pesat dalam sektor telekomunikasi. Hal ini mencerminkan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas komunikasi. Dengan adanya peningkatan infrastruktur telekomunikasi, masyarakat dapat mengakses layanan telepon seluler, internet, dan layanan komunikasi lainnya dengan lebih efisien. Peningkatan menara telekomunikasi juga dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, karena komunikasi yang efektif mendukung bisnis, pendidikan, dan interaksi sosial secara umum.

Meningkatnya jaringan 3G dan 4G yang dapat mengakses internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Sintang sangat mempermudah hubungan komunikasi dan proses pertukaran informasi baik secara personal maupun kelembagaan, hal tersebut berimbas kepada pengguna internet semakin meningkat pesat, namun secara tidak langsung terjadi pergeseran pemanfaatan media internet melalui warnet bergeser melalui telpon selular sehingga menurunkan jumlah warnet setiap tahunnya. Selain itu terjadinya peningkatan jumlah *website* milik pemerintah daerah yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas *website* menandakan upaya yang kuat dalam pemberdayaan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi terkait kebijakan, program, dan layanan publik secara lebih transparan dan efisien. Jumlah surat kabar nasional/lokal juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mencerminkan pertumbuhan dalam industri media dan informasi di suatu negara atau wilayah. Hal ini dapat menandakan keberagaman media dan ketersediaan platform untuk menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat. Peningkatan ini juga bisa mencerminkan minat masyarakat yang tinggi terhadap isu-isu lokal, nasional, dan global. Peningkatan jumlah surat kabar tidak hanya mencerminkan perkembangan industri media, tetapi juga dapat berkontribusi pada pemberdayaan kebebasan pers dan pluralitas pandangan dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan terlibat dalam isu-isu yang memengaruhi mereka secara langsung. Selengkapnya mengenai data indikator bidang komunikasi dan informasi Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.38.
Indikator Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang
Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Warnet Terhadap Penduduk	%	30	22	12	2	2	2	2
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Buah	28	28	28	92	91	90	91

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	Buah	3	3	5	7	1	2	2
Website Milik Pemerintah Daerah	Web	14	14	14	27	27	27	29
Pameran/Expo	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	1
Sistem Informasi Manajemen Pemda	Unit	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2024

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di pemerintah Kabupaten Sintang telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain berimplikasi pada peningkatan sumber daya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta perencanaan di Kabupaten Sintang karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim investasi akan sangat terdukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan. Setidaknya terdapat tiga tabel yang dapat memberikan gambaran kondisi komunikasi dan informasi di Kabupaten Sintang, yaitu jumlah kantor pos pembantu, jangkauan telekomunikasi dan karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.39.
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2023

No.	Kecamatan	2010	2015	2020	2023
1	Serawai	1	0	1	1
2	Ambalau	0	0	0	0
3	Kayan Hulu	0	0	0	0
4	Sepauk	1	0	1	1
5	Tempunak	0	0	0	0
6	Sungai Tebelian	0	0	1	1
7	Sintang	0	1	1	2
8	Dedai	0	0	0	0
9	Kayan Hilir	1	0	0	0

No.	Kecamatan	2010	2015	2020	2023
10	Kelam Permai	1	0	1	1
11	Binjai Hulu	1	0	1	1
12	Ketungau Hilir	0	0	0	0
13	Ketungau Tengah	1	0	1	1
14	Ketungau Hulu	0	0	0	0
TOTAL		**6**	**1**	**7**	**8**

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel 2.39 diketahui jumlah kantor pos pembantu tahun 2010 yaitu 6 Kantor Pos Pembantu dan pada tahun 2023 Kantor Pos Pembantu menjadi 8 Unit. Selanjutnya mengenai data jangkauan telekomunikasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.40.
Jangkauan Telekomunikasi Kabupaten Sintang

Telekomunikasi	2019	2021	2022
Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa	53	143	195
Tidak Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa	337	247	195
Warga Desa Memiliki Akses Internet	110	191	222
Warga Desa Tidak Memiliki Akses Internet	280	199	168
Jumlah Desa Dengan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Kuat	203	154	162
Jumlah Desa Dengan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Lemah	85	194	203
Jumlah Desa Tidak Ada Sinyal Telepon Seluler/Handphone	102	42	25

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel 2.40 dapat diketahui terjadi peningkatan total desa yang terdapat fasilitas internet di kantor Kepala Desa dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 hanya terdapat 13,59% jumlah desa yang sudah terdapat fasilitas internet di Kantor Kepala Desa dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki total 50,00%, terlihat terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jangka waktu 2 tahun. Selain itu, dapat diketahui warga desa yang memiliki akses internet pada tahun 2019 sebanyak 28,21% meningkat pada tahun 2022 menjadi 56,92% sehingga diketahui masih terdapat 43,08% warga desa yang

tidak memiliki akses internet. Informasi lain yang dapat diketahui dari tabel yaitu pada tahun 2022 yaitu jumlah desa dengan sinyal telepon seluler/handphone kuat pada tahun 2022 berjumlah 162 desa atau mencakup 41,54%, sinyal lemah yaitu 203 desa atau mencakup 52,05%, dan tidak ada sinyal sebanyak 25 desa atau mencakup 6,41% dari total keseluruhan yaitu 390 desa yang ada di Kabupaten Sintang.

Selanjutnya terjadi peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2019 sampai 2022 persentase pengguna fasilitas komunikasi maupun pengguna yang mengakses internet. Pada tahun 2019 persentase pengguna fasilitas komunikasi terdapat 67,20% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 78,67%. Sementara untuk pengguna yang mengakses internet pada tahun 2019 sejumlah 30,25% dan meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 57,12%. Selengkapnya mengenai data karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.41.
Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet Tahun 2019-2022

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)				Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Jenis Kelamin KRT								
Laki-laki	70,11	71,65	71,28	78,90	31,31	30,24	44,39	57,58
Perempuan	64,11	56,13	67,92	75,76	29,13	29,73	51,67	51,15
Kuintil Pengeluaran								
40 Persen Terbawah	52,28	51,60	59,01	65,86	15,45	11,32	32,98	39,69
40 Persen Tengah	71,58	78,57	73,51	84,61	30,86	35,80	47,14	65,09
20 Persen Teratas	87,21	89,80	89,68	91,38	57,53	55,38	64,26	74,63
Pendidikan Tertinggi ART								
SD ke bawah	54,10	59,59	64,05	71,48	15,74	15,95	35,21	44,41
SMP ke atas	91,52	88,55	82,61	86,80	57,19	54,53	61,23	71,50
Kab. Sintang	67,20	70,29	71,01	78,67	30,25	30,20	44,97	57,12

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2023

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

Sarana dan prasarana memiliki arti yang sama dengan fasilitas dapat mempermudah upaya dan mempermudah Upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan menurut Subroto di dalam Arianto (2008), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Lebih luas lagi tentang fasilitas, menurut Arikunto dalam Arianto (2008) berpendapat, fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha.

Sarana dan prasarana infrastruktur mengacu pada fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung fungsi masyarakat dan perekonomian suatu wilayah. Infrastruktur merupakan pondasi penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara atau daerah.

Sarana Infrastruktur meliputi sarana transportasi, sarana energi, sarana air bersih, sarana komunikasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana rekreasi. Sedangkan prasarana infrastruktur meliputi prasarana jalan dan jembatan, prasarana transportasi publik, prasarana telekomunikasi, prasarana air bersih, prasarana sanitasi, prasarana listrik, prasarana pendidikan serta prasarana Kesehatan.

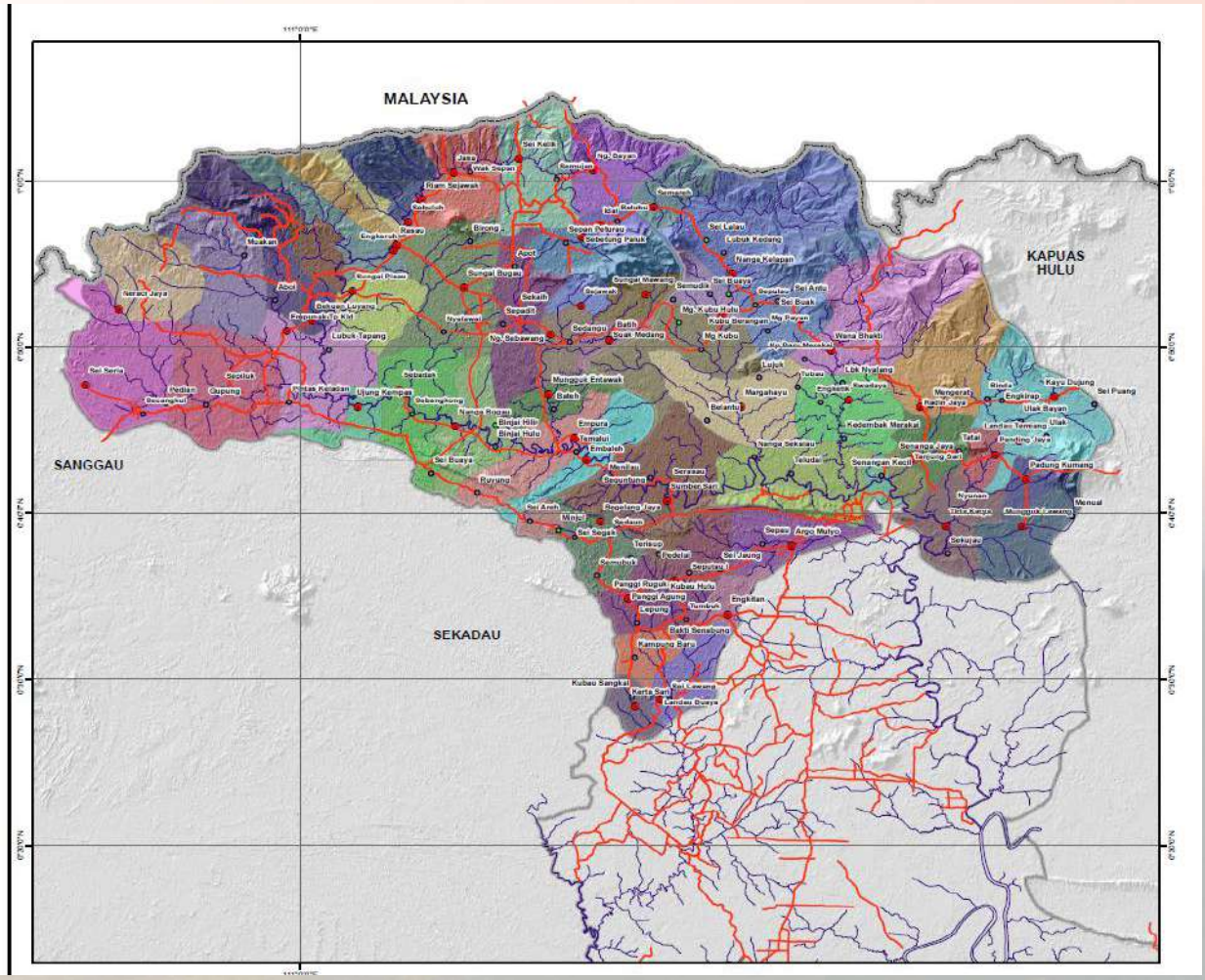
Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Investasi dalam infrastruktur yang tepat dapat memperbaiki akses ke layanan dasar, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Oleh karena itu, pemerintah dan sektor swasta sering bekerja sama untuk membangun, mengelola, dan memelihara sarana dan prasarana infrastruktur yang diperlukan untuk memajukan suatu wilayah.

2.3.3.1. Kawasan Perbatasan

Daerah perbatasan adalah wilayah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi ini mendorong mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi illegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya; termasuk kegiatan illegal lain yang terkait dengan aspek politik dan keamanan.

Kawasan perbatasan Kabupaten Sintang terdiri dari dua kecamatan lokpri yaitu Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. Masing-masing kecamatan terdiri dari 29 desa sehingga keseluruhan desa di kawasan perbatasan berjumlah 58 desa.

Gambar 2.6
Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang



Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, 2023

Dari 58 desa di kawasan perbatasan terdapat 15 desa yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Secara tidak langsung wilayah desa tersebut terdapat jalur-jalur illegal yang melintas antar kedua Negara. Terdapat 13 jalur tikus terdeteksi dan beberapa jalur lainnya yang merupakan perlintasan antar Negara yang illegal. Perlintasan orang dan barang melalui jalur-jalur tersebut untuk perdagangan hasil alam dari Indonesia dan belanja kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di Negara Malaysia. Namun, dari hasil temuan aparat di lapangan terdapat penyedupan TKI illegal, barang-barang terlarang seperti narkoba, miras dan rokok illegal yang diseludupkan melalui perlintasan masyarakat tersebut.

Tabel 2.42.
Desa Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara Malaysia

No.	Desa	Pusat Desa	Luas Wilayah (Km^2)
A. KETUNGAU HULU			
1	Sungai Seria	Sungai Seria	135,00
2	Nanga Bayan	Nanga Bayan	102,00
3	Jasa	Jasa	68,00
4	Senaning	Senaning	47,00
5	Rasau	Rasau	50,00
6	Muakan Petinggi	MuakanPetinggi	53,00
7	Sebuluh	Sebuluh	67,00
8	Riam Sejawak	RiamSejawak	97,20
9	Engkeruh	Sungai Lawang	63,00
10	Sungai Kelik	Sungai Kelik	45,00
11	Neraci Jaya	Sungai Enteli	38,00
B. KETUNGAU TENGAH			
12	WanaBakti	Nanga Seran	90,00
13	Mungguk Gelombang	Mungguk Gelombang	98,00
14	Nanga Kelapan	Nanga Kelapan	78,00
15	Semareh	Semareh	42,00

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, 2023

Dengan kondisi permasalahan tersebut, pengelolaan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sintang memang belum terakomodir dengan baik. Terbukti sampai November 2023, perkembangan pembanguan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, masih terkendala pada tahap pembebasan lahan dan penetapan *bordercross exiting* antar kedua negara. Harapan adanya PLBN akan dapat meningkatkan kemampuan negara mengamankan wilayah dan warganya.



Gambar 2.7.
Rencana Kawasan Pembangunan PLBN Sungai Kelik
Kecamatan Ketungau Hulu

Rencana Kawasan Pembangunan PLBN Sungai Kelik seluas 25,44 HA di pada Zero Point (titik Nol) Patok : H507-H508 dengan Koordianat 1^{0}04'11,431" LU dan 111^{0}12'3,132" BT. Penetapan lokasi tersebut sesuai dengan Dokumen Kesepakatan Zero Point atau *exit/entry point* RI-Malaysia melalui Kegiatan Sosekda Provinsi Kalimantan Barat dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Tahun 2011.

Pengelolaan perbatasan daerah di Kabupaten Sintang, setidaknya menjadi perhatian yang sangat serius bagi Negara dan juga Pemerintah Daerah setempat. Beberapa permasalahan yang terkait dengan Kawasan perbatasan ini salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar bagi masyarakat yang sangat terbatas di kawasan perbatasan, seperti pembangunan jalan dan jembatan di lokasi prioritas perbatasan yang menjadi akses utama bagi warga di Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.

Masih minimnya sarana dan prasarana serta pembangunan yang belum merata seperti sarana pendidikan, jalan, air bersih, listrik maupun sarana komunikasi, serta minimnya ketersediaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk pengembangan daerah perbatasan, menjadi suatu kendala dan tantangan yang harus dicarikan solusi jalan keluar dari masalah ini.

Tabel 2.43.
Fasilitas Listrik, Air Bersih, Balai Pertemuan dan Tempat Ibadah di Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah

No	Desa	Listrik	Air Bersih	Balai Pertemuan	Tempat Ibadah			
					Gereja Kristen	Gereja Khatolik	Masjid	Surau
A. KETUNGAU TENGAH								
1	Argomulyo	Layak	Tidak Layak	3 Layak 1 Rusak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Bagelang Jaya	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Bakti Senabung	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Engkitan	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Gut Jaya Bakti	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Kayu Dujung	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Kerta Sari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Kubu Berangan	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Landau Buaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Landau Temiang	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Margahayu	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Desa	Listrik	Air Bersih	Balai Pertemuan	Tempat Ibadah			
					Gereja Kristen	Gereja Khatolik	Masjid	Surau
12	Mungguk Gelombang	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Mungguk Lawang	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Layak
14	Nanga Kelapan	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Padung Kumang	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Panding Jaya	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Panggi Agung	Layak	Layak	Layak	3 Tidak Layak 1 Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
18	Panggi Ruguk	Tidak Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
19	Radin Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
20	Semareh	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
21	Senangan Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Senangan Kecil	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
23	Sumber Sari	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
24	Sungai Areh	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak
25	Swadaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
26	Tanjung Sari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Layak
27	Tirta Karya	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Layak
28	Wana Bakti	Tidak Ada	Layak	Layak	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Wirayuda	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
B. KETUNGAU HULU								
1	Bekuan Luyang	Layak	Tidak Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Embaleh	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Empunak Tapang Keladan	Tidak Layak	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Empura	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Engkeruh	Layak	Tidak Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Layak	Tidak Ada
6	Idai	Tidak Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Jasa	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Muakan Petinggi	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Layak
9	Mungguk Entawak	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Nanga Bayan	Tidak Ada	Tidak Layak	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Layak
11	Nanga Bugau	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada
12	Nanga Sebawang	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Neraci Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak
14	Rasau	Layak	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Riam Sejawak	Tidak Layak	Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Sebadak	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Desa	Listrik	Air Bersih	Balai Pertemuan	Tempat Ibadah			
					Gereja Kristen	Gereja Khatolik	Masjid	Surau
17	Sebetung Paluk	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada
18	Sebuluh	Layak	Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
19	Sejawak	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
20	Sekaih	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak
21	Senaning	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak
22	Sepiluk	Layak	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak
23	Suak Medang	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Sungai Bugau	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Sungai Kelik	Tidak Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak
26	Sungai Mawang	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Sungai Pisau	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Layak
28	Sungai Seria	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada
29	Ujung Kempas	Layak	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat masih terbatasnya infrastruktur yang tersedia, sentuhan pembangunan yang masih sangat jauh dari harapan di daerah perbatasan. Selain itu Jalan yang menghubungkan antara Sintang sebagai Ibukota Kabupaten dan Sungai Kelik sebagai gerbang perbatasan dengan Serawak juga masih sangat sederhana 83% masih berupa permukaan tanah. Listrik sebagai salah satu kebutuhan utama pembangunan masyarakat perbatasan yang bermartabat juga masih belum memadai. Sarana air bersih pada dua kecamatan berdasarkan tabel diatas , masih sangat banyak yang tidak layak. Sarana transportasi juga masih belum cukup tersedia sehingga intensitas komunikasi yang terjalin antara masyarakat lokal di sekitar Sungai Pisau sebagai Ibukota Kecamatan Ketungau Hulu dan Wirayuda sebagai Ibu Kota Kecamatan Ketungau Tengah dengan masyarakat luar seperti di Kota Sintang dan kota-kota lainnya masih sangat rendah. Arus lalu lintas barang di perbatasan daerah ini juga belum terlalu tinggi sehingga Sungai Pisau dapat dikategorikan sebagai titik yang masih memiliki perhatian sangat rendah baik oleh masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah.

Tabel 2.44.
Status Desa Kawasan Perbatasan Tahun 2023

NO	KETUNGAU TENGAH		KETUNGAU HULU	
	DESA	STATUS DESA 2023	DESA	STATUS DESA 2023
1	Wirayuda	Mandiri	Senaning	Mandiri
2	Tanjung Sari	Berkembang	Empura	Maju
3	Panding Jaya	Berkembang	Sebadak	Maju
4	Tirta Karya	Berkembang	Sepiluk	Mandiri
5	Begelang Jaya	Berkembang	Sungai Seria	Mandiri
6	Sumber Sari	Maju	Suak Medang	Maju
7	Panggi Agung	Maju	Nanga Bayan	Berkembang
8	Kerta Sari	Maju	Rasau	Maju
9	Argo Mulyo	Maju	Jasa	Maju
10	Wana Bhakti	Mandiri	Sungai Bugau	Maju
11	Swadaya	Berkembang	Nanga Bugau	Berkembang
12	Margahayu	Berkembang	Empunak Tapang Keladan	Maju
13	Gut Jaya Bhakti	Berkembang	Sebetung Paluk	Berkembang
14	Landau Buaya	Maju	Muakan Petinggi	Maju
15	Kayu Dujung	Berkembang	Nanga Sebawang	Berkembang
16	Senangan Kecil	Mandiri	Sekaih	Berkembang
17	Sungai Areh	Berkembang	Bekuan Luyang	Maju
18	Mungguk Gelombang	Berkembang	Sungai Pisau	Maju
19	Mungguk Lawang	Berkembang	Mungguk Entawak	Berkembang
20	Nanga Kelapan	Berkembang	Embaleh	Berkembang
21	Panggi Ruguk	Berkembang	Sebuluh	Berkembang
22	Bakti Senabung	Berkembang	Riam Sejawak	Berkembang
23	Engkitan	Berkembang	Engkeruh	Berkembang
24	Landau Temiang	Berkembang	Sungai Kelik	Berkembang
25	Padung Kumang	Berkembang	Idai	Berkembang
26	Radin Jaya	Berkembang	Sungai Mawang	Berkembang
27	Senangan Jaya	Berkembang	Ujung Kempas	Berkembang
28	Kubu Berangan	Berkembang	Neraci Jaya	Berkembang
29	Semareh	Berkembang	Sejawak	Berkembang

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Kondisi infrastruktur yang sangat minim ini menjadi salah satu faktor perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di kawasan perbatasan sangat lambat untuk menuju satus mandiri. Dari tabel diatas, hasil penilaian Kementerian Desa dan PDT dapat dilihat Status Desa Kawasan Perbatasan Tahun 2023 hanya terdapat 7 desa status mandiri, 15 desa berstatus maju dan sisanya masih berstatus berkembang.

2.3.3.2. Jalan

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi masyarakat serta dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dapat kita temukan klasifikasi jalan umum yang menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Pembangunan jalan yang dilaksanakan memperhatikan keserasian dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Disamping itu juga dilakukan pembangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan pe-mukiman terutama pemukiman transmigrasi. Jalan merupakan prasarana angkutan yang penting. Dengan adanya jalan akan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pada tahun 2022, panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang sepanjang 2.289,62 kilometer, di mana permukaan jalan 7,51 persen jalan beraspal, 65,05 persen jalan kerikil, 23,05 persen jalan tanah dan 4,39 persen lainnya. Ditinjau dari kondisinya 5,26 persen baik, 59,20 persen sedang, 19,99 persen rusak dan 15,54 persen rusak berat.

Panjang jalan menurut status kewenangan serta jenis kondisi keadaan berdasarkan data tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45.
Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2023

No	Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 (SK Bupati 2023)*
1	Negara	73,5	73,5	73,5	129,80	136,32	136,32	73,5
2	Provinsi	193,97	193,97	193,97	135,27	135,27	239,47	191,07
3	Kabupaten/Kota	2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62	1.782,38
Jumlah/Total		**2.557,09**	**2.557,09**	**2.557,09**	**2.554,69**	**2.561,21**	**2.425,94**	**2.046,95**

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 600.1.7.2./1221/KEP-DPU/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut status dan fungsinya sebagai jalan kabupaten di Kabupaten Sintang, dengan penambahan ruas jalan baru sebanyak 69 ruas baru dan penghapusan 42 ruas jalan dari SK jalan sebelumnya, sehingga terjadi selisih sebesar 507,24 km dari total panjang SK jalan sebelumnya. Perubahan ini karena terjadi pada perubahan ruas jalan pada nama desa dan dusun. Perubahan panjang menyesuaikan panjang ruas jalan dan penyesuaian trase ruas apabila terdapat pemecahan ruas jalan.

Tabel 2.46.
Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2023

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2023 (SK Bupati 2023)*
1	Aspal	263,55	299,02	241,404	241,404	202,581	187,893
2	Kerikil	952,55	1.100,00	1.946,718	1.946,718	1.585,946	1110,137
3	Tanah	1.073,51	899,60	531,769	531,769	394,404	394,562
4	Lainnya	-	-	19,729	19,729	106,671	95,368
Total		**2.289,62**	**2.289,62**	**2.289,62**	**2.289,62**	**2.289,62**	**1787,96**

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020 - 2024

Tabel 2.47.
Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2023

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2023 (SK Bupati 2023)*
1	Baik	214,3	247.943	151,87	107,873	98,532	116,434
2	Sedang	934,15	1.086.078	1.338,09	1.361,216	1.402,623	93,224
3	Rusak Ringan	531,37	444,18	383,82	461,032	335,619	433,199
4	Rusak Berat	609,8	511.424	415,84	259,449	452,846	1145,103
Total		**2.289,62**	**2.289,62**	**2.289,62**	**2.289,62**	**2.289,62**	**1787,96**

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020 – 2024

Jalan Poros Kabupaten Sintang yaitu jalan penghubung antar Ibukota Kabupaten Sintang ke ibukota kabupaten lain dan antar Ibukota kabupaten ke kecamatan ke kecamatan serta penghubung ibukota Kabupaten Sintang ke batas negara. Ruas-ruas jalan ini diharapkan tetap fungsional agar konektivitas antar wilayah tersebut tetap terjalin baik. Jalan poros ini terbagi dalam beberapa jalur yang terdiri dari beberapa ruas jalan dengan berbagai status jalannya. Ruas-ruas jalan terasebut terbagi menjadi 3 poros, yaitu :

Tabel 2.48.
Ruas Jalan Poros Kabupaten Sintang

NO	Ruas	Status	Panjang (KM)
	WILAYAH I		**239.15**
1	Bts. Kota Sintang - Sp. Nangasilat (Bongkong)	Nasional	53.98
2	Simpang Medang - Nanga Mau	Provinsi	37.2
3	Nanga Mau – Tebidah	Provinsi	30.9
4	Tebidah – Bunyau	Provinsi	37
5	Bunyau – Serawai	Provinsi	30.17
6	Serawai – Tontang	Kabupaten	32.7
7	Tontang - Ng. Kemangai	Kabupaten	17.2
	WILAYAH II		**210.28**
1	Sintang-Semubuk	Provinsi	58.7
2	Semubuk - Sp. Ng. Merakai	Kabupaten	24.4
3	Sp. Ng. Merakai - Panggi Agung	Kabupaten	19.4
4	Panggi Agung - Sp. Ng. Bugau	Kabupaten	36.1
5	Sp. Ng. Bugau - Pintas Keladan	Kabupaten	13.1
6	Pintas Keladan – Rasau	Nasional	32.71
7	Rasau - Jasa - Batas Serawak	Nasional	25.87
	WILAYAH III		**173.58**
1	Tebelian - Bts. Kota Sintang	Nasional	10.9
2	Sekadau – Tebelian	Nasional	69.7
3	Tebelian – Nangapinoh	Nasional	57.73
4	Lengkenat – Sepauk	Kabupaten	6.65
5	Penyangkak – Tempunak	Kabupaten	12
6	Kajang – Dedai	Kabupaten	16.6

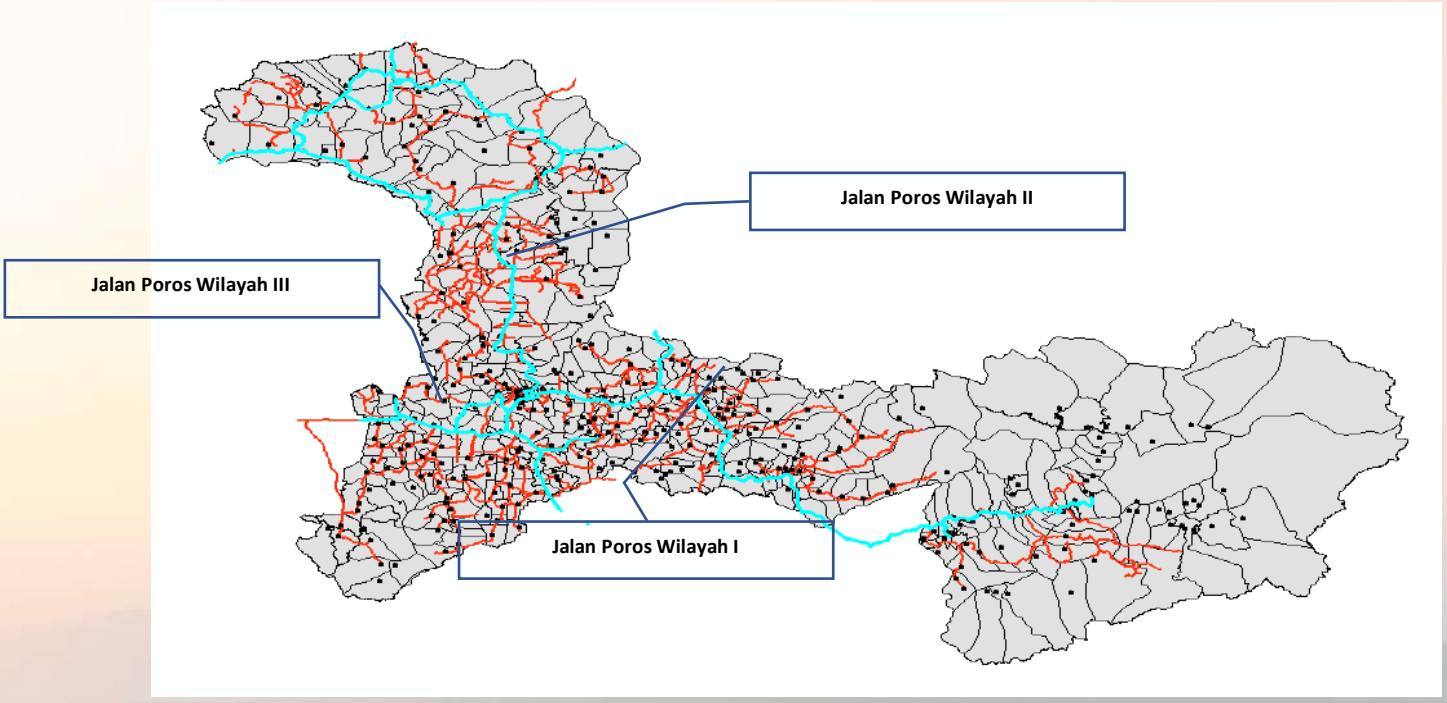
Sumber: Bappeda Kabupaten Sintang, 2023

Jalan Poros wilayah I konektivitas antar wilayah yang menghubungkan Kota Sintang ke Kebong (Kecamatan Kelam Permai), Putusibau (Kabupaten Kapuas Hulu), Nanga Mau (Kecamatan Kayan Hilir), Nanga Tebidah (Kecamatan Kayan Hulu), Nanga Serawai (Kecamatan Serawai), Nanga Kemangai (Kecamatan Ambalau).

Jalan Poros Wilayah II konektivitas antar wilayah yang menghubungkan Kota Sintang ke Binjai Hulu (Kecamatan Binjai), Nanga Ketungau (Kecamatan Ketungau Hilir), Balai Sepuak (Kabupaten Sekadau), Nanga Merakai (Kecamatan Ketungau Tengah), Balai Karangan (Kabupaten Sanggau), Sungai Pisau (Kecamatan Ketungau Hulu) dan Batas Negara Malaysia (PLBN Sungai Kelik).

Jalan Poros Wilayah III konektivitas antar wilayah yang menghubungkan Kota Sintang ke Kawasan Industri Sungai Ringin, Sungai Ukoi (Kecamatan Tebelian), Bandar Udara

Tebelian, Penyak Lalang (Kecamatan Dedai), Nanga Pinoh (Kabupaten Melawi), Nanga Tempunak (Kematan Tempunak), Nanga Sepauk (Kecamatan Sepauk), dan Sekadau (Kabupaten Sekadau).



Gambar 2.8.
Jalan Poros di Wilayah Kabupaten Sintang

2.3.3.3. Jembatan

Kondisi jembatan yang berlokasi pada jaringan jalan Kabupaten di Kabupaten Sintang berdasarkan data tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.49.
Kondisi Jembatan di Jaringan Jalan Kabupaten Sintang Tahun 2023

Jumlah Jembatan	Kondisi Bangunan Atas (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
979	69,12	14,98	9,01	5,08	1,81
	Kondisi Bangunan Bawah (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
	65,16	18,56	8,39	6,35	1,54
	Kondisi Fondasi (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
	68,74	18,22	8,42	4,62	0,00
	Kondisi Lantai (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
	49,37	25,03	16,86	8,20	0,54

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2024

2.3.3.4. Perhubungan

Sesuai perkembangan teknologi dan pembangunan perekonomian yang semakin mantap. peranan jasa angkutan darat yang ditunjang dengan kondisi dan jenis permukaan jalan yang baik perlu lebih ditingkatkan sehingga mobilitas penduduk dan perdagangan antar daerah dapat berjalan dengan lancar.

Bandar udara dan terminal penumpang adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang biasa disebut simpul. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamaan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013). Terminal sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Tabel 2.50.
Indikator Bidang Perhubungan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Org	289.525	77.022	27.187	100.549	47.092
2	Jumlah ijin trayek	Trayek	99	99	108	148	128
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	33	9	5.418	182	765
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis						
	a. Pelabuhan Sungai	Unit	2	2	2	2	2
	b. Pelabuhan Udara	Unit	1	1	1	1	1
	c. Terminal Bis	Unit	3	3	3	3	3
5	Angkutan darat	Unit	276	276	23	49	36
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	8,8	2,38	4,89	3,57	10,30
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Tahun	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
8.1	Pengujian Awal						

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*
	a. JBB s.d. 2.500 kg	Rp.	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	b. JBB 2.501 s.d. 7.500 kg	Rp.	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	c. JBB 7.501 s.d. 14.000 kg	Rp.	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	d. JBB > 14.000 kg	Rp.	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
8.2	Pengujian Berkala:						
	JBB s.d. 2.500 kg	Rp.	66.000	66.000	66.000	66.000	50.000
	JBB 2.501 s.d. 7.500 kg	Rp.	71.000	71.000	71.000	71.000	55.000
	JBB 7.501 s.d. 14.000 kg	Rp.	76.000	76.000	76.000	76.000	60.000
	JBB > 14.000 kg	Rp.	81.000	81.000	81.000	81.000	65.000
8.3	Pengujian Penghapusan Kendaraan						
	Kendaraan bermotor beroda 2 (dua)	Rp.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kendaraan bermotor beroda 4 (empat)	Rp.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kendaraan bermotor beroda 6 (enam)	Rp.	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	Kendaraan bermotor lebih dari 6 (enam) roda	Rp.	80.000	80.000	80.000	80.000	0
9	Pemasangan Rambu-rambu	%	0	64,37	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sintang Tahun 2023

Pertumbuhan jumlah kendaraan penting dalam rangka mengkaji aspek *demand* dan *supply* pada sektor transportasi. Pertumbuhan kendaraan dapat diketahui berdasarkan beberapa informasi antara lain berupa jumlah kendaraan yang tercatat pada UPT PPD Kabupaten Sintang (BPS Kabupaten Sintang Tahun 2020 dan 2023) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51.
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2022

No.	Kecamatan	Mobil Penumpang				Bus				Truk				Sepeda Motor			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Serawai	56	63	73	83	-	-	-	-	32	16	15	26	1.261	1.381	1.639	1.852
2	Ambalau	37	41	49	47	-	-	-	-	5	1	1	1	510	545	619	705
3	Kayan Hulu	20	28	39	55	-	-	-	-	66	10	10	11	2.805	2.957	3.200	3.526
4	Sepauk	364	403	517	613	-	-	-	-	704	231	235	262	27.715	28.970	30.856	32.492
5	Tempunak	136	152	175	211	-	-	-	1	350	144	153	154	15.452	16.140	17.220	18.253
6	Sungai Tebelian	555	607	693	776	4	4	-	6	908	519	535	556	22.590	23.344	24.776	26.295
7	Sintang	4.454	4.643	5.009	5.360	37	44	7	43	3.642	1.274	1.241	1.307	73.828	75.887	78.694	81.651
8	Dedai	260	285	333	375	1	1	-	1	432	122	120	119	15.785	16.308	17.224	17.985
9	Kayan Hilir	76	81	97	115	-	-	-	-	170	49	47	52	7.218	7.513	8.054	8.726
10	Kelam Permai	161	181	208	238	-	-	-	-	253	100	104	112	8.624	8.991	9.539	10.122
11	Binjai Hulu	180	191	215	249	-	-	-	-	288	113	114	129	7.701	8.071	8.737	9.387
12	Ketungau Hilir	25	28	32	45	-	-	-	1	166	66	71	82	5.973	6.397	7.340	8.295
13	Ketungau Tengah	23	25	27	33	-	-	-	-	195	50	50	45	4.170	4.489	5.088	5.746
14	Ketungau Hulu	19	27	37	211	1	1	-	1	136	54	75	154	2.308	2.521	2.938	18.253
JUMLAH		**6.366**	**6.755**	**7.504**	**8.251**	**43**	**50**	**7**	**53**	**7.347**	**2.749**	**2.771**	**2.953**	**195.940**	**4.950**	**21.924**	**228.305**

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2024

2.3.3.5. Irigasi

➢ **Kondisi Sumber Daya Air**

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

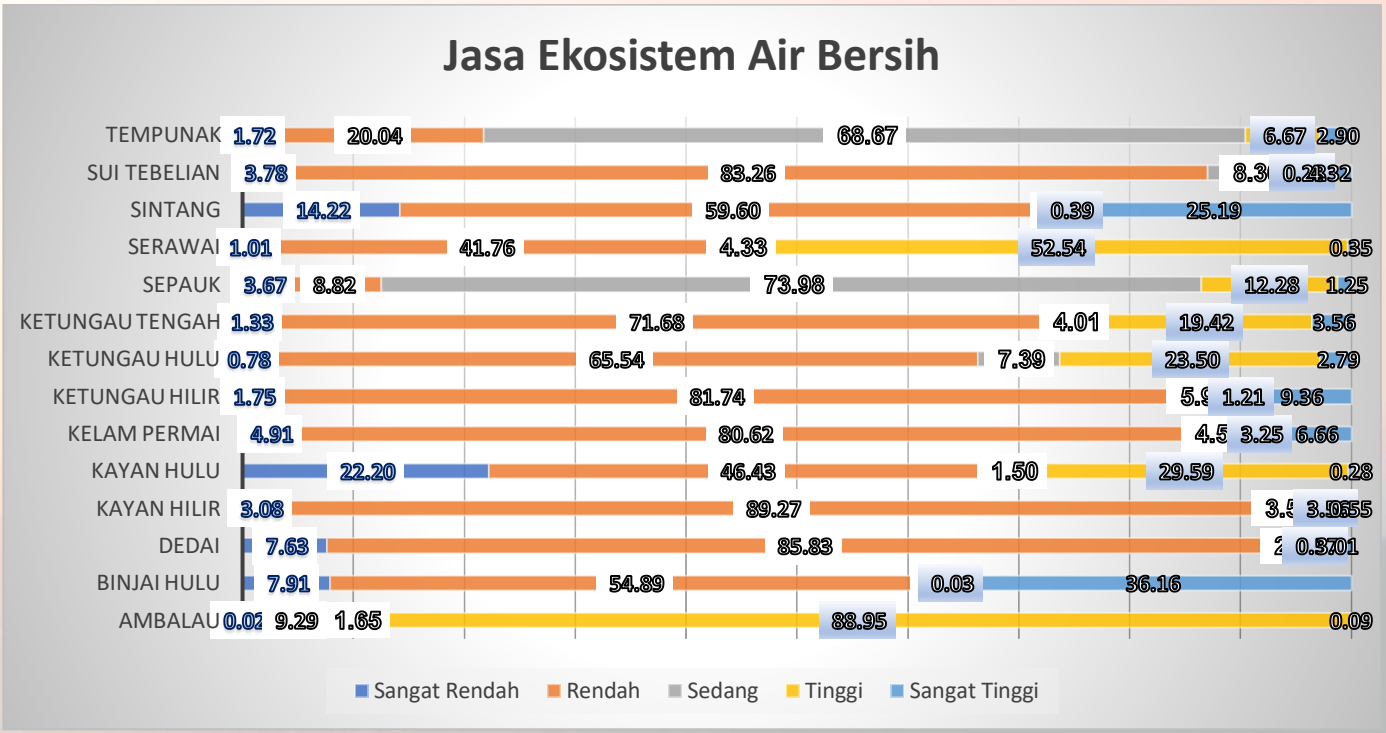
Manusia membutuhkan antara 20-50 liter air perharinya untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya mulai dari minum, memasak, hingga mandi. Lahan gambut sebagai lahan basah menjadi wilayah yang kaya akan air tawar mampu menampung air hujan hingga dapat dimanfaatkan manusia bahkan membantu peresapan air ke dalam tanah sebagai cadangan air bersih di dalam tanah bagi manusia. Proses inilah yang disediakan oleh alam sebagai jasa ekositem sebagai jasa pemurnian air bersih. Gambar 2.9 menunjukan bahwa setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang memiliki distribusi kategori yang merata.

TABEL 2.52.
DISTRIBUSI DAN LUAS JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN AIR DI KABUPATEN SINTANG

Kecamatan	Jasa Ekosistem Air Bersih (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	0,02	9,29	1,65	88,95	0,09	100
Binjai Hulu	7,91	54,89	1,02	0,03	36,16	100
Dedai	7,63	85,83	2,96	0,57	3,01	100
Kayan Hilir	3,08	89,27	3,54	3,56	0,55	100
Kayan Hulu	22,20	46,43	1,50	29,59	0,28	100
Kelam Permai	4,91	80,62	4,56	3,25	6,66	100
Ketungau Hilir	1,75	81,74	5,94	1,21	9,36	100
Ketungau Hulu	0,78	65,54	7,39	23,50	2,79	100
Ketungau Tengah	1,33	71,68	4,01	19,42	3,56	100
Sepauk	3,67	8,82	73,98	12,28	1,25	100
Serawai	1,01	41,76	4,33	52,54	0,35	100
Sintang	14,22	59,60	0,59	0,39	25,19	100

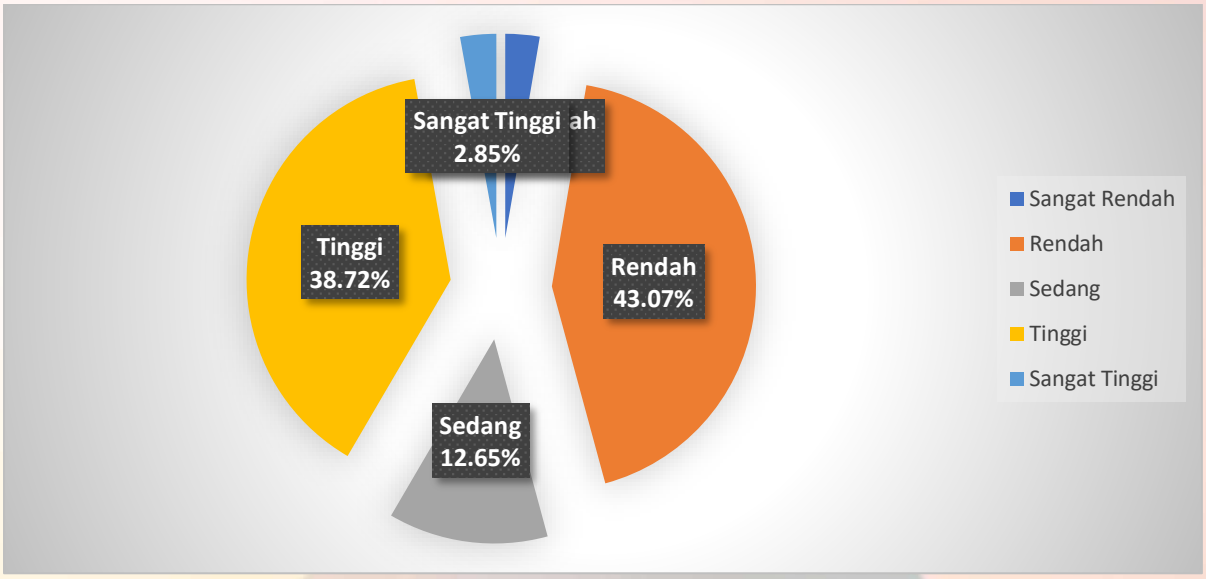
Kecamatan	Jasa Ekosistem Air Bersih (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Sui Tebelian	3,78	83,26	8,36	0,28	4,32	100
Tempunak	1,72	20,04	68,67	6,67	2,90	100
Kab. Sintang	**2,71**	**43,07**	**12,65**	**38,72**	**2,85**	**100**

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, 2019



GAMBAR 2.9
INDEKS EKOSISTEM JASA PENYEDIAAN AIR BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan informasi pada Tabel 2.52 dan Gambar 2.10, menunjukan bahwa penyediaan jasa air bersih di Kabupaten Sintang yang termasuk dalam kategori rendah (43%) dan tinggi (38%) dari total luas wilayah. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Sintang belum merata. Hal ini ditunjukkan pada sembilan kecamatan yang terklasifikasi sebagai daya dukung penyedian airnya rendah yaitu Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, dan Sintang. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% kecamatan di Kabupaten Sintang memiliki permasalahan dalam penyediaan air bersih.



GAMBAR 2.10 PROPORSI LUAS TINGKAT JASA PENYEDIAAN AIR BERSIH KABUPATEN SINTANG

Dukungan kondisi ekoregion berupa tutupan lahan berhutan dan gambut yang semakin berkurang membuat persediaan air pada beberapa kecamatan sangat rendah, sedangkan di musim penghujan rentan terjadi banjir. Faktor lain yang juga mempengaruhi ketersediaan air adalah tegakan pohon, kualitas dan jenis tanah, serta iklim.

Sumber daya air yang terdiri dari air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.





Pada aspek pembangunan infrastruktur terdapat pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum pada dokumen RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036 antara lain berupa:

a. Pemeliharaan dan perluasan jaringan irigasi;
b. Pengembangan waduk-wasuk penampungan air baku baru untuk penyediaan irigasi permukaan dan irigasi rawa lebak dan air minum;
c. Pemantapan dan pengembangan daerah irigasi meliputi bendung/embung, daerah irigasi; dan
d. Pemantapan dan pengembangan sistem pengendalian banjir dan pengamanan sungai.

Indeks kondisi operasional dan pemeliharaan Jaringan irigasi serta Kondisi Jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53.
Indeks Kondisi Prasarana Fisik dan Sarana serta dan Kondisi Jaringan Irigasi

Tahun	Indeks Kondisi Op. Jaringan Irigasi (%)		Kondisi Jaringan Irigasi (B/(B+RR+RS+RB); %			
	Prasarana Fisik	Sarana Penunjang	Bangunan Utama	Jar. Irigasi Primer	Jar. Irigasi Sekunder	Jar. Irigasi Pembuangan
2015	45	15	24.05	3.80	0.00	1.27
2016	45	15	31.65	3.80	0.00	2.53
2017	45	15	31.65	3.80	0.00	2.53
2018	45	15	50.63	21.52	32.91	13.92
2019	45	15	50.63	21.52	32.91	13.92

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2021

Tabel 2.54.
Areal Tedampak Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Sintang Tahun 2015 - 2019

Tahun	Luas Areal (ha)	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)							
		Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
2015	10,529	4,336	**41.181**	1,669	**15.851**	1,552	**14.740**	2,972	**28.227**
2016	10,529	4,963	**47.136**	1,594	**15.139**	1,448	**13.752**	2,524	**23.972**
2017	10,529	4,963	**47.136**	1,594	**15.139**	1,448	**13.752**	2,524	**23.972**
2018	10,529	6,181	**58.705**	1,452	**13.790**	1,251	**11.881**	1,645	**15.624**
2019	10,529	6,181	**58.705**	1,452	**13.790**	1,251	**11.881**	1,645	**15.624**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2021

2.3.3.6. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan Kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Hal ini sebagaimana yang di nyatakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1.

Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi jumlah rumah tak layak huni, persentase pengguna air bersih, sanitasi dan penduduk berakses air minum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55.
Kondisi Perumahan Permukiman di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023

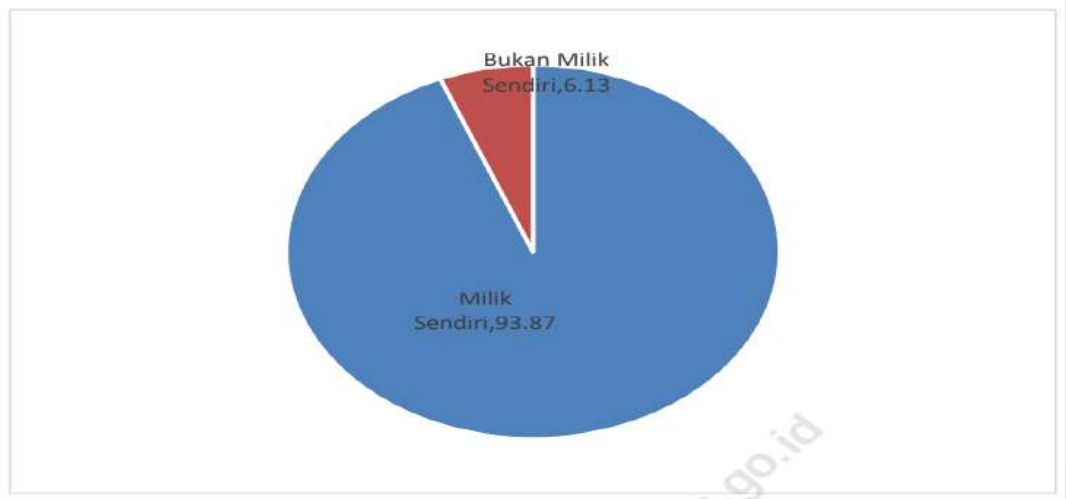
No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Rumah Tak Layak Huni	%	5.685	3.920	9.103	9.040
2	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan	%	14,92	29.59	24,75	21.761
3	Rumah Tangga Bersanitasi	%	65,50	75,31	67,67	68,56
4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	39,59	45,79	47,42	51,13
5	Jumlah Konsumen Yang Menggunakan Air Bersih Yang Diproduksi Oleh PDAM	Org	9.854	9.941	11.439	13.500

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sintang, Tahun 2024

Menurut tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan rumah tak layak huni di Kabupaten Sintang yaitu sebesar 9.040 rumah serta rumah tangga bersanitasi mengalami Peningkatan sebesar 68,56% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 67,67 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada tahun 2021, Kabupaten Sintang mengalami bencana banjir bandang yang mengakibatkan rusaknya rumah penduduk. Meski begitu, jumlah konsumen yang menggunakan air bersih yang diproduksi oleh PDAM di Kabupaten Sintang pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu 13.500 pengguna.

Berdasarkan dokumen indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Sintang tahun 2023 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, pada tahun 2023 persentase rumah tangga di Kabupaten Sintang yang memiliki rumah sendiri mencapai 93,87 persen.

Kemudian rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri (rumah bebas sewa, rumah kontrakan/sewa dan rumah dinas) mencapai 6,13 persen.



Sumber: BPS (Susenas), Tahun 2023

Gambar 2.11.
Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Sintang Tahun 2023

2.3.3.7. Ketersediaan Air Bersih

Jumlah kebutuhan air untuk tiap orang pada umumnya dari tahun ke tahun akan semakin meningkat, yang disebabkan oleh (i) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih untuk kesehatan, (ii) meningkatnya kebutuhan air untuk pemakaian yang semakin beragam.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan, kebutuhan pangan dan air bersih selalu bersamaan bahkan air lebih banyak dibutuhkan. Sehingga ketersediaannya menjadi penting sebagai *recharge* area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Kesehata RI Nomor : 41 6/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

Jumlah pelanggan air bersih di Kabupaten Sintang berdasarkan jenis atau golongan pelanggan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56.
Jumlah Pelanggan Air Bersih Berdasarkan Jenis Pelanggan Tahun 2017-2023

No.	Jenis Pelanggan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Tangga	5.768	6.083	6.840	9.021	9.061	10.498	12.380
2	S o s i a l	93	99	111	114	115	123	127
3	Kantor Pemerintah	127	134	154	179	175	175	174
4	Niaga Besar	1	3	8	5	5	5	5
5	Niaga Kecil	431	449	515	535	585	638	663
6	I n d u s t r i	1	-	-	-	-	-	-
7	Hidran air				-	-	-	-
Jumlah		**6.421**	**6.768**	**7.628**	**9.854**	**9.941**	**11.439**	**13.349**

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 - 2024

Sedangkan jumlah pelanggan dan volume air yang disalurkan menurut sebaran lokasi, daerah kecamatan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57.
Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan
Menurut Lokasi di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2023

No.	Lokasi	Pelanggan				Air Disalurkan (m^3)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Sintang Pusat	1.307	1.328	1.382	1.681	284.034	282.284	281.185	294.164
2	SPL Baning1	2.774	2.876	3.236	3.737	554.240	577.674	653.676	702.348
3	Kapuas Kanan Hulu	1.211	1.216	1.356	1.494	237.720	233.770	232.286	241.883
4	Kapuas Kanan Hilir	537	520	555	632	104.065	104.452	101.256	103.360
5	Sepauk	522	520	636	708	77.540	83.744	86.774	89.460
6	Mengkurai	381	371	389	485	79.970	66.901	61.727	81.443
7	Tempunak	217	208	224	233	26.087	28.798	26.988	30.398
8	Merakai	502	472	509	567	81.120	63.688	64.349	69.283
9	Senaning	154	157	207	233	14.909	15.494	16.198	20.009
10	Sungai Ringin	800	896	1.168	1.508	109.515	149.279	182.923	245.440
11	Dedai	234	236	260	256	23.241	31.474	29.767	29.234
12	Nanga Mau	267	231	262	284	28.711	30.877	32.772	35.609
13	Serawai2	938	944	925	1.023	60.014	130.025	103.241	99.963
14	Kelam Permai	-	-	330	546		-	1.405	30.752
Jumlah		**9.844**	**9.975**	**11.439**	**13.387**	**1.681.166**	**1.798.460**	**1.874.547**	**2.073.346**

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2021 - 2024

Tabel 2.58.
Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2023

No.	Lokasi	Pelanggan				Air Disalurkan (m^3)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Serawai	938	944	925	1.23	60.014	130.025	103.241	99.963

No.	Lokasi	Pelanggan				Air Disalurkan (m^3)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sepauk	522	520	636	708	77,540	83.744	86.774	89.460
5	Tempunak	217	208	224	233	26,087	28.798	26.988	30.398
6	Sungai Tebelian	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sintang	7.010	7.207	8.086	9.537	1.369.544	1.414.360	1.513.053	1.668.638
8	Dedai	234	236	260	256	23.241	31.474	29.767	29.234
9	Kayan Hilir	267	231	262	284	28.711	30.077	32.772	35.609
10	Kelam Permai	-	-	330	546	-	-	1.405	30.752
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ketungau Tengah	502	472	509	567	81.120	63.688	64.349	69.283
14	Ketungau Hulu	154	157	207	233	14.909	15.494	16.198	20.009
Jumlah		**9.844**	**9.975**	**11.439**	**13.387**	**1.681.166**	**1.797.660**	**1.874.547**	**2.073.346**

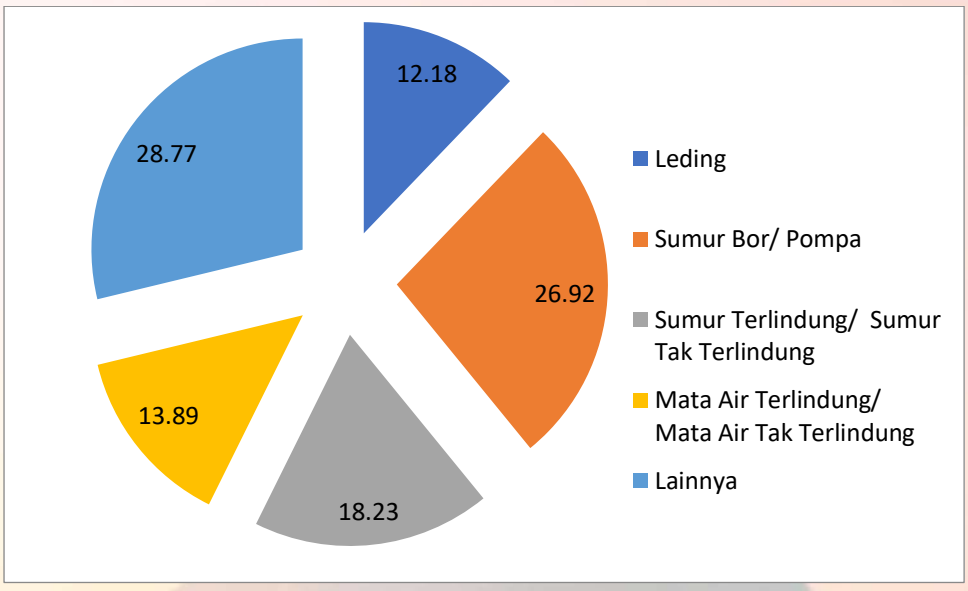
Sumber: BPS; Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2021 - 2024

Tabel 2.59.
Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih
di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020

No	Jumlah dan Prosentase RT	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelanggan	7.423	9.854	9.941	11.439	13.349
2	Jumlah Rumah Tangga	92.553	93.375	108.086	105.636	136.129
3	% Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih	8,02	10,55	9,20	10,83	9,81

Sumber: Perumda Tirta Senentang, Tahun 2021

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Sintang dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2023, dijelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat 28,77 persen sumber air yang digunakan untuk mandi/cuci/dan lain-lain yang berasal dari air permukaan (Sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan dan lain-lain.



Sumber: BPS (Susenas), Maret Tahun 2023

Gambar 2.12.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/DLL di Kabupaten Sintang Tahun 2023

2.3.3.8. Fasilitas Listrik

Terdapat tiga parameter penting pada sisi supply dari fasilitas listrik yaitu daya terpasang dan produksi dan distribusi listrik. Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang.

Penyediaan akses listrik merupakan salah satu program untuk menutup kesenjangan antar wilayah. Penyediaan akses listrik juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas energi yang berkualitas dan terjangkau. Perkembangan penyediaan pada sektor energi khususnya kelistrikan dapat diketahui dari data banyaknya pelanggan listrik PLN di wilayah Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2023, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sintang adalah sebanyak 93.954 KK, dimana jumlah ini meningkat dari konsumen pengguna listrik di tahun 2022 yaitu sebanyak 85.024 konsumen atau meningkat sebesar 7,69 persen.

Tabel 2.60.
Rasio Elektrifikasi

KABUPATEN	RASIO ELEKTRIFIKASI S.D. 2022 dan 2023					
	2022			2023		
	JML RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA PLN	PERSENTASE ELEKTRIFIKASI	JML RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA PLN	PERSENTASE ELEKTRIFIKASI
SINTANG	116.227	85.024	73,15%	116.227	93.954	80,84%

Tabel 2.61.
Rasio Desa Berlistrik

KABUPATEN	RASIO DESA BERLISTRIK 2022 DAN 2023						
	2022			2023			% NAIK/TURUN
	JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK	PERSENTASE ELEKTRIFIKASI DESA	JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK	PERSENTASE ELEKTRIFIKASI DESA	
SINTANG	406	239	58,87%	406	284	69,95	11,08%



Sumber: PT. PLN (Persero) Wilayah V Cabang Sanggau Ranting Sintang

Grafik 2.11.
Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2023

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Beberapa hal yang patut didorong dalam upaya meningkatkan PDRB, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan PDRB per Kapita di Kabupaten Sintang adalah melalui investasi. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah, Kabupaten Sintang secara

terus menerus berusaha untuk meningkatkan realisasi investasi melalui PMDN dan PMA. Secara umum, dalam kurun waktu 2012-2023 terjadi kenaikan jumlah realisasi investasi, baik PMDN maupun PMA. Realisasi investasi PMDN mengalami kenaikan relatif tinggi selama tahun 2012-2017, yakni rata-rata 25,86% per tahun. Sedangkan realisasi investasi PMA mengalami kenaikan relatif tinggi selama tahun 2012-2017, yakni rata-rata 22,84% per tahun.

Tabel 2.62.
Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sintang, Tahun 2012-2023

Tahun	Realisasi Investasi			
	PMDN (Juta Rp)	Peningkatan (%)	PMA (US $ Ribu)	Peningkatan (%)
2012	1.781.727,00	--	60.697,00	--
2013	2.009.905,00	12,81	81.756,00	34,70
2014	3.544.158,00	76,33	93.574,00	14,46
2015	4.420.406,00	24,72	112.065,00	19,76
2016	5.273.439,00	19,30	141.581,00	26,34
2017	6.432.156,00	21,97	200.715,00	41,77
2018	688.510,00	-89,30	4.292,00	-97,86
2019	2.191.190,00	218,25	5.604,00	30,57
2020	449.873,00	-79,47	0,00	-100,00
2021	499.548,10	11,04	16.887,60	100,00
2022	572.425,70	14,59	26.909,70	59,35
2023	1.364.544,80	238,38	16.794,00	-62,40

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sintang, Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar, Tahun 2024

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Sintang juga sebagian besar diperuntukkan di sektor primer terutama perkebunan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan.



2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Politik, Pemerintahan dan Hukum

2.4.1.1 Bidang Politik

Pada level daerah, politik lokal dapat dimaknai sebagai proses interaksi antara individu dengan kelompok dalam rangka mempengaruhi dan mengambil keputusan yang tentunya berkaitan dengan kepentingan dan pembangunan daerah. Setidaknya ada tiga dasar konsepsi yang relevan dalam memahami dan memaknasi politik, yang pertama terkait dengan kekuasaan, kepemimpinan dan yang terpenting adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai negara demokratis, partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi tonggak dasar untuk melibat sejauh mana masyarakat ingin terlibat dalam pembangunan. Partisipasi politik masyarakat menjadi penting untuk menghasilkan pemimpin yang paham betul apa kebutuhan dari masyarakat.

Partisipasi pemilih juga menjadi elemen penting karena merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Partisipasi pemilih menjadi elemen penting karena merupakan syarat terpenuhinya sistem demokrasi yang berbasis kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat tidak hanya melulu melalui Pemilihan Umum, namun juga dapat berupa pengorganisasian kelompok kepentingan baik berupa LSM maupun ORMAS, dan juga aksi politik lainnya.

Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menempati urutan keenam kabupaten/kota tertinggi di Kalimantan Barat pada Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah sebanyak 304.776 orang. Dari keseluruhan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang terdaftar, persentase realisasi suara yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sintang adalah 86,48 persen, tertinggi ke-tiga di Kalimantan Barat. Capaian tersebut melebihi target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU RI pada angka 81,69 persen, dan perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan baik oleh Pemerintah Daerah, maupun pihak penyelenggara pemilu.

Tabel 2.63.
Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 di Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Indikator			Persentase	
		Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Singkawang	167.146	116.116	51.030	69,47	30,53
2	Sambas	436.963	310.879	126.084	71,15	28,85
3	Ketapang	390.269	296.515	93.754	75,98	24,02
4	Bengkayang	183.623	140.002	43.621	76,24	23,76
5	Pontianak	479.762	373.649	106.113	77,88	22,12
6	Kayong Utara	85.054	66.433	18.621	78,11	21,89
7	Kubu Raya	438.842	346.825	92.017	79,03	20,97
8	Mempawah	195.949	156.227	39.722	79,73	20,27
9	Sanggau	343.013	273.694	69.319	79,79	20,21
10	Kapuas Hulu	183.992	151.937	32.055	82,58	17,42
11	Sekadau	154.853	129.652	25.201	83,73	16,27
12	Sintang	304.776	263.565	41.211	86,48	13,52
13	Landak	278.570	249.346	29.224	89,51	10,49
14	Melawi	163.317	148.557	14.760	90,96	9,04

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat

Partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum dari tahun 2004 hingga 2024 sudah dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan sejak kontentasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten Sintang 2009 hingga 2024 selalu mendapatkan persentase diatas 80 persen. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, tingkat partisipasi tertinggi berhasil di raih pada saat Pemilu serentak tahun 2024 dengan persentase sebesar 88,06% dengan jumlah suara yang digunakan sebanyak 284.865 suara. Pada empat kali masa Pemilihan Umum sejak 2009 sampai 2024, partisipasi tertinggi dalam pemilihan legislatif di tingkat kabupaten terjadi pada Pemilihan Legislatif 2024 dengan partisipasi pemilih yang hampir sama dengan Pemilihan Presiden yaitu sebanyak 87,75

persen. Artinya, lebih dari 4/5 masyarakat yang menjadi DPT memberikan hak suara untuk para wakil rakyat di Kabupaten Sintang.



Tabel 2.64.
Persentase Partisipasi Pemilih di Kabupaten Sintang Pada Pemilu 2004-2019

No	Jenis Pemilihan	Tahun Pelaksanaan			
		2009	2014	2019	2024
1	PPWP	83,60%	82,86%	86,70%	88,06%
2	DPRD Kab	81,80%	83,10%	86,50%	87,75%

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang terkait pemilihan Bupati Sintang yang dilaksanakan pada tahun 2015, partisipasi pemilih yang menggunakan hak suara sebesar 75,66% dengan pengguna hak pilih sebanyak 229.685 dari total keseluruhan jumlah DPT 303.591 pemilih. Lima tahun kemudian pada Pilkada 2020, terjadi peningkatan partisipasi pemilih sebesar 7,09% sehingga tingkat persentasenya naik menjadi 82,75% (234.231 suara). Dari kedua periode pemilihan Bupati Sintang ini, tingkat ketidakikutsertaan masyarakat dalam memilih calon bupati masih berada

di atas 15 persen. Hal ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang agar kembali membuat tren positif dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2024 nanti.

Tabel 2.65.
Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Sintang (2015-2020)

No	Indikator	Tahun	
		2015	2020
1	Jumlah DPT	303.591	293.942
2	Pengguna Hak Pilih	229.685 (75,66%)	243.231 (82,75%)
3	Tidak Gunakan Hak Pilih	73.906	50.711

Sumber: KPU dan BPS Kabupaten Sintang

2.4.1.2. Bidang Pemerintahan

Secara lebih spefisik, khususnya di Indonesia terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintahan suatu daerah dijalankan secara baik atau tidak. Mulai dari Opini BPK, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pelayanan Publik (PP), Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat hingga Persentase Perusahaan yang Melaksanakan CSR. Indikator-indikator inilah yang nantinya juga berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan rancangan pembangunan dan perencanaan kebijakan.

A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat dengan tujuan untuk menyajikan data terkait penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh pemda setiap tahun. Dari laporan ini, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan memeriksa dan memberikan pendapat/opini terkait kewajaran penggunaan anggaran dalam laporan keuangan melalui empat jenis opini yaitu TW (Tidak Wajar), TMT (Tidak Memberikan Pendapat), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai opini dengan predikat terbaik yang selalu menjadi target dari setiap pemerintahan daerah.

Menurut data yang bersumber BPS dan RPJMD Kabupaten Sintang terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dari tahun 2007 sampai 2011 mendapatkan opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selama kurun waktu empat tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan penggunaan anggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kelengkapan alat bukti penggunaan anggaran, sampai dengan efektivitas sistem pengendalian intern yang dijadikan sebagai syarat penilaian opini BPK belum dicapai secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sehingga masih memunculkan ketidakwajaran pada beberapa aspek penggunaan anggaran.

Tabel 2.66.
Capaian Opini BPK Pemerintah Kabupaten Sintang (2010-2023)

No	Tahun	Opini BPK
1	2010	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2	2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	2023	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang

Berdasarkan tabel capain opini BPK di atas, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sintang sudah berhasil memperoleh pendapat/opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni. Predikat terbaik dalam pelaporan keuangan ini sebenarnya sudah dicapai oleh Pemkab Sintang sejak tahun 2012 sampai 2014 ketika mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang disertai dengan Paragraf Penjelasan (WTP PP). Barulah pada 2015 hingga tahun anggaran 2022, BPK selalu memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang karena telah menyajikan data keuangan secara wajar baik dalam hal realisasi anggaran, arus kas yang dimiliki, serta hasil pendapatan yang diperoleh daerah.

B. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang berkualitas, pemerintah perlu memperhatikan kinerja setiap instansi pemerintah dari tahun ke tahun. Indeks SAKIP merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas dengan menilai kinerja instansi pemerintah, untuk itu setiap instansi pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan. Pada tahun 2015 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sintang mendapat nilai 51,71 dengan predikat CC (Cukup). Predikat yang didapat oleh Kabupaten Sintang ini

menunjukkan bahwa instansi Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2015 sudah cukup baik dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Tabel 2.67.
Capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sintang (2010-2022)

Indikator	Tahun Realisasi			
	2010	2015	2020	2023
Indeks SAKIP	N/A	CC	CC	B

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Indeks SAKIP terdiri dari 6 indikator yang dinilai agar dapat hasil capaian Indeks SAKIP. Sejak diberlakukannya penilaian Indeks SAKIP pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja setiap instansi yang ada di Kabupaten Sintang. Setelah lima tahun berselang, hasil capaian Indeks SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil mempertahankan predikat CC (Cukup). Pemerintah Kabupaten Sintang belum berhasil melakukan perbaikan pada tahun 2022, khususnya akuntabilitas kinerja setiap instansi yang ada di Kabupaten Sintang. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks SAKIP yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB untuk Pemerintah Kabupaten Sintang masih mendapat predikat CC (Cukup). Namun perbaikan terus dilakukan hingga akhirnya di tahun 2023 Kabupeten Sintang berhasil naik peringkat menjadi B. Hal ini tentunya menjadi momentum titik balik peningkatan kualitas Pemerintahan Daerah.

C. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Keberadaan Birokrasi di Indonesia ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat, sehingga birokrasi selalu menjadi tolak ukur dalam penilaian kualitas suatu negara oleh masyarakat itu sendiri. Kebutuhan masyarakat yang beragam dan semakin kompleks menuntut pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi khususnya dalam tata kelola agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan. Indeks reformasi birokrasi hadir untuk menilai peningkatan yang terjadi pada suatu birokasi.

Tabel 2.68.
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Sintang (2010-2023)

Indikator	Tahun Realisasi			
	2010	2015	2020	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	**N/A**	**N/A**	**CC (Cukup)**	**B (Baik)**

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan oleh KEMENPAN-RB sejak tahun 2014. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 memperoleh predikat CC (Cukup) yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Meskipun predikat CC (Cukup) sudah bagus, namun predikat tersebut kurang memuaskan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sintang belum mampu mencapai predikat baik. Hal ini dibuktikan dengan evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB menyatakan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang tetap mendapat predikat CC (Cukup) pada tahun 2022. Hasil evaluasi ini membuat pemerintah lebih gencar melakukan perbaikan tata kelola hingga pada tahun 2023 Kabupaten Sintang memperoleh predikat B (baik). Walaupun belum mencapai target RPJMD setidaknya ada progres perbaikan.

D. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui perhitungan statistik berdasarkan pada aspek kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dasar hukum pelaksanaan penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Indonesia adalah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 2.69.
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sintang (2010-2022)

Indeks Profesionalitas ASN	Tahun Realisasi				
	2010	2015	2020	2021	2022
Nilai	N/A	N/A	N/A	50,33	51,95
Predikat	N/A	N/A	N/A	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan atas penilaian Indeks Profesionalitas ASN khususnya di Kabupaten Sintang dapat diketahui pada tahun anggaran 2021. Pada tahun tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mendapatkan predikat "Sangat Rendah" karena nilai yang diperoleh hanya sampai pada skor 50,33 dari rentang skor 0-100. Untuk satu tahun sebelum dan setelahnya yaitu 2020 dan 2022 tidak dijelaskan secara spesifik berapa skor yang

dihasilkan dari penilaian kualitas ASN yang ada di Kabupaten Sintang sehingga tidak diketahui data tentang IP-ASN di kedua tahun tersebut dan untuk penilaian tahun 2023 sampai diterbitkannya dokumen RPJPD ini angka penilaiannya belum tersedia. Pemerintah Sintang dapat berupaya meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun-tahun mendatang sehingga upaya optimalisasi penilaian kinerja pegawai pada organisasi menjadi lebih objektif.

E. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyelenggaraan layanan pemerintahan dengan menggunakan basis elektronik atau yang dikenal dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dianggap sebagai langkah revolusioner dalam melakukan reformasi birokasi untuk mewujudkan konsep pemerintahan yang baik (*good governance*). SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan juga terpadu. Penggunaan teknologi informasi ini dipakai dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seluruh organisasi pemerintahan baik dari kementerian, lembaga hingga dan instansi pemerintahan daerah diharuskan untuk siap menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini sebagai wujud reformasi birokrasi di dalam proses kerja yang lebih efektif dan efisien serta meningkatknya kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.70.
Indeks SPBE Kabupaten Sintang (2010-2023)

No	Indeks SPBE	Tahun Realisasi					
		2010	2015	2020	2021	2022	2023
1	Nilai	N/A	N/A	N/A	1,51	1,03	1,89
2	Predikat	N/A	N/A	N/A	Kurang	Kurang	Cukup

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai bagian dari pemerintah daerah yang mendapat mandat untuk menjalankan SPBE juga melakukan hal serupa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di dalam hasil evaluasi tersebut, khususnya pada tahun 2021, 2022 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Sintang mendapatkan nilai 1,51 untuk tahun 2021 dan 1,03 di tahun anggaran 2022 serta 1,89 ditahun 2023. Terjadi peningkatan skor sebesar 0,86 yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sintang. Walaupun terjadi peningkatan namun hal ini masih jauh dari target penyelenggaraan SPBE guna menciptakan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang tergitalisasi.

F. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Salah satu fungsi pemerintahan adalah memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat sehingga organisasi penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan. Tuntutan tersebut membuat pemerintah harus menjaga kualitas pelayanan publik agar tidak menurun. Dalam menjaga kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) melakukan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP).

Tabel 2.71.
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sintang

No	Indeks Pelayanan Publik	Tahun Realisasi			
		2010	2015	2020	2023
1	Predikat	N/A	N/A	B-	B-

Sumber : KEMENPAN-RB

Evaluasi pelayanan publik mulai dilakukan pada tahun 2017 hingga sekarang tetap dilakukan. Dalam evaluasi pelayanan publik terdapat 6 aspek yang harus dinilai agar didapat Indeks Pelayanan Publik (IPP) yakni aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan aspek inovasi pelayanan. Penyelenggaraan evaluasi pelayanan publik pada tahun 2020 di Pemerintah Kabupaten Sintang mendapat hasil B- (baik dengan catatan). Hal yang sama juga diperoleh Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2023 dengan mendapatkan skor Indeks Pelayanan Publik yaitu B-. Tentunya dengan hasil ini menjadi sesuatu yang baik pada Pemerintah Kabupaten Sintang karena berhasil mempertahankan predikat IPP Baik walaupun dengan beberapa catatan seperti yang didapatkan di tahun-tahun sebelumnya.

G. Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan publik agar masyarakat sebagai penerima pelayanan merasa puas. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, pengertian survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Tabel 2.72.
Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sintang

No	Survei Kepuasan Masyarakat	Tahun Realisasi			
		2010	2015	2020	2022
1	Predikat	N/A	N/A	B	B

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat mulai dilakukan pada tahun 2017, sehingga data survei kepuasan masyarakat pada tahun 2010 dan 2015 tidak dapat ditemukan. Dalam survei kepuasan masyarakat terdapat 9 indikator penilaian yaitu persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan. Hasil survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 tergolong bagus karena mendapat predikat B (baik). Kemudian survei kepuasan masyarakat kembali dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil yang sama pada tahun 2020 yaitu mendapat predikat B (baik). Meskipun tidak mengalami peningkatan, predikat yang didapat juga termasuk prestasi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang karena berhasil menjaga kualitas pelayanan sehingga masyarakat tetap puas terhadap pelayanan yang diterima.

H. Indeks Inovasi Daerah

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan inovasi daerah melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018, pengertian indeks inovasi daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

Tabel 2.73.
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2023

Tahun Capaian	Skor Indeks	Predikat
2010	Na	N/A
2015	Na	N/A
2020	45	Kurang Inovatif
2023	36,22	Inovatif

Sumber: KEMENDAGRI

Terkait Indeks Inovasi Daerah tahun 2020, Kabupaten Sintang mendapatkan predikat kurang inovatif dengan skor indeks sebesar 45. Sebagai informasi pada tahun 2021, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengubah aturan nilai dalam skor indeks inovasi menjadi hanya dalam rentang 0–100. Pada tahun 2022, Kabupaten Sintang kembali mendapatkan predikat kurang inovatif seperti pada tahun 2020 dengan hanya memperoleh skor indeks sebesar 9,50. Padahal satu tahun sebelumnya, tepat setelah perubahan aturan nilai, Kabupaten Sintang berhasil memperoleh skor sebesar 41,57 sehingga menyandang salah satu kabupaten inovatif di Indonesia. Penurunan skor Indeks Inovasi Daerah ini seharusnya dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera melakukan strategi percepatan inovasi agar kembali mendapatkan predikat kabupaten kota yang inovatif atau bahkan sangat inovatif pada tahun-tahun mendatang.

I. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sintang

Indeks Desa Membangun terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 desa yang terdata di Kabupaten Sintang berjumlah 391 desa dan 16

kelurahan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mulai diberlakukan sejak 2016, desa diklasifikasikan menjadi beberapa 5 status, yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Kabupaten Sintang sendiri pada kondisi awal yakni tahun 2016 terdapat 213 desa sangat tertinggal, 147 desa tertinggal, 30 desa berkembang, 1 desa maju, dan belum ada desa mandiri.

Tabel 2.74.
Klasifikasi Desa di Kabupaten Sintang

No	Klasifikasi Desa	Tahun					
		Realisasi					
		2005	2010	2015	2020	2023	
1	Desa Mandiri	*	*	*	44	146	
2	Desa Maju	*	*	*	68	110	
3	Desa Berkembang	*	*	*	207	134	
4	Desa Tertinggal	*	*	*	72	0	
5	Desa Sangat Tertinggal	*	*	*	0	0	
Jumlah					**391**	**391**	

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tingginya angka desa sangat tertinggal membuat Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar 3 komponen yang terdapat dalam Indeks Desa Membangun dapat terpenuhi. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan selama 5 tahun sehingga pada kondisi akhir RPJMD yaitu tahun 2020 sudah tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal, desa tertinggal berkurang menjadi 72 desa tertinggal, meningkatnya jumlah desa berkembang dari 29 menjadi 207 desa, jumlah desa maju naik menjadi 68 desa, dan terdapat 44 desa berstatus desa mandiri.

Peningkatan Indeks Desa Membangun pada RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2020 merupakan sebuah prestasi karena berhasil membuat Kabupaten Sintang tidak memiliki desa yang berstatus sangat tertinggal lagi. Persentase status desa mandiri pada tahun 2020 dengan target awal 70,59% sudah terealisasi sebesar 64,71% sehingga tingkat keberhasilan yang dicapai dalam peningkatan status desa mandiri berjumlah 91,67%. Keberhasilan ini tentunya menjadi motivasi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus membangun desa. Pada RPJMD Kabupaten Sintang periode 2021–2026 Pemerintah Kabupaten Sintang berencana membangun desa dengan target tahun 2025 akan tercapai 161 desa mandiri, 130 desa maju, 100 desa berkembang dan tidak ada lagi desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal.

Berdasarkan target tersebut, sehingga pada tahun 2023 dilakukan penilaian dengan hasil bahwa Kabupaten Sintang sudah mendekati target yang telah ditetapkan, dengan hasilnya pada tahun 2023 yaitu terdapat 146 desa mandiri, 110 desa maju, 124 desa berkembang, dan tidak ada lagi desa tertinggal. Dalam menunjang pencapaian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang membuat program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan.

2.4.1.3. Hukum dan HAM

Kondisi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sintang dapat ditelusuri dari beberapa indikator, antara lain adalah jumlah aparat ketertiban dan perlindungan masyarakat, jumlah sarana dan prasrana keamanan, dan jumlah kendaraan operasional. Secara umum tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Sintang, seperti laporan Polres Sintang pada tahun 2022 yang terbanyak adalah kasus curat yaitu sebanyak 36 kasus dan menurun menjadi 34 kasus di tahun 2023. Berdasarkan jenis tindak pidana di Kabupaten Sintang yang terbesar adalah Curat dan Curanmor. Berdasarkan Jenis Kelamin untuk tahun 2023, Jenis kelamin Laki-laki merupakan pelaku kriminal terbanyak yaitu 124 orang diikuti Wanita 1 orang.

Tabel 2.75.
Jumlah Tindak Pidana Terbesar Menurut Jenis Tindak Pidana di Kabupaten Sintang Tahun 2023

No	Tingkat Pidana Terbesar	2023
1	Curat	34
2	Curanmor	12
3	Penganiayaan	7
4	Minerba (PETI)	1
5	Perjudian	3
6	Pengeroyokan	2
7	Karhutla	1
8	Penggelapan	13
9	Perlindungan Anak	18
10	KDRT	3

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana tertinggi yang ada di Kabupaten Sintang adalah pencurian dengan pemberatan dan kasus pencurian kendaraan bermotor.

Baru kemudian disusul oleh tindak pidana perlindungan anak (18 kasus), penggelapan (13 kasus) dan curanmor (12 kasus).

Jika dilihat dari indikator bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Sintang Tahun 2018 sampai dengan 2023, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 3.21, jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 40.7, dan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten sebanyak 4070 orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan memperhatikan perkembangan situasi ketenteraman dan ketertiban saat ini banyaknya keluhan masyarakat berkenaan dengan aktifitas usaha Hiburan Malam, Diskotik, Permainan Ketangkasan, Karaoke dan Usaha Cafe di Kabupaten Sintang. Dalam upaya menjaga kondusifitas ketenteraman dan ketertiban di daerah maka pemerintah daerah telah melakukan penertiban atura usaha hiburan malam, diskotik, permainan ketangkasan, dan karaoke yang terkadang memicu masalah sosial dan hukum.

2.4.2. Fasilitas Umum

2.4.2.1. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Apabila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka kesejahteraan rakyat juga akan meningkat secara langsung. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan dokter.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2024, jumlah sarana Kesehatan yang tersedia pada tahun 2021 adalah Rumah Sakit Umum sebanyak 5 unit, Rumah Sakit Umum Bersalin sebanyak 1 unit, Puskesmas Rawat Inap sebanyak 20 unit, Poliklinik sebanyak 11 unit, Puskesmas sebanyak 21 Unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 98 unit, Posyandu sebanyak 513 unit dan Apotek sebanyak 15 unit.

Tabel 2.76.
Jumlah Rumah Sakit (Unit) Menurut Kecamatan Tahun 2016 - 2023

No.	Kecamatan	Rumah Sakit (Unit)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Serawai	-	-	-	-	-	1	1	1
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sepauk	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tempunak	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sungai Tebelian	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sintang	2	2	3	3	3	4	4	4
8	Dedai	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kayan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelam Permai	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ketungau Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**	**5**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2024 (diolah)

Tabel 2.77.
Jumlah Rumah Sakit Bersalin (Unit) Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2023

No.	Kecamatan	Rumah Sakit Bersalin (Unit)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Serawai	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sepauk	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tempunak	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sungai Tebelian	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sintang	-	-	-	1	1	1	1	1
8	Dedai	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kayan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelam Permai	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ketungau Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2024 (diolah)

Tabel 2.78.
Jumlah Poliklinik (Unit) Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2022

No.	Kecamatan	Poliklinik (Unit)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Serawai	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	1	1	1	1	1	1
4	Sepauk	-	-	1	1	1	1	1	1
5	Tempunak	-	-	-	3	2	1	1	1
6	Sungai Tebelian	-	-	1	1	-	-	-	-
7	Sintang	-	-	2	2	3	4	4	4
8	Dedai	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kayan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelam Permai	-	-	1	2	1	1	1	1
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	1	1	1	-	-	-
13	Ketungau Tengah	-	-	4	2	3	3	3	3
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		**-**	**-**	**11**	**14**	**14**	**11**	**11**	**11**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2024 (diolah)

Tabel 2.79.
Jumlah Puskesmas (Unit) Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2023

No.	Kecamatan	Puskesmas (Unit)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Serawai	1	1	1	2	1	1	1	1
2	Ambalau	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kayan Hulu	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Sepauk	1	1	1	1	2	2	2	2
5	Tempunak	2	2	2	4	1	2	2	2
6	Sungai Tebelian	1	1	2	1	1	1	1	1
7	Sintang	3	3	4	3	3	3	3	3
8	Dedai	2	2	2	2	3	2	2	2
9	Kayan Hilir	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Kelam Permai	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Binjai Hulu	1	1	2	1	1	1	1	1
12	Ketungau Hilir	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Ketungau Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Ketungau Hulu	1	1	2	1	1	1	1	1
Jumlah Total		**20**	**20**	**24**	**23**	**21**	**21**	**21**	**21**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2023 (diolah)

Tabel 2.80.
Jumlah Puskesmas Pembantu (Unit) Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2023

No.	Kecamatan	Puskesmas Pembantu (Unit)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023
1	Serawai	-	-	6	3	8	4	38
2	Ambalau	-	-	8	2	8	13	33
3	Kayan Hulu	-	-	9	6	8	12	9
4	Sepauk	-	-	19	13	16	7	40
5	Tempunak	-	-	10	6	8	6	14
6	Sungai Tebelian	-	-	11	12	14	15	21
7	Sintang	-	-	2	2	2	1	1
8	Dedai	-	-	8	7	9	8	5
9	Kayan Hilir	-	-	2		1	4	7
10	Kelam Permai	-	-	3	3	3	4	9
11	Binjai Hulu	-	-	2	-	1	2	2
12	Ketungau Hilir	-	-	5	7	5	8	7
13	Ketungau Tengah	-	-	15	14	13	5	10
14	Ketungau Hulu	-	-	6	6	7	9	12
Jumlah Total		**-**	**-**	**106**	**86**	**103**	**98**	**208**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2023

Tabel 2.81.
Jumlah Apotek (Unit) Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2023

No.	Kecamatan	Apotek (Unit)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023
1	Serawai	-	-	-	1	1	1	1
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-	-	-
4	Sepauk	-	-	2	2	2	1	1
5	Tempunak	-	-	-	-	-	-	-
6	Sungai Tebelian	-	-	1	2	2	2	2
7	Sintang	-	-	7	8	9	10	11
8	Dedai	-	-	-	-	-	-	-
9	Kayan Hilir	-	-	1	-	1	1	1
10	Kelam Permai	-	-	-	1	1	-	-
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-	-	-	-
13	Ketungau Tengah	-	-	-	1	1	-	-
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		**-**	**-**	**11**	**15**	**17**	**15**	**16**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2023



Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pada sasaran pokok dengan fokus pembangunan meningkatkan peran kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Salah satu kelembagaan lokal yang dapat mengambil peran adalah Pos Pelayanan Terpadu (posyandu). Posyandu sebagai bagian kewenangan lokal berskala desa merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi desa, sehingga Posyandu tidak hanya sebagai obyek, melainkan subyek pembangunan di desa.

Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD, yaitu wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Peran Posyandu sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi: pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan pembinaan kemasyarakatan dengan :

1. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
2. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
3. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan Pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;

4. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
5. Peningkatan kesejahteraan keluarga;dan
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Secara rinci data posyandu yang ada di Kabupaten Sintang dapat di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.82

DATA POSYANDU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024
Januari s/d Juni

NO	PUSKESMAS	JUMLAH POSYANDU	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH KADER
1	Serawai	38	38	0	193
2	Kemangai	33	33	0	236
3	Tebidah	48	48	0	250
4	Sepauk	44	33	11	272
5	Tempunak	16	16	0	161
6	Jelimpau	19	19	0	128
7	Pandan	36	18	18	251
8	Sungai Durian	21	21	0	121
9	Tanjung Puri	17	17	0	83
10	Dara Juanti	10	8	2	32
11	Dedai	23	23	0	0
12	Emparu	15	0	15	97
13	Nanga Mau	44	11	33	114
14	Kebong	20	0	20	120
15	Nanga Lebang	6	0	6	29
16	Mensiku	11	11	0	111
17	Nanga Ketungau	24	21	3	67
18	Serangas	14	14	0	102
19	Merakai	33	0	33	263
20	Senaning	33	0	33	218
KAB.SINTANG		505	331	174	2848

2.4.2.2. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan tingkat Pendidikan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada suatu bangsa. Apabila tingkat pendidikan semakin tinggi maka kualitas SDM yang ada juga akan semakin bagus. Perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sintang cukup menggembirakan. Hal ini tidak lepas dari peran serta semua pihak

baik institusi pemerintah maupun swasta. Peran serta tersebut dapat dilihat dalam hal penyediaan sarana fisik maupun non fisik yang ada.

Tabel 2.83.
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sintang
Tahun 2022 - 2023

Sarana - Prasarana Pendidikan	TK/RA		SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Sekolah (unit)	185	185	453	456	129	130	39	40
Guru (orang)	619	619	3.625	3.642	1.519	1.560	678	708
Murid (orang)	3.178	5.387	52.478	51.770	20.704	20.872	10.814	10.238

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 dan Tahun 2024

Dari data diatas dapt disimpulkan bahwa rata-rata unit sekolah baik TK, SD,SLTP dan SLTA diKabupaten Sintang mengalami penambahan yang diiringi juga dengan penambahan guru maupun jumlah siswanya.

Tabel 2.84.
Jumlah Sekolah Dasar (SD)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Serawai	29	33	29	29	29
2	Ambalau	27	27	26	28	28
3	Kayan Hulu	28	28	27	34	34
4	Sepauk	38	40	33	44	45
5	Tempunak	24	24	24	27	27
6	Sungai Tebelian	25	25	25	32	32
7	Sintang	24	25	23	36	37
8	Dedai	26	27	27	28	28
9	Kayan Hilir	26	32	32	35	35
10	Kelam Permai	24	14	15	19	19
11	Binjai Hulu	11	11	9	12	12
12	Ketungau Hilir	24	24	24	42	43
13	Ketungau Tengah	28	28	25	53	53
14	Ketungau Hulu	27	27	27	34	34
Jumlah Total		**361**	**365**	**346**	**453**	**456**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.85.
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Serawai	9	9	8	8	8
2	Ambalau	6	6	6	6	6

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Kayan Hulu	8	8	8	8	8
4	Sepauk	13	13	13	12	12
5	Tempunak	9	10	9	9	9
6	Sungai Tebelian	6	6	7	10	10
7	Sintang	12	12	12	17	17
8	Dedai	9	9	9	8	8
9	Kayan Hilir	8	10	10	10	10
10	Kelam Permai	5	6	6	6	6
11	Binjai Hulu	3	2	2	3	3
12	Ketungau Hilir	9	12	9	9	9
13	Ketungau Tengah	11	12	11	13	14
14	Ketungau Hulu	10	10	10	10	10
Jumlah Total		**118**	**125**	**120**	**129**	**130**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.86.
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Serawai	1	1	1	1	1
2	Ambalau	1	1	1	1	1
3	Kayan Hulu	2	2	2	2	2
4	Sepauk	3	3	4	3	3
5	Tempunak	3	3	3	3	3
6	Sungai Tebelian	2	2	2	2	2
7	Sintang	6	6	6	12	12
8	Dedai	2	2	2	2	2
9	Kayan Hilir	2	2	2	3	3
10	Kelam Permai	2	2	2	2	2
11	Binjai Hulu	1	1	2	2	2
12	Ketungau Hilir	2	4	2	2	2
13	Ketungau Tengah	3	3	3	3	3
14	Ketungau Hulu	1	1	1	1	2
Jumlah Total		**31**	**33**	**33**	**39**	**40**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.87.
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Serawai	1	1	1	1	1
2	Ambalau	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-
4	Sepauk	1	1	1	1	1

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Tempunak	-	-	-	-	-
6	Sungai Tebelian	3	3	3	4	4
7	Sintang	2	4	3	6	6
8	Dedai	1	1	1	1	1
9	Kayan Hilir	-	1	1	1	1
10	Kelam Permai	1	1	1	1	1
11	Binjai Hulu	1	1	1	1	1
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-	1
13	Ketungau Tengah	1	1	1	2	2
14	Ketungau Hulu	2	2	2	2	2
Jumlah Total		**12**	**15**	**14**	**20**	**21**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2024

Sedangkan kecamatan yang memiliki fasilitas gedung perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sintang di tahun 2023 adalah sebanyak 8 unit, 2 unit berada di Kecamatan Sungai Tebelian dan 6 unit di Kecamatan Sintang.

Tabel 2.88.
Jumlah Gedung Perguruan Tinggi
Di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023

Kecamatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Serawai	-	-	-	-	-
Ambalau	-	-	-	-	-
Kayan Hulu	-	-	-	-	-
Sepauk	-	-	-	-	-
Tempunak	-	-	-	-	-
Sungai Tebelian	1	1	2	2	2
Sintang	6	6	6	6	6
Dedai	-	-	-	-	-
Kayan Hilir	-	-	-	-	-
Kelam Permai	-	-	-	-	-
Binjai Hulu	-	-	-	-	-
Ketungau Hilir	-	-	-	-	-
Ketungau Tengah	-	-	-	-	-
Ketungau Hulu	-	-	-	-	-
Jumlah Total	**7**	**7**	**8**	**8**	**8**

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) Tahun 2024

2.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro), meminjamkan uang (kredit), dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan Bank Note.

Dalam upaya mendukung kegiatan perekonomian daerah, keberadaan perbankan tentu sangat strategis. Demikian pula halnya dengan perbankan di Kabupaten Sintang. Saat ini, terdapat kantor cabang Bank Pembangunan Daerah Kalbar (Bank Kalbar), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Selain perbankan, terdapat beberapa lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian, Asuransi, dan Credit Union.

2.4.2.4. Fasilitas Sarana Perdagangan

Dalam mendukung aktivitas kegiatan perekonomian daerah, keberadaan pasar akan mendorong aktifitas bisnis dan perdagangan masyarakat semakin berkembang. Ketersediaan pasar akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual berbagai produk hasil produksinya.

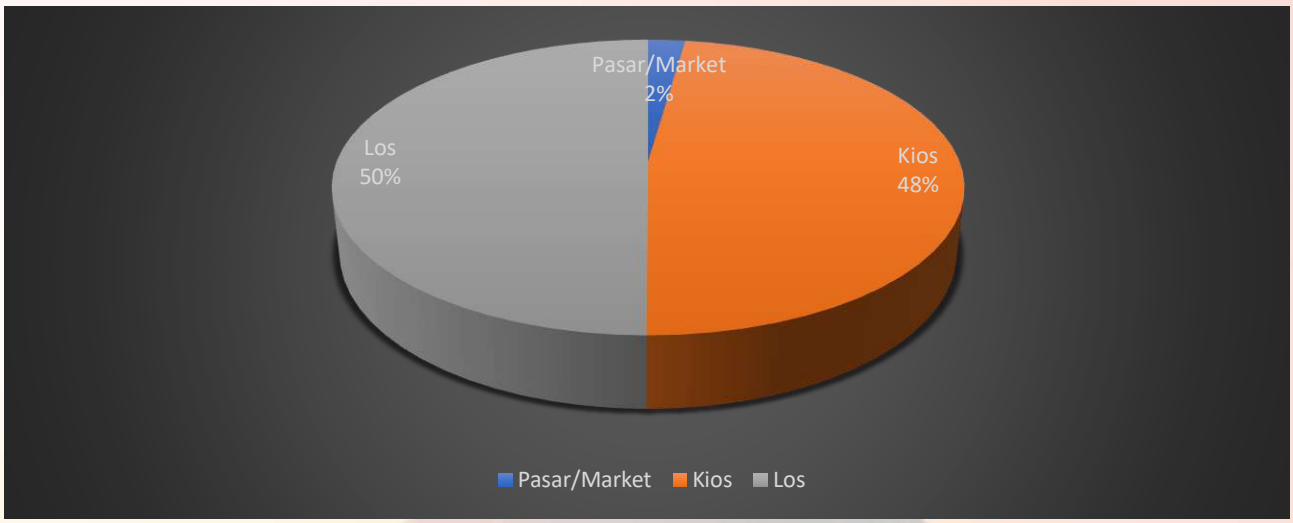
Dilihat dari fasilitas penunjang kegiatan perdagangan, di Kabupaten Sintang pada tahun 2022 terdapat 1.728 sarana perdagangan, yang terdiri dari Pasar 39 unit, Kios 826 unit dan Los sebanyak 863 unit, namun terjadi penurunan ditahun 2023 dengan jumlah sarana perdagangan sebanyak 1.703

Tabel 2.89.

Jumlah Sarana Perdagangan
di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023

No	Sarana Perdagangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasar/Market	39	39	39	39	38
2	Kios	825	825	826	826	802
3	Los	863	863	863	863	863
Jumlah		**1.727**	**1.727**	**1.728**	**1.728**	**1.703**

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023



Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.13.
Persentase Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sintang (%) Tahun 2022

2.4.2.5. Koperasi

Perkembangan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sintang cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, pada tahun 2019 jumlah koperasi yang aktif sebanyak 248 unit dan pada tahun 2023 menurun menjadi 179 unit. Adapun persebaran koperasi menurut kecamatan, sebagian besar konsentrasi koperasi di Kecamatan Sintang (59 unit atau 29,5%), sedangkan paling sedikit di Kecamatan Kayan Hulu (1 unit atau 0,5%).

Tabel 2.90.
Jumlah Koperasi Aktif per Kecamatan
di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2022

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Serawai	10	3	3	3	1
2	Ambalau	2	3	3	3	2
3	Kayan Hulu	4	1	1	1	-
4	Sepauk	14	12	12	12	14
5	Tempunak	12	10	10	10	8
6	Sungai Tebelian	31	20	25	27	26
7	Sintang	112	52	52	59	50
8	Dedai	8	3	3	3	3
9	Kayan Hilir	9	7	7	7	5
10	Kelam Permai	8	6	7	8	8
11	Binjai Hulu	15	11	12	12	12
12	Ketungau Hilir	26	18	19	19	13
13	Ketungau Tengah	10	7	8	9	11

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
14	Ketungau Hulu	23	25	26	27	24
Total		**248**	**178**	**188**	**200**	**179**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2024

2.4.2.6. Prasarana Olahraga

Kabupaten Sintang memiliki beberapa prasarana olahraga yang meliputi 5 unit bangunan gelanggang balai remaja serta 411 unit lapangan olahraga. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91.
Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023

No	Sarana Prasarana	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Gelanggang/Balai Remaja (Selain milik swasta)	Bangunan	5	5	5	5	3
2	Lapangan Olahraga	Unit	408	409	409	411	452

Sumber: RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2024

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

2.5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

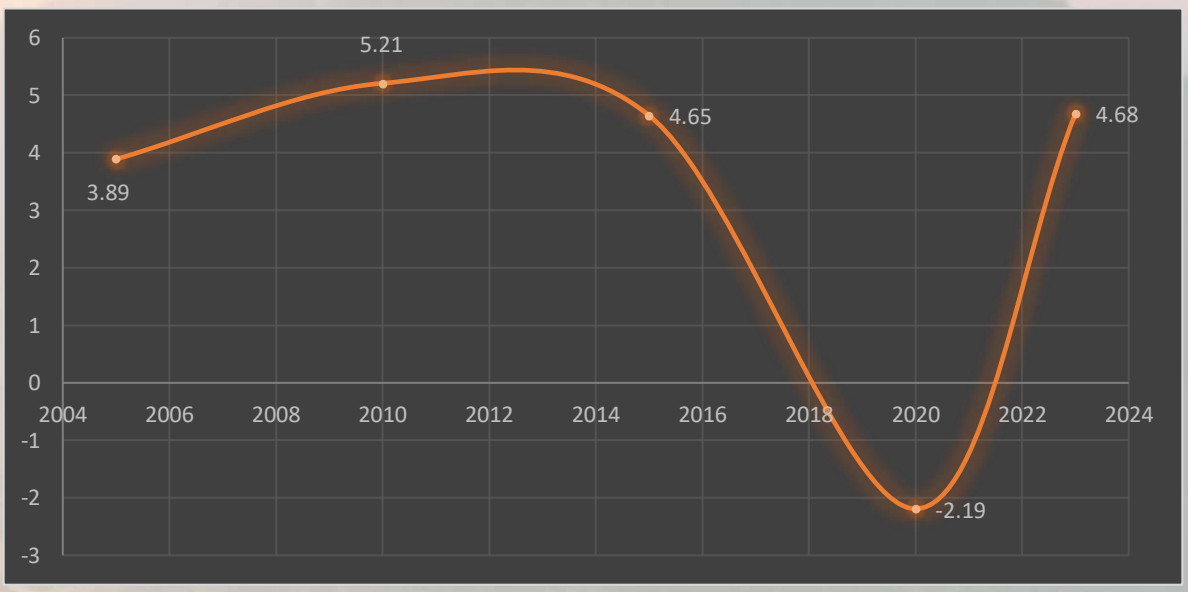
Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana total produk barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah/daerah mengalami peningkatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh lapangan usaha di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu capaian kinerja indikator makro pembangunan di Kabupaten Sintang selama periode RPJPD tahun 2005-2025. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari capaian angka PDRB harga konstan maupun harga berlaku. PDRB atas harga konstan sangat relevan dan dianggap lebih tepat digunakan dalam analisis perekonomian makro daerah, karena telah menghilangkan pengaruh inflasi.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2005-2025, dikatakan bahwa ditinjau dari perkembangan ekonomi kemajuan pembangunan daerah tercermin pada pencapaian laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan termasuk distribusinya. Lebih tinggi pendapatan rata-rata dan

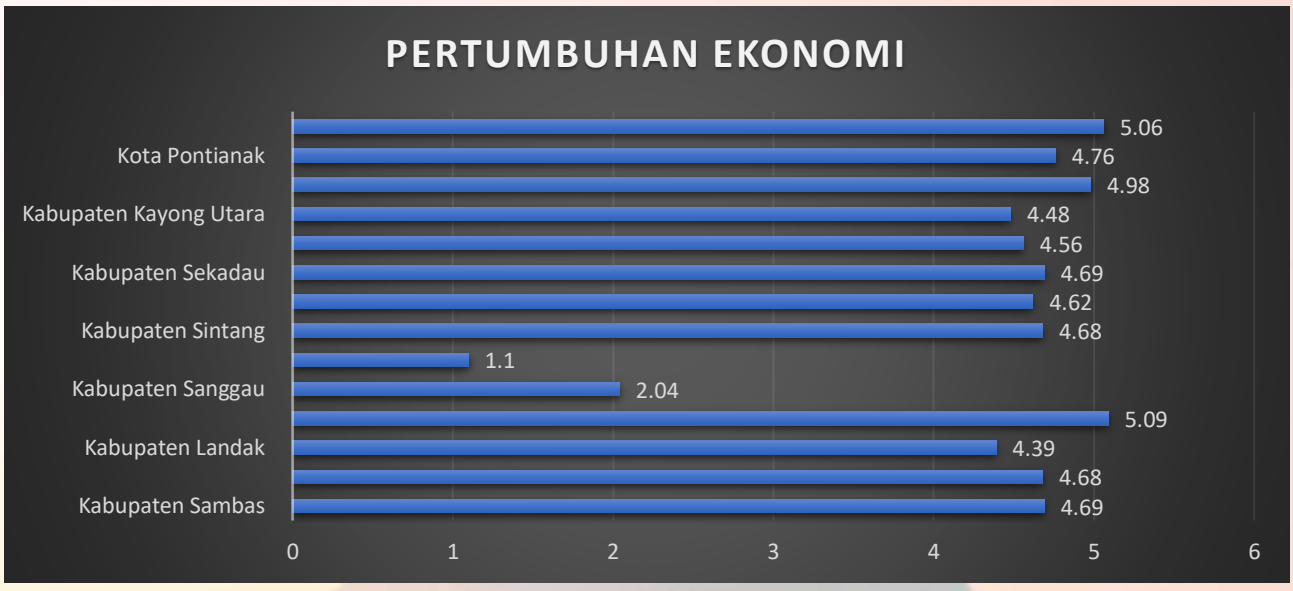
lebih merata distribusinya, suatu daerah dikatakan lebih makmur, dan dengan demikian daerah tersebut lebih maju.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada awal periode perencanaan tahun 2005 dirasakan masih relatif rendah, yakni sebesar 3,89%. Namun pada tahun 2010 capaian pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,21%, kemudian tahun 2015 mengalami sedikit pelambatan menjadi sebesar 4,65%. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang mengalami konstraksi sebesar -2,19% dikarenakan pandemi Covid-19, dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,96%. Dengan demikian, tingkat capaian pertumbuhan pada awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2022 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,62%. Jika dilihat dari target pertumbuhan ekonomi, hanya tahun 2008, tahun 2010, dan tahun 2022 yang mencapai target.



Gambar 2.14.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Periode 2005-2025
(Dalam Persen)

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2023 menempati posisi ke -8 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 4,68%, dan masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang sebesar 4,46%. Uraian rinci pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:



Gambar 2.15.
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Hingga Tahun 2023

Capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 adalah Kabupaten Mempawah, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09%, sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Ketapang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1%. Berdasarkan posisi capaian ini, dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang masih belum optimal dalam mencapai target kinerja sebagaimana visi yang telah ditetapkan dalam RPJPD tahun 2005-2025, yakni Kabupaten Sintang yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

2.5.1.2 Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini

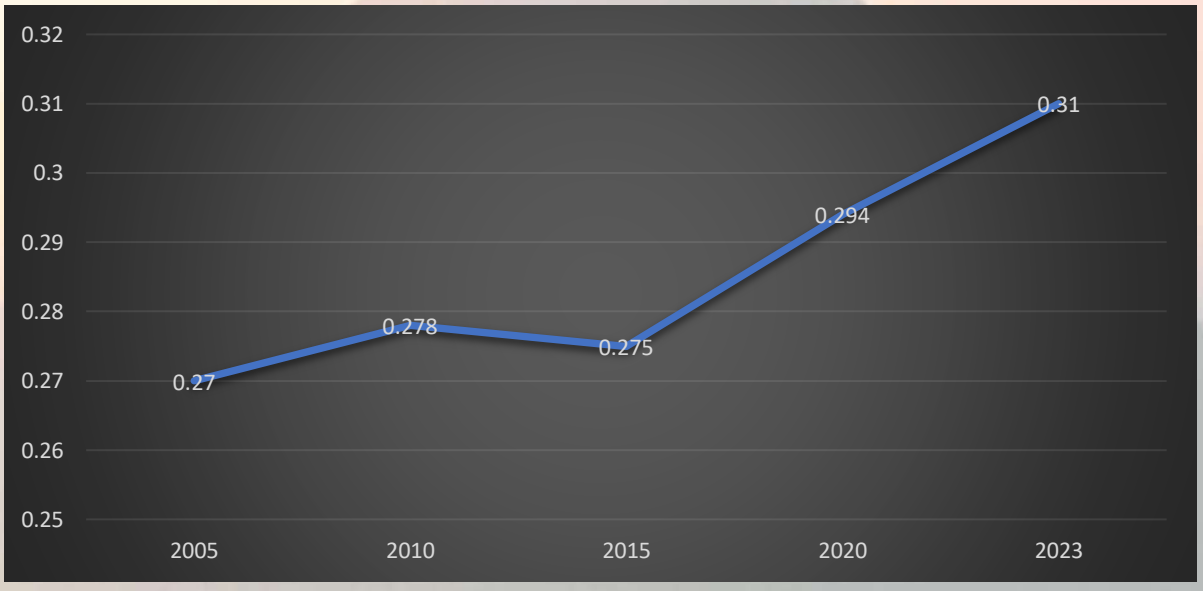
Ketimpangan atau disparsitas antar suatu wilayah/daerah merupakan hal yang biasa terjadi dalam aktivitas perekonomian di suatu negara. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya yang dihasilkan oleh setiap daerah serta kondisi demografi yang berbeda-beda antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Pembangunan ekonomi tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga adanya perbaikan distribusi pendapatan (income distribution). Distribusi pendapatan yang relatif baik dalam suatu perekonomian ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu menyolok. Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator perkembangan

perekonomian suatu negara/daerah. Apabila distribusi pemdapatan antar kelompok masyarakat tidak merata, maka ketimpangan pendapatan sulit untuk dihindarkan.

Pemerataan pendapatan salah satunya diukur melalui indeks gini. Indeks gini menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai indeks gini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi/ semakin mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sintang pada periode 2005- 2025 dapat diuraikan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 2.16.
Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sintang Periode 2005-2025

Indeks Gini Kabupaten Sintang pada awal periode perencanaan tahun 2005 dirasakan masih relatif rendah, yakni sebesar 0,270. Namun pada tahun 2010 naik menjadi 0,278 dan selanjutnya pada tahun 2015 indeks gini sedikit mengalami penurunan menjadi 0,275. Pada tahun 2020 naik kembali menjadi 0,294 dan pada tahun 2023 menjadi 0,31. Berdasarkan indeks gini sejak awal perencanaan tahun 2005 s/d tahun 2023 yang berada di bawah 0,300 menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sintang berada dalam kategori rendah.

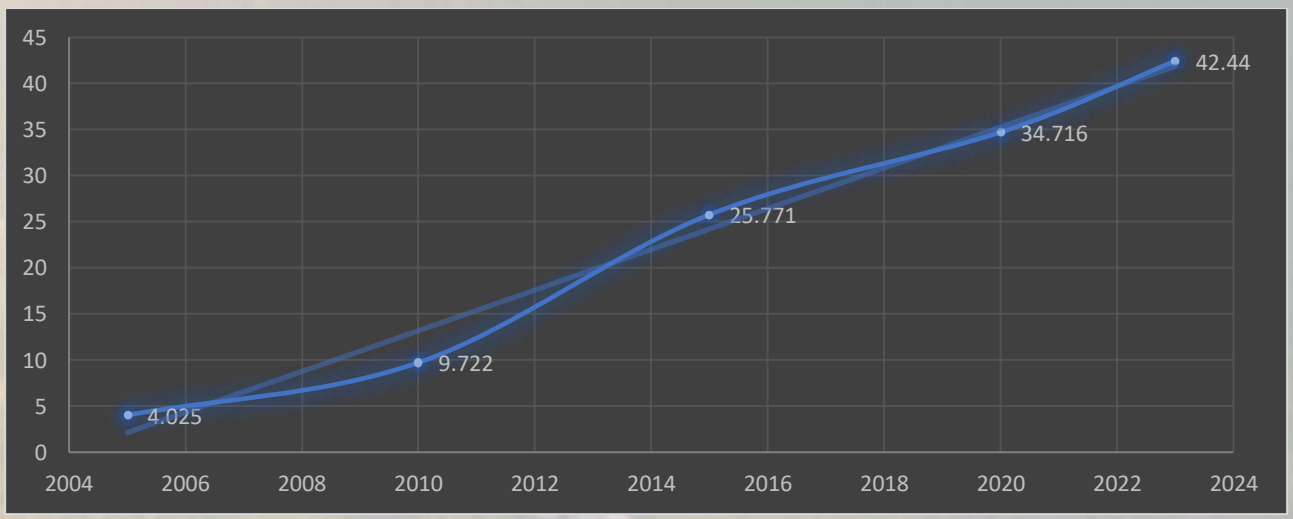
2.5.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di

daerah itu. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai alat pengukur kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, karena lebih menggambarkan mengenai nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing individu di suatu daerah. Pendekatan PDRB per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian daerah dan secara umum memberikan informasi tentang perkembangan pendapatan per Kapita penduduk. Dalam analisis perekonomian daerah, angka PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku digunakan untuk menggambarkan rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat dari periode ke periode.

PDRB per Kapita Kabupaten Sintang pada awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar Rp 4,026 juta, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp 9,722 juta. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan PDRB per Kapita yang relatif tinggi dibandingkan lima tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp 25,771 juta, sedangkan pada tahun 2020 nilainya mencapai Rp 34,716 juta, dan pada tahun 2023 sebesar 42,44 juta. Berdasarkan perkembangan sejak awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata PDRB Kabupaten Sintang meningkat sebesar Rp 1,950 juta per tahun. Peningkatan PDRB per Kapita selama periode tahun 2005 hingga tahun 2023 tersebut relatif cukup tinggi.

Secara lebih rinci, PDRB per Kapita Kabupaten Sintang periode 2005- 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:



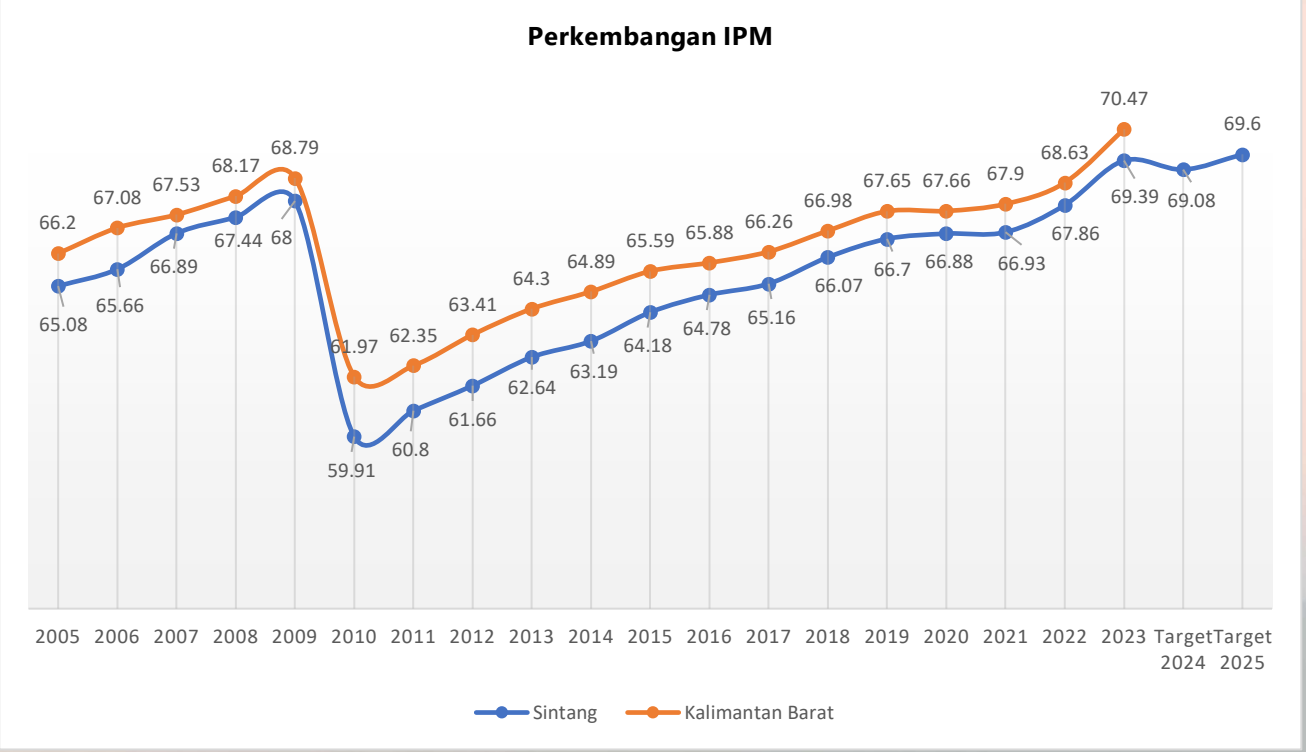
Gambar 2.17.

PDRB per Kapita Kabupaten Sintang Periode 2005-2025

2.5.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembanguna Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat). Menurut

Badan Pusat Statistik (BPS), IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yakni: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Sintang jika diukur sejak periode periode awal RPJPD 2005-2025 hingga akhir periode, dapat digambar dengan grafik sebagai berikut.



Gambar 2.18.

Perkembangan IPM Kabupaten Sintang Periode 2005-2025

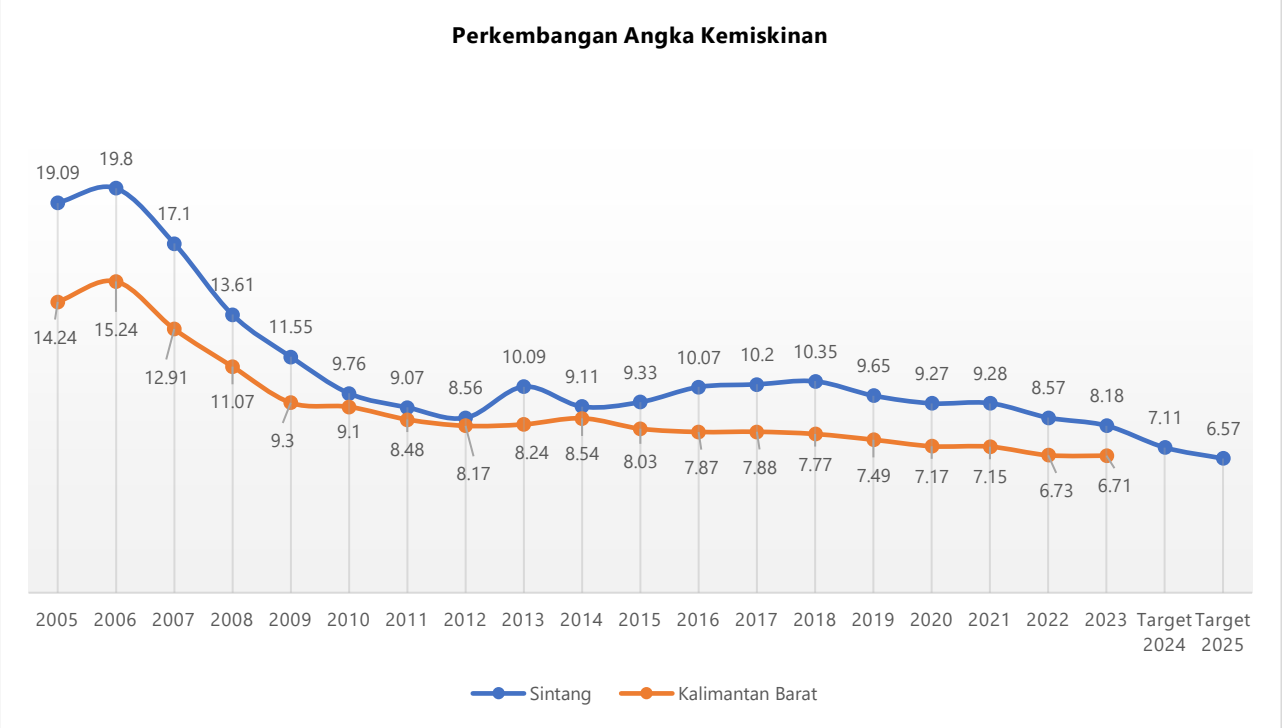
Gambar 2.18. menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sintang dan IPM Kalimantan Barat cenderung meningkat dari periode ke periode. Pada awal periode RPJMD I tahun 2005 sebesar 57,26 kemudian meningkat seterusnya pada setiap RPJMD berikutnya, yakni 59,91 pada tahun 2010, kemudian meningkat lagi menjadi sebesar 64,18 pada tahun 2015. Pada awal RPJMD IV tahun 2020 IPM meningkat menjadi 66,88 dan meningkat lagi tahun 2022 menjadi 67,86. Pada akhir RPJP tahun 2025 IPM Kabupaten Sintang meningkat menjadi 69,53.

Dalam proses pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sintang, Indeks Pembangunan Manusia meningkat setiap tahunnya. Namun, meskipun meningat setiap tahunnya, capaiannya masih di bawah IPM Provinsi hingga menjelang akhir RPJP (2022). Walaupun capaian masih di bawah provinsi, program pembangunan manusia di Kabupaten terbilang berhasil. Dikatakan berhasil, karena di awal pelaksanaan RPJP (2005), perbedaan IPM Propinsi dengan IPM Kabupaten Sintang sebesar 2,49 dan di akhir periode RPJP tahun 2025 perbedaan IPM semakin mengecil, yakni 1,32.

2.5.1.5 Angka Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan adalah berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seiring dengan progress pembangunan ekonomi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang cenderung berkurang dari periode ke periode RPJMD. Angka kemiskinan pada awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar 10,16%. Lima tahun berikutnya (2010) persentase penduduk miskin berkurang menjadi 9,76% kemudian menurun lagi menjadi 9,33% pada tahun 2015. Meskipun pembangunan sosial-ekonomi Kabupaten Sintang mengalami dampak covid-19, ternyata dampaknya tidak signifikan terhadap kemiskinan. Jumlah penduduk miskin tidak bertambah seperti yang diperkirakan, melainkan berkurang sedikit menjadi mencapai sebesar 9,27%. Menjelang akhir periode RPJPD, (2022) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang menjadi 8,57%. Diperkirakan angka penduduk miskin akan terus menurun hingga tahun 2025 menjadi 8,17%. Fakta ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 20 tahun, pembangunan daerah Sintang berhasil mengurarangi kemiskinan sebesar 1,59%. Perkiraan penurunan angka penduduk miskin hingga 8,17% sesungguhnya belumlah menggembirakan, karena masih jauh dari angka penduduk miskin propinsi Kalimantan Barat (5,94%) pada tahun 2025. Keadaan ini mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Sintang lebih serius dan inovatif menciptakan dan menjalankan program pengentasan kemiskinan. Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui program pemberdayaan UMKM, pembangunan sektor pertanian dan perkebunan melalui perluasan lahan pertanian dan perkebunan.

Berikut ini adalah grafik angka kemiskinan di Kabupaten Sintang sejak periode 2005-2025, yakni sebagai berikut.



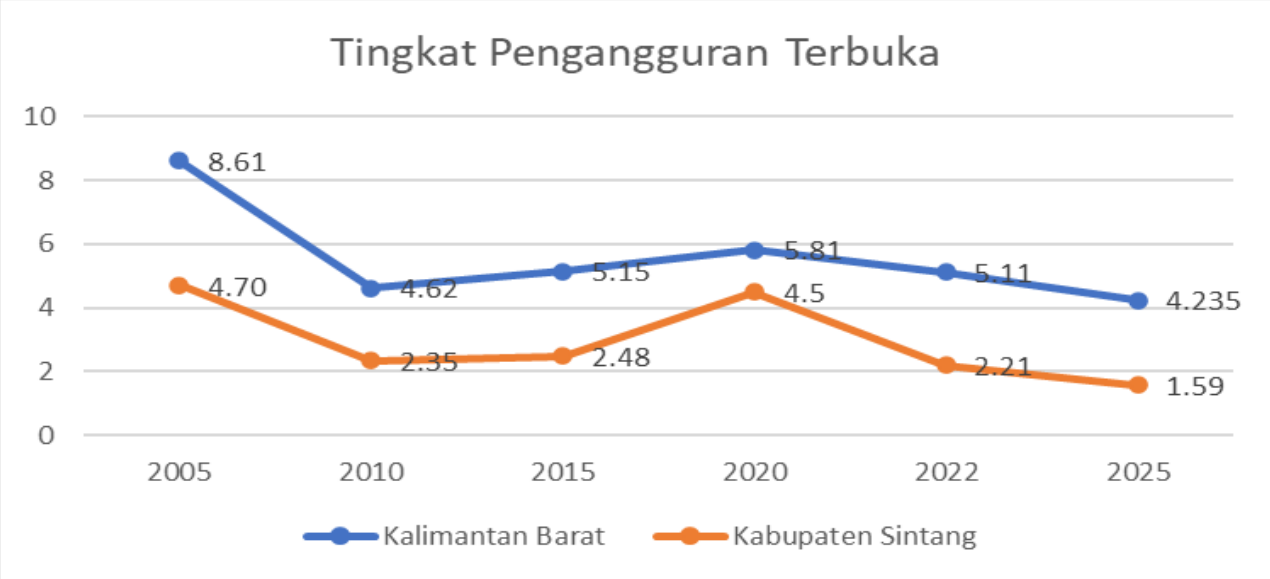
Gambar 2.19.
Persentase Kemiskinan di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat Periode 2005-2025

2.5.1.6 Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) selama periode jangka panjang relative rendah. Berfluktuasi pada kisaran 2 hingga 5 persen. Capaian ini lebih rendah dari TPT Provinsi Kalimantan Barat yang berfluktuasi pada kisran 5 hingga 9 persen (lihat Gambar 2.20). TPT Kabupaten Sintang menurun dari 4,70% (2005) menjadi 2,21% (2022) dan diperkirakan akan turun lagi menjadi 1,59% tahun 2025. Capian ini menandakan kesempatan kerja di Kabupaten Sintang akan mencapai full employment. Ini membuktikan bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Sintang terbuka luas bagi masyarakat sebagai konsekuensi bergeraknya roda perekonomian, terutama di sektor pertanian dan perkebunan serta sector perdagangan, hotel dan restoran.

Rendahnya TPT di Kabupaten Sintang belum memberikan kesejahteraan bagi

sebagian pekerja. Hal ini terbukti dari tingginya angka kemiskinan pada periode yang sama, yakni bergerak turun dan lambat pada kisaran 8 hingga 10 persen. Penduduk usia kerja sebagian besar terserap (bekerja) pada 17 lapangan usaha, namun gaji/upah yang diperoleh masih di bawah upah minimum.



Gambar 2.20.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat Periode 2005-2025

Berdasarkan data perkembangan pada setiap periode tersebut di atas, capaian kinerja RPJPD tahun 2005-2025 dapat dijabarkan ke dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 2.92.
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (Tahun 2005)	Capaian pada Tahun berjalan (Tahun 2023)	Keterangan
1	2	3	4	6
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,89	4,68	Pertumbuhan ekonomi fluktuatif
2	PDRB Per Kapita (RpJuta)	0,270	0,31	Indeks Gini rendah dan relatif stabil
3	Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio	4,026	42,44	PDRB per Kapita -meningkat

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (Tahun 2005)	Capaian pada Tahun berjalan (Tahun 2023)	Keterangan
1	2	3	4	6
4	Indeks Pembangunan Manusia	58.78	69.39	IPM meningkat setiap tahunnya
5	Angka Kemiskinan	11,55	8,18	Angka Kemiskinan cenderung menurun
6	Angka Pengangguran	4,70	2,92	Angka Pengangguran menurun hingga mencapai *full employment*

Capaian pembangunan sebagaimana uraian matriks tersebut di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar 3,89%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,21%, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 4,65%, pada tahun 2020 mengalami konstraksi sebesar -2,19%, dan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan mencapai sebesar 4,68 %, dengan tingkat capaian pertumbuhan pada awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2023 rata-rata sebesar 1,96%.
2. Ketimpangan pendapatan atau indeks gini di Kabupaten Sintang dilihat dari tahun awal 2005. Indeks Gini Kabupaten Sintang pada pada tahun 2005 sebesar 0,270 dan meningkat menjadi 0,278 pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 0,275, dan pada tahun 2020 mencapai sebesar 0,294, dan pada tahun 2023 sebesar 0,31 dengan capaian peningkatan sejak awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2023 rata-rata sebesar 0,19%.
3. PDRB per Kapita Kabupaten Sintang pada awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar Rp 4,026 juta, pada tahun 2010 sebesar Rp 9,722 juta, pada tahun 2015 sebesar Rp 25,771 juta, pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp 34,716 juta, dan pada tahun 2023 sebesar Rp 42,44 juta, dengan capaian peningkatan sejak awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2023 rata-rata sebesar 15,69%. Pendapatan per Kapita mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2005 hingga tahun 2023 dan capaian angka

PDRB per kapita tergolong relatif cukup tinggi diantara kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh PDRB Kabupaten Sintang ditopang oleh berkembangnya sektor swasta, dan pengeluaran pemerintah.

4. Pembangunan Manusia di Kabupaten Sintang selama periode jangka Panjang terus dilaksanakan secara bekelanjutan. Berbagai program yang terkait dengan bidang/dimensi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi telah dijalankan oleh pemerintah, namun hasilnya belum optimal. Hal ini dibuktikan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari periode ke periode. IPM Kabupaten Sintang meningkat dari 58,75 tahun 2005 menjadi 69,53 tahun 2025 (IPM 2025 angka estimasi). Rata-rata meningkat 0.5 point per tahun. Walaupun meningkat, posisi capaian ini masih tetap di rangking 7 dari 14 kabupaten/kota. Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi harus lebih ditingkatkan dan lebih merata ke seluruh wilayah.
5. Bila dicermati angka kemiskinan Kabupaten Sintang yang menurun setiap tahunnya, tersirat ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di awal periode perencanaan tahun 2005 angka kemiskinan sebesar 10,16%. Seiring dengan intensitas pembangunan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, angka kemiskinan terus menurun hingga mencapai 8,18% tahun 2023 dan diperkirakan akan menurun menjadi 8,17 di akhir RPJPD (2025).
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sintang cenderung menurun dan fluktuatif. Pada awal periode perencanaan tahun 2005, TPT sebesar 4,70%, kemudian pada periode berikutnya (2010) menurun sebesar 2,35% menjadi sebesar 2,35%. Selanjutnya, pada tahun 2015 dan tahun 2020 meningkat 2,48% dan 4,50%. Peningkatan TPT yang cukup tinggi (yaitu 4,50%) di tahun 2020 terjadi pada saat penerapan kebijakan menghadapi/mengatasi pandemic Covid-19. Pasca pandemic- 19, pembangunan dan perekomomian memasuki masa pemulihan (recovery) dan TPT kembali menurun menjadi 2,92% (2023) dan tahun 2025 diperkirakan akan menurun lagi menjadi 1,58%.

2.5.2. Rekomendasi

1. Upaya meningkatkan capaian indikator makro pembangunan, (IPM, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan PDRB perkapita) harus menjadi prioritas Pembangunan Kabupaten Sintang untuk jangka panjang

berikutnya dengan cara menciptakan iklim investasi yang mengundang investor-investor baru dan partisipasi Masyarakat dalam percepatan roda perekonomian.

2. Perlu pengadaan Bank Data lintas sektoral dan penyedian sumber informasi yang bersifat terpadu untuk meminimalisir berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
3. Pemberantasan penyakit masyarakat yang berdampak pada aspek kesehatan dan harapan hidup perlu didukung dengan membentuk atau menghidupkan kembali lembaga-lembaga tertentu melalui pengelolaan yang serius dan profesional, agar lebih fokus dan terukur dalam upaya sebagaimana dimaksud.
4. Proses atau tahapan dalam pemilihan kepala daerah perlu melibatkan unsur perencanaan daerah guna mengevaluasi visi dan misi calon kepala daerah, agar tetap sejalan dengan visi dan misi RPJPD yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi sasaran pokok pembangunan jangka menengah perlu diagendakan secara rutin melalui penyusunan dokumen evaluasi RPJMD yang bersifat komprehensif dan terukur untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan evaluasi RPJPD.
6. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sintang 2006-2026 dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Demografi

Paradigma pembangunan penduduk menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia.

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur

penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten Sintang 2020-2045 Hasil Sensus Penduduk 2020 ini menyajikan proyeksi penduduk pada periode 2020 hingga 2045. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun proyeksi penduduk Indonesia setiap kali hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah tersedia.

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). TFR, IMR, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP 2020.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, jumlah penduduk Kabupaten Sintang tahun 2045 sebanyak 538.480 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 275.160 jiwa dan perempuan sebanyak 263.320 jiwa. Penduduk berusia 0-14 tahun sebanyak 125.610 (23.33%); usia 15-64 tahun sebanyak 366.650 jiwa (68.09%) dan penduduk usia 65+ tahun sebanyak 46.220 jiwa atau 8.58%. Ratio Ketergantungan (dependency ratio) sebesar 46,86 (akhir dari era bonus demografi), lihat Tabel 2.93.

Tabel 2.93.
Parameter Kependudukan Kabupaten Sintang Tahun 2020-2045

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040*	2045**
PENDUDUK						
Laki-Laki (000)	217,32	231,41	243,49	253,83	273,59	292,27
Perempuan (000)	202,85	217,8	231,19	243,16	261,81	279,69
Total (000)	420,17	449,21	474,68	496,99	535,40	571,96
Sex Ratio **(%)**	107,13	106,25	105,32	104,39	104,50	104,50
Komposisi Umur (%)						
0–14	27,02	25,62	24,4	23,33	23,33	23,33
15–64	68,32	68,63	68,54	68,09	68,09	68,09
65+	4,66	5,75	7,05	8,58	8,58	8,58
Dependency Ratio **(%)**	46,37	45,71	45,89	46,87	46,86	46,86

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040*	2045**
FERTILITAS						
Total Fertility Rate **(TFR)**[1]	2,4	2,26	2,18	2,13	2,08	2,03
MORTALITAS						
Infant Mortality Rate **(IMR)** [1]	16,55	14,88	12,78	10,32	7,92	5,72

Sumber: Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat 2020-2035
*Keterangan: * = diolah sendiri berdasarkan pola proyeksi 2020-2035*
Catatan: [1] Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Generasi Z

Sesuai prediksi dan analisis berbagai kalangan, Indonesia tengah berada pada periode yang dinamakan sebagai Bonus Demografi, termasuk Kabupaten Sintang. Menariknya, hasil sensus 2020 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sintang yang sebagian besar berasal dari Generasi Z/Gen Z (27,62%), yaitu generasi yang lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi Milenial yang digadang-gadang menjadi motor pergerakan masyarakat saat ini, jumlahnya berada sedikit di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 23,69% dari total penduduk Kabupaten Sintang, (lihat Tabel 3.2). Ini artinya, keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Kabupaten Sintang saat ini dan nanti.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (boundary-less generation). Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas.

Menurut Bruce Tulgan dan Rainmaker Thinking, Inc. yang didasarkan pada penelitian longitudinal sepanjang 2003 - 2013, menemukan lima karakteristik utama Gen Z yang membedakannya dengan generasi sebelumnya.

Pertama, media sosial adalah gambaran tentang masa depan generasi ini. Gen Z merupakan generasi yang tidak pernah mengenal dunia yang benar-benar terasing dari keberadaan orang lain. Media sosial menjadi jembatan atas keterasingan, karena semua orang dapat terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi.

Kedua, bahwa keterhubungan Gen Z dengan orang lain adalah hal yang terpenting.

Ketiga, kesenjangan keterampilan dimungkinkan terjadi dalam generasi ini. Ini yang menyebabkan upaya mentransfer keterampilan dari generasi sebelumnya seperti komunikasi interpersonal, budaya kerja, keterampilan teknis dan bepikir kritis harus intensif dilakukan.

Keempat, kemudahan Gen Z menjelajah dan terkoneksi dengan banyak orang di berbagai tempat secara virtual melalui koneksi internet, menyebabkan pengalaman mereka menjelajah secara geografis, menjadi terbatas. Meskipun begitu, kemudahan mereka terhubung dengan banyak orang dari beragam belahan dunia menyebabkan Gen Z memiliki pola pikir global (global mindset).

Kelima, keterbukaan generasi ini dalam menerima berbagai pandangan dan pola pikir, menyebabkan mereka mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan suatu hal. Namun, dampaknya kemudian, Gen Z menjadi sulit mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas diri yang terbentuk sering kali berubah berdasarkan pada berbagai hal yang mempengaruhi mereka berpikir dan bersikap terhadap sesuatu.

Tabel 2.94.
Distribusi Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Generasi
Tahun 2020 dan 2045 (dalam 000)

Kelompok Generasi	2020		2045	
	Jumlah (jiwa)	persentase	Jumlah (jiwa)	persentase
Post Gen Z (Kelahiran 2013)	75,36	17,93	87,70	13,33
Generasi Z (Kelahiran 1997-2012)	110,92	26,40	131,21	22,94
Generasi Milenial (Kelahiran 1981-1996)	107,20	25,51	125,18	21,88
Generasi X (Kelahiran 1965-1980)	78,05	18,57	119,16	20,83
Baby Boomer (1946-1964)	38,19	9,09	79,71	13,94
Post Boomer (kelahiran sebelum 1946)	10,48	2,49	29,04	5,08
Total	420,20	100,00	571,96	100,00

Sumber : Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat 2020-2045

Tabel 2.95.
Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2045

Laki-Laki

Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
0–4	19,13	19,47	19,77	20,04	20,27	20,47	19,72	19,28	21,92	22,20
5–9	19,13	19,04	19,00	18,99	19,00	19,00	20,34	19,59	22,27	22,56
10–14	19,70	19,66	19,54	19,37	19,19	19,05	18,93	20,26	23,03	23,33
15–19	18,88	19,00	19,19	19,39	19,55	19,63	18,98	18,86	21,44	21,72
20–24	18,94	18,87	18,79	18,73	18,72	18,77	19,51	18,88	21,46	21,74
25–29	19,07	19,03	19,00	18,96	18,91	18,85	18,68	19,42	22,07	22,36
30–34	18,92	19,04	19,08	19,05	19,00	18,96	18,74	18,57	21,11	21,38
35–39	17,17	17,48	17,85	18,23	18,56	18,79	18,82	18,60	21,14	21,42
40–44	16,05	16,3	16,47	16,6	16,77	17,00	18,60	18,62	21,16	21,44
45–49	13,56	14,05	14,54	15,02	15,44	15,78	16,72	18,29	20,79	21,06
50–54	11,1	11,49	11,89	12,31	12,74	13,19	15,36	16,28	18,51	18,75
55–59	8,8	9,16	9,5	9,86	10,21	10,58	12,60	14,68	16,69	16,90
60–64	6,57	6,87	7,18	7,51	7,84	8,18	9,84	11,74	13,34	13,52
65–69	4,74	4,96	5,16	5,37	5,59	5,83	7,26	8,78	9,98	10,11
70–74	2,85	3,05	3,26	3,48	3,69	3,89	4,8	6,02	6,84	6,93
75+	2,72	2,84	2,96	3,11	3,27	3,45	4,62	5,98	6,80	6,89
Total	**217,32**	**220,30**	**223,20**	**226,02**	**228,75**	**231,41**	**243,49**	**253,83**	**288,52**	**292,27**

Perempuan

Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
0–4	18,56	18,80	19,01	19,19	19,38	19,63	18,92	18,50	21,01	21,28
5–9	18,54	18,55	18,56	18,61	18,59	18,46	19,54	18,83	21,38	21,66
10–14	18,49	18,58	18,6	18,56	18,51	18,48	18,41	19,47	22,11	22,39
15–19	17,36	17,5	17,72	17,98	18,22	18,4	18,39	18,31	20,79	21,06
20–24	17,55	17,41	17,28	17,18	17,15	17,2	18,24	18,23	20,70	20,97
25–29	18,11	18,01	17,87	17,72	17,56	17,41	17,06	18,10	20,55	20,82
30–34	17,82	17,97	18,06	18,08	18,05	17,98	17,29	16,95	19,25	19,50
35–39	16,11	16,38	16,71	17,07	17,4	17,64	17,81	17,13	19,45	19,70
40–44	15,08	15,36	15,53	15,64	15,77	15,95	17,47	17,65	20,04	20,30
45–49	12,30	12,82	13,39	13,96	14,47	14,88	15,75	17,26	19,60	19,85
50–54	9,96	10,36	10,74	11,14	11,56	12,03	14,57	15,44	17,53	17,76
55–59	7,78	8,13	8,50	8,88	9,27	9,66	11,69	14,18	16,10	16,31
60–64	5,95	6,22	6,50	6,79	7,10	7,43	9,26	11,23	12,75	12,92
65–69	4,35	4,59	4,82	5,03	5,26	5,50	6,91	8,65	9,82	9,95
70–74	2,54	2,78	3,03	3,3	3,55	3,79	4,84	6,14	6,97	7,06
75+	2,37	2,52	2,68	2,88	3,10	3,36	5,05	7,09	8,05	8,16
Total	**202,85**	**205,96**	**209,01**	**212**	**214,93**	**217,8**	**231,19**	**243,16**	**276,10**	**279,69**

Laki-Laki + Perempuan

Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
0–4	37,69	38,27	38,78	39,23	39,65	40,10	38,64	37,78	42,92	43,48
5–9	37,67	37,59	37,56	37,6	37,59	37,46	39,88	38,42	43,65	44,22
10–14	38,19	38,24	38,14	37,93	37,70	37,53	37,34	39,73	45,14	45,72
15–19	36,24	36,50	36,91	37,37	37,77	38,03	37,37	37,17	42,23	42,78
20–24	36,49	36,28	36,07	35,91	35,87	35,97	37,75	37,11	42,16	42,71
25–29	37,18	37,04	36,87	36,68	36,47	36,26	35,74	37,52	42,63	43,18
30–34	36,74	37,01	37,14	37,13	37,05	36,94	36,03	35,52	40,35	40,88
35–39	33,28	33,86	34,56	35,3	35,96	36,43	36,63	35,73	40,59	41,12
40–44	31,13	31,66	32,00	32,24	32,54	32,95	36,07	36,27	41,21	41,74
45–49	25,86	26,87	27,93	28,98	29,91	30,66	32,47	35,55	40,39	40,91
50–54	21,06	21,85	22,63	23,45	24,30	25,22	29,93	31,72	36,04	36,51
55–59	16,58	17,29	18,00	18,74	19,48	20,24	24,29	28,86	32,79	33,21
60–64	12,52	13,09	13,68	14,30	14,94	15,61	19,10	22,97	26,10	26,44
65–69	9,09	9,55	9,98	10,40	10,85	11,33	14,17	17,43	19,80	20,06
70–74	5,39	5,83	6,29	6,78	7,24	7,68	9,64	12,16	13,81	13,99
75+	5,09	5,36	5,64	5,99	6,37	6,81	9,67	13,07	14,85	15,04
Total	**420,17**	**426,26**	**432,21**	**438,02**	**443,68**	**449,21**	**474,68**	**496,99**	**564,62**	**571,96**

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Penduduk Kabupaten Sintang terus bertambah namun dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin menurun. Semakin lambatnya laju pertumbuhan penduduk dimungkinkan karena adanya kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat dari waktu lke waktu, dari periode ke periode. Keterlibatan kaum perempuan dalam dunia pekerjaan disertai dengan terbukanya kesempatan menikmati pendidikan ke jenjang tertinggi berdampak pada meningkatnya rata-rata usia perkawinan yang pada gilirannya rata-rata kepemilikan anak semakin menurun (TFR < atau = 2). Di sisi lain, tingkat kematian bayi juga semakin menurun karena kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan semakin meningkat dan pada saat yang sama tingkat kesadaran pasangan usia subur (PUS) semakin meningkat untuk memeriksa dan merawat kehamilannya pada tenaga kesehatan sesuai waktunya.

Berdasar pada kondsisi tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Sintang bertambah dari 420.170 jiwa (2020) menjadi 571.960 jiwa (2045) dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,44% per tahun. Jumlah penduduk yang bertambah ini perlu di respon dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Kebutuhan dasar penduduk, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan perlu di proyeksi untuk mewujudkan visi dan misi

yang akan di jalankan pimpinan daerah (Bupati dan wakil Bupati) terpilih. Dalam dokumen perencanaan ini akan disajikan proyeksi kebutuhan rumah tempat tinggal, kebutuhan air minum dan air bersih, kebutuhan beras, kebutuhan listrik, kebutuhan sarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga kesehatan.

2.6.2.1 Kebutuhan Dasar

Tabel 2.96.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Rumah Tempat Tinggal di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Proyeksi Rumah Tempat Tinggal (unit)	112303	118670	124248	141155	142990

Keterangan : 1 Rumah Tempat Tinggal = 4 jiwa

Tabel 2.97.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter)	1123025	1186700	1242475	1411550	1429900
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter)	22235895	23496660	24601005	27948690	28312020

Keterangan : Kebutuhan Air Minum per kapita = 2,5 liter per hari
Kebutuhan Air Bersih per kapita = 49,5 liter per hari

Tabel 2.98.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh/Kapita)	600145	634172	663979	754332	764139

Keterangan : Konsumsi per kapita 1.336 kWh/kapita akhir tahun 2023 (menurut Kementerian ESDM)

Tabel 2.99.
Proyeksi Kebutuhan beras Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Proyeksi Kebutuhan beras (kg/Kapita/tahun)	51479466	54398328	56955054	64705452	65546616
Proyeksi Kebutuhan beras (ton)	51479	54398	56955	64705	65547

Keterangan : Konsumsi per kapita 114,6 kg/kapita/tahun

2.6.2.2 Sarana Kesehatan

Tabel 2.100.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit (1:100000)	4	5	5	6	6
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Puskesmas (1:16.000 pddk)	28	30	31	35	36
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Posyandu (1:5000)	90	95	99	113	114
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Klinik (1:20000)	22	24	25	28	29

Tabel 2.101.
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Dokter Spesialis (28/100000)	126	133	139	158	160
Dokter Umum (112/100000)	503	532	557	632	641
Dokter Gigi (11/100000)	49	52	55	62	63
Perawat (158/100000)	710	750	785	892	904

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Bidan (72/100000)	323	342	358	407	412
Sanitarian (35/100000)	157	166	174	198	200
Tenaga Gizi (56/100000)	252	266	278	316	320

Keterangan : Kepmenkes No.81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan

2.6.2.3 Sarana Pendidikan

Tabel 2.102.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan TK Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 0-4 tahun (jiwa)	40100	38640	37780	42920	43480
Proyeksi TK (unit)	42	44	45	40	39

Keterangan : Rasio Ketersediaan TK = Jlh Sekolah TK/Jlh pddk usia 0-4 tahun x 10.000

Tabel 2.103.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SD Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 5-9 tahun (jiwa)	37460	39880	38420	43650	44220
Proyeksi SD (unit)	121	114	118	104	102

Keterangan : Rasio Ketersediaan SD = Jlh Sekolah SD/Jlh pddk usia 5-9 tahun x 10.000

Tabel 2.104.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMP Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 10-14 tahun (jiwa)	37530	37340	39730	45140	45720
Proyeksi SMP (unit)	34	35	32	29	28

Keterangan : Rasio Ketersediaan SMP = Jlh Sekolah SMP/Jlh pddk usia 10-14 tahun x 10.000

Tabel 2.105.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMA Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 15-19 tahun (jiwa)	38030	37370	37170	42230	42780
Proyeksi SMA (unit)	10	10	10	9	9

Keterangan : Rasio Ketersediaan SMA = Jlh Sekolah SMA/Jlh pddk usia 15-19 tahun x 10.000

Tabel 2.106.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMK Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 15-19 tahun (jiwa)	38030	37370	37170	42230	42780
Proyeksi SMK (unit)	5	5	5	5	5

Keterangan : Rasio Ketersediaan SMK = Jlh Sekolah SMK/Jlh pddk usia 15-19 tahun x 10.000

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Kinerja RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJPD dan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dan RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Untuk Dokumen RKPD tidak memerlukan penelaahan RTRW.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

a) Menelaah rencana struktur ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi: 1) peta rencana struktur ruang; 2) rencana sistem perkotaan; 3) rencana jaringan transportasi; 4) rencana jaringan energi/kelistrikan; 5) rencana jaringan telekomunikasi; 6) rencana

sistem jaringan sumber daya air; dan 7) rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

b) Menelaah rencana pola ruang Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi: 1) Rencana kawasan lindung; dan 2) Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

c) Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Telaahan terhadap indikasi program pemanfaatan meliputi:

1. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kabupaten;
2. Menelaah program pengembangan wilayah kabupaten;
3. Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan;
4. Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan; dan
5. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

2.7.2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional..

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarkhi satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional..

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarkhi satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sintang meliputi pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat kegiatan yang merupakan pusat pertumbuhan kegiatan di wilayah kabupaten meliputi:

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Sintang sebagai ibukota kabupaten.
b. Pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berada di Kota Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu;
c. Pusat kegiatan Lokal (PKL) berada di:
   - Nanga Serawai di Kecamatan Serawai;
   - Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir;
   - Nanga Sepauk di Kecamatan Sepauk;
   - Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah;dan
   - Sungai Ringin sebagai PKL industri yang terletak di Kecamatan Sintang, dan Kecamatan Sungai Tebelian.
d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di:
   - Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu;
   - Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir;
   - Binjai di Kecamatan Binjai Hulu;
   - Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak;
   - Sungai Ukoi di Kecamatan Sei Tebelian;
   - Dedai di Kecamatan Dedai;
   - Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu;
   - Kelam di Kecamatan Kelam Permai;dan
   - Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau.
e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri atas desa-desa pusat pertumbuhan.

Sistem jaringan prasarana utama dibentuk oleh sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi sungai, sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan sistem jaringan transportasi udara. Jaringan meliputi:

a. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan PKN dengan PKW, terdiri atas:
   1) Ruas Jalan Sekadau – Tebelian;
   2) Ruas Jalan Tebelian – Nanga Pinoh (pkwp);
   3) Ruas Jalan Tebelian – Batas Kota Sintang (PKW);
   4) Ruas Jalan MT. Haryono (Sintang);
   5) Ruas Jalan Lintas Melawi (Sintang);
   6) Ruas Jalan Oevaang Oeray (Sintang);
   7) Ruas Jalan Batas Kota Sintang – Simpang Nanga Silat;

b. Jaringan jalan kolektor primer (K1) adalah jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi di Kabupaten Sintang, terdiri atas :
   1) Ruas jalan Sintang – Binjai;
   2) Ruas jalan Binjai – Setungkup;
   3) Ruas jalan Setungkup – Senibung;
   4) Ruas jalan Senibung – Argo Mulyo;
   5) Ruas jalan Seputau III – Nanga Merakai – Simpang Jaong;
   6) Ruas jalan Sudirman

c. Jaringan jalan kolektor primer (K3) yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan kolektor (K1) yang menghubungkan antar PKSN atau antara PKSN dengan gerbang lintas batas negara atau antara Pelabuhan Nasional dengan PKW, terdiri atas:
   1) Ruas Jalan Poros Perbatasan
   2) Ruas Jalan Balai Karangan – Secangkul – Simpang Pintas Keladan;
   3) Ruas Jalan Paralel Simpang Pintas Keladan – Rasau – Belubu – Sepulau – Nanga Seran – Nanga Jaong – Simpang Jaong;

4) Ruas Jalan Rasau – Jasa – Sungai Kelik – Batas Sarawak;
5) Ruas Jalan Paralel Simpang Jaong – Jaong – Langau – Nanga Kantuk

d. Jaringan jalan kolektor primer (K2) adalah jalan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi ke ibukota kabupaten di Kabupaten Sintang, terdiri atas:
1) Ruas jalan Sungai Ukoi – Manter;
2) Ruas jalan Manter – Nanga Pinoh;
3) Ruas Jalan Sintang – Semubuk – Seputau III;
4) Ruas Jalan Seputau III – Simpang Pintas Keladan;
5) Ruas Jalan Seputau III – Nanga Merakai – Simpang Jaong;

e. Jaringan jalan kolektor primer (K3) terdiri atas:
1) Ruas Jalan Simpang Medang – Nanga Mau – Tebidah;
2) Ruas Jalan Tebidah – Bunyau – Nanga Serawai;
3) Ruas Jalan Nanga Serawai – Nanga Ella;

Jaringan prasarana lalu lintas terdiri atas:

a. Terminal penumpang tipe B terletak di Sungai Ukoi dan Sungai Durian;
b. Rencana pembangunan terminal tipe A terletak di Sungai Ukoi Kecamatan Tebelian;
c. Rencana pembangunan terminal tipe B terletak di Desa Jasa dan Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu;
d. Terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Sepauk, Kelurahan Tanjung Puri dan Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir;
e. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C terletak di, Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, Senaning Kecamatan Ketungau Hulu, Merakai Kecamatan Ketungau Tengah;
f. Rencana pembangunan terminal angkutan barang tipe B terletak di Kota Sintang;
g. Jembatan timbang terletak di Sungai Ukoi;
h. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) terletak di Sungai Ukoi

Alur pelayaran transportasi sungai, meliputi; rencana pengembangan alur pelayaran lokal berupa alur pelayaran dari:

a. Sintang – Nanga Pinoh;
b. Nanga Pinoh - Serawai;
c. Serawai – Ambalau;
d. Sintang – Nanga Mau;
e. Nanga Mau – Nanga Tebidah;
f. Sintang - Nanga Ketungau – Nanga Merakai – Senaning.

Pengembangan poros utama transportasi sungai terdapat di kota Sintang untuk wilayah Utara dan Nanga Serawai untuk wilayah Selatan Kabupaten Sintang. Prasarana transportasi sungai, meliputi dermaga terdapat di daerah:

a. Dermaga Sungai Durian di Kota Sintang;
b. Dermaga Nanga Serawai di Kecamatan Serawai;
c. Dermaga Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau;
d. Dermaga Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah;
e. Dermaga Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu;
f. Dermaga Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu;
g. Dermaga khusus angkutan sungai untuk swasta.

Rencana pengembangan prasarana transportasi sungai terdiri dari :

a. Pelabuhan Sungai Durian di Kota Sintang;
b. Pelabuhan Sungai Ringin di Kecamatan Sintang;
c. Dermaga Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir;
d. Stegher Sungai Ana di Kecamatan Sintang.

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian, terdiri atas: jaringan kereta api umum lintas yang menghubungkan Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau. Sistem jaringan transportasi udara, terdiri atas tatanan kebandarudaraan; dan ruang udara dan penerbangan. Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Sintang, yaitu: rencana pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Sungai Tebelian, rencana pengembangan bandar udara untuk melayani penerbangan perintis di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ketungau Hulu, dan rencana pengembangan heliport di Jasa Kecamatan Ketungau Hulu.

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas sistem jaringan prasarana persampahan, sistem jaringan prasarana air limbah, sistem jaringan drainase, sistem penyediaan air minum; dan jalur evakuasi bencana. Sistem jaringan prasarana persampahan meliputi peningkatan sistem pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill, terdapat di Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir, Nanga Sepauk Kecamatan Sepauk, Nanga Serawai Kecamatan Serawai, Jerora Kecamatan Sintang. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, terdapat di Nanga Kemangai untuk melayani Kecamatan Ambalau, Nanga Tebidah untuk melayani Kecamatan Kayan Hulu, dan Nanga Tempunak untuk melayani Kecamatan Tempunak, Sungai Ukoi untuk melayani Kecamatan Sungai Tebelian, Nanga Dedai untuk melayani Kecamatan Dedai, Kebong untuk melayani Kecamatan Kelam Permai, Mensiku untuk melayani Kecamatan Binjai Hulu, Nanga Ketungau untuk melayani Kecamatan Ketungau Hilir, Merakai untuk melayani Kecamatan Ketungau Tengah dan Senaning untuk melayani Kecamatan Ketungau Hulu.

Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan sistem 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), terdapat di Nanga Serawai, Nanga Mau, Nanga Sepauk, Nanga Merakai; dan Kecamatan Sintang. Sistem jaringan prasarana air limbah, meliputi

a. Pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima;
b. Pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (iplt) regional di kecamatan sintang, didorong untuk pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (iplt) yang menghasilkan energi alternatif;
c. Pengembangan instalasi pengolahan air limbah (ipal) pada permukiman-permukiman di ibukota-ibukota kecamatan dan pada fasilitas kesehatan dengan pengembangan instalasi pengolahan air limbah medis (ipal medis).
d. Pengembangan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) pada kegiatan yang menghasilkan dan berpotensi sebagai penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) sesuai peraturan perundang-undangan.

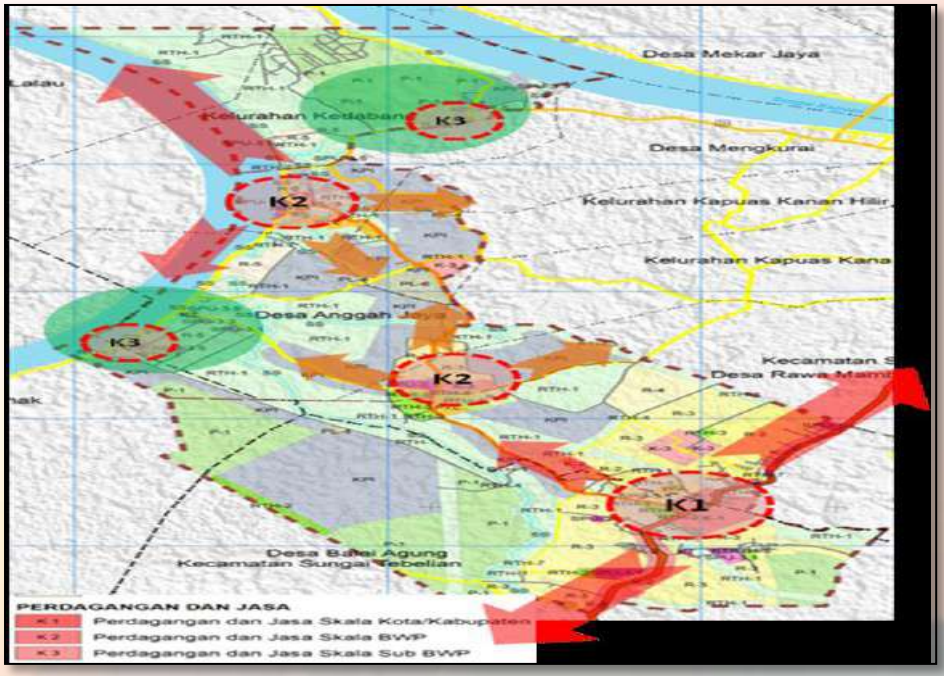
Sistem jaringan drainase meliputi:

a. Pengembangan jaringan drainase primer di kota Sintang sebagai ibukota kabupaten berupa sungai – sungai/saluran air yang bermuara ke sungai Kapuas;
b. Pengembangan jaringan drainase sekunder berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam kota;
c. Pengembangan jaringan drainase tersier berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam lingkungan permukiman;
d. Pengembangan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier di ibukota-ibukota kecamatan sebagai PKL dan PPK.

Sistem penyediaan jaringan air minum terdiri atas:

a. Sumber mata air (SMA) di Nanga Merakai dengan debit kurang lebih 5 l/d;
b. Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kapuas dengan debit kurang lebih 80 l/d, terdapat di:
   1) Unit PDAM Tanjung Puri dengan debit kurang lebih 55 l/d,
   2) Unit PDAM Kapuas Kiri Hilir dengan debit 10 l/d,
   3) Unit PDAM Nanga Sepauk dengan debit kurang lebih 5 l/d,
   4) Unit PDAM Tempunak dengan debit kurang lebih 10 l/d; dan
c. Sumber Sungai Melawi dengan debit kurang lebih 70 l/d, terdapat di:
   1) Unit PDAM Sungai Ana dengan debit kurang lebih 40 l/d;
   2) Unit PDAM Kapuas Kanan Hulu debit kurang lebih 30 l/d.

Kawasan industri Kabupaten sintang dapat disajikan melalui gambar dibawah ini:



Gambar 2.21
Kawasan industri Sungai Ringin Kecamatan Sintang

Penetapan kawasan industri di Kabupaten Sintang di tetapkan di kawasan Sungai Ringin dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Industri Sungai Ringin Tahun 2020-2039. Merupakan Penataan BWP Industri Sungai Ringin bertujuan untuk mewujudkan BWP Industri Sungai Ringin sebagai kawasan industri pengolahan komoditi lokal yang bersaing secara global dan ramah lingkungan. Fungsi utama Sub BWP yaitu sebagai berikut:

a. Sub BWP A dengan fungsi utama sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Kabupaten;
b. Sub BWP B dengan fungsi utama sebagai sub pusat pelayanan ekonomi kabupaten, transportasi dan industri;
c. Sub BWP C dengan fungsi utama sebagai kawasan revitalisasi industri dan lahan eks tambang.

Penataan ruang Sub BWP A sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut:

a. tersedianya ruang bagi pengembangan industri besar;
b. tersedianya ruang bagi pengembangan industri kecil dan menengah;

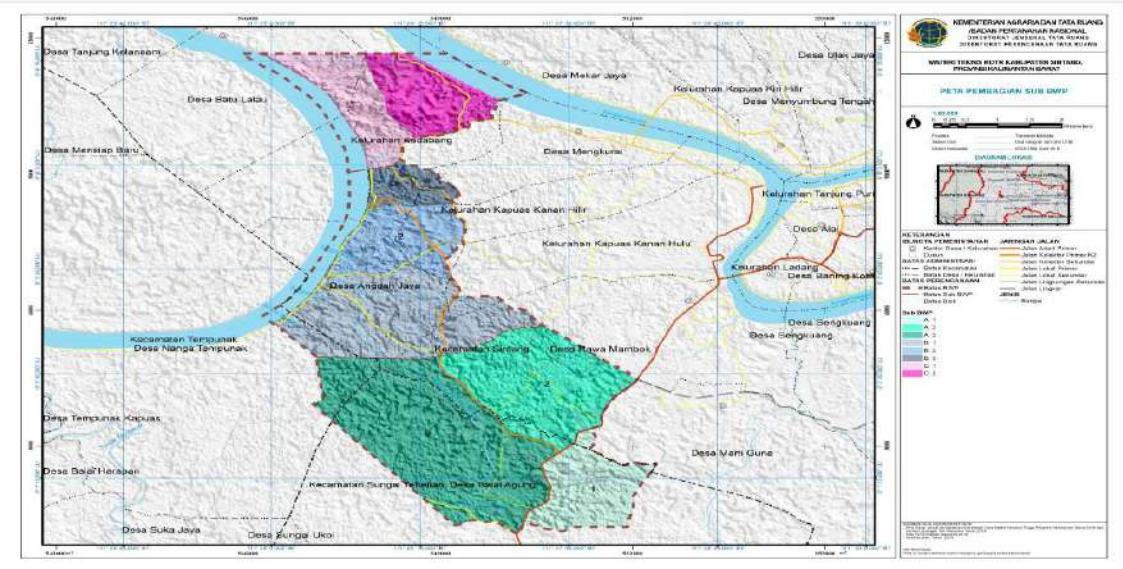
c. tersedianya ruang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
d. tersedianya ruang bagi kawasan permukiman dan industri rumah tangga;
e. tersedianya sarana dan prasarana pendukung fungsi zona permukiman dan pelayanan umum;
f. tersedianya Aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
g. tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup dan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Penataan ruang Sub BWP B sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut:

a. tersedianya ruang bagi pengembangan industri besar;
b. tersedianya ruang bagi pengembangan industri kecil dan menengah;
c. tersedianya ruang bagi kawasan permukiman dan industri rumah tangga;
d. berfungsinya Pelabuhan Sungai Ringin dengan waktu operasional yang lebih panjang;
e. tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan;
f. tersedianya sarana dan prasarana pendukung fungsi zona permukiman dan pelayanan umum;
g. terkendalinya perkembangan penggunaan lahan pada sepanjang tepian Sungai Kapuas; dan
h. tersedianya RTH yang memadai.

Penataan ruang Sub BWP C sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut:

a. terwujudnya revitalisasi industri besar;
b. terwujudnya reklamasi lahan eks tambang;
c. tersedianya ruang bagi kawasan permukiman dan permukiman tenaga kerja industri;
d. tersedianya akses eksternal dan internal Sub BWP C;
e. tersedianya dan tertatanya RTH; dan
f. terkendalinya perkembangan penggunaan lahan pada sepanjang tepian Sungai Kapuas.



Gambar 2.22
Pembagian Wilayah Sub BWP Kawasan Industri Sungai Ringin
Sumber : RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Industri Sungai Ringin Tahun 2020-2039

Untuk mengetahui luas rencana pola ruang Kabupaten Sintang dapat di lihat pada tabel 2.107 dibawah ini:

Tabel 2.107
Luas Rencana Pola Ruang

No	Zona	Sub Zona	Kode	Jumlah (ha)
	Zona Lindung			**1.007,54**
1.	Perlindungan Setempat	Zona Sempadan Sungai	SS	222,54
2.	Ruang Terbuka Hijau	Hutan Kota	RTH-1	737,62
		Taman Kota	RTH-2	20,00
		Taman Kecamatan	RTH-3	16,73
		Taman Kelurahan	RTH-4	6,93
		Pemakaman Umum	RTH-7	3,71
	Zona Budidaya			**1.849,09**
1	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	105,48
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	313,84
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	37,47
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	93,68
2.	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan jasa skala kota /kab	K-1	34,66
		Perdagangan dan jasa Skala BWP	K-2	58,80
		Perdagangan dan jasa Skala Sub BWP	K-3	33,60
3.	Perkantoran	Perkantoran	KT	3,48
4.	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	628,91
5.	Sarana Pelayanan Umum	SPU Pendidikan Skala Kota/Kabupaten	SPU-1.1	8,51
		SPU Transportasi Skala Kota/Kabupaten	SPU-1.2	3,31
		SPU Pendidikan Skala Kecamatan	SPU-2.1	7,32
		SPU Pendidikan Skala Kelurahan	SPU-3.1	5,32
		SPU Kesehatan Skala Kelurahan	SPU-3.3	0,95
		SPU Peribadatan Skala Kelurahan	SPU-3.5	1,84
6.	Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	462,33
7.	Tempat Pemprosesan Akhir (TPA)	Tempat Pemprosesan Akhir (TPA)	TPA	3,20
8.	Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	19,13
9.	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	2,09
		Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	4,98
		Pergudangan	PL-6	20,21
10.	Sungai (Badan Air)	Sungai (Badan Air)	BA	224,23
11.	Jalan (Transportasi)	Jalan (Transportasi)	TR	70,23
	Luas BWP			**3.151,09**

Sumber : RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Industri Sungai Ringin Tahun 2020-2039

2.7.3. Rencana Pola Ruang

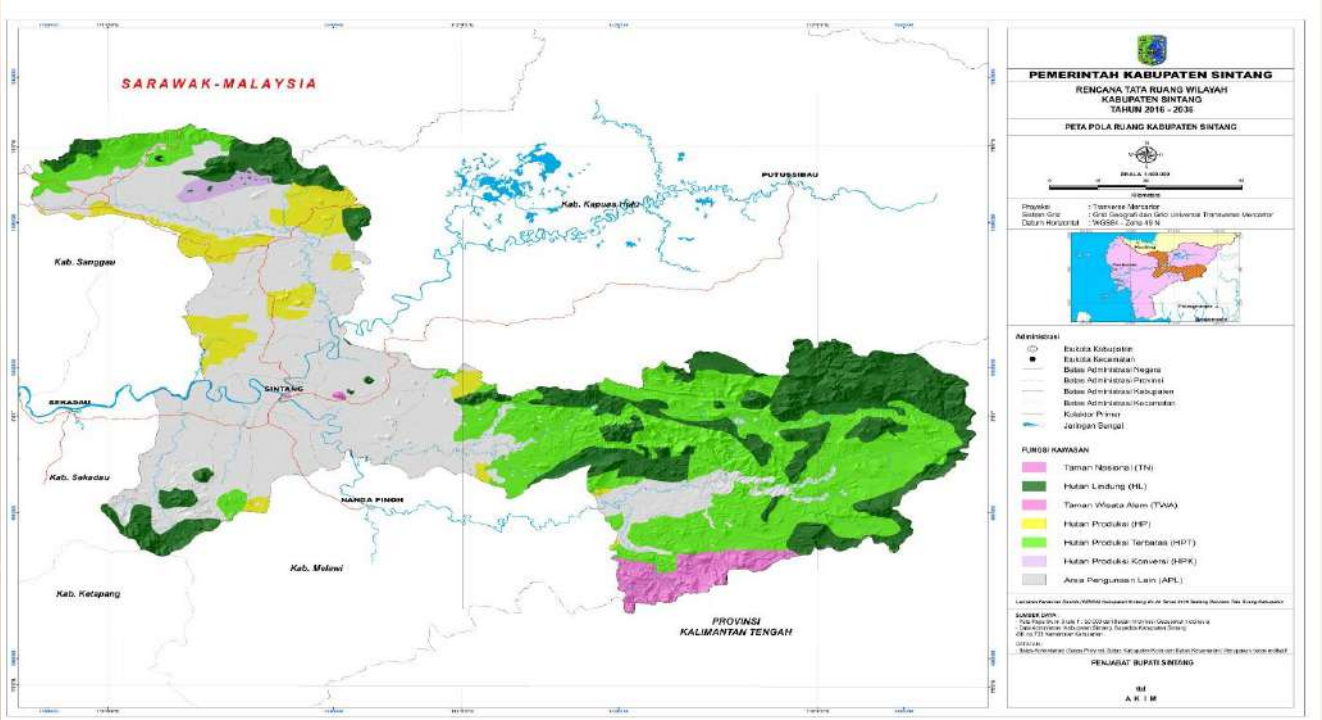
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari Pola Ruang Kawasan Lindung dan Pola Ruang Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi. Kawasan Budidaya ditetapkan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan kawasan budidaya provinsi.

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi :

a. Kawasan lindung; dan

b. Kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud digambarkan pada peta dibahwah ini :



2.7.4. Kawasan Lindung

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan resapan air; dan kawasan bergambut. Kawasan hutan lindung yang dimaksud adalah kawasan hutan lindung meliputi:

a. Hutan Lindung Betung Kecamatan Ketungau Tengah;

b. Hutan Lindung Bukit Alat - Sungai Demu Kecamatan Kayan Hulu - Serawai - Ambalau;

c. Hutan Lindung Bukit Kala Kecamatan Ambalau;
d. Hutan Lindung Bukit Kerepas - Bukit Buluh Kecamatan Serawai;
e. Hutan Lindung Bukit Keuhuma Kecamatan Ketungau Tengah;
f. Hutan Lindung Bukit Liyang Kukang Kecamatan Ambalau;
g. Hutan Lindung Bukit Luit Kecamatan Kelam Permai;
h. Hutan Lindung Bukit Mencaha Kecamatan Ambalau;
i. Hutan Lindung Bukit Penai Kecamatan Kelam Permai;
j. Hutan Lindung Bukit Rentap Kecamatan Kelam Permai;
k. Hutan Lindung Bukit Serigi Kecamatan Kayan Hulu – Ambalau;
l. Hutan Lindung Bukit Tamaraunta Kecamatan Ambalau;
m. Hutan Lindung Bukit Tunjun Kecamatan Ambalau;
n. Hutan Lindung Bukit Penai Kecamatan Kelam Permai;
o. Hutan Lindung Daturan Kecamatan Kayan Hilir - Kayan Hulu;
p. Hutan Lindung Bukit Bang Kecamatan Kayan Hilir - Kayan Hulu;
q. Hutan Lindung Bukit Baturan Kecamatan Kayan Hulu - Serawai – Ambalau;
r. Hutan Lindung Bukit Keuhuma Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
s. Hutan Lindung Bukit Kujau Kecamatan Sepauk – Tempunak;
t. Hutan Lindung Bukit Kumbu Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
u. Hutan Lindung Bukit Naning Kecamatan Sepauk;
v. Hutan Lindung Ketungau Hulu Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
w. Hutan Lindung Lubuk Lintang Kecamatan Sepauk – Tempunak;
x. Hutan Lindung Nyaban - Pangihan - Lambuanak Kecamatan Ambalau;
y. Hutan Lindung Sungai Beluwai – Sungai Jelundung Kecamatan Serawai;
z. Hutan Lindung Sungai Keruab – Sungai Melawi Kecamatan Serawai.

Kawasan resapan air adalah kawasan yang memiliki kemiringan lahan diatas 300 (tiga puluh derajat) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Kawasan bergambut adalah kawasan memiliki kriteria ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat dihulu sungai atau rawa. Kawasan bergambut memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Sintang. Di dalam kawasan hutan lindung, terdapat kawasan hutan desa dan hutan

kemasyarakatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan adalah hutan Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan danau/embung, kawasan sempadan danau paparan banjir, kawasan sempadan mata air; dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Kapuas, sungai Melawi, sungai Ketungau dan Sempadan anak sungainya dengan ketentuan:

a. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter kiri kanan dari tepi sungai besar di luar kawasan permukiman;
b. Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter kiri kanan dari tepi sungai kecil di luar kawasan permukiman;
c. Untuk sungai di kawasan permukiman, sempadan sungai antara 10 - 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi; dan
d. Untuk kawasan rawan bencana banjir penetapan sempadan sungai 150 (seratus lima puluh) meter dari tepi sungai.

Kawasan sempadan danau/embung terdapat di

a. Sempadan Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
b. Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
c. Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
d. Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
e. Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
f. Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
g. Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
h. Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
i. Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak;
j. Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu;dan
k. Danau Sijab di Kecamatan Binjai Hulu;

Dengan ketentuan ditetapkan daratan sepanjang tepian danau/embung yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi danau/waduk 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan penetapan lain sempadan danau/waduk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kawasan danau paparan banjir terdapat di Danau Sengkuang di Kecamatan Sintang ditetapkan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, dan penetapan lain sempadan danau paparan banjir didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kawasan sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air. Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, terdapat di pusat kota Sintang, ibukota-ibukota kecamatan, pusat kelurahan/desa dan kawasan-kawasan perumahan. Pengembangan fungsi danau ditetapkan sebagai danau lindung kabupaten yang wajib dikelola sesuai dengan ketentuan keberlanjutan.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan Taman Nasional meliputi Kawasan Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya. Kawasan taman wisata alam meliputi kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan Baning. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yaitu rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) meliputi:

a. Rumah Adat di desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai;
b. Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang di Jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang; dan
c. Museum Kapuas Raya di desa Jerora Kecamatan Sintang.

Kawasan rawan bencana alam meliputi Kawasan rawan banjir; Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, Kawasan rawan banjir, antara lain :

a. Kawasan sekitar sungai;
b. Kawasan sekitar danau;
c. Kawasan sekitar rawa;
d. Kawasan sekitar jalur jalan apang semangai – teuku umar;

e. Kawasan sekitar jalur jalan cik ditiro – ;
f. Kawasan sekitar jalur jalan bintara – dara juanti;
g. Kawasan sekitar jalur jalan mt. Haryono – sungai ringin;
h. Kawasan perumahan citra ladang permai;
i. Kawasan istana al-mukarramah;
j. Kawasan akcaya 3;
k. Kawasan alai; dan
l. Kawasan desa simbak kecamatan binjai hulu.

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, meliputi kawasan gambut, lahan kelola masyarakat dan swasta. Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah adalah kawasan imbuhan air tanah. Kawasan imbuhan air tanah terdapat di kawasan sekitar Cekungan Air Tanah, terdapat di:

a. Kecamatan Sepauk;
b. Kecamatan Tempunak;
c. Kecamatan Tebelian;
d. Kecamatan Sintang;
e. Kecamatan Dedai;
f. Kecamatan Kayan Hilir;
g. Kecamatan Kelam Permai;
h. Kecamatan Ketungau Hilir;
i. Kecamatan Binjai Hulu; dan
j. Kecamatan Ketungau Tengah.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas:

a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
b. kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi;
c. kawasan hutan kota;
d. Kawasan lindung Kelokak di desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian;
e. Kawasan lindung bukit besar di desa Penjernang Hulu Kecamatan Sungai Tebelian;

f. Kawasan hutan adat Rimba Jajau di Kecamatan Sungai Tebelian Dan Kecamatan Tempunak;
g. Kawasan indung Bukit Tuau di desa Nanga Lidau Kecamatan Kayan Hilir;
h. Kawasan lindung Bukit Tuguk di desa Tuguk Kecamatan Kayan Hilir;
i. Kawasan lindung Bukit Segaloh di desa Bukit Segaloh Kecamatan Kayan Hilir
j. Kawasan lindung Hutan Sijap, desa Binjai Hilir, Kecamatan Binjai;
k. Kawasan lindung hutan desa Gurung Mali, di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak;
l. Kawasan hutan desa Sungai Buluh, di desa Sungai Buluh, Kecamatan Tempunak; dan
m. Kawasan hutan Desa Jaya Mentari, di desa Jaya Mentari, Kecamatan Tempunak.

Kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi kawasan di sekitar pegunungan Bukit Baka di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi meliputi koridor/alur pergerakan satwa di Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai. Kawasan Hutan Kota adalah Hutan Wisata Baning.

2.7.5. Kawasan Budidaya

Sementara itu kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan pertanian; perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; kawasan pertahanan dan keamanan; serta kawasan transportasi.

Kawasan peruntukan Hutan Produksi meliputi:

a. kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
b. kawasan Hutan Produksi (HP); dan
c. kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Kawasan Hutan Produksi Terbatas terdapat di:

a. Hutan produksi terbatas (HPT) Kainjal;
b. Hutan produksi terbatas (HPT) Sungai Ketungau Hulu;
b. Hutan produksi terbatas (HPT) Sungai Serawai; Hutan Ptoduksi Terbatas (HPT) Uluk Ubur.

Kawasan Hutan Produksi terdapat di:

a. Hutan produksi (HP) Dinding Raja;
b. Hutan produksi (HP) Keninjal;
c. Hutan produksi (HP) Nanga Mengkilau;
d. Hutan produksi (HP) Sungai Kembayan-Sungai Mengkiang;
e. Hutan produksi (HP) Sungai Sekapak-Kenapai;
f. Hutan produksi (HP) Bukit Condong;
g. Hutan produksi (HP) Bukit Pelantar;
h. Hutan produksi (HP) Ginsar;
i. Hutan produksi (HP) Keruab Melawi; dan
j. Hutan produksi (HP) Sungai Jungkit.

Kawasan Hutan Produksi Konversi terdapat di hutan produksi konservasi (HPK) Gunung Kemuha. Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas terdapat hutan desa yaitu hutan desa Rasau dan hutan desa Jasa.

Kawasan pertanian terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas:

a. Kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak; dan
b. Kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (lahan basah) dan kawasan perlindungan lahan kering yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang.

Kawasan pertanian hortikultura terdiri atas:

a. Budidaya tanaman sayuran jenis dataran terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;
b. Budidaya tanaman buah terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;

Kawasan perkebunan terdiri atas:

a. Kawasan perkebunan karet, terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;
b. Kawasan perkebunan sawit terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;

c. Pengembangan kawasan perkebunan memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Induk pengelolaan perkebunan kabupaten Sintang.

Kawasan peternakan menurut komoditas:

a. Jenis ternak besar di Kecamatan Binjai Hulu, Tempunak, Sungai Tebelian dan Ketungau Hilir;
b. Jenis ternak kecil di Kecamatan Ketungau Hilir, Serawai, Kayan Hulu, Binjai Hulu, Tempunak dan Sungai Tebelian;
c. Jenis ternak unggas di Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang, Kelam Permai, Binjai Hulu dan Tempunak;
d. Pengembangan ternak besar, khususnya sapi dapat diintegrasikan dengan kawasan perkebunan kelapa sawit.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi:

a. Kawasan Sungai Kapuas;
b. Sungai Melawi;
c. Sungai Ketungau;
d. Sungai Kayan;
e. Sungai Serawai;
f. Sungai Ambalau;
g. Sungai Sepauk;
h. Sungai Tempunak;dan
i. Sungai Batang Tuk.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas:

a. Budidaya perikanan umum daratan di sungai terdapat di:

1) Sungai Kapuas;
2) Sungai Melawi;
3) Sungai Ketungau;

4) Sungai Kayan;

5) Sungai Serawai;

6) Sungai Ambalau;

7) Sungai Sepauk;

8) Sungai Tempunak;dan

9) Sungai Batang Tuk.

b. Budidaya perikanan umum daratan di danau terdapat di:

1) Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;

2) Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;

3) Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;

4) Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;

5) Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;

6) Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;

7) Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;

8) Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;

9) Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak; dan

10) Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu;

c. Budidaya perikanan umum daratan di kolam budidaya terdapat di Kecamatan Ketungau Hilir; Kecamatan Kayan Hilir; Kecamatan Dedai; Kecamatan Sintang; dan Kecamatan Tempunak.

Kawasan pengolahan hasil perikanan meliputi kawasan:

a. Pengembangan bangsal hasil perikanan berupa Unit Pengembangan Hasil Perikanan di:

1) Kecamatan Ketungau Tengah;

2) Kecamatan Ketungau Hilir; dan

3) Kecamatan Sintang;

b. Pengolahan hasil perikanan tangkap berupa Unit Pendaratan, Pemasaran dan Pelelangan Ikan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hilir dan Kecamatan Sintang, meliputi :

1) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
2) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
3) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
4) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
5) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
6) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
7) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
8) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
9) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak dan Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu.

Rencana pengembangan Sentra Produk Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hilir dan Kecamatan Sintang.

Rencana Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari :

a. Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
b. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batu bara;
c. Kawasan Peruntukan Pertambangan Logam;
d. Kawasan Peruntukan Pertambangan Non logam;
e. Kawasan Peruntukan Pertambangan Radio aktif;
f. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
g. Kawasan Peruntukan Pertambangan Rakyat.

Kawasan peruntukan Wilayah Pencadangan Negara meliputi Kecamatan Serawai; dan Kecamatan Ambalau. Kawasan peruntukan pertambangan Batubara meliputi Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai; dan Kecamatan Ambalau.

Kawasan peruntukan pertambangan logam meliputi:

a. Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu;
b. Kecamatan Ketungau Hilir;
c. Kecamatan Binjai;
d. Kecamatan Sepauk;
e. Kecamatan Tempunak;
f. Kecamatan Sungai Tebelian;
g. Kecamatan Sintang;
h. Kecamatan Kelam Permai;
i. Kecamatan Dedai;
j. Kecamatan Kayan Hilir;
k. Kecamatan Kayan Hulu;
l. Kecamatan Serawai; dan
m. Kecamatan Ambalau.

Kawasan peruntukan pertambangan non logam meliputi Kecamatan Ambalau. Sedangkan kawasan peruntukan pertambangan Radio Aktif meliputi:

a. Kecamatan Ketungau hilir;
b. Kecamatan Binjai Hulu;
c. Kecamatan Sepauk;
d. Kecamatan Kelam Permai;
e. Kecamatan Kayan Hilir;
f. Kecamatan Kayan Hulu;
g. Kecamatan Serawai; dan
h. Kecamatan Ambalau.

Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi :

a. Kecamatan Dedai;
b. Kecamatan Sei Tebelian;
c. Kecamatan Ketungau Hilir;
d. Kecamatan Kelam Permai;
e. Kecamatan Binjai Hulu;
f. Kecamatan Sintang;
g. Kecamatan Tempunak;
h. Kecamatan Sepauk; dan
i. Kecamatan Serawai.

Kawasan peruntukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu. Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan
f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tarnbang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pengelolaan Pertambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan wilayah pertambangan yang meliputi Wilayah Pencadangan Negara, Wilayah Usaha Pertambangan, dan Wilayah Pertambangan Rakyat, dilaksanakan sesuai peruntukan perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri sedang; dan kawasan peruntukan industri rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar antara lain:

a. Industri pengolahan karet;
b. Industri pengolahan tandan buah segar (tbs);
c. Industri crumb rubber;
d. Industri crumb palm oil (cpo); dan
e. Industri kernel (inti sawit).

Kawasan peruntukan industri sedang meliputi Kawasan Industri Sungai Ringin di Kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sungai Tebelian. Kawasan peruntukan industri rumah tangga antara lain meliputi:

a. Industri kecil menengah (IKM) pangan di:
    1) Kecamatan Sintang;
    2) Kecamatan Tempunak;
    3) Kecamatan Sungai Tebelian;
    4) Kecamatan Kelam Permai;
    5) Kecamatan Ketungau Tengah;
    6) Kecamatan Ambalau;
    7) Kecamatan Kayan Hilir;
    8) Kecamatan Ketungau Hulu; dan
    9) Kecamatan Binjai Hulu.
b. Industri kecil menengah (IKM) sandang di:
    1) Kecamatan Sintang;
    2) Kecamatan Dedai; dan
    3) Kecamatan Kelam Permai.
c. Industri kecil menengah (IKM) kimia dan bahan bangunan di Kecamatan Sintang.

d. Industri kecil menengah (IKM) logam dan elektronika di:

1) Kecamatan Sintang;
2) Kecamatan Serawai;
3) Kecamatan Ambalau;
4) Kecamatan Tempunak;
5) Kecamatan Dedai; dan
6) Kecamatan Kelam Permai.

e. Industri kecil menengah (IKM) kerajinan di:

1) Kecamatan Sintang;
2) Kecamatan Kelam Permai;
3) Kecamatan Tempunak;
4) Kecamatan Kayan Hulu;
5) Kecamatan Sepauk;
6) Kecamatan Ketungau Hilir;
7) Kecamatan Ketungau Tengah; dan
8) Kecamatan Ketungau Hulu.

Pengembangan industri berciri khusus dikembangkan untuk komoditi :

a. Tenun ikat di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai, Desa Umin di Kecamatan Dedai, Desa Sungai Buaya di Kecamatan Kayan Hilir;
b. Rotan di Kecamatan Serawai: Desa Mentajoi (pusat), Desa Merako, Desa Riyoi, Desa Tangoi, Desa Ruhan, Desa Sawang Sengiang; Kecamatan Ambalau: Desa Sake, Desa Kesange, Desa Menantak, Desa Menakon, Desa Buntut Sabon, dan Desa Buntut Purun.
c. Industri komoditi lainnya yang menjadi ciri khusus Kabupaten Sintang.

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan wisata religi, kawasan peruntukan pariwisata alam; dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:

a. Kawasan wisata budaya Rumah Adat Betang di:
1) Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai;

2) Desa Kayu Duyung Kecamatan Ketungau Tengah.

b. Kawasan wisata Museum Keraton Al Mukoromah di kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang;

c. Kawasan wisata Museum Kapuas Raya di desa Jerora Kecamatan Sintang;

d. Kawasan Makam Pahlawan Syuhada Pertiwi di Kecamatan Sintang.

Kawasan peruntukan pariwisata religi terdiri atas:

a. Goa Maria di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai; dan

b. Kawasan Tabung Demung Gelong, di Desa Binjai Hilir, Kecamatan Binjai Hulu.

Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas:

a. Kawasan wisata hutan, terletak di:

1) Hutan Wisata Baning;

2) Taman Wisata Bukit Kelam; dan

3) Hutan Tawang Mersibung.

b. Kawasan wisata bukit, terdapat di:

1) Bukit Luit;

2) Bukit Kujau;

3) Bukit Saran;

4) Bukit Bang;

5) Bukit Ruyung;

6) Bukit Gonik;

7) Bukit Bungau;

8) Bukit Bejaku;

9) Bukit Sahai Keladan; dan

10) Bukit Rentap;

c. Kawasan wisata danau dan telaga terdapat di:

1) Danau Jemelak;

2) Telaga Rendang;

3) Telaga Telaga Surat; dan

4) Telaga Kumang;

d. Kawasan wisata sungai dan riam terdapat di:

1) Sungai Silit;
2) Sungai Kiara;
3) Sungai Lubuk Kembang;
4) Sungai Kura;
5) Sungai Beribijit;
6) Sungai Kelampai;
7) Sungai Kujau;
8) Sungai Senirah;
9) Riam Capat Cunai;
10) Riam Setungkup;
11) Riam Pengundang; dan
12) Riam Mensabu.

e. Kawasan wisata air terjun terdapat di:
1) Air Terjun Nokan Nayan;
2) Air Terjun Nokan Cecak;
3) Air Terjun Nokan Undak;
4) Air Terjun Nokan Jenggonoi;
5) Air Terjun Sentarum;
6) Air Terjun Tuja Pamak;
7) Air Terjun anak Sungai Sentarum;
8) Air Terjun Tuja Supit;
9) Air Terjun Tuja Tapang Tuai;
10) Air Terjun Sarai Entemu;
11) Air Terjun Sarai Nantai Bulung;
12) Air Terjun Bukit Kujau;
13) Air Terjun Gurung Jatuk;
14) Air Terjun Sungai Jerup;
15) Air Terjun Sungai Udang;
16) Air Terjun Wong Sepakat;
17) Air Terjun Wong Tapah;

18) Air Terjun Tekop; dan

19) Air Terjun Wong Tungku.

f. Kawasan wisata gua, terdapat di:

1) Gua Paleh Berani;

2) Gua Paleh Pengolak;

3) Gua Antu Simpak;

4) Gua Gemelat; dan

5) Gurung Jeruk;

g. Kawasan wisata Air Panas di Hilir Sungai Ketungau, Kecamatan Ketungau Tengah.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri dari:

a. Kawasan wisata Galery Motor Bandong di Desa Jerora Kecamatan Sintang;

b. Kawasan wisata Kolam:

1) Renang Serantung Waterpark;

2) Kolam Renang Baliomoro;

3) Kolam Renang Tebelian Indah; dan

4) Kolam Renang Tirta Wisata Kelam.

c. Kawasan wisata Out Bond Sake.

d. Kawasan wisata paralayang, panjat tebing, sepeda gunung di Bukit Kelam.

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan permukiman perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdiri dari kawasan perkotaan terdapat di Kota Sintang, kawasan ibukota kecamatan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi meliputi:

a. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Dedai, dan Kecamatan Sungai Tebelian;

b. Permukiman perdesaan yang tersebar di Kabupaten Sintang.

c. Permukiman khusus perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu.

d. Permukiman perdesaan yang berada di dalam kawasan hutan, yaitu:

1) Desa Benua Kencana dan Pekulai Bersatu di Kecamatan Tempunak;

2) Desa Sarai di Kecamatan Sungai Tebelian;

3) Desa Sungai Buaya, Sungai Sintang dan Batu Netak di Kecamatan Kayan Hilir;
4) Desa Nanga Masau, Desa Nanga Tampang dan Desa Empakan di Kecamatan Kayan Hulu;
5) Desa Sungai Mali dan Desa Ratu Damai di Kecamatan Ketungau Hilir;
6) Desa Kayu Dujung, Desa Nanga Kelapan, Desa Gut Jaya Bhakti, Desa Begelang Jaya, Desa Radin Jaya, Desa Landau Temiang, Desa Padung Kumang di Kecamatan Ketungau Tengah;
7) Desa Sinar Pekayau, Desa Sungai Segak, Desa Temawang Bulai, dan Desa Sungai Jaung di Kecamatan Sepauk;
8) Desa Meroboi, Desa Tunas Harapan, Desa Limur Bernaung, Desa Tahai Permai dan Desa Mensulung Biu di Kecamatan Serawai;
9) Desa Patih Jepara, Desa Bukai Tukun, Desa Luting Mingan, Desa Korong Desa, Desa Nanga Sake, Desa Punuk Beribit, dan Desa Nanga Menakon di Kecamatan Ambalau;
10) Desa Sungai Mawang, Desa Sejawak, Desa Nanga Sebawang, Desa Sauk Medang, dan Desa Neraci Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu.

Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:

a. Kepolisian Resort Sintang (POLRES) yang berada di Kota Sintang;
b. Kepolisian Sektor (POLSEK) di kecamatan-kecamatan dalam wilayah kabupaten.
c. Komando Resort Militer (KOREM) di ibukota Kabupaten Sintang;
d. Komando Distrik Militer (KODIM) di ibukota kabupaten yaitu Kota Sintang;
e. Kawasan Komando Rayon Militer (KORAMIL) di kecamatan-kecamatan dalam wilayah kabupaten; dan
f. Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara

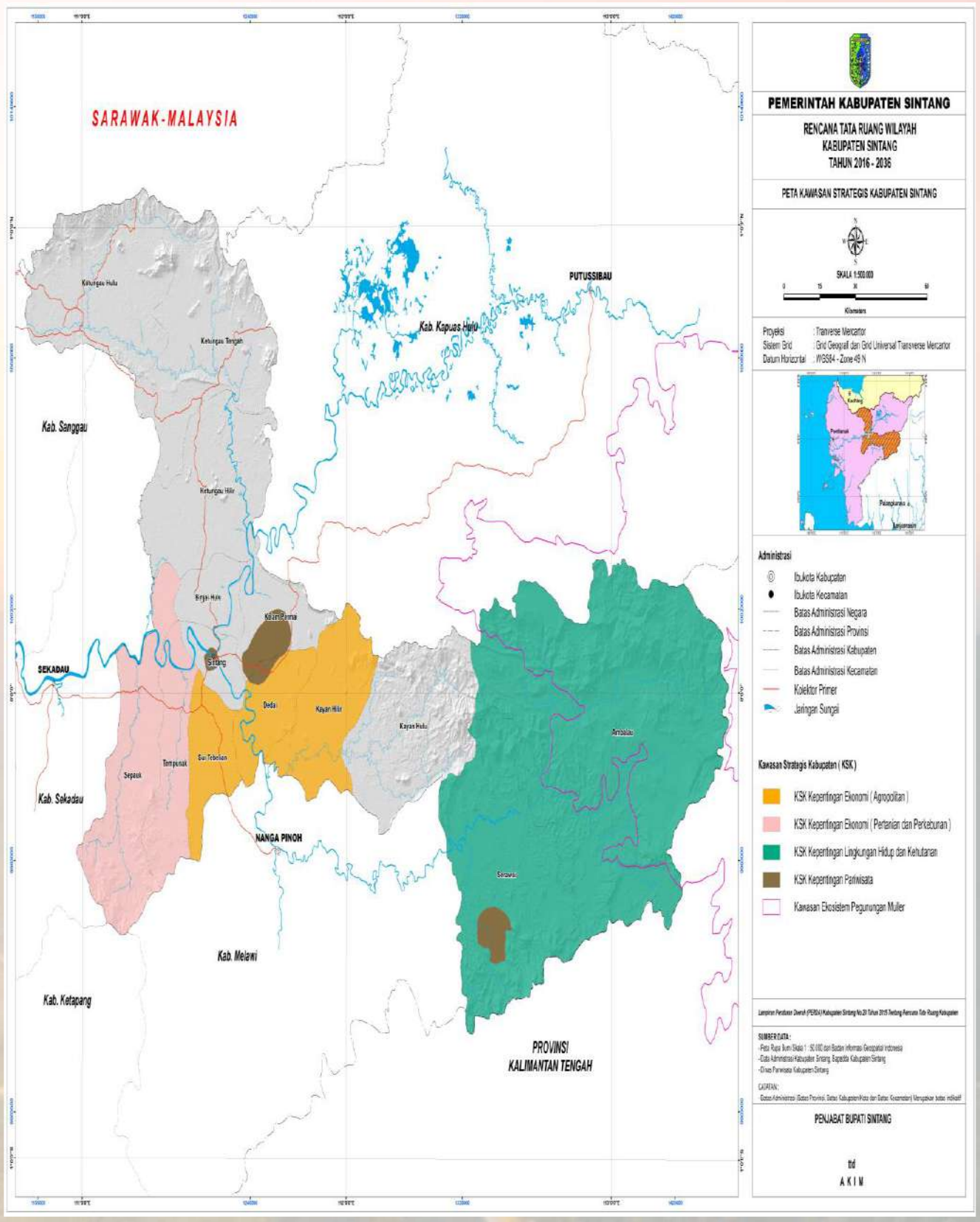
2.7.6. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis adalah merupakan bagian wilayah yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah baik di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Kawasan

Strategis di wilayah kabupaten terdiri atasKawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Sintang terdiri atas kawasan Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan perbatasan dan kawasan jantung kalimantan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Sintang, pada kawasan sektor unggulan pertambangan batubara, terletak di Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, dan Kecamatan Ambalau.

Kawasan strategis kabupaten, terdiri atas kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan; dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pariwisata; Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak, difungsikan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang; dan Kawasan Agropolitan terdapat di Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Sungai Tebelian. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan adalah Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai dengan Kawasan Ekosistem Muller sebagai zona perlindungan utama. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pariwisata meliputi Kawasan Sintang – Baning, Kawasan Klutap (Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap) dan Kawasan Penyangga Serawai – Jelundung sebagai kawasan desa wisata Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.



Sumber: RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036

Gambar 2.23.
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sintang

2.8. Indikasi Program

Tabel 2.108
Hasil Telaahan Struktur Ruang

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
I	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**																					
A	**Perwujudan Pusat Kegiatan (PKSN, PKW, PKL, PPK)**																					
A1	Perwujudan Sistem Perkotaan																					
1	Penetapan Status PusatKegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBDP, APBN	Bappeda
2	Penyusunan Rencana Tata Ruang Pusat-Pusat Kegiatan																					
	2.1. RTR PKW (Sintang)							X								1 Paket					APBDP	Dinas PU
	2.2. RTR PKSN (Jasa)														X	1 Paket					APBN	Kemen PU
	1.3. RTR PKL (7 Lokasi)	X			X	X	X	X		X				X		5 Paket					APBD	Dinas PU
	1.4. RTR PPK (9 Lokasi)		X	X		X	X		X		X	X	X		X	9 Paket					APBD	Dinas PU
3	Legalitas/ Penetapan Status Hukum RTR Pusat Kegiatan																					
	3.1. Legalitas RTR PKW							X								1 Paket					APBDP	Dinas PU
	3.2. Legalitas RTR PKSN														X	1 Paket					APBN	Kemen PU
	1.3. Legalitas RTR PKL	X			X	X	X	X		X				X		5 Paket					APBD	Dinas PU
	1.4. Legalitas RTR PPK		X	X		X	X		X		X	X	X		X	9 Paket					APBD	Dinas PU
4	Perwujudan Fungsi-fungsi Kegiatan Utama Pendukung PKW																					
	4.1.Pengembangan Prasarana sosial ekonomi							X													APBDP	Dinas PU

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	4.2. Pemantapan pelayananansimpul transportasi							X													APBDP	Dinas PU
	4.3. Penguatan Identitas kotafungsi PKW.							X													APBDP	Dinas PU
5	Perwujudan Fungsi-fungsi Kegiatan Utama Pendukung PKSN																					
	5.1. Pengembangan Prasarana sosek.														X						APBN	Kemen PU
	5.2. Pemantapan pelayanan transportasi														X						APBN	Kemen PU
	5.3. Penguatan Identitas kota fungsi PKSN														X						APBN	Kemen PU
6	Perwujudan Fungsi-fungsi Kegiatan Utama Pendukung PKL & PPL																					
	6.1. Pengembangan Prasarana sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							APBD	Dinas PU
	6.2. Pemantapan pelayanan transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							APBD	Dinas PU
	6.3. Penguatan Identitas kawasan fungsi PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							APBD	Dinas PU
7	Perwujudan Fungsi-fungsi Kegiatan Utama Pendukung Kawasan Agropolitan																					
	1.1. Pengembangan prasarana pendukung sistem agribisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dinas PU
	1.2. Pengembangan infrastruktur.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dinas PU
B	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama.**																					
1	Sistem Jaringan Transportasi Darat																					
	1.1. Pemeliharaan jalan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dinas PU
	1.2. Pengembangan ruas-ruas jalan baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dinas PU
	1.3. Pengembangan Terminal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	1.4. Penataan sistem trayekangkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
	1.5. Pengembangan angkutan umum massal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
2	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Sungai																					
	Pengembangan dermaga	X	X					X						X	X						APBD	Dishub
	2.1. Sungai Kapuas																					
	2.2. Sungai Melawi																				APBD	Dishub
	2.3. Sungai Ketungau												X	X	X						APBD	Dishub
	2.4. Sungai Serawai	X	X					X						X	X						APBD	Dishub
	2.5. Sungai Kayan																				APBD	Dishub
	2.6. Sungai Ambalau	X	X																		APBD	Dishub
3	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian																					
	3.1. Pemantapan pelayanan jaringan KA						X														APBD	Dishub
	3.2. Pengembangan Jalur KAbaru.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
	3.3. Pengembangan stasiun KA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
	3.4. Penataan Pelayana KA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
4	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara																					
	4.1. Pengembangan Bandara SeiTebelian						X									2 Paket					APBD	Dishub
	4.2. Pengembangan Bandara Tersier							X								3 Paket					APBD	Dishub
	4.3. Pengembangan Bandara Perintis	X													X	6 Paket					APBD	Dishub
C	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**																					
1	Perwujudan Sistem Jaringan Energi																					
	1.1. Pemeliharaan dan pemantapan PLTD	X	X		X			X			X		X	X	X	8 Paket					APBD & Swasta	Dinas

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
																						ESDM
	1.2. Pengembangan PLTU Sungai Ringin.							X								4 Paket					APBD & Swasta	Dinas ESDM
	1.3. Pengembangan PLTA Nokan Kayan		X													4 Paket					APBD & Swasta	Dinas ESDM
	1.4. Pengembangan PLTMH		X	X	X	X									X	5 Paket					APBD & Swasta	Dinas ESDM
	1.5. Pengembangan PLTS												X	X	X	3 Paket					APBD & Swasta	Dinas ESDM
2	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi																					
	2.1. Perluasan Pelayanan untuk PKW, PKSN, PKL,PPK & PPL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.2. Perluasan pelayanan jaringan terestrial nirkabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.3. Penataan Tower Telekomuniksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.4. Pengembangan Jaringan Satelit.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.5. Pengembangan Jaringan televisi lokal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.6. Pengembangan Jaringan stasiun radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
3	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air																					
	3.1. Perluasan Jaringan Irigasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.2. Pengembangan waduk penampung air baku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.3. Peningkatan pelayanan air minum perpipaan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.4. Pengembangan sistem penyediaan air minum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	3.5. Pengembangan bendung untuk kebutuhan air bakudan tenaga listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.6. Pengembangan embung untuk kebutuhan air bakudan pengairan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
4	Perwujudan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan																					
	4.1. Peningkatan sistem pengolahan sampah	X			X					X						3 Paket					APBD	Dinas PU
	4.2. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	9 Paket					APBD	Dinas PU
	4.3. Pengembangan TPST dg sistem 3 R.	X			X			X		X				X		5 Paket					APBD	Dinas PU
	4.4. Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah Terpadu.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	4.5. Pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja							X								1 Paket					APBD	Dinas PU
	4.6. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL)	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	13 Kecamatan					APBD	Dinas PU
	4.7. Pengembangan jaringan drainase Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas PU
	4.8. Pengembangan jaringan drainase Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas PU
	4.9. Pengembangan jaringan drainase Tersier	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas PU
	4.10. Sumber Mata Air													X		1 Paket					APBD	PDAM
	4.11. Sumber Air Baku				X	X		X				X	X	X		5 Paket					APBD	PDAM
	4.12. Pengembangn SAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	PDAM
II	**PERWUJUDAN POLA RUANG**																					
A	Perwujudan Kawasan Lindung																					
1	Perwujudan Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya																					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	1.1. Penetapan tata batas hutan lindung	X	X	X	X	X				X	X			X	X	19 Paket					APBN	Kemenhut
	1.2. Rehabilitasi kawasan hutan lindung.	X	X	X	X	X				X	X			X	X	19 Paket					APBN	Kemenhut
	1.3. Penetapan dan Pemantapan Kawasan Resapan Air	X	X		X	X					X					5 Paket					APBN	Kemenhut
	1.4. Perlindungan dan penertiban kawasanresapan air	X	X		X	X					X					5 Paket					APBN	Kemenhut
	1.5. Penetapan dan pemantapan kawasan bergambut			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		10 Paket					APBN	Kemenhut
	1.6. Perlindungan dan penertiban kawasanbergambut			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		10 Paket					APBN	Kemenhut
	1.7. Konservasi & rehabilitasi kawasan bergambut			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		10 Paket					APBN	Kemenhut
	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat																					
	2.1. Sempadan Sungai																					
	a. Penetapan sempadan sungai.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	b. deliniasi dan aturan zonasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	c. Penyebaran informasi (sosialisasi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	d. Perlindungan dan penertiban bertahap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	2.2. Sempadan Danau/Embung																					
	a. Penetapan sempadan					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut
	b. deliniasi dan aturan zonasi.					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	c. Penyebaran informasi					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut
	d. Perlindungan dan penertiban ertahap					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut
	2.3. Sempadan Danau																					
	1.4. Perlindungan dan penertiban kawasan resapan air	X	X		X	X					X					5 Paket					APBN	Kemenhut
	1.5. Penetapan dan pemantapan kawasan bergambut			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		10 Paket					APBN	Kemenhut
	1.6. Perlindungan dan penertiban kawasan bergambut			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		10 Paket					APBN	Kemenhut
	1.7. Konservasi & rehabilitasi kawasan bergambut			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		10 Paket					APBN	Kemenhut
2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat																					
	2.1. Sempadan Sungai																					
	a. Penetapan sempadan sungai.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	b. deliniasi dan aturan zonasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	c. Penyebaran informasi (sosialisasi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	d. Perlindungan dan penertiban bertahap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	2.2. Sempadan Danau/ Embung																					
	a. Penetapan sempadan					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut
	b. deliniasi dan aturan zonasi.					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	c. Penyebaran informasi					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut
	d. Perlindungan dan penertiban ertahap					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut
	2.3. Sempadan Danau																					
	Paparan Banjir																					
	a. deliniasi dan aturan zonasi.							X								1 Paket					APBD	Dinas Hut
	b. Penyebaran informasi (sosialisasi)							X								1 Paket					APBD	Dinas Hut
	c. Perlindungan dan penertiban bertahap							X								1 Paket					APBD	Dinas Hut
	2.4. Sempadan Mata Air																					
	a. Penetapan sempadanmata air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersebar di Sintang					APBD	Dinas Hut
	b. deliniasi dan aturanzonasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersebar di Sintang					APBD	Dinas Hut
	c. Penyebaran informasi (sosialisasi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersebar di Sintang					APBD	Dinas Hut
	d. Perlindungan dan penertiban bertahap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersebar di Sintang					APBD	Dinas Hut
	2.5. Kawasan RTH																					
	a. Masterplan RTHK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	b. RTHK 30% (PWK & PKSN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	c. RTHK 40% (PKL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	d. RTHK 50% (PPK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
3	Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam & Cagar Budaya																					
	3.1. Taman Nasional																					
	a. Penegasan batas kawasan							X			X					1 Paket					APBD	Dispar

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	b. Penetapan zonasi							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	c. Konservasi & rehabilitasi kawasan							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	kawasan.																					
	3.2. Taman Wisata Alam																					
	a. Penegasan batas							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	b. Penetapan zonasi							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	c. Konservasi & rehabilitasi kawasan.							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	3.3. Cagar Budaya																					
	a. Inventarisasi potensi							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	b. Penetapan kawasan							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	c. Konservasi & Revitalisasi							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
4	Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Alam																					
	4.1. Rawan Banjir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kec.					APBD	Dinas PU
	a. Identifikasi kawasan rawan banjir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kec.					APBD	Dinas PU
	b. Penetapan solusi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kec.					APBD	Dinas PU
	c. Sosialisasi & Realisasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kec.					APBD	Dinas PU
	4.2. Rawan Kebakaran Hutan	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
	a. Peraturan pengendalian	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
	b. Identifikasi	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
	c. Pengaturan pemanfaatan air tanah	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
	d. Sosialisasi	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
	e. Peningkatan SDM	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
5	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi																					
	a. Peraturan pengendalian				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10 Kec					APBD	Dishut
	b. Identifikasi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10 Kec					APBD	Dishut

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	c. Pengaturan pemanfaatan				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10 Kec					APBD	Dishut
	lindung geoligi																					
	d. Sosialisasi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10 Kec					APBD	Dishut
	e. Peningkatan SDM				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10 Kec					APBD	Dishut
6	Perwujudan Kawasan Lindung Lainnya																					
	a. Identifikasi	X	X					X								3 Paket					APBD	Dishut
	b. Penetapan koridor satwa	X	X					X								3 Paket					APBD	Dishut
	c. RTR koridor	X	X					X								3 Paket					APBD	Dishut
	d. Konservasi flora & fauna	X	X					X								3 Paket					APBD	Dishut
B	Perwujudan Kawasan Budidaya																					
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi																					
	1.1. Kawasan HPT																					
	a. Pemetaan kawasan	X				X				X	X				X	5 Paket					APBD	Dishut
	b. Pengembangan komoditas	X				X				X	X				X	5 Paket					APBD	Dishut
	1.2. Kawasan HP																					
	a. Pemetaan kawasan	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	10 Kec.					APBD	Dishut
	b. Pengembangan komoditas	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	10 Kec.					APBD	Dishut
	c. Rehabilitasi	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	10 Kec.					APBD	Dishut
	1.3. Kawasan HPK																					
	a. Pemetaan kawasan													X	X	2 Kec.					APBD	Dishut
	b. Pengembangankomoditas													X	X	2 Kec.					APBD	Dishut
	c. Rehabilitasi													X	X	2 Kec.					APBD	Dishut
2	Kawasan Peruntukan Pertanian																					
	2.1. Tanaman Pangan																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	b. Penetapan pertanian				X	X										2 Kec.					APBD	Distan

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	berkelanjutan																					
	c. Intensifikasi lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	d. Pertanian organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	e. Agrigisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	2.2. Hortikultura																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	b. Intensifikasi lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	c. Pertanian organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	d. Agrigisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	1.3.Perkebunan																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	b. Intensifikasi lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	c. Pertanian organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	d. Agrigisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	e. Kemitraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	1.4.Peternakan																					
	a. Pemantapan pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	b. Integrasi antar zona	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	c. Klasifikasi ternak besar.					X	X					X			X	4 Kec.					APBD	Distan
	d. Klasifikasi ternak kecil.	X		X		X	X					X	X			6 Kec.					APBD	Distan
	e. Ternak unggas					X	X	X			X	X				5 Kec.					APBD	Distan
3	Kawasan Peruntukan Perikanan																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	13 Kec.					APBD	Distan
	b. Perikanan Tangkap	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	13 Kec.					APBD	Distan
	c. Perikanan Sungai	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	13 Kec.					APBD	Distan
	d. Perikanan Danau					X	X					X	X	X	X	6 Kec.					APBD	Distan
	e. Perikanan Kolam					X		X	X	X			X			5 Kec.					APBD	Distan

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	f. Unit PPPI							X						X	X	3 Kec.					APBD	Distan
	g. Unit PPI					X		X				X	X	X		5 Kec.					APBD	Distan
	h. Pengembangan Sentra Produk							X					X	X		3 Kec.					APBD	Distan
	i. Peraturan zonasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 Paket					APBD	Distan
	j. Pemantapan Pelabuhan, PPI & TPI					X		X				X	X	X	X	6 Kec.					APBD	Distan
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan																					
	4.1. WPN																					
	a. Pemetaan	X	X													2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X													2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X													2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X													2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.2. Batubara																					
	a. Pemetaan	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.3. Logam																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.4. Non Logam																					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	a. Pemetaan		X													1 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi		X													1 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang		X													1 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi		X													1 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.5. Radio Aktif																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X					X	X	X			X	8 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X	X	X					X	X	X			X	8 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X	X	X					X	X	X			X	8 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X	X	X					X	X	X			X	8 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.6. Batuan																					
	a. Pemetaan	X			X	X	X	X	X		X	X	X			9 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X			X	X	X	X	X		X	X	X			9 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X			X	X	X	X	X		X	X	X			9 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X			X	X	X	X	X		X	X	X			9 Kec.					APBD	Dinas ESDM
5	Kawasan Peruntukan Industri																					
	5.1. Rencana Induk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 Paket					APBD	Disper
	5.2. Industri Besar			X	X	X	X	X	X							6 Paket					APBD	Disper
	5.3. Industri Sedang					X	X	X								3 Kec.					APBD	Disper

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	5.4. Industri Kecil																				
	a. Pangan		X			X	X	X		X	X	X		X	X	9 Kec.					APBD	Disper
	b. Sandang							X	X		X					3 Kec.					APBD	Disper
	d. Logam & Elektronika	X	X			X		X	X		X					6 Kec.					APBD	Disper
	e. Kerajinan			X	X	X		X			X		X	X	X	8 Kec.					APBD	Disper
	f. Berciri khusus	X	X						X	X	X					5 Kec.					APBD	Disper
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata																					
	6.1.Rencana Induk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Disper
	6.2. Peratran Zonasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Disper
	6.3. Perwujudan DTW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dispar
	6.4. Penetapan																				APBD	Dispar
	a. Wisata Budaya							X			X			X		5 Paket					APBD	Dispar
	b. Wisata Religi										X					1 Paket					APBD	Dispar
	c. Wisata Alam	X	X	X	X	X		X		X	X		X	X	X	53 Paket					APBD	Dispar
	d. Wisata Buatan						X	X			X					6 Paket					APBD	Dispar
7	Kawasan Peruntukan Permukiman																					
	7.1. Permukiman Perkotaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Semua Kec.					APBD	Dinas PU
	7.2. Permukiman Perdesaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 Kec.					APBD	Dinas PU

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
8	7.3. Agropolitan						X		X	X						3 Kec.					APBD	Dinas PU
	Kawasan Peruntukan Lainnya																					
	8.1. KODIM							X													APBD	Dishan
	8.2. KORAMIL	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishan
	Perwujudan Rencana Kawasan Strategis																					
	KS Nasional	X	X												X	2 KSN					APBN	Kemenhut
	KS Propinsi	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.					APBD P	Dinas ESDM
	KS Kabupaten																					
	a. Ekonomi				X	X	X			X			X			5 Kec.					APBD	Disperindag
	b. LH & Kehutanan	X	X													2 Kec.					APBD	Dishut
	c. Pariwisata	X						X			X					3 Kec.					APBD	Dispar

Dari telaahan Rencana Struktur Ruang maupun Pola Ruang, terdapat ketidaksesuaian lokasi indikasi program pada pelaksanaan nya. Beberapa faktor yang menjadi perubahan lokasi tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan nasional maupun provinsi. Beberapa kebijakan yang mempengaruhi antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Dalam penetapan Jalan bebas Hambatan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
4. Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)
5. Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.
6. Terdapat rencana jaringan jalur kereta api berdasarkan Kepmen Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
7. Gardu Induk dan sistem distribusi tegangan 150/20 kv, total kapasitas 150 MVA berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/HK.02/Mem.L/2021 Tentang RUPTL PT. PLN 2021-2030.
8. SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2020.

2.8.1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada suatu kabupaten/kota umumnya berbentuk tertentu dan pola perkembangannya dapat diestimasikan. Keputusan-keputusan pembangunan kota biasanya berkembang bebas, tetapi diupayakan sesuai dengan perencanaan penggunaan lahan. Motif ekonomi adalah motif utama dalam pembentukan struktur penggunaan tanah suatu kota dengan timbulnya pusat-pusat bisnis yang strategis.

Hingga tahun 2019, luas lahan yang ada di Kabupaten Sintang sebesar 2.206.994,65 ha dimana penggunaannya secara umum untuk belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, pelabuhan udara/laut, pemukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, sawah, semak/belukar, tanah terbuka, transmigrasi dan tubuh air. Penggunaan lahan tertinggi yaitu pada pertanian lahan kering campuran sebesar 983.502,51 ha sedangkan penggunaan lahan terendah yaitu pada pelabuhan darat/laut sebesar 23,23 ha.

Tabel 2.109.
Data Penggunaan Lahan Kabupaten Sintang Tahun 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Luas (km^2)	%
1	Belukar Rawa	17.068,75	170,69	**0,77**
2	Hutan Lahan Kering Primer	419.045,58	4.190,46	**18,99**
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	491.058,08	4.910,58	**22,25**
4	Hutan Rawa Sekunder	43.680,16	436,80	**1,98**
5	Hutan Tanaman	12.209,94	122,10	**0,55**
6	Pelabuhan Udara/Laut	23,23	0,23	**0,00**
7	Pemukiman	2.639,70	26,40	**0,12**
8	Perkebunan	91.359,10	913,59	**4,14**
9	Pertambangan	8.547,59	85,48	**0,39**
10	Pertanian Lahan Kering	2.685,47	26,85	**0,12**
11	Pertanian Lahan Kering Campuran	983.502,51	9.835,03	**44,56**
12	Sawah	184,24	1,84	**0,01**
13	Semak/Belukar	67.908,05	679,08	**3,08**
14	Tanah Terbuka	52.812,30	528,12	**2,39**
15	Transmigrasi	2.847,49	28,47	**0,13**
16	Tubuh Air	11.422,45	114,22	**0,52**
	TOTAL	**2.206.994,65**	**22.069,95 100**	**100**

Sumber: RPJMD Kab. Sintang, Tahun 2021-2026

2.8.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Salah satu produk tata ruang di Kabupaten Sintang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Industri Sungai Ringin Tahun 2020-2039. RDTR BWP Industri Sungai Ringin ini diharapkan menjadi acuan dalam perizinan dan pemanfaatan ruang, serta dapat mamacu tumbuhnya berbagai industri pengolahan komoditas lokal yang ada di Kabupaten Sintang yang mampu berdaya saing dan ramah lingkungan. Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja Pasal 14 juga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan usahanya dengan RDTR.

Luas kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Sintang berdasarkan SK Kementerian Kehutanan

Nomor 936 mencapai 1.326.435,63 Ha (59,39 %) dari luas Kabupaten Sintang. Luas rencana kawasan lindung dapat dilihat pada tabel 2.110.

Tabel 2.110.
Luas Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Sintang

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
1	Hutan Lindung (HL)	472.205,37	65,27%
2	Taman Nasional (TN)	67.969,98	9,40%
3	Taman Wisata Alam (TWA)	1.340,26	0,19%
4	Danau	734,79	0,10%
5	Gambut	40.543,27	5,60%
6	Sungai dan Sempadan Sungai	74.696,63	10,33%
7	Kemiringan	65.924,08	9,11%

Sumber: SK Kemenhut No. 733 Tahun 2014 dalam RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036

Tabel 2.111.
Luas Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Sintang

No.	Rencana Kawasan Budidaya	Total Luas (Ha)	%
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	760.012,75	26,28%
2	Kawasan Peruntukan Pertanian	1.173.606,85	40,58%
3	Kawasan Peruntukan Pertambangan	542.446,41	18,75%
4	Kawasan Peruntukan Peternakan	216,21	0,01%
5	Kawasan Peruntukan Pariwisata	415.833,17	14,38%
6	Kawasan Peruntukan Industri	174,50	0,01%

Pembangunan di Kabupaten Sintang yang tidak melupakan aspek lingkungan memberikan dampak positif terhadap luas area Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Luas Area Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sintang dipertahankan untuk tetap memenuhi persyaratan yaitu sebesar 30,00% dari luas wilayah. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga sangat baik. Pengembangan

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kawasan (RTHK) diintegrasikan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada seluruh kawasan perkotaan, baik itu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Secara lengkap luas ruang terbuka hijau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.112.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2017 - 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
		M^2	M^2	M^2	M^2
1	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	30% dari luas 21.635 Km^2	30% dari luas 21.635 Km^2	30% dari luas 21.635 Km^2	30% dari luas 21.635 Km^2
2	Ketaatan terhadap RTRW	100% dari jumlah penduduk	100% dari jumlah penduduk	100% dari jumlah penduduk	100% dari jumlah penduduk

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, Tahun 2020;
Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036

Berdasarkan aktivitas ekonomi dan diarahkan dalam RTRW, Kabupaten Sintang berpotensi untuk dikembangkan kegiatan ekonomi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir.

Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Sintang terdiri atas kawasan Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan perbatasan dan kawasan jantung kalimantan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Sintang, pada kawasan sektor unggulan pertambangan batubara, terletak di Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, dan Kecamatan Ambalau.

Kawasan strategis kabupaten, terdiri atas kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan; dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pariwisata; Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak, difungsikan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang; dan Kawasan Agropolitan terdapat di Kecamatan

Kayan Hilir, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Sungai Tebelian. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan adalah Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai dengan Kawasan Ekosistem Muller sebagai zona perlindungan utama. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pariwisata meliputi Kawasan Sintang – Baning, Kawasan Klutap (Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap) dan Kawasan Penyangga Serawai – Jelundung sebagai kawasan desa wisata Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.

Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan di antaranya yang menonjol adalah sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam), sektor kehutanan (gaharu buaya, rotan, kayu bulat atau kayu belian), sektor pertanian (Padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah- buahan), sektor perikanan (Usaha Perikanan Keramba dan Budidaya Kolam Serta Perikanan Umum dengan jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampam, Gurami, Semah dan Paten/Juara), sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

2.8.3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan wilayah sangat dibutuhkan, dikarenakan perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah akan berkembang apabila terjalin keterkaitan yang kuat berdasarkan aspek aksesibilitas lokasi, ketersediaan fasilitas pelayanan publik, potensi penduduk, dan keterkaitan wilayah. Sedangkan pusat-pusat pertumbuhan yang belum mampu memberikan dampak perkembangan ekonomi pada daerah hinterland merupakan persoalan yang muncul akibat adanya disparitas antar wilayah.

Sebagaimana diketahui, rencana umum tata ruang (RTRW) merupakan rencana pengelolaan ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan serta untuk kepentingan wilayah secara keseluruhan, termasuk sub-sub wilayah serta sektor-sektor.

Dalam RTRW Kabupaten Sintang tahun 2016-2036, telah ditetapkan beberapa kawasan strategis, yakni:

A. Kawasan strategis nasional, terdiri dari:

1. Kawasan Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan perbatasan.
2. Kawasan jantung Kalimantan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

B. Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Sintang adalah merupakan kawasan sektor unggulan pertambangan batubara di (a) Kecamatan Ketungau Hulu; (b) Kecamatan Ketungau Hilir; (c) Kecamatan Ketungau Tengah; (d) Kecamatan Kayan Hilir; (e) Kecamatan Kayan Hulu; (f) Kecamatan Serawai; dan (g) Kecamatan Ambalau.

C. Kawasan strategis kabupaten, terdiri dari:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
   a. Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak, difungsikan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang;
   b. Kawasan Agropolitan terdapat di Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Sungai Tebelian.
2. Kawasan strategis dari sudut sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan adalah Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai dengan Kawasan Ekosistem Muller sebagai zona perlindungan utama.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan pariwisata dari:
   a. Kawasan Sintang – Baning;
   b. Kawasan Klutap (Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap);
   c. Kawasan Penyangga Serawai - Jelundung sebagai kawasan desa wisata Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan umumnya dilakukan dengan mendorong peningkatan dan persebaran kegiatan investasi. Pengembangan sentra-sentra ekonomi dilakukan melalui pengembangan sektor- sektor strategis. Pendekatan yang ditempuh dengan cara menentukan pusat-pusat kegiatan wilayah untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan atau sentra-sentra ekonomi.

Adapun pusat kegiatan wilayah di Kabupaten Sintang adalah:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kota Sintang
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu Kota Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Nanga Serawai di Kecamatan Serawai; Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir; Nanga Sepauk di Kecamatan Sepauk; Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah;dan Sungai Ringin sebagai PKL industri yang terletak di Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu; Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir; Binjai di Kecamatan Binjai Hulu; Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak; Sungai Ukoi di Kecamatan Sei Tebelian; Dedai di Kecamatan Dedai; Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu; Kelam di Kecamatan Kelam Permai; dan Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau.
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri atas desa-desa pusat pertumbuhan.

Adapun pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Sintang dengan mensinergikan pendekatan nilai strategis kawasan dan kegiatan-kegiatan sub wilayah serta sektor ekonomi diupayakan sebagai berikut:

a) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan mendorong peningkatan dan persebaran kegiatan investasi berdasarkan kawasan.
b) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor- sektor sesuai potensi unggulan dan daya dukung tiap kecamatan.
c) Penyediaan Infrastruktur diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor unggulan di kawasan/wilayah yang strategis sebagai pusat pertumbuhan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan *gap* kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara umum permasalahan di Kabupten Sintang dapat dikelompokkan menjadi 5 aspek antara lain :

1. Aspek Geografi dan Demografi ; secara umum permaslahan pada aspek geografis menyangkat luas wilayah yang disertai dengan penataan ruang, dengan luas wilayah mencapai 21.638 km^2 maka tantangan dan permaslahan juga semakin kompleks. dan pada aspek demografi yaitu terkait kependudukan dengan pemenuhan layanan dasarnya yang diperkirakan ditahun 2045 jumlah penduduk mencapai 571.960 jiwa
2. Hubungan Antar Wilayah; permasalahan pada aspek hubungan antar wilayah yaitu terkait konektifitas antar wilayah, kuantitas dan kualitas jalan jembatan, pembangunan transportasi massal yang terintegrasi, serta kualitas dan kuantitas jaringan internet.
3. Kebencanaan Dan Perubahan Iklim; salah satu aspek penting dalam pemetaan permasalahan yaitu pada aspek kebencanaan dan perubahan iklim yang secara umum di gambarkan bahwasanya pengelolaan perubahan iklim sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dunia yang disertainya arus industrilisasi yang semakin meningkat menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi yang akhirnya mempengaruhi iklim global dan memicu resiko bencana yang semakin besar. Oleh karena itu pengelolaan persampahan, mitigasi bencana, pengendalian kebakaran dan pengrusakan lingkungan serta pengelolaan sumber daya air menjadi permasalahan yang urgen untuk ditangani secara terencana dan efektif.
4. Kesejahteraan Masyarakat; salah satu tujuan adanya pemeirntahan yaitu meningkatkan ksejahteraan Masyarakat baik secara ekonomi, Kesehatan, Pendidikan maupun penyediaan pangan, sandang dan papan. Dengan kemiskinan diangka 8,18% maka aspek kesejahteraan menjadi salah satu permasalahan penting untuk dapat dituntaskan.

5. Daya Saing Daerah; aspek daya saing daerah merupakan Gambaran umum dari kemajuan ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, tata Kelola pemerintahan kabupaten sintang dibandingkan dengan kabupaten/kota lain baik dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat, regional Kalimantan maupun nasional.

permasalahan pembangunan Kabupaten Sintang berdasarkan aspek dan/atau bidang urusan pemerintah daerah diuraikan pada table dibawah ini :

Tabel 3.1
Aspek permasalahan daerah

Aspek	Lingkup Masalah	Akar Permasalahan
Geografi & Demografi	penataan Ruang dan Wilayah	• Wilayah Kabupaten Sintang Yang Luas 21.638KM2 • Jumlah Desa sebanyak 391 desa dan 16 kelurahan • Belum adanya atau sesuainya regulasi/peraturan terkait penataan ruang • Masih banyak batas wilayah antar desa yang belum selesai • Belum Efektifnya Upaya Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang • SDM Aparatur Yang Berkompetensi Untuk Kegiatan Pengawasan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Belum Maksimalnya Penegakan Peraturan Daerah Terutama Terhadap Bangunan-Bangunan Yang Melanggar Rencana Tata Ruang Dan Belum Memiliki persetujuan bangunan gedung

Aspek	Lingkup Masalah	Akar Permasalahan
		• Belum optimalnya dukungan terhadap program sertifikasi tanah dan pelaksanaan reformasi agraria guna mendukung kepastian hukum kepemilikan tanah/lahan
	Pengembangan Kawasan Perbatasan	• Infrastruktur Jalan dan jembatan wilayah perbatasan masih kurang baik • Jauhnya rentang kendali dari pusat pemerintahan kebupaten ke wilayah perbatasan • Belum optimalnya upaya Pengelolaan Kelembagaan Antarnegara Dalam Mendukung Aktivitas Lintas Batas & Integrasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dengan Negara Tetangga • Terbatasanya Pendanaan Untuk Kawasan Perbatasan
	Kependudukan	• Jumlah Penduduk Lansia Bertambah Banyak Karena Adanya Kesadaran Pola Hidup Sehat di Masa Muda & Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan • Rendahnya produktifitas penduduk • Jumlah Kelahiran Lebih Banyak Dari Kematian • Migrasi Masuk Lebih Banyak Dari Migrasi Keluar • Persebaran penduduk Belum Merata Antar Kecamatan

Aspek	Lingkup Masalah	Akar Permasalahan
		• Pertambahan Penduduk Lansia Cenderung Membebani Pengeluaran Daerah, Jika Tidak Dibekali Dengan Pengetahuan Dan Keterampilan Untuk Kegiatan Produktif • Tingginya pernikahan penduduk dibawah 15 tahun
	Infrastruktur jalan dan jembatan	• jalan kabupaten sangat panjang yaitu 1.787, 96 KM dengan kondisi baik hanya sebesar 6,5% • jembatan yang menjadi yang tanggung jawab kabupaten sebanyak 979 unit dengan sebagian besar masih kontruksi kayu • Penggunaan Jalan Tidak Sesuai Dengan Kapasitas Jalan (Tonase) • Dana peningkatan jalan dan jembatan masih minim
	Perumahan dan permukiman	• Makin luasnya Kawasan dan permukiman kumuh • Belum optimalnya penyediaan fasilitas umum pada kawasan pemukiman • berkembangnya area perkotaan • kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah • penyediaan listrik baru dan terbarukan
	Penyediaan air minum	• Sebanyak 87.560 Rumah Yang Belum Memiliki Akses Air bersih • penyediaan sarana dan prasarana Air minum belum optimal • belum adanya Data Perencanaan Air minum • Menurunnya Kualitas air baku
	Sanitasi Dan Air Limbah	• Belum Adanya Master Plan Air Limbah Domestik • Belum Dimilikinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) • Belum adanya Regulasi Atau Perda Air Limbah Domestik

Aspek	Lingkup Masalah	Akar Permasalahan
		• Rendah Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pengelolaan Air Limbah • Kurang Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengelolaan Air Limbah
Hubungan Antar Wilayah	Konektivitas Dan Aksestabilitas wilayah	• Jumlah Transportasi Umum Yang Menghubungkan Desa/Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten Yang Kurang. • Jarak Tempuh Yang Jauh Menghubungkan Ibukota Kabupaten Dengan Ibukota Provinsi • Wilayah Yang Luas • Belum berkembangnya moda trasportasi massal yang terintegrasi
Kebencanaan Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Persampahan	• Akumulasi Sampah Yang Merusak Lingkungan • Meningkatnya Volume Sampah • Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. • Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap budaya sehat
	Pengendalian, Kebakaran Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup serta kebencanaan	• Ketidakcukupan Dalam Upaya Melindungi Lingkungan Dari Pencemaran Dan Kerusakan • Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam • Belum Terkoordinasi Sistem Penegakan Hukum • Belum Optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Kurangnya Sarana Dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan • Masih banyaknya Penambangan Tanpa Izin • Tutupan Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) • Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) • Tingginya intensitas banjir • Belum Optimalnya mitigasi bencana daerah
	Sumber Daya Air	• Kondisi Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Masih Rendah

Aspek	Lingkup Masalah	Akar Permasalahan
		• 49,37 % Dari Bangunan Utama Dalam Kondisi Rusak • 78,48 % Dari Jaringan Irigasi Primer Dalam Kondisi Rusak • 67,09 % Dari Jaringan Irigasi Sekunder Dalam Kondisi Rusak • 86,08 % Dari Jaringan Irigasi Pembuangan Dalam Kondisi Rusak
Kesejahteraan Masyarakat	Rendah Produktivitas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan	• Belum Optimalnya Produktivitas Tanaman Pangan Strategis • Belum Optimalnya Sarana Dan Prasana Yang Mendukung Sektor Pertanian • Belum Optimalnya Kelembagaan Petani • Harga Produk ditingkat petani dan pekebun Yang Rendah • Pengelolaan Pertanian dan perkebunan Masih Secara Tradisional • Alih Fungsi Lahan pertanian • Upah Kerja Rendah • Biaya Produksi Tinggi • SDM Yang Kurang terlatih • Belum optimalnya penanganan Hama Penyakit • Kurangnya Benih/Bibit Berkualitas • Belum optimalnya riset dan inovasi bidang pertanian • Harga pupuk mahal dan tidak stabil • Menurunnya produktifitas perkebunan
	Ketahanan Pangan, Peternakan dan perikanan	• Stok Pangan Terbatas • Pasokan Gizi Rendah • Pola Konsumsi Yang Kurang Sehat • Rendah Pengelolaan Potensi Lahan Produktif • Rendah Produktivitas Peternakan • Minim Sarana & Prasarana Peternakan • Rendah Keterampilan & Pengetahuan Peternak • Belum Optimal Penerapan Teknologi Peternakan • Penurunan Produksi Ikan • Belum Optimalnya Budidaya Ikan • Terbatasnya Ketersediaan Benih Unggul Ikan Untuk Budidaya

Aspek	Lingkup Masalah	Akar Permasalahan
		• Rendah Produksi Pakan Ikan • Terbatasnya Akses Modal • Rendah Keterampilan & Pengetahuan Pembudidaya Perikanan • Belum Optimal Penerapan Teknologi Perikanan • Belum tersedia struktur ruang peternakan dan perikanan
	Penanganan PMKS	• Rendah Kualitas Penanganan PMKS yang hanya mencapai 58% dari target sebesar 75% • Belum Optimal Pemberdayaan Bagi Fakir Miskin yang meningkat dari tahun 2019 sebesar 47.826 dan pada tahun 2022 naik menjadi 80.844 Dan Komunitas Adat Terpencil • Tinggi Angka Kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 8,18 dengan tingkat penurunan yang sangat rendah dari tahun 2020 sebesar 9,27 • Belum Tersedia Fasilitas Rumah Singgah Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraaan Sosial (PMKS) • Belum Optimal Akses Pelayanan Sosial Dasar
	Kesehatan masyarakat	• Status Kesehatan Ibu & Anak Masih Rendah • Belum optimalnya kinerja penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian anak (AKA) • Status Gizi Masyarakat Masih Rendah • Tenaga Medis (Terutama Dokter Spesialis & Dokter Gigi) Masih Kurang • Masih rendahnya cakupan tenaga medis yaitu baru tersedia 7 dari 13 jenis tenaga kesehatan • Perilaku Hidup Bersih & Sehat Belum Optimal • Kurang Pemerataan Sarana & Prasarana di Fasilitas Kesehatan
	Ketenagakerjaan	• Rendahnya daya saing tenaga kerja • Masih tingginya angka pengangguran terbuka

Aspek	Lingkup Masalah	Akar Permasalahan
		• Perencanaan Tenaga Kerja Merespon Era Digitalisasi Kini & Masa Datang Belum Tersedia • Ketimpangan TPAK Laki-Laki Dengan TPAK Perempuan • Belum optimalnya sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja • Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam upaya penyediaan dan penempatan tenaga kerja
	Kemiskinan	• Tingginya garis kemiskinan • Rendahnya pendapatan masyarakat • Kerentanan terhadap gejolak ekonomi • Infrastruktur yang belum baik menyebabkan harga kebutuhan masyarakat tinggi • Tingginya perkawinan anak
	Pertumbuhan Ekonomi	• Lamban Transformasi Struktur Ekonomi • Belum Menguatnya Basis Ekonomi berkelanjutan • Terbatasnya Sektor-Sektor Unggulan • Lambannya Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Komoditi Unggulan Daerah • Belum Optimalnya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan • Terbatasnya Penyediaan Infrastruktur Dasar • Belum adanya kawasan industri terpadu dan mandiri • Belum berkembangnya ekonomi kreatif dan UMKM
Daya Saing Daerah	Budaya & Kehidupan Beragama	• Belum optimalnya Penataan Kawasan Budaya • Pelestarian Cagar Budaya masih belum optimal • Terbatas Kelembagaan Seni • Minimnya kegiatan Pagelaran Seni Budaya • Belum Optimal Pemanfaatan Museum • Rendah Minat Generasi Muda

Aspek	Lingkup Masalah	Akar Permasalahan
		• Rendahnya Jumlah Grup Kesenian yang aktif • Minim Kegiatan Festival Seni Dan Budaya • Terbatas Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya • Rendah Indeks Toleransi
	Pendidikan	• Kualitas akses pendidikan belum merata • Profesionalisme guru dan tenaga pendidikan yang masih rendah • Belum optimalnya penuntasan Penduduk Buta Huruf Dan Angka Putus Sekolah Ke Tingkat Yang Lebih Rendah • Kuantitas dan pemerataan guru belum optimal • Belum berkembangnya Kurikulum Berbasis Digital
	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	• Keterbatasan Akses Internet Di Kantor Desa • Terhambat Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi • Masih Terdapat Desa-Desa "*Blank Spot*" • Kualitas Internet Juga Masih Kurang • Kuantitas Dan Kualitas Sdm Peneliti Belum Memadai
	Tata Kelola Pemerintahan	• Belum Optimal Akuntabilitas Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Public • Belum Optimal Kapasitas Dan Kualitas Pelayanan Aparatur • Belum Sepenuh Efektif Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan • Rendah Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Dan Kedisiplinan Pegawai • Belum Optimal Upaya Pengelolaan Domain Kebijakan Spbe, Indeks SPBE di angka 1,8 pada tahun 2023 • Pemerintah Kabupaten Sintang Juga Belum Sepenuhnya Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Sistem Pelayanan Publik Bagi Masyarakat • Rendahnya kapasitas keuangan daerah yang pada tahun 2023 mendapatkan skor 0,98 dengan kategori sangat rendah
	Hukum & Ham	• Masih rendahnya Perlindungan bagi kelompok rentan termasuk ibu dan anak

Aspek	Lingkup Masalah	Akar Permasalahan
		• Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Masih Dilakukan Secara Parsial • Masih Tinggi Potensi Tindakan Kejahatan Lintas Negara • Persentase Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Kejahatan Konvensional Dari Tahun Ke Tahun Mengalami Peningkatan • Tinggi Penyakit Masyarakat

3.2. Isu Strategis

3.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu internasional yang dihadapi dunia secara global telah banyak mendapat perhatian dari berbagai ilmuan dan berbagai lembaga internasional. Mereka telah mencoba untuk memprediksi dan dan mengindentifikasi berbagai isu global yang patut untuk diantisipasi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam pandangan mereka pemahaman terhadap isu global sangat penting agar masa depan global bisa dipersiapkan dengan cermat sehingga dapat mencegah terjadinya bencana-bencana yang meluas di semua Negara. Isu global yang cukup menonjol beberapa tahun terakhir ini seperi kemiskinan, kerawanan pangan, perubahan iklim, hak asasi manusia, krisis dan konflik kemanusiaan, kesetaraan gender, krisis energi, wabah penyakit, kemajuan teknologi dan sebagainya. Berbagai isu ini bukan hanya berdampak signifikan tetapi juga memiliki keterhubugan antara satu isu dengan isu lainnya. Beberapa isu global ini memicu perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan arah kebijakan setiap negara, sehingga akan menciptakan tatanan kehidupan baru.

Secara lebih menyeluruh, isu global tergambar dengan baik melalui *megatrend global* yang akan dihadapi menuju 2045. *Megatrend global* ini memiliki dua sisi, yakni memberikan potensi kemajuan bagi sosial ekonomi global, tetapi disisi lain juga berdampak disrupsi. Beberapa perubahan tersebut meliputi: Urbanisasi dunia; Perdagangan internasional; Disrupsi teknologi; Demografi global; Geopolitik dan geoekonomi; Penduduk kelas menengah, Persaingan sumber daya manusia, Perubahan Iklim, Tata Kelola Keuangan Global dan Pemanfaatan Luar Angkasa.

3.2.1.1. Demografi Global

Tantangan nyata dihadapi semua Negara saat ini adalah peningkatan penduduk. Berdasarkan data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini berjumlah 7 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar pada tahun 2050. Hal ini perlu diantisipasi dengan baik setiap Negara termasuk Indonesia. Berbagai upaya seperti pelayanan kesehatan yang baik, urbanisasi yang normal, kekuatan kelaurga dan rumah tangga, persoalan anak dan remaja dan sebagainya.

Kewaspadaan yang semakin meningkat akibat konflik-konflik negara di dunia seperti Perang antara Rusia dan Ukraina berpotensi menciptakan konflik geopolitik di masa depan di wilayah lain, seperti yang terjadi di Semenanjung Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut Cina Selatan**.** Kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung akibat perang bagi negara lain, seperti tingginya tekanan inflasi global, krisis energi dan pangan, dan lain-lain. Selain itu, perang mendorong negara-negara untuk mencari cara militer untuk melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya konflik atau perang lagi di kemudian hari.

3.2.1.2. Geopolitik dan Geoekonomi

Kemunculan kawasan Indo-Pasifik akibat perkembangan dinamika geopolitik yang melibatkan wilayah maritim Samudera Hindia dan Pasifik. Pasifik telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga memicu persaingan antar negara.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. IndoPasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Negara-negara berkembang semakin mendominasi output dunia. Pada tahun 2015, negara-negara berkembang menyumbang 55% dari total output dunia, meningkat dari 34% pada tahun 1980. Sedangkan pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang akan mencapai 71% dari total nilai output dunia, dengan negara-negara Asia sebagai

pendorong utama menyumbang 54% dari total nilai output global. Secara keseluruhan, pendapatan per kapita di negara maju masih lebih tinggi dibandingkan negara berkembang.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Selama 60 tahun terakhir, sebagian besar negara berkembang mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. 54% ekspor nasional Amerika Latin berbasis komoditas, 81% di Afrika, dan 75% di negara-negara Timur Tengah.Perubahan struktur perekonomian, terutama di negaranegara pengimpor komoditas, telah menurunkan permintaan terhadap komoditas. Tingkat kesiapan menghadapi perubahan komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang terjadi akibat kebijakan makroekonomi yang kredibel berdasarkan prinsip kehati-hatian telah mendukung pertumbuhan selama bertahun-tahun dan akan menjadi salah satu pilar utama di masa depan. Investasi jangka panjang pada peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Reformasi dan perbaikan lingkungan usaha akan mendukung terbentuknya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

3.2.1.3. Perkembangan Teknologi

Saat ini dunia sedang mengalami gelombang digitalisasi. Manfaat dari perkembangan teknologi digital telah dirasakan oleh masyarakat, seperti Internet of Things (IoT), blockchain, hyper-connected Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Life Cycle Management, dan Robotic Process. otomatisasi (RPA)), komputasi tepi, sistem robot otomotif, 3D dan teknologi masa depan.

Perubahan teknologi mencakup percepatan otomatisasi sebagian besar aktivitas industri, seperti: nanoteknologi, blockchain; robotika pintar, IoT, kecerdasan buatan, dan teknologi imersif; digitalisasi untuk memungkinkan konektivitas: material canggih; rekayasa genetika dan bioteknologi; teknologi

Inovasi dalam proses belajar mengajar berbasis kecerdasan buatan (AI) diperlukan agar transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kemampuan dapat terus berjalan tanpa

kendala ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan kecerdasan buatan maka penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan ekonomis.

Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Kecerdasan buatan kini bahkan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperkirakan sebelumnya. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pengambilan kebijakan, termasuk pengembangan peraturan. Pemanfaatan teknologi membantu tercapainya proses pembentukan undang-undang dan peraturan serta pembangunan lembaga-lembaga nasional yang lebih terencana, lengkap dan sistematis.

3.2.1.4. Urbanisasi Dunia

Berdasaran data yang ada, terdapat dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies (UN DESA). Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kuncibagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan Di sisi lain, dampak pandemy COVID-19 di samping.

3.2.1.5. Konstelasi Perdagangan Global

Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga

meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial dan kompetensi SDM industri yang berkualitas. khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Kerja sama Kawasan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global investasi.

3.2.1.6. Tata Kelola Keuangan Global

Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things (IoT), Computing, Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan.

3.2.1.7. Pertumbuhan Kelas Menengah

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melaluivirtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses

3.2.1.8. Persaingan Memperebutkan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan sumber daya alam (SDA) (energi, air, dan pangan) diperkirakan akan meningkat secara global di masa depan. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sumber daya alam seperti air, pangan, dan energi sehingga mendorong persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam.

3.2.1.9. Perubahan iklim

Perubahan iklim global, kerusakan dan polusi lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman (tiga krisis global, tiga krisis planet) diperkirakan akan terus berlanjut dan tidak dapat dihindari. *Triple Planet Crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan model pembangunan seperti biasa (BaU) yang lama dan beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Tren pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global**.** Banyak negara maju dan berkembang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Promosi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon yang dilakukan Indonesia adalah arah pengembangan kebijakan global di masa depan.

3.2.1.10. Pemanfaatan luar angkasa

Antariksa dianggap sebagai warisan bersama umat manusia, yaitu suatu ruang strategis yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Peraturan bahwa ruang angkasa bukan milik suatu negara tertentu telah mendorong banyak negara untuk mengembangkan industri dirgantara. Dalam jangka panjang, ekonomi antariksa global akan tumbuh secara signifikan.Ekonomi luar angkasa diperkirakan akan mencapai $469 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai $1 triliun pada tahun 2040.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki posisi strategis, kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki daya tawar besar dalam hubungan internasional. Kebijakan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah mencatat kemajuan yang signifikan di berbagai bdiang kehidupan sehingga dapat bersaing dalam lingkup regional asia maupun dunia. Namun

demikian, tantangan dan isu pembangunan Indonesia semakin kompleks seiring perkembangan dunia sehingga sangat mempengaruhi pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045. Adapun beberapa isu dan tantangan pembangunan ke depan sepeerti tergambar dalam konsep RPJP Nasional 2025-2045 dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.2.2.1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.

Rata-rata produktivitas yang tercermin dari Total Factor Productivity (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.



Gambar 3.1 Rata-Rata Total Factor Productivity Index

Sumber: APO, 2022



grafik 3.2 Total Factor Productivity Index 2010-2019

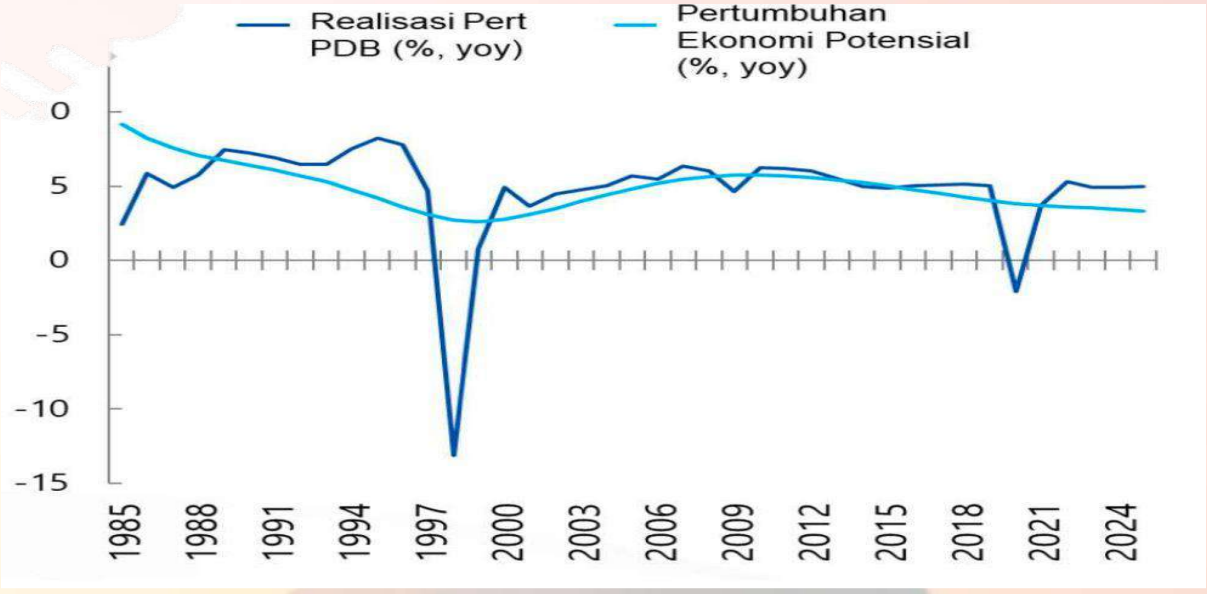
Sumber: APO, 2022

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Berikutnya, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015-2022.

Selain itu, produktivitas yang rendah telah menyebabkan menurunnya ekonomi potensial, dan bahkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5 persen.

3.2.2.2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi disebabkan oleh masih lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari seri anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81). Thailand (1,31), dan Malaysia (1,04) pada tahun 2005.



grafik 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia(1985-2024)

Sumber: Bank Dunia, 2023

3.2.2.3. Kuantitas dan Kualitas SDM peneliti belum memadai

Peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408) pada tahun 2019. Berikutnya, ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1.445, jauh tertinggal dari Malaysia (1.863), Singapura (9.766), dan Korea Selatan (267.527) pada tahun 2021. Sementara dari sisi H-Indeks, Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan Malaysia (415), Singapura (697), dan Korea Selatan (810). Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah

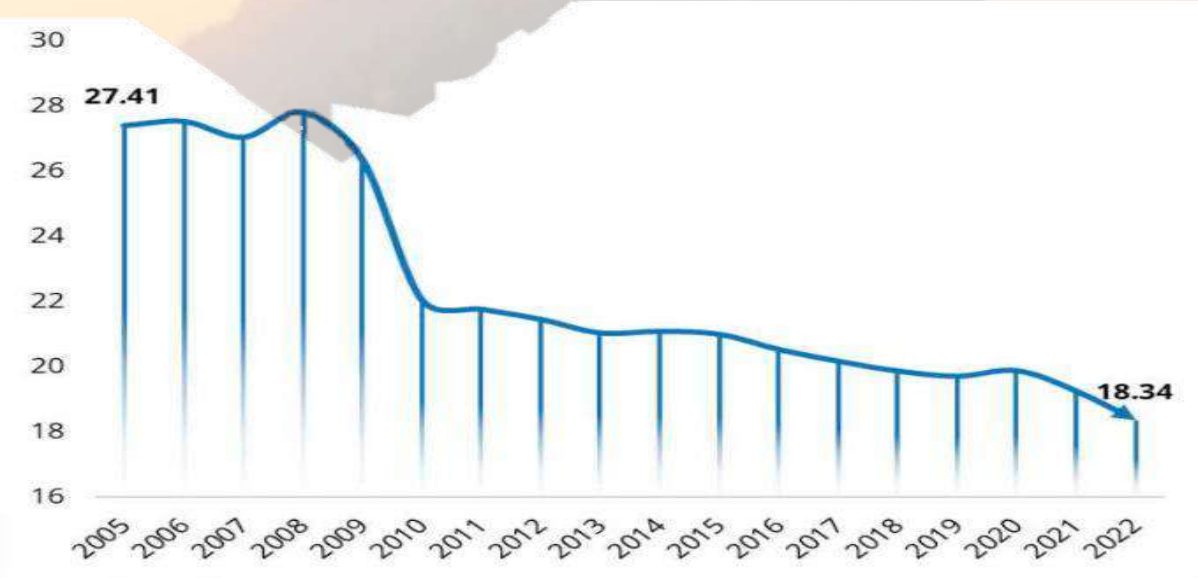
(*scientific temper*).

3.2.2.4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.

Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil

riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

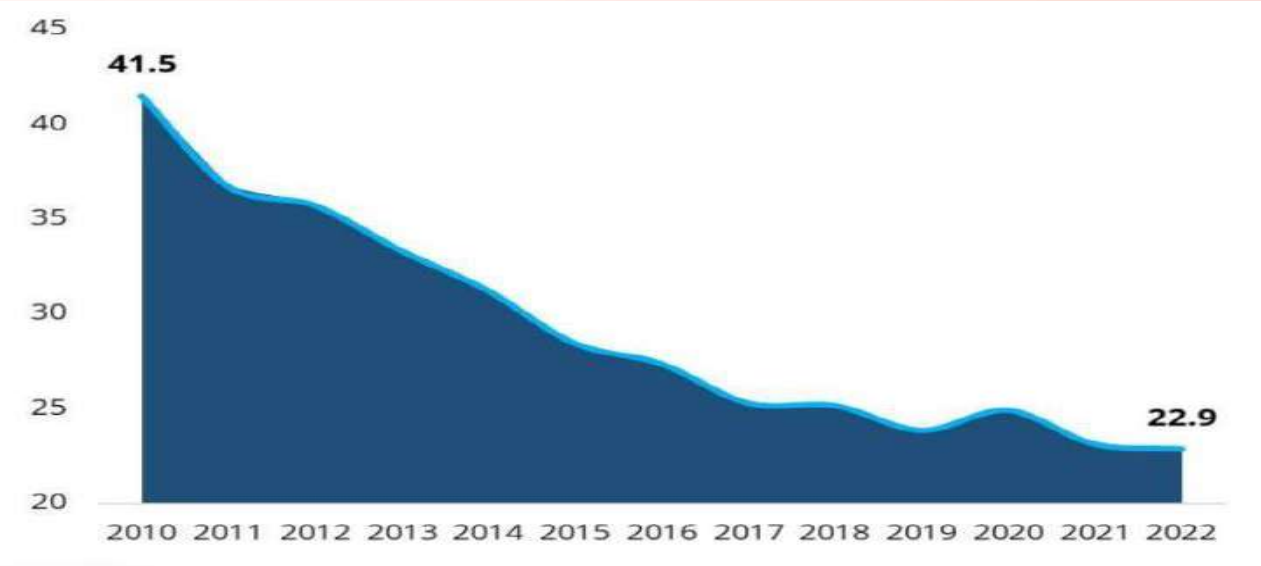
Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut kemudian menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022.



grafik 3.4 Kontribusi Manufaktur terhadap PDB

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus melambat dari Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya Rp22,9 juta per pekerja pada tahun 2022 (Grafik 1.2.5).



grafik 3. Produktivitas Pertanian

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata. Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung. masih rendah. Di samping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

3.2.2.5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SLOC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB Kemaritiman masih berada pada kisaran 7,60 persen. Rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum

berkembangnya diversifikasi industri dan emerging sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Di sisi lain, masih terdapat tantangan antara lain rendahnya penanganan sampah plastik masih tingginya kegiatan illegal unreported, and unregulated fishing (IUUF): serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut. Meskipun demikian, peran kemaritiman dalam perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan mengingat potensi ekonomi kelautan yang besar.

3.2.2.6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (low-skilled workers) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

3.2.2.7. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal

Sebesar US$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US$8.449.0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM (56.3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

3.2.3. Isu Strategis Kabupaten Sintang

Isu strategis merupakan bentuk perumusan dengan melihat permasalahan di daerah serta disinkronisasi dengan kebijakan perencanaan pembangunan lainnya dalam dokumen RPJPD, Adapun perumusan isu strategis berdasarkan permasalahan daerah seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Perumusan Isu Strategis dari Permasalah Daerah

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
Kepadatan Penduduk	Kesejahterahan Masyarakat
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraaan Sosial (PMKS)	
Ketenaga Kerjaan	
Kemiskinan	
Rendahnya Produktivitas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan	Pembangunan Ekonomi Skala Regiona
Ketahanan Pangan, Peternakan dan perikanan	
Pertumbuhan Ekonomi	
Bonus Demografi Akan Berakhir	Sumber Daya Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing
Rendahnya produktifitas penduduk	
Penduduk Usia Di Bawah 15 Tahun Yang Menikah Dan Melahirkan	
Kesehatan Masyarakat	
Pendidikan	
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
Pembangunan kebudayaan dan kehidupan beragama	
Wilayah dan Penataan Ruang	Infrastruktur Yang Handal Dan Berkelanjutan
Pengembangan Kawasan Perbatasan	
Infrastruktur jalan dan jembatan	
Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Penyediaan air minum	
Sanitasi dan Air Limbah	
Sumber Daya Air	
Konektivitas Dan Aksestabilitas wilayah	
Sengketa Batas Wilayah	Tata Kelola Pemerintah
Tata Kelola Pemerintahan	
Rendahnya Kapasitas Keuangan Daerah	
Belum optimalnya akutabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
Penanganan dan penegakan Hukum dan HAM	Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
Pengelolaan Persampahan	Ketahanan Dan Kualitas Lingkungan Hidup
Pengendalian, Kebakaran Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	
Banjir Dan Tanah Longsor	
Mitigasi Bencana	

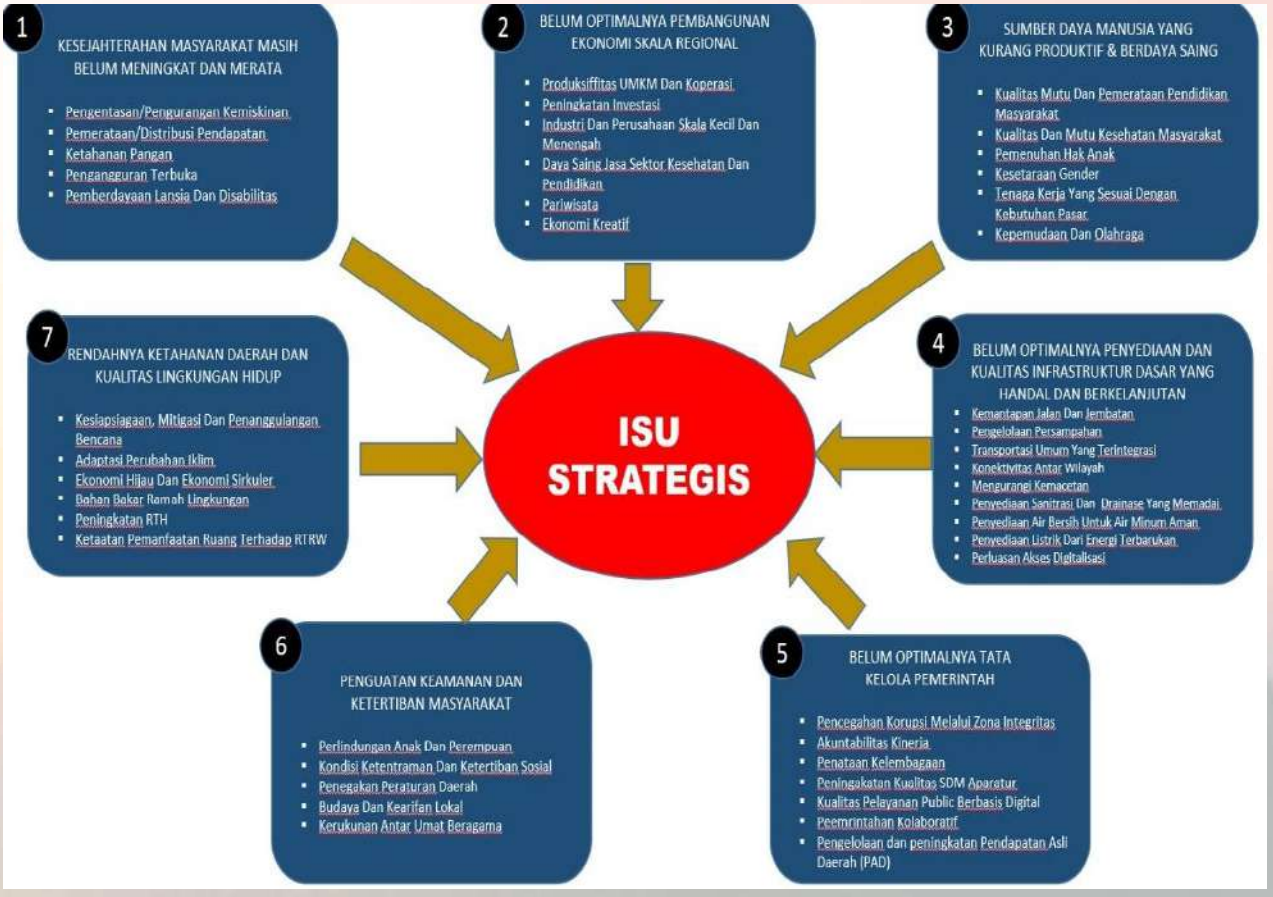
Berdasarkan perumusan diatas serta mempertimbangkan isu internasional, nasional, dan isu Kalimantan Barat maka disimpulkan bahwa isu strategis yang ada di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Kesejahterahan Masyarakat Masih Belum Meningkat Dan Merata, dengan lingkup:
   a. Pengentasan/Pengurangan Kemiskinan
   b. Pemerataan Distribusi Pendapatan
   c. Ketahanan Pangan
   d. Pengangguran Terbuka
   e. Pemberdayaan Lansia dan Disabilitas
2. Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi Skala Regional, dengan lingkup:
   a. Produksitivitas UMKM dan Koperasi
   b. Peningkatan Investasi
   b. Industri Dan Perusahaan Skala Kecil dan Menengah
   c. Daya Saing Jasa Sektor Kesehatan dan Pendidikan
   d. Pariwisata
   e. Ekonomi Kreatif
3. Sumber Daya Manusia Yang Kurang Produktif dan Berdaya Saing, dengan lingkup:
   a. Kualitas Mutu dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat
   b. Kualitas dan Mutu Kesehatan Masyarakat
   c. Pemenuhan Hak Anak
   d. Kesetaraan Gender
   e. Tenaga Kerja Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar
   f. Kepemudaan dan Olahraga
4. Belum Optimalnya Penyediaan Dan Kualitas Infrastruktur Yang Handal Dan Berkelanjutan, dengan lingkup:
   a. Kemantapan Jalan dan Jembatan
   b. Pengelolaan Persampahan
   c. Transportasi Umum yang Terintegrasi
   d. Konektivitas Antar Wilayah

e. Mengurangi Kemacetan
f. Penyediaan Sanitrasi dan Drainase yang Memadai
g. Penyediaan Air Bersih Untuk Air Minum Aman
h. Penyediaan Listrik Dari Energi Terbarukan
i. Perluasan Akses Digitalisasi

5. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintah, dengan lingkup:
   a. Pencegahan korupsi melalui zona integritas
   b. Akuntabilitas kinerja
   c. Penataan kelembagaan
   d. Kualitas SDM Aparatur
   e. Kualitas pelayanan publik berbasis digital
   f. Pemerintahan Kolaboratif
   g. Kapasitas fiscal daerah
6. Penguatan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, dengan lingkup:
   a. Perlindungan anak dan perempuan
   b. Kondisi ketentraman dan ketertiban sosial
   c. Penegakan peraturan daerah
   d. Budaya dan kearifan lokal
   e. Kerukunan antar umat beragama
7. Rendahnya Ketahanan Daerah Dan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan lingkup :
   a. Kesiapsiagaan, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
   b. Adaptasi Perubahan Iklim
   c. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Sirkuler
   d. Bahan Bakar Ramah Lingkungan
   e. Peningkatan RTH
   f. Ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW

Isu strategis Kabupaten Sintang secara jelas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.6. Isu Strategis Kabupaten Sintang

BAB IV
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholders di daerah. Landasan dalam merumuskan visi pembangunan didasarkan pada gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Sintang periode 2025 - 2045 mengandung pernyataan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang, yang disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin komplek. Dinamika perubahan dan tantangan ke depan yang semakin kompleks perlu dituangkan dalam dalam perencanaan pembangunan yang bertahap, terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

Menghadapi era globalisasi saat ini, Pemerintah Kabupaten Sintang mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar, serta menggali potensi-potensi ekonomi dan keuangan, agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Disamping itu, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel senantiasa dikedepankan dalam upaya merespon tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Perumusan Visi Kabupaten Sintang juga tidak lepas dari Visi RPJPN yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Serta Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berbunyi "Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan".

4.1. Visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang.

Perumusan visi pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2045 didasarkan pada isu-isu strategis pembangunan daerah. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Sintang, yaitu: (1) Belum optimalnya kinerja pembangunan ekonomi, lambannya hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah, dan belum optimalnya penerapan ekonomi hijau; (2) Belum optimalnya pemenuhan kapasitas dan pengembangan sarana prasarana dasar dan kawasan perbatasan, serta ketimpangan antar wilayah, dan kondusivitas daerah; (3) Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter; transisi demografi dan pengentasan kemiskinan (4) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan; (5) Belum optimalnya kedaulatan pangan dan penangan alih fungsi lahan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah tersebut, maka visi RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2045 adalah:

"KABUPATEN SINTANG YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025-2045 yaitu: Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1) **Sejahtera,** mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontribusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.
2) **Maju**. Kemajuan dari sisi ekonomi tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB per kapita. Selain dari sisi ekonomi, kemajuan juga diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai

dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.

3) **Berkelanjutan**. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan disegala bidang baik, ekonomi, social, dan infrastruktur serta penerapan ekonomi hijau senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Perumusan visi pembangunan Kabupaten Sintang 2025-2045 berdasarkan pada masalah utama atau isu strategis pembangunan. Tabel dibawah ini menunjukan perumusan pokok-pokok visi berdasarkan masalah utama atau isu strategis pembangunan Kabupaten Sintang

Tabel 4.1 Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Sintang

No	Isu Strategis	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Kesejahterahan Masyarakat	Sejahtera	KABUPATEN SINTANG YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN
2	Pembangunan Ekonomi Skala Regiona	Maju	
3	Sumber Daya Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing	Maju, Sejahtera	
4	Infrastruktur Yang Handal Dan Berkelanjutan	Maju, Berkelanjutan	
5	Tata Kelola Pemerintah	Maju	
6	Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Sejahtera	
7	Ketahanan Dan Kualitas Lingkungan Hidup	Berkelanjutan	

Penyelarasan antara visi dan sasaran visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPD Kabupaten Sintang 2025-2045 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Penyelarasan Visi Kabupaten Sintang

No	Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Prov Kalbar 2025-2045	Visi RPJPD Kab Sintang 2025-2045
1	Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur	Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	KABUPATEN SINTANG YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN

Dalam merumuskan visi, terdapat sasaran visi sebagai indicator penilaian terhadap pencapaian visi di tahun 2045. Sasaran visi RPJPD Kabupaten tentunya harus selaras dengan sasaran visi nasional dan sasaran visi provinsi. Dan berikut sasaran visi RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2025-2045

Tabel 4.3 Sasaran Visi

No	KABUPATEN SINTANG			
	Sasaran Visi	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Perkapita	47,5	180-230
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9,61	13,2
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini	0,265 - 0,31	0,238 - 0,280
		Tingkat Kemiskinan	6,83	4,25
		kontribusi PDRB	6,91	6,96
3	Kepemimpinan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,97	5
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	IPM	70,08	80,01
		IMM	N/A	N/A
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas emisi GRK	67,10	99,30

Selain penyelarasan pernyataan Visi perlu adanya penyelarasan sasaran visi agar capaian pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dapat lebih terinci dan konsisten. Peneylarasan sasaran visi dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.4 Penyelarasan Sasaran Visi

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD KALIMANTAN BARAT 2024-2045				RPJPD KABUPATEN SINTANG 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	GNI Perkapita	5500-5520	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Perkapita	53-54,5	350,47-409,86	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Perkapita	47,5	180-230
		Kontribusi PDB Maritim	8,1	15,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan* (Bebrp Kab)	16,50-17,40	28,63-37,57		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9,61	13,2
		Kontribusi PDB Manufaktur	20,8	28,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia	38,37	134,61				
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini	0,379-0,382	0,290-0,320	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini	0,315-0,321	0,253-0,304	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini	0,265 - 0,31	0,238 - 0,280
		Tingkat Kemiskinan	7,0-8,0	0,5-0,8		Tingkat Kemiskinan	5,65-8,15	0,08-0,56		Tingkat Kemiskinan	6,83	4,25
		Kontribusi PDB KTI	21,5	28,5		Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,65	6,07-7,63				
						Kontribusi PDRB	1,35	1,66		kontribusi PDRB	6,91	6,96
3	Kepemimpinan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Global Power Indeks	34	15	Kepemimpinan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,33	3,5-4	Kepemimpinan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,97	5
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	IMM	0,5	0,64	Daya saing sumber daya manusia meningkat	IPM	70,08	80,01
										IMM	N/A	N/A
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK	38,6	93,5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK	77,51	83,24	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	67,10	99,30

4.2. Misi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan sesuai tugas-tugas dan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, permasalahan, dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sintang periode sebelumnya.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2045, diperlukan misi yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sebagai berikut:

1. **Menghadirkan ekonomi Sintang yang produktif, stabil, inklusif, mandiri dan merata**

   Yaitu misi yang secara khusus mengoptimalkan ekonomi daerah sebagai tolak ukur dalam pembangunan kesejahteraan Masyarakat agar tercipta suatu kemandirian daerah yang produktif, stabil, inklusif dan berkelanjutan.

2. **Mewujudkan pembangunan manusia Sintang yang bermoral, unggul, berdaya saing dan bermartabat**

   Yaitu misi yang berfokus pada peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas masyarakat Kabupaten Sintang.

3. **Mewujudkan Sintang yang terkoneksi dan terdigitalisasi melalui infrastruktur yang handal dan menyeluruh**

   Yaitu misi yang menempatkan pembangunan infrastruktur di segala bidang sebagai upaya utama dalam menjadikan Kabupaten Sintang yang Maju dan Sejahtera.

4. **Mewujudkan tata kelola yang adaptif untuk pemerintahan daerah yang bersih, efektif, terpercaya, melayani dan kolaboratif**

   Yaitu misi yang berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah.

5. **Menjaga ketahanan ekologi melalui pelestarian alam dan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan**

   Yaitu misi yang secara khusus menjaga agar pembangunan kabupaten sintang dapat selaras dengan pelestarian alam dan ekosistem lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain sebagai upaya pencapaian Visi daerah, Misi juga menjadi pedoman dalam membuat arah kebijkaan daerah. Oleh sebab itu penyelarasan misi antara RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPD Kabupaten Sintang wajib selaras agar sinergistitas pembangunan dapat terjaga. Adapun penyelarasan dimaksud sebagai berikut :

Tabel 4.5 Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPD Kabupaten Sintang

No	RPJPN		RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD KAB SINTANG 2025-2045
	Agenda	Misi	Agenda	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan pembangunan manusia Sintang yang bermoral, unggul, berdaya saing dan bermartabat.
		Transformasi Ekonomi		Transformasi Ekonomi	1. Menghadirkan ekonomi Sintang yang produktif, stabil, inklusif, mandiri dan merata
					2. Mewujudkan Sintang yang terkoneksi dan terdigitalisasi melalui infrastruktur yang handal dan menyeluruh
		Transformasi Tata Kelola		Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan tata kelola yang adaptif untuk pemerintahan daerah yang bersih, efektif, terpercaya, melayani dan kolaboratif
2	Landasan Transfromasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, serta Ekonomi Makro	Landasan Transfromasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, serta Ekonomi Makro	1. Menghadirkan ekonomi Sintang yang produktif, stabil, inklusif, mandiri dan merata
					2. Mewujudkan tata kelola yang adaptif untuk pemerintahan daerah yang bersih, efektif, terpercaya, melayani dan kolaboratif

No	RPJPN		RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD KAB SINTANG 2025-2045
	Agenda	Misi	Agenda	Misi	Misi
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Menjaga ketahanan ekologi melalui pelestarian alam dan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan
3	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	1. Mewujudkan Sintang yang terkoneksi dan terdigitalisasi melalui infrastruktur yang handal dan menyeluruh
		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	2. Menjaga ketahanan ekologi melalui pelestarian alam dan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan
		Kesinambungan Pembangunan		Kesinambungan Pembangunan	

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2005-2025. Tabel di bawah ini merupakan rumusan capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Sintang.

Tabel 5.1.
Target Capaian Indikator Makro

Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2023	Baseline 2025	Target Capaian			
				Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4
Pertumbuhan Ekonomi	%	**4,68**	5,28	5,39	5,68	5,81	5,94
PDRB per Kapita	Juta (Rp.)	**42,43**	47,57	47,57-90	90-120	120-180	180-230
Indeks Gini (Gini Ratio)	%	**0,31**	0,265	0,265	0,254	0,246	0,238
Indeks Infrastruktur	Indeks	**53,39**	60,33	67,6	72,33	77,4	80,01
Rasio Desa Mandiri Wilayah Perbatasan	%	**10,34**	17,24	25,86	51,72	77,59	100
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	**68,67**	70,08	71,47	73,05	75,55	80,01
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	**2,92**	2,8	2,67	2,52	2,24	2,08
Angka Kemiskinan	%	**8,18**	6,83	6,74	5,59	4,84	4,25
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	**B**	B	B	BB	A	A
Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	**2,84**	2,95	3,5	4,00	4,50	5,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	Indeks	**72,81**	79,28	80,13	80,99	81,85	82,46

Sumber: Hasil Data Olahan, Tahun 2023
*Keterangan : *Menggunakan Data Capaian 2023*

Dalam rangka mewujudkan capaian target pembangunan, pembangunan jangka panjang dilakukan dengan pentahapan Transformasi Ekonomi, Transformasi Infrastruktur, Transformasi Sosial, Transformasi Sosial Tata Kelola Pemerintahan, dan Transformasi Lingkungan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan Tahun 2045. Secara umum, arah kebijakan setiap periode dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2025-2029: Penguatan Modal Dasar Pembangunan

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Sintang difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui peningkatan pembangunan dan pemerataan ekonomi, pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar diseluruh wilayah kecamatan serta khususnya diwilayah perbatasan dengan Pembangunan PLBN Sungai Kelik , pengembangan sumber daya manusia daerah; penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan, dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari dengan lingkungan.

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2030-2034: Akselerasi Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun kedua (periode 2) di Kabupaten Sintang difokuskan pada akselerasi pembangunan daerah. Akselerasi (percepatan) pembangunan daerah diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengembangan produk unggulan daerah, pengembangan industri berbasis inovasi dan berdaya saing; percepatan peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian dan komoditas UMKM, percepatan nilai tambah investasi daerah, percepatan jangkauan infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi; percepatan pemanfaatan dan pengendalian ruang, percepatan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat; percepatan peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan

sosial, pendampingan anak dan perempuan, dan pemberdayaan komunitas; penguatan penataan rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan Provinsi Kapuas Raya, penguatan tata kelola pemerintahan dengan percepatan pemekaran wilayah (Kecamatan dan Desa), implementasi layanan publik, dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2035-2039: Perluasan Aktivitas Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun ketiga (periode 3) di Kabupaten Sintang difokuskan pada perluasan aktivitas pembangunan daerah. Perluasan aktivitas pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan jaringan rantai nilai domestik dan global, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana/infrastruktur dasar terutama jalan poros kabupaten sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi, penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, Transformasi tata kelola kelembagaan pemerintahan yang adaptif, ASN yang profesional dan kompetitif, partai politik yang transparan dan akuntabel, dan masyarakat sipil mandiri dan berbudaya, tata kelola lingkungan hidup selaras, lestari, dan berkelanjutan.

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2040-2045: Pemantapan Capaian Pembangunan

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada periode 4 ini di Kabupaten Sintang difokuskan pada keberlanjutan dan pemantapan capaian pembangunan yang terintegrasi. Pemantapan capaian pembangunan pembangunan diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi; pemantapan kondisi sarana dan prasarana pembangunan; pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman; pengendalian ruang terbuka hijau, pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; perlindungan sosial yang adaptif; dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkualitas, dan kolaboratif, serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan.

Adapun penjabaran arah kebijakan lima tahunan, Kabupaten Sintang selama tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.2
ARAH KEBIJAKAN

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
KABUPATEN SINTANG YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	Menghadirkan ekonomi Sintang yang produktif, stabil, inklusif, mandiri dan merata	Peningkatan Pembangunan Dan Pemerataan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Ekonomi Sesuai Potensi Lokal, Menjaga Ketersediaan Pangan, Peberdayaan UMKM berbasis potensi lokal, Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja, Pengembangan Investasi Lokal Yang Berdampak Luas, Penetapan kawasan industri dan produk unggulan daerah, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	Akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengembangan produk unggulan daerah, Keterjangkauan Pangan, pengembangan kawasan industri berbasis inovasi dan berdaya saing; percepatan peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian dan komoditas UMKM dan percepatan nilai tambah investasi daerah;	Perluasan aktivitas ekonomi yang produktif, merata dan mandiri melalui peningkatan daya saing UMKM dan investor, perluasan industri dan ekspansi produk berbasis lokal, penguatan jaringan rantai nilai domestik dan global serta menjaga Kualitas dan Keamanan Pangan	pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Mewujudkan pembangunan manusia Sintang yang bermoral, unggul, berdaya saing dan bermartabat	Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Melalui Penguatan Pondasi Dan Modal Pelaksanaan Transformasi Pembangunan Pendidikan, Transformasi Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Sosial Budaya Dan Keagamaan;	Akselerasi transformasi pendidikan dan kesehatan melalui pemerataan akses dan mutu layanan kepada masyarakat; percepatan peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan, dan pemberdayaan komunitas serta optimalisasi Pembangunan Sosial Budaya Dan Keagamaan;	Perluasan transformasi pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan daya saing SDM, Penguasaan IPTEK, penguatan sosial budaya dan keagamaan serta manjaga keberlanjutan kesejahteraan yang inklusif dan merata	pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta perlindungan sosial yang adaptif
	Mewujudkan Sintang yang terkoneksi dan terdigitalisasi melalui infrastruktur yang handal dan menyeluruh	Pemenuhan Kapasitas Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur Dasar Diseluruh Wilayah Kecamatan Melalui Perbaikan/Penambahan Infrastruktur Dasar Yang Rusak Dan Kurang, Memperkuat Keterhubungan Antar	Akselerasi jangkauan infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, listrik, sanitasi dan air bersih serta telekomunikasi yang mendukung kegiatan kemajuan sosial dan ekonomi, percepatan pemanfaatan dan pengendalian ruang, penguatan literasi	Perluasan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektifitas, produktifitas dan daya saing daerah , Optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang, mendorong kemajuan kawasan perbatasan dan pemerataan digitalisasi	pemantapan kondisi infrastruktur dasar, sarana dan prasarana pembangunan, pengendalian dan modernisasi kawasan permukiman;

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Wilayah Kecamatan Yang Memiliki Potensi Ekonomi Produktif, Perluasan Sarana Pendukung Digitalisasi Daerah, penguatan dukungan terhadap reformasi agraria serta Perencanaan Penataan Ruang Secara Detail dan Pembangunan Diwilayah Perbatasan Melalui Pembangunan PLBN Sungai Kelik;	digitalisasi dan pengembangan pengelolaan kawasan perbatasan;		
	Mewujudkan tata kelola yang adaptif untuk pemerintahan daerah yang bersih, efektif, terpercaya, melayani dan kolaboratif	Penguatan Fungsi Dan Peran Kelembagaan Dan Koordinasi Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dan Desa, penguatan pemerintahan kolaboratif serta fasilitasi usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya;	Akselerasi Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan bersih, peningkatan kualitas pelayanan publik yang didasari digitalisasi, percepatan pemekaran wilayah dalam mendukung Provinsi Kapuas Raya , dan	Perluasan kinerja tata kelola dan pelayanan publik Pemerintahan Daerah dan Desa berbasis digital yang bersih, efektif, terpercaya, melayani dan kolaboratif	pemantapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkualitas, dan kolaboratif

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Menjaga ketahanan ekologi melalui pelestarian alam dan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Yang Lestari, Optimalisasi Pencegahan, Mitigasi dan Rekonstruksi Bencana Alam, Pengelolaan Persampahan Dan Kawasan Kumuh, serta Penyiapan Berbagai Modal Pengembangan Ekonomi Hijau dan berkelanjutan Yang Sesuai Potensi Daerah	Akselerasi Pemanfaatan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan, penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, modernisasi pengelolaan sampah, penerapan ekonomi hijau serta energi baru dan terbarukan	Perluasan tata kelola lingkungan hidup melalui penguatan adaptasi dan mitigasi bencana, penerapan ekonomi hijau yang berdampak pada penurunan emisi GRK selaras, lestari, dan berkelanjutan, pemanfaatan pengelolaan sampah yang bernilai tambah ekonomi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.	pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan dan pemantapan adaptasi bencana serta optimalisasi penerapan ekonomi hijau

5.2. Sasaran Pokok

Berdasarkan kertas kerja perumusan sasaran pokok yang telah disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 1 tahun 2024 maka didapati hasil perumusan sasaran pokok sebagai berikut :

1. penguatan stabilitas ekonomi makro daerah melalui pengembangan iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi.
2. peningkatan pemerataan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta perlindungan sosial
3. peningkatan transformasi digital serta penyediaan infrastruktur, sarana prasarana dasar dan pembangunan perdesaan
4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing
5. peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berketahanan dan resiliensi terhadap bencana

Adapun indikator yang mencerminkan capaian kinerja dari sasaran tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table 5.3 Sasaran Pokok

SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR		TARGET	
					BASELINE 2025	TARGET 2045
1.	penguatan stabilitas ekonomi makro daerah melalui pengembangan iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	9,61	13,2
			2.	Pengembangan Pariwisata		
			A.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,5	6,1
			B.	Jumlah Wisman	260	300
			3.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	N/A	N/A
			4.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			A.1	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	N/A	N/A
			A.2	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	1,51	6,33-8,11
			5.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,018	0,1

SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR		TARGET	
					BASELINE 2025	TARGET 2045
			6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,8	2,08
			7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,01	62,8
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-2,27	1,35
		Stabilitas Ekonomi Makro	1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,412	5,79
			2.	Tingkat Inflasi (%)	2.25-2.90	1,50-2,50
2.	peningkatan pemerataan kesehatan, pendidikan dan kesehateraan sosial yang berkualitas dan berbudaya	Kesehatan Untuk Semua	1.	Usia Harapan Hidup (Uhh)	72,81	75,01
			2.	Kesehatan Ibu Dan Anak		
			A.	Angka Kematian Ibu (Akb)	12	0
			B.	Prevelensi Stunting	18,23	5,67
			3.	Penanganan Tuberkolosis		

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR		TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
		A.	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Tuberkolosis	65,01	100
		B.	Angka Keberhasilan Penanganan Tuberkolosis	92,02	100
		4.	Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	95,43	100
	Pendidikan Berkualitas Dan Merata	1.	Hasil Pembelajaran		
		A.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
		a)	Literasi membaca	60,06	72,5
			SD	54	70
			SMP	66,12	75

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR		TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
		b)	Numerasi	52,5	65
			SD	40	60
			SMP	65	70
		B.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk		
		a)	Literasi membaca	N/A	N/A
		b)	Numerasi	N/A	N/A
		C.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,8	12
		D.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,7	15
		E.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	6,81	9,4

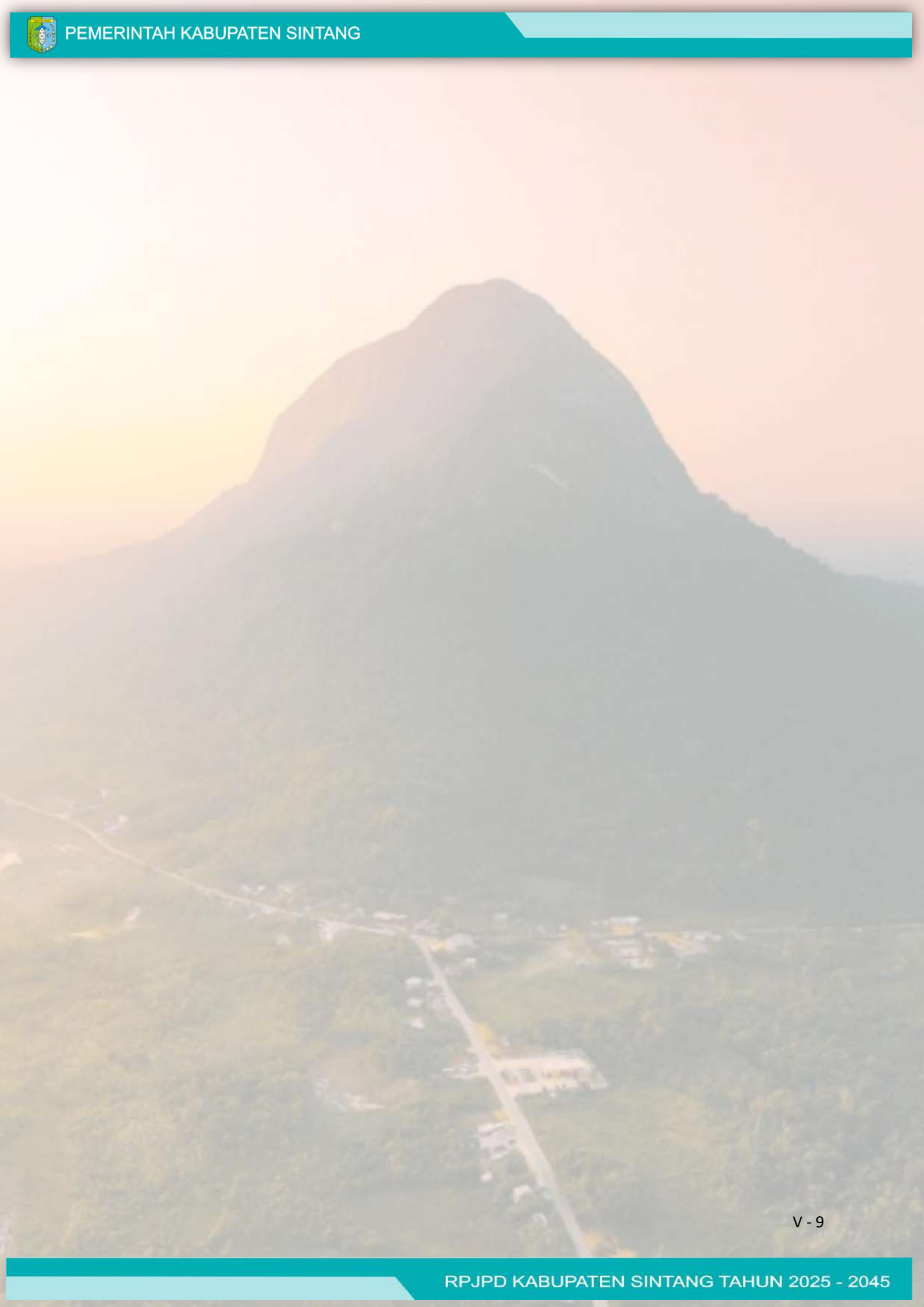
SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR		TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
		F.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	N/A	N/A
	Perlindungan Sosial Yang Adaptif	1.	Tingkat Kemiskinan (%	6,83	3,9-4,25
		2.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten(%)	32,16	50,01
		3.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	N/A	N/A
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	N/A
		2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	N/A	N/A

SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR		TARGET	
					BASELINE 2025	TARGET 2045
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	N/A	N/A
			2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG	0,567	0,23
3.	peningkatan transformasi digital serta penyediaan infrastruktur, sarana prasarana dasar dan pembangunan perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	1.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	63,82	85,98
			2.	Persentase Desa Mandiri (%)	35,38	87,17
			3.	Indeks Infrastruktur	60,33	80,01
		Transformasi Digital	1.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	5,59	6,04
4.	peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1.	Indeks Reformasi Hukum	47,31	70
			2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,85	4
			3.	Indeks Pelayanan Publik	4	5

SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR		TARGET	
					BASELINE 2025	TARGET 2045
			4.	Indeks Integritas Nasional	74,43	80,31
		Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	N/A	N/A
			2.	Indeks Demokrasi Indonesia	N/A	N/A
		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	1.	Indeks Daya Saing Daerah	2,95	5,1
5.	peningktan kualitas lingkungan hidup yang berketahanan dan resiliensi terhadap bencana	Lingkungan Hidup Berkualitas	1.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	N/A	N/A
			2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,45	82,88
			3.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%	2,67	49,27

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR		TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
		4.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,69	60
		5.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	20,33	60
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	455,12	700
		2.	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	N/A	N/A
		3.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	12,81	3-4
		4.	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,84	2,9
		5.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	10,23	20

SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR		TARGET	
					BASELINE 2025	TARGET 2045
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	132,84	129,31
			2.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			a.	Kumulatif	24,59	51,88
			b.	Tahunan	67,10	99,30



BAB VI
PENUTUP

VI.I. KAIDAH PELAKSANAAN

Visi Kabupaten Sintang yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguartding)* untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sintang 2025-2045 sesuai dengan cita-cita masyarakat Kabupaten Sintang.

VI.II. KONSISTENSI PERENCANAAN PENDANAAN

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah. Upaya menjadim konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dari partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

VI.II.I. Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang memiliki posisi menengah dalam perencanaan pembangunan Nasional, yang tertinggi adalah RPJPN dan RPJPD selanjutnya menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen Perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pemnangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen Perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Konsistensi antara RPJPD 2025-2045 dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

- Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD 2025-2045 ke RPJPD Provinsi dan RPJMD. Periodesasi RPJPD 2025-2045 mengikuti RPJPN, misi (agenda) pembangunan Kabupaten Sintang berikut upaya transformatif prioritas mempedomani muatan RPJPN 2025-2045.
- RPJPD 2025-2045 bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Kabupaten Sintang Sejahtera, maju dan Berkelanjutan. Hal-hal lain yang bersifat spesifik pusat tidak dimuat di RPJPD 2025-2045, serta yang bersifat strategis 5 tahunan semua SKPD dimuat ke dalam RPJMD dengan memperhatikan kondisi daerah.
- Arah (Tujuan) pembangunan Kabupaten Sintang dan indikator dalam RPJPD 2025-2045 mempedomani RPJPN 2025-2045 dan menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Sintang dalam RPJMD Kalimantan Barat dan menjadi pedoman bagi RPJPD Kabupaten Sintang untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan indikator pembangunan.
- Sasaran dan indikator prioritas daerah pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Sintang pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis SKPD (Renstra SKPD), serta tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Sintang.
- Sasaran dan indikator strategis/program Renstra SKPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD),

sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun sasaran program RKPD.

- Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Sintang pada RKPD juga dipedomani dalam menyususn sasaran dan indikator program Renja SKPD dan sasaran program RKPD Kabupaten. Indikator prioritas pembangunan Kabupaten Sintang dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja SKPD

VI.III. Manajemen Resiko Pembangunan Daerah

Dalam merencanakan Pembangunan daerah baik pada jangka pendek maupun jangka panjang tidak lepas dari resiko Pembangunan daerah sehingga perlu adanya manajemen resiko Pembangunan daerah yang terstruktur, matematis dan terdokumentasi dengan baik.

Secara umum manajemen resiko saat ini diatur dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2023 tentang manajemen resiko Pembangunan nasional. Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati nomor 58 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan resiko.

Sesuai pasal 4 ayat 1 peraturan presiden nomor 39 tahun 2023, bahwa Manajemen Resiko diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan. Manajemen resiko untuk sasaran pokok pembanguan pada RPJPD Kabupaten Sintan tahun 2025-2045 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel VI.1
Identifikasi Risiko

Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak
Risiko Kebijakan	penyusunan dan penetapan Dokumen RPJPD tidak sesuai jadwal	1. Tidak terdapat kebijakan tentang pedoman dalam penyusunan RPJPD. 2. Tim Penyusun RPJPD tidak kompeten	Turunnya Reputasi dan Kinerja Pemerintah Daerah atas RPJPD yang terlambat
Risiko Operasional	Penentuan tujuan, sasaran dan arah kebijakan, indikator capaian tidak selaras dan SMART	1. Sistem informasi atau basis data internal tidak lengkap/terbatas. 2. Lemahnya	Kualitas RPJPD rendah

		koordinasi antar opd dan instansi vertikal yang terlibat dalam penyusunan RPJPD	
Risiko Kebijakan	Perubahan Kebijakan Fiskal dari Pemerintah Pusat	**1.** Terjadi fluktuasi ekonomi global atau nasional **2.** Perubahan Dinamika Sosial atau demografi **3.** Ketidakstabilan Politik	17 Arah Kebijakan tidak dapat dilaksanakan sesuai indikator dan target yg sudah ditetapkan
Risiko Bencana	Bencana Alam/non alam	**1.** Perubahan Iklim **2.** Peperangan	Kerusakan infrastruktur sehingga 17 Arah Kebijakan tidak dapat dilaksanakan sesuai indikator dan target yg sudah ditetapkan
Risiko Opersional	Kualitas dan keterbatasan teknologi, infrastruktur dan SDM	Tatakelola pemerintahan tidak adapif dan bersaing.	Keterlambatan dan pencapaian target tidak sesuai rencana.
Risiko Pemangku Kepentingan	Konflik kepentingan antar *stakeholder* atau unit kerja	Manajemen konflik pemetaan hubungan tidak berjalan/tumpang tindih	Prioritas Pembangunan tidak sesuai dokumen perencanaan (RPJPD)

Tabel VI.2
Penilaian Risiko

Pernyataan Risiko	Skala Kemungkinan		Skala Dampak		Tingkat Risiko	
	Skala	Skor	Skala	Skor	Skor	Skala
Tahap Perencanaan RPJPD						
1. Penyusunan dan penetapan dokumen RPJPD tidak sesuai jadwal	Sangat Sering	5	Sangat tingi	5	25	Sangat Tinggi
2. Penentuan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan, Indikator Capain, tidak selaras / (SMART)	Sangat Sering	5	Sangat tingi	5	25	Sangat Tinggi
Tahap Pelaksanaan RPJPD						
3. Perubahan Kebijakan Fiskal dari pemerintah Pusat	Sangat Sering	5	Sangat tingi	5	25	Sangat Tinggi

Pernyataan Risiko	Skala Kemungkinan		Skala Dampak		Tingkat Risiko	
	Skala	Skor	Skala	Skor	Skor	Skala
Tahap Perencanaan RPJPD						
4. Bencana Alam/Non Alam	Sangat Sering	5	Sangat tingi	5	25	Sangat Tinggi
5. Kualitas dan keterbatasan teknologi, Infrastruktur dan SDM	Sangat Sering	5	Sangat tingi	5	25	Sangat Tinggi
6. Konflik kepentingan antar *stakeholder* atau unit kerja	Sangat Sering	5	Sangat tingi	5	25	Sangat Tinggi

Tabel VI.3
Tindak Lanjut Risiko

Pernyataan Risiko	Tingkat Risiko		Rencana Pengendalian
	Skor	Skala	
Tahap Perencanaan			
1. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RPJPD tidak sesuai jadwal	25	Sangat Tinggi	Penyusunan Tim dan koordinasi atas regulasi dan juknis penyusunan RPJPD
2. Penentuan Tujuan/ Sasaran dan arah kebijakan, Indikator tidak selaras dan SMART	25	Sangat Tinggi	Koordinasi, Supervisi, Reivu dan Evaluasi kepada Pihak-Pihak yang berkompeten dalam penyusunan RPJPD
Tahap Perencanaan			
3. Perubahan Kebijakan Fiskal dari pemerintah Pusat	25	Sangat Tinggi	1. Diversifikasi sumber pendanaan, pemantauan ekonomi secara berkala 2. Advokasi kebijakan, peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan 3. Penelitian sosial berkala, penyesuaian kebijakan sesuai dengan perkembangan terkini
4. Bencana Alam/Non Alam	25	Sangat Tinggi	Penguatan infrastruktur tahan bencana, penerapan sistem mitigasi bencana
5. Kualitas dan keterbatasan teknologi, Infrastruktur, dan SDM	25	Tinggi	Peningkatan kapasitas teknis, pemilihan teknologi yang sesuai dan handal
6. Konflik Kepentingan antar stakeholder atau unit kerja	25	Sangat Tinggi	Peningkatan komunikasi dengan stakeholder atau unit kerja untuk mencapai kesepakatan dan persamaan persepsi sesuai tujuan/sasaran arah kebijakan RPJPD

VI.2. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan

pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan visi "**Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan**" perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sintang; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

Sintang, 12 November 2024

BUPATI SINTANG

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph